



KATA PENGANTAR

Puji syukur terpanjat kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Kutai Barat tahun 2019, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan sarana pelaporan kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Barat untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan bersama seluruh perangkat daerah selama tahun 2019 sebagai konsistensi terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan salah satu pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi pemerintah Kabupaten Kutai Barat sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016-2021. Wujud akuntabilitas dari penyelenggaraan pemerintahan tidak saja mempertanggungjawabkan hasil akhir dan manfaat dari terlaksananya program dan kegiatan yang dirasakan oleh masyarakat, namun padahal yang lebih mendasar yaitu apakah program dan kegiatan telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta berdampak pada perubahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara substansif Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kutai Barat ini disusun dengan menggunakan data realisasi kinerja yang ada dalam LKjIP Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Materi LKjIP mengandung analisis pencapaian sasaran serta pengukuran atas kegiatan, program, dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk Tahun 2016 - 2021. LKjIP juga memuat informasi mengenai keberhasilan/kegagalan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam pencapaian tujuan dan sasaran, dan dapat dijadikan sebagai bahan koreksi guna meningkatkan kinerja pemerintah pada masa mendatang.



Berbagai keberhasilan terhadap pencapaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat tidak terlepas dari hasil kerja keras semua pihak yang terlibat di dalamnya yaitu Aparatur Pemerintah di semua jenjang pemerintahan, pihak swasta dan masyarakat tentunya, baik dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan maupun pengawasannya yang dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyusun dan seluruh Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, yang telah turut membantu dalam penyelesaian laporan ini, semoga laporan kinerja ini bermanfaat dan dapat menjadi umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat Kutai Barat yang kita cintai.

Sendawar, 23 Maret 2020

BUPATI KUTAI BARAT,

FX. YAPAN, SH



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Kutai Barat tahun 2019 disusun dalam rangka memenuhi ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Kutai Barat wajib mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam perencanaan strategik melalui pelaporan yang dilaksanakan secara periodik. Dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan hasil evaluasi implementasi SAKIP Tahun 2019 dan Rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Tahun 2018 menyebutkan agar dilakukan reviu terhadap dokumen perencanaan daerah (RPJMD) dan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renstra). Maka pada tanggal 12 Juli 2019 dilakukan pendampingan Penguatan SAKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan. Pendampingan Penguatan SAKIP yang dimaksud adalah untuk mereviu terhadap tujuan dan sasaran serta Indikator Kinerja Utama (IKU). Reviu atau perbaikan dokumen tersebut agar memberikan arah yang jelas pada maksud dan tujuan dari Visi dan Misi Kepala Daerah.

Kemenpan RB memberikan masukan terhadap perbaikan Dokumen RPJMD dengan memangkas beberapa sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU), yang semula Sasaran berjumlah 18 (delapan belas) serta 27 (dua puluh tujuh) IKU menjadi **16 (enam belas) Sasaran** dengan **21 (dua puluh satu) IKU** yang kemudian dijadikan dasar Penyusunan Perjanjian Kinerja (PERKIN) Bupati Tahun 2019.

Agar perbaikan terhadap dokumen RPJMD tersebut memiliki legal standing maka berdasarkan arahan dari Biro Hukum Provinsi Kalimantan Timur dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati tentang Perbaikan Dokumen RPJMD.

Tahun 2019 adalah tahun ketiga dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2016-2021, secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mencapai misi dan tujuan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016-2021.



Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) pada dasarnya merupakan sistem manajemen *outcome oriented* yang dijadikan sebagai instrument dalam mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat menjalankan fungsinya secara efektif, efisien, transparan dan responsif terhadap aspirasi publik. Implementasi SAKIP di Kabupaten Kutai Barat merupakan suatu keharusan sehingga dapat menjalankan fungsinya sebagai media kontrol, booster dan alat ukur penilaian kualitas kinerja untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam perspektif yang lebih luas SAKIP juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat kepada publik dalam merefleksikan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Barat Tahun 2016 - 2021.

Pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam tahun ketiga RPJMD 2016 – 2021 ini diukur dengan membandingkan antara Rencana Kinerja (*Performance Plan*) yang diinginkan dengan Realisasi Kinerja (*Performance Result*) yang dicapai oleh organisasi yang bersangkutan. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya Kesenjangan Kinerja (*Performance Gap*) antara rencana kinerja dan realisasinya serta tindakan perbaikan yang diperlukan pada masa mendatang. Metode pengukuran ini dapat bermanfaat dalam memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi organisasi instansi pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019 ini menyajikan hasil pengukuran, evaluasi dan analisis terhadap pencapaian **16 sasaran strategik**, dihitung sebagai realisasi kinerja tahunan berdasarkan dokumen Penetapan Kinerja tahun 2019. Dalam mengukur capaian kinerja pada masing-masing sasaran strategik tersebut, dibantu dengan dukungan indikator-indikator kinerja setingkat *outcome* yang sebagian besar diambil dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Kutai Barat. Berdasarkan hasil pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian diperoleh hasil akumulatif dari 16 sasaran strategik yang ditetapkan dengan nilai pencapaian akumulatif sebesar **100,81 %** atau termasuk dalam kategori **"SANGAT BERHASIL (SB)"**. Adapun hasil evaluasi terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019 secara spesifik dijelaskan sebagai berikut :

1. Pencapaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Barat tahun Pertama RPJMD 2016 – 2021 menganalisa dan mengukur 16 sasaran dengan 21 indikator kinerja sasaran dengan realisasi sebagai berikut :
 - a. Sebanyak 16 sasaran atau sebesar 100 % dengan Capaian Kinerja Sangat Berhasil.



2. Interpretasi kategori pengukuran sasaran dan indikator kinerja sasaran dapat disimpulkan bahwa :
 - a. Sebanyak 16 sasaran atau 100 % dengan kategori Sangat Berhasil.
 - b. Sebanyak 21 indikator kinerja atau 100 % sasaran dengan kategori Sangat Berhasil.

3. Kategori dan nilai capaian pada pengukuran 16 sasaran sebagai berikut :
 - a. Sasaran dengan kategori Sangat Baik (SB), (nilai diatas 85)
 - 1) Meningkatnya Pendapatan Perkapita (115,39%)
 - 2) Meningkatnya Infrastruktur Dasar di Wilayah Kutai Barat (106,50%)
 - 3) Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat (92,86%)
 - 4) Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (98,89%)
 - 5) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan (100,50%)
 - 6) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Daerah (102,49%)
 - 7) Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan (87,91%)
 - 8) Meningkatnya Nilai Investasi (99,95%)
 - 9) Meningkatnya Pendapatan Perkapita (115,39%)
 - 10) Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (Angka Pengangguran), (105,92%)
 - 11) Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup (96,88%)
 - 12) Meningkatnya Prosentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan (97,96%)
 - 13) Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban bagi Masyarakat (104,22%)
 - 14) Meningkatnya Kampung Maju (100%)
 - 15) Meningkatnya Peran Pemuda Dalam Pembangunan (123%)
 - 16) Meningkatnya Kesetaraan Gender (101,01%)

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran pembangunan melalui LKjIP ini, dari 16 sasaran yang semuanya mencapai hasil yang sangat baik. Hal ini disebabkan beberapa faktor, antara lain :

1. Mengadakan evaluasi pada target-target yang telah ditetapkan di RPJMD sehingga ada sinkronisasi antara RKPD dan Penetapan Kinerja SKPD.
2. Melakukan revisi RPJMD Kutai Barat 2016 – 2021 bekerjasama dengan pihak PSKP-UGM yang selama ini menjadi konsultan pendampingan dalam perencanaan pembangunan di Kutai Barat.



3. Memacu penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara penuh, yaitu Perangkat Daerah selain menyusun Renstra, Perjanjian Kinerja dan LKjIP juga harus menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PERKIN) .
4. Menyelenggarakan Bimtek penyusunan LKjIP dan Perjanjian Kinerja dengan mengundang Narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur untuk peningkatan SDM Aparatur sehingga pengetahuan dan pemahaman terkait penyusunan LKjIP dan Perjanjian Kinerja sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.
5. Peningkatan kapasitas SDM para evaluator LKjIP dengan mengikuti Bimtek Evaluasi LKjIP di luar daerah atau mengundang Narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.
6. Memberikan *reward* kepada Perangkat Daerah yang telah menyusun LKjIP secara benar dan sistematis dan berdasarkan hasil evaluasi implementasi SAKIP mendapatkan nilai tertinggi untuk diberikan penghargaan sehingga akan memacu Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Kutai Barat untuk meningkatkan kualitas LKjIP yang dibuat dan berusaha meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang berorientasi hasil.

Selanjutnya dilihat dari sisi Akuntabilitas Kinerja Keuangan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019 dapat dilaporkan sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan Kabupaten Kutai Barat setelah perubahan APBD 2019 yang ditargetkan berjumlah Rp. 2.581.577.421.223,08 dan terealisasi sebesar Rp. 2.546.928.990.007,00 (98,65%).
2. Total Anggaran Belanja yang ditargetkan pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 2.798.104.450.170,26 Dari target tersebut terealisasi sebesar Rp 2.194.650.659.457,26 atau persentase penyerapan belanja sebesar 78,43%.
3. Pada Belanja Langsung yang ditargetkan sebesar Rp 1.712.682.150.672,68 terealisasi Rp. 1.295.089.166.699,26 atau 75,61%. Sedangkan pada Belanja Tidak Langsung ditargetkan sebesar Rp 1.085.422.299.497,58 terealisasi sebesar Rp 899.561.492.758,00 atau 82,87%.
4. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan dapat tercapai sebesar Rp. 133.162.244.525,04 dan terealisasi sebesar Rp. 168.908.553.788,33 atau pencapaiannya hanya 126,84%.



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan nasional yang diarahkan untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia menuju masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, mandiri dan bermartabat. Keberhasilan pembangunan nasional tidak mungkin dapat terwujud tanpa didukung oleh Pemerintahan yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidang tugasnya masing-masing, transparan, profesional dan akuntabel. Setiap penyelenggara negara dan pemerintah harus mampu menampilkan akuntabilitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga terjadi sinkronisasi antara perencanaan ideal yang dicanangkan dengan keluaran dan manfaat yang dihasilkan.

Untuk mewujudkan Pemerintahan daerah yang profesional serta memahami tugas dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, stabil dan dinamis. Selain itu, diperlukan instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggara negara dan pemerintahan. Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang pada intinya mengharuskan Pemerintah Kabupaten beserta perangkatnya untuk melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) atau menyampaikan **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)** sebagai laporan yang merupakan kewajiban pelaporan pelaksanaan pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui laporan pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.. Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, dan fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.



Sebagai penjabaran dari Perpres Nomor 29 Tahun 2014, Pemerintah membuat petunjuk teknis (juknis) Sistem AKIP berupa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019 ini disusun sehubungan dengan komponen dari Sistem AKIP yakni pelaporan kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*.

Penyusunan LKjIP Tahun 2019 Kabupaten Kutai Barat berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator sasaran. Dengan demikian LKjIP Kabupaten Kutai Barat menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintah oleh Bupati kepada Presiden/Wakil Presiden dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Gubernur/Kepala Pemerintah Daerah Provinsi dan Kepada Perwakilan Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) yang telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam LKjIP ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2019 yaitu tahun ke-2 RPJMD Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016–2021.

B. DASAR HUKUM

Pelaksanaan Penyusunan LKjIP Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019 dilandasi oleh beberapa ketentuan hukum, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



2. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor: 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5395);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Permenpan No 20 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Penyusunan Indikiator Kinerja Utama (IKU)



10. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019 Nomor 21);
12. Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 800.05.130/K.98/2020 Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap pemerintah daerah diminta untuk menyampaikan "Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)" kepada Presiden. Dengan demikian maka penyusunan LKjIP ini dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan visi, misi dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan secara periodik, diukur dengan seperangkat indikator kinerja non-keuangan (*performance indicator*) dan menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintah oleh Bupati kepada Presiden yang proses penyusunannya telah dikembangkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Tujuan :

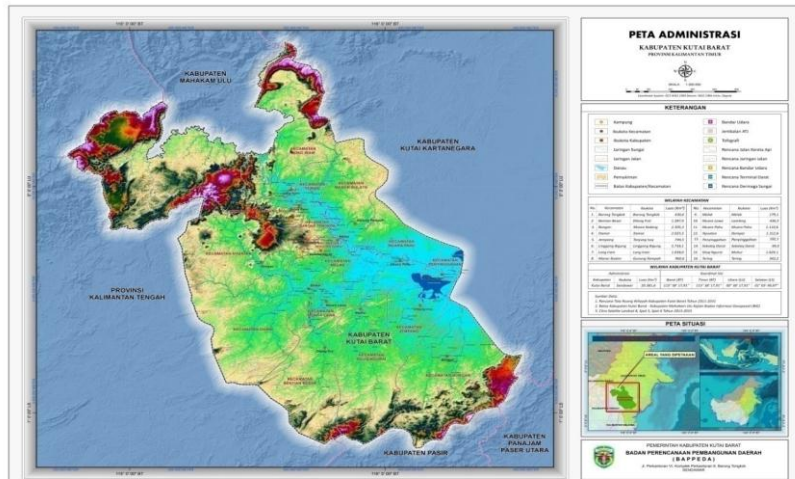
- ❖ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan sarana bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Barat untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* (Presiden, DPRD dan masyarakat).
- ❖ Sebagai media pertanggungjawaban kepada publik, meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah dan meningkatkan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja Organisasi Pemerintah serta meminimalkan peluang terciptanya korupsi, kolusi dan nepotisme.

- ❖ Sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada instansi pemerintah.
- ❖ Sebagai alat kendali dan sarana untuk menilai kinerja sehingga dapat mendorong terwujudnya *good governance* yang memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah serta partisipasi masyarakat.

D. Gambaran Umum Kabupaten Kutai Barat

1. Kondisi Geografi

Kabupaten Kutai Barat dengan ibukota Sendawar terletak di bagian barat daya Provinsi Kalimantan Timur dan merupakan salah satu Kabupaten yang berbatasan langsung



Gambar 1.1 Peta Kabupaten Kutai Barat, Sumber Data : BP3D Kutai Barat

dengan Provinsi dan Kabupaten lain. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu dari Kabupaten Kutai Barat, secara langsung luas wilayah Kabupaten Kutai Barat berkurang menjadi sekitar 20.381,59 Km² atau kurang lebih mencapai 16,06% dari keseluruhan luas Propinsi Kalimantan Timur.

Secara geografis Kabupaten Kutai Barat terletak antara 114°45'49"-116°32'43" Bujur Timur dan 00°37'30" Lintang Utara dan 1°09'33" Lintang Selatan.

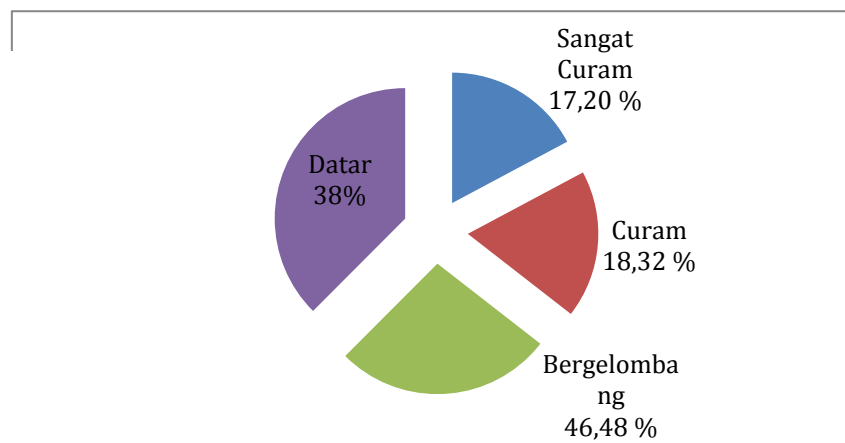
Secara administratif, batas wilayah Kabupaten Kutai Barat memiliki batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Mahakam Hulu.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara

- Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2013, Kabupaten Kutai Barat memiliki wilayah seluas 20.381.59 Km². Didominasi oleh topografi datar sampai dengan bergelombang sedang yakni sebesar 46,48 %, topografi sangat curam (17,20%) dan curam (18,32%). Wilayah dengan topografi pegunungan mencapai 350.653,07 hektar atau kurang dari 18% dari luas seluruhnya dan berada di bagian Utara dan Selatan Kabupaten Kutai Barat, sebagaimana pada Grafik 1.1.

Grafik 1.1
Luas Wilayah Kabupaten Kutai Barat Setelah Pemekaran Berdasarkan Topografi



Sumber : Analisis Kelas Lereng, Bappeda

Wilayah berbukit dan bergunung dijumpai di Kecamatan Bongan kawasan gunung Meratus, Kecamatan Linggang Bigung bagian Barat dan Utara, dan Kecamatan Long Iram bagian Utara.

Secara Klimatologi wilayah Kabupaten Kutai Barat terbagi menjadi 4 tipe daerah hujan yaitu:

- 1) Kawasan dengan curah hujan antara 2.000 - 2.500 mm/ tahun. Kawasan ini terletak pada ujung bagian timur Kabupaten Kutai Barat di sepanjang wilayah Kecamatan Penyinggahan, Tanjung Isui dan Muara Kedang;
- 2) Kawasan dengan curah hujan antara 2.500 - 3.000 mm/ tahun. Kawasan ini terletak di bagian tengah meliputi daerah sekitar



- Kecamatan Melak, Muara Pahu, Damai, Muara Lawa, Jempang dan Bongan;
- 3) Kawasan dengan curah hujan antara 3.000 - 3.500 mm/ tahun. Kawasan ini terletak di sebelah barat Melak meliputi Kecamatan Barong Tongkok sampai bagian selatan Kecamatan Barong Tongkok;
 - 4) Kawasan dengan curah hujan antara 3.500 - 4.000 mm/ tahun. Kawasan ini terletak di wilayah Kecamatan Long Iram meliputi daerah sekitar Kecamatan Long Iram;

Setelah pemekaran Kabupaten Mahakam Ulu, saat ini Kabupaten Kutai Barat terdiri dari 16 Kecamatan, 190 Kampung dan 4 Kelurahan. Kecamatan dengan jumlah kampung terbanyak ialah Kecamatan Barong Tongkok yang terdiri dari 19 Kampung, sedangkan Kelurahan. Adapun nama kecamatan, jumlah kampung dan kelurahan dapat dilihat lebih jelasnya pada tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1
Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Kampung
di Kabupaten Kutai Barat

| No. | Kecamatan | Jumlah Kelurahan | Jumlah Kampung |
|-----|-----------------|------------------|----------------|
| 1. | Long Iram | - | 11 |
| 2. | Melak | 2 | 2 |
| 3. | Barong Tongkok | 2 | 19 |
| 4. | Damai | - | 17 |
| 5. | Muara Lawa | - | 8 |
| 6. | Muara Pahu | - | 12 |
| 7. | Jempang | - | 12 |
| 8. | Bongan | - | 16 |
| 9. | Penyinggahan | - | 6 |
| 10. | Bentian Besar | - | 9 |
| 11. | Linggang Bigung | - | 11 |
| 12. | Nyuatan | - | 10 |
| 13. | Siluq Ngurai | - | 16 |



| | | | |
|---------------|--------------------|----------|------------|
| 14. | Mook Manaar Bulatn | - | 14 |
| 15. | Tering | - | 15 |
| 16. | Sekolaq Darat | - | 8 |
| Jumlah | | 4 | 190 |

Sumber : Bagian Pemerintahan Setdakab. Kutai Barat, 2019

2. Kondisi Demografis

Penduduk merupakan pelaku sekaligus sasaran pembangunan sehingga data penduduk merupakan data pokok yang perlu diketahui karakteristiknya (kuantitas, distribusi, komposisi dan kualitas) untuk mengetahui potensi maupun kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menuju subyek yang berkualitas. Penduduk mempunyai kedudukan yang strategis dalam pembangunan daerah yaitu sebagai subyek pembangunan dan juga sebagai obyek pembangunan.

Jumlah penduduk yang besar jika diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai akan menjadi pendorong bagi pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya jumlah penduduk yang besar jika diikuti dengan tingkat kualitas yang rendah, menjadikan penduduk tersebut sebagai beban bagi pembangunan.

Jumlah Penduduk Kabupaten Kutai Barat tahun 2019 menurut data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tercatat sebanyak 162.200 jiwa. Berikut disajikan pada tabel 1.4 jumlah penduduk Kutai Barat tahun 2019 masing-masing Kecamatan berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

| No | Kecamatan | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|----|----------------|---------------|--------|--------|
| | | L | P | |
| 1 | Long Iram | 3.859 | 3.414 | 7.273 |
| 2 | Melak | 7.632 | 7.119 | 14.751 |
| 3 | Barong Tongkok | 16.089 | 14.961 | 31.050 |
| 4 | Damai | 5.501 | 4.917 | 10.418 |
| 5 | Muara Lawa | 3.582 | 3.352 | 6.934 |
| 6 | Muara Pahu | 4.381 | 4.005 | 8.386 |
| 7 | Jempang | 5.920 | 5.131 | 11.051 |
| 8 | Bongan | 5.361 | 4.782 | 10.143 |
| 9 | Penyinggahan | 2.007 | 1.812 | 3.819 |



| | | | | |
|---------------|--------------------|---------------|---------------|----------------|
| 10 | Bentian Besar | 1.714 | 1.511 | 3.225 |
| 11 | Linggang Bigung | 8.204 | 7.491 | 15.695 |
| 12 | Nyuatan | 3.305 | 2.988 | 6.293 |
| 13 | Siluq Ngurai | 3.074 | 2.704 | 5.778 |
| 14 | Mook Manaar Bulatn | 4.478 | 3.992 | 8.470 |
| 15 | Tering | 5.585 | 4.998 | 10.583 |
| 16 | Sekolaq Darat | 5.308 | 4.870 | 10.179 |
| Jumlah | | 86.001 | 78.047 | 164.048 |

Sumber : Disdukcapil Kab. Kutai Barat 2019

Berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 86.001 jiwa (52,42%) sedangkan penduduk perempuan sebanyak 78.047 jiwa (47,58%). Berikut data pada Tabel 1.5 menunjukkan luas wilayah, jumlah KK, jumlah penduduk serta kepadatan penduduk pada tiap kecamatan di Kabupaten Kutai Barat hingga bulan Desember 2019.

Tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Kutai Barat pada umumnya tergolong rendah, namun demikian beberapa Kecamatan seperti Kecamatan Barong Tongkok, Sekolaq Darat, Melak, Tering dan Barong Tongkok merupakan wilayah dengan jumlah penduduk yang lebih padat di banding Kecamatan lain. Bila dilihat perbandingan antara jumlah penduduk dengan wilayah Kutai Barat yang memiliki luas 20.381,59 Km², maka dapat diperoleh kepadatan penduduk untuk Kabupaten Kutai Barat adalah sebesar 8,05 jiwa/km². Dari kepadatan tersebut di atas, Kecamatan Sekolaq Darat memiliki kepadatan penduduk tertinggi yaitu 207,99 jiwa/km² kemudian diikuti Kecamatan Melak dengan kepadatan 82,36 jiwa/ km² dan Kecamatan Barong Tongkok sebesar 72,11 jiwa/km². Sebaliknya Kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah adalah Bentian Besar dengan kepadatan penduduk 2,50 jiwa/km², diikuti Kecamatan Linggang Bigung dengan 2,74 jiwa/km² dan Siluq Ngurai yang kepadatan penduduk 3,55 jiwa/ km².

Tabel 1.3
Luas Wilayah, Jumlah KK, Penduduk dan Kepadatan Penduduk
Menurut Kecamatan Tahun 2019

| Kecamatan | Luas Wilayah (Km ² ¹) | Jumlah KK ² | Jumlah Penduduk ²) | Kepadatan Penduduk/ Km ² ²) |
|----------------|--|------------------------|--------------------------------|--|
| Long Iram | 1.657,95 | 2.221 | 7.273 | 4.38 |
| Melak | 179,11 | 4.410 | 14.751 | 82,36 |
| Barong Tongkok | 430,58 | 9.843 | 31.050 | 72,11 |



| | | | | |
|--------------------|------------------|---------------|----------------|-------------|
| Damai | 2.025,53 | 3.308 | 10.418 | 5.14 |
| Muara Lawa | 436,54 | 2.135 | 6.934 | 15.88 |
| Muara Pahu | 1.110,64 | 2.544 | 8.386 | 7.55 |
| Jempang | 744,47 | 3.520 | 11.051 | 14.84 |
| Bongan | 2.305,31 | 3.117 | 10.143 | 4.40 |
| Penyinggahan | 192,08 | 1.182 | 3.819 | 19,88 |
| Bentian Besar | 1.287,86 | 1.020 | 3.225 | 2.50 |
| Linggang Bigung | 5.718,07 | 4.790 | 15.695 | 2.74 |
| Nyuatan | 1.312,62 | 1.920 | 6.293 | 4.79 |
| Siluq Ngurai | 1.629,10 | 1.790 | 5.778 | 3.55 |
| Mook Manaar Bulatn | 960,57 | 2.701 | 8.470 | 8.82 |
| Tering | 342,22 | 3.228 | 10.583 | 30,92 |
| Sekolaq Darat | 48,94 | 3.209 | 10.179 | 207,99 |
| Kutai Barat | 20.381,59 | 50.938 | 164.048 | 8,05 |

Sumber : Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kab.Kutai Barat 2019

3. Kondisi Perekonomian

Kondisi perekonomian Kabupaten Kutai Barat di tahun 2019 relatif tidak banyak mengalami pergeseran. Pergerakan roda ekonomi ini tidak terlepas dari situasi dan kondisi Kabupaten Kutai Barat dengan penerapan kebijakan pemerintah daerah melalui paket kebijakan yang berpedoman pada peningkatan kesejahteraan rakyat yang adil dan merata serta terarah dan tepat sasaran, dengan selalu berlandaskan pada skala prioritas kebutuhan. Prioritas pembangunan selama Tahun 2019 pada sektor ekonomi menitikberatkan program pembangunan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada peningkatan kesejahteraan melalui usaha kecil/menengah, koperasi, dan pertanian sebagai tumpuan kehidupan sebagian besar masyarakat Kutai Barat.

Kondisi makro ekonomi Kutai Barat juga tidak terlepas dari dampak perkembangan kondisi ekonomi maupun non ekonomi. Keadaan tersebut sangat mempengaruhi kondisi perekonomian nasional yang tercerminkan pula pada perekonomian regional di setiap Kabupaten. Beberapa indikator makro ekonomi nasional memperlihatkan perkembangan yang positif selama tahun 2019 seperti laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita.



Dampak dari faktor ekonomi maupun faktor non ekonomi bagi Kutai Barat, sebagai daerah penghasil Sumber Daya Alam (SDA) memberi pengaruh terhadap perkembangan kondisi makro ekonomi. Dengan meningkatnya kemampuan keuangan Daerah untuk melayani masyarakat (*Public Services*), secara langsung telah menimbulkan "*Multiplier Effect*" terhadap perekonomian daerah, sehingga diharapkan pembangunan di Kutai Barat dapat lebih cepat berkembang dan hasilnya dapat dinikmati masyarakat secara nyata.

3.1. Struktur Ekonomi

Struktur perekonomian Kutai Barat pada tahun 2019 masih didominasi Lapangan Usaha berbasis sumberdaya alam, yaitu Pertambangan khususnya komoditas Batubara yang namun pada tahun 2019 mengalami sedikit penurunan. Terlihat dari besarnya peranan Lapangan Usaha ini terhadap pembentukan PDRB Kutai Barat. Dan pada tahun 2019, struktur ekonomi Kutai Barat juga belum menunjukkan pergerakan yang berarti, dimana lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian masih mendominasi (14.250.640,8 juta rupiah), diikuti lapangan usaha Pertanian (3.885.244,6 juta rupiah) dan Konstruksi (3.467.978,8 juta rupiah). Sedangkan peranan lapangan usaha yang lain jika dilihat kontribusinya terhadap pembentukan total PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kutai barat masih relatif kecil.

Tabel 1.4
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Kutai Barat Tahun 2017 – 2019 (Juta Rupiah)

| Kategori | | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|---|--------------|--------------|--------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 3.757.553,3 | 3.827.305,8 | 3.885.244,6 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 13.012.827,4 | 14.602.667,1 | 14.250.640,8 |
| C | Industri Pengolahan | 1.606.364,1 | 1.611.408,6 | 1.647.428,6 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaan Air, Pengelolaan | 5.377,5 | 6.406,4 | 6.999,0 |
| E | Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 7.942,0 | 8.160,9 | 8.621,7 |
| F | Konstruksi | 2.839.023,3 | 3.142.071,9 | 3.467.978,8 |



| Kategori | | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 1.754.647,7 | 1.951.529,9 | 2.188.014,4 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 376.953,2 | 422.990,6 | 473.470,6 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 79.106,7 | 88.384,5 | 99.273,7 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 249.910,8 | 276.599,5 | 305.970,2 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 30.748,0 | 33.570,7 | 36.762,7 |
| L | Real Estate | 136.568,1 | 145.953,1 | 156.450,0 |
| M,N | Jasa Perusahaan | 15.511,7 | 16.911,7 | 18.388,3 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 1.237.965,9 | 1.349.464,0 | 1.471.993,2 |
| P | Jasa Pendidikan | 399.224,7 | 441.481,6 | 484.692,8 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 199.249,4 | 225.666,5 | 256.763,5 |
| R,S, T,U | Jasa lainnya | 78.219,6 | 91.559,2 | 106.551,6 |
| PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO | | 25.787.193,5 | 28.242.132,2 | 28.865.244,5 |

Sumber: BPS Kab. Kutai Barat Tahun 2019

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan perkembangan produksi dari barang dan jasa pada periode tertentu dibandingkan periode sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan, sehingga angka pertumbuhan ini sudah tidak dipengaruhi faktor perubahan harga atau bisa diartikan benar-benar murni disebabkan oleh kenaikan produksi dari barang dan jasa tersebut.

3.2. Pertumbuhan Ekonomi

Seiring dengan upaya pemulihan ekonomi global dan nasional, situasi ekonomi regional Kutai Barat juga menunjukkan pergerakan positif di tahun 2019. Kondisi ini tergambar dari estimasi capaian akan laju pertumbuhan ekonomi Kutai Barat tahun 2019 yang mencapai 5,58 persen, mengalami peningkatan dari tahun 2018 yang tumbuh sebesar 3,54 persen. Hal ini ditopang oleh perkembangan lapangan usaha yang memberi kontribusi besar dalam pergerakan ekonomi Kutai Barat yaitu Pertambangan dan



Penggalian yang mengalami pertumbuhan positif sebesar 3,99 persen, lebih tinggi dari tahun 2017 yang tumbuh 3,61 persen. Untuk lapangan usaha lainnya juga menunjukkan pergerakan positif sebagai dampak meningkatnya aktivitas pertambangan (khususnya batubara) tersebut.

Tabel 1.5
Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Kabupaten
Kutai Barat Tahun 2017-2019 (Juta Rupiah)

| Kategori | Uraian | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|---|-------|-------|------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 5,28 | 4,86 | 4,52 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 3,69 | 5,01 | 5,53 |
| C | Industri Pengolahan | 5,89 | 5,20 | 5,29 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 10,39 | 14,14 | 8,24 |
| E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 5,85 | 2,47 | 5,39 |
| F | Konstruksi | 1,72 | 2,52 | 5,39 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 4,74 | 6,20 | 6,71 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 6,88 | 8,11 | 7,68 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 7,73 | 8,13 | 8,90 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 7,96 | 8,37 | 8,53 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 5,33 | 5,42 | 6,60 |
| L | Real Estate | 3,37 | 3,87 | 3,95 |
| M,N | Jasa Perusahaan | 2,27 | 3,80 | 4,07 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan | -5,96 | 6,02 | 5,52 |



| | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | dan Jaminan Sosial Wajib | | | |
| P | Jasa Pendidikan | 6,41 | 7,90 | 7,07 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 6,19 | 7,38 | 8,13 |
| R,S,T,U | Jasa lainnya | 7,90 | 9,82 | 8,85 |
| PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO | | 3,64 | 5,04 | 5,58 |



Sumber Data : BPS Kab Kutai Barat (2017-2019)

3.3. PDRB Per Kapita

PDRB Perkapita yang menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk bukanlah alat untuk mengukur kesejahteraan karena nilai PDRB tersebut belum tentu dimiliki oleh penduduk pada wilayah tersebut. Pada ada tahun 2019, PDRB per kapita Kabupaten Kutai Barat diestimasikan mencapai Rp 195,01 juta mengalami peningkatan sebesar Rp 3,67 juta atau naik 1,88 persen dari tahun 2018.

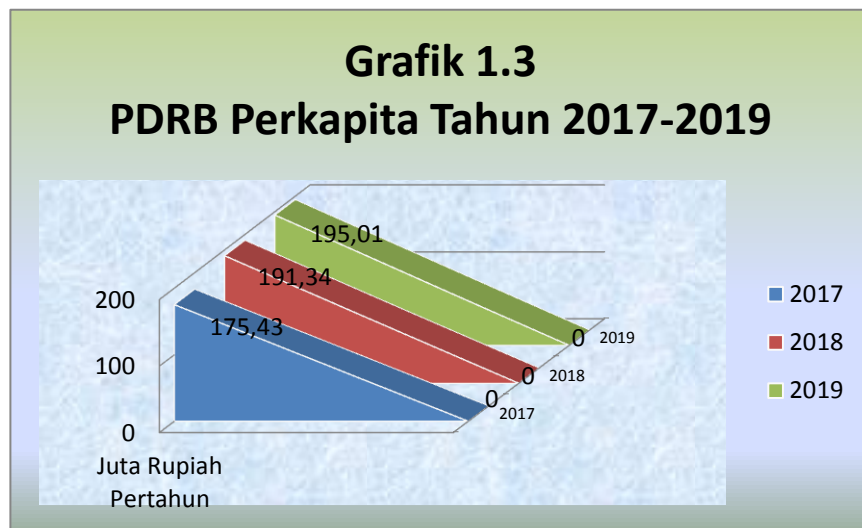
PDRB per kapita diperoleh dari PDRB Kutai Barat secara keseluruhan, yang meliputi 17 kategori lapangan usaha, dimana sebagian besar PDRB Kabupaten Kutai Barat didominasi oleh lapangan usaha pertambangan batu bara. Sementara nilai tambah dari lapangan usaha pertambangan batu bara



tidak mencerminkan pendapatan masyarakat secara riil, sehingga dapat diartikan pendapatan per kapita masyarakat yang sesungguhnya bisa jadi jauh lebih rendah lagi.

Tabel 1.6
PDRB Perkapita Kutai Barat Tahun 2017-2019 (Juta Rupiah per Tahun)

| Tahun | PDRB Perkapita (Juta Rupiah per Tahun) |
|-------|---|
| 2017 | 175,43 |
| 2018 | 191,34 |
| 2019 | 195,01 |



Sumber Data: BPS Kab Kutai Barat (2013-2017)

4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit yang mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia atau status tiga kemampuan dasar penduduk, yakni berumur panjang dan sehat yang mengukur peluang hidup, berpengalaman dan berketerampilan, serta akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak. 3 (tiga) dimensi pokok penyusun IPM tersebut, yaitu kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Aspek kesehatan dalam pembangunan manusia diukur oleh indeks harapan hidup sebagai representasi kemampuan untuk hidup sehat dan berumur panjang. Aspek pendidikan diukur oleh indeks

pendidikan yang diperoleh dengan mengukur rata-rata lama sekolah dan angka harapan sekolah. Standar hidup yang layak merupakan gambaran dari aspek ekonomi masyarakat. Aspek ekonomi tersebut dihitung dengan menggunakan indikator GNI per kapita.

Perkembangan IPM di Kutai Barat dalam 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan pergerakan positif, meskipun percepatannya bergerak bervariasi. Kondisi ini menunjukkan adanya pola perkembangan pembangunan di Kutai Barat menuju arah yang lebih baik. Pada tahun 2019 IPM Kutai Barat tercatat 70,63 persen, mengalami peningkatan sebesar 1,31 persen dari tahun 2018.



Sumber Data : BPS Kab Kutai Barat (2017-2019)

Dari Grafik 1.4 di atas, capaian kinerja IPM Kutai Barat memang memiliki kecenderungan meningkat secara absolut.

5. Struktur Organisasi

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah dilakukan penataan kembali Organisasi Perangkat Daerah dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Barat.



Susunan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat 7 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Barat merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Barat merupakan Inspektorat Tipe A;
- d. Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat, terdiri dari :
 - 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan;
 - 2) Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
 - 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - 4) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta urusan pemerintahan bidang Pertanahan;
 - 5) Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
 - 6) Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
 - 7) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga



- Berencana dan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 8) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi;
 - 9) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 10) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 11) Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
 - 12) Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Persandian dan urusan pemerintahan bidang Statistik;
 - 13) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 14) Dinas Pemuda dan Olah Raga Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
 - 15) Dinas Arsip dan Perpustakaan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan dan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan;
 - 16) Dinas Ketahanan Pangan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan;
 - 17) Dinas Lingkungan Hidup Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;



- 18) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - 19) Dinas Pariwisata Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
 - 20) Dinas Pertanian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian; dan
 - 21) Dinas Perikanan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perikanan.
- e. Badan Daerah Kabupaten Kutai Barat, terdiri atas:
- 1) Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - 2) Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Pengelolaan Pendapatan Daerah;
 - 3) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan dan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan; dan
 - 4) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
- f. Kecamatan terdiri atas:
- 1) Kecamatan Barong Tongkok dengan Tipe A;
 - 2) Kecamatan Melak dengan Tipe A;
 - 3) Kecamatan Linggang Bigung dengan Tipe A;
 - 4) Kecamatan Sekolaq Darat dengan Tipe A;
 - 5) Kecamatan Damai dengan Tipe A;
 - 6) Kecamatan Muara Lawa dengan Tipe A;



- 7) Kecamatan Jempang dengan Tipe A;
 - 8) Kecamatan Bongan dengan Tipe A;
 - 9) Kecamatan Siluq Ngurai dengan Tipe A;
 - 10) Kecamatan Bentian Besar dengan Tipe A;
 - 11) Kecamatan Muara Pahu dengan Tipe A;
 - 12) Kecamatan Penyinggahan dengan Tipe A;
 - 13) Kecamatan Mook Manaar Bulatn dengan Tipe A;
 - 14) Kecamatan Nyuatan dengan Tipe A;
 - 15) Kecamatan Tering dengan Tipe A; dan
 - 16) Kecamatan Long Iram dengan Tipe A.
- g. Perangkat Daerah Lainnya :
- 1) Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar (RSUD) Tipe C, bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah;
 - 2) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebanyak 19 unit, tersebar di 16 Kecamatan, sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional;
 - 3) UPT Dinas Daerah;
 - 4) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundangundangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan;
 - 5) Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum



Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 6) Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Kutai Barat yang dibentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan terbentuknya peraturan perundang-undangan yang mengatur teknis pembentukan Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia.

6. Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kabupaten Kutai Barat

Guna melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat pada tahun 2019 didukung oleh sumber daya aparatur yang cukup memadai sebanyak 11.966 orang yang terdiri dari :

- Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 3.783 orang.
- Tenaga Kerja Kontrak (TKK)/Honoror sebanyak 8.183 orang

Tabel 1.7

Rincian Jumlah Pegawai/ASN dan TKK/PTT di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat tahun 2016 - 2019

| No. | Jenis Kepegawaian | Tahun | | |
|--------|----------------------------|--------|--------|--------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | 4.033 | 3.855 | 3.783 |
| 2 | Tenaga Kerja Kontrak (TKK) | 7.293 | 5.502 | 5.483 |
| 3 | Pegawai Tidak Tetap (PTT) | | 2.225 | 2.700 |
| Jumlah | | 11.326 | 11.582 | 11.966 |

Sumber Data : Badan Kepegawaian Daerah Kutai Barat tahun 2019



Tabel 1.8
Rincian Jumlah Pegawai/ASN di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019 Berdasarkan
Golongan Ruang dan Gender

| NO. | Golongan dan Ruang | Gender | | Jumlah Total |
|-----|--------------------|-------------|-----------|--------------|
| | | Laki - Laki | Perempuan | |
| 1 | I | 44 | 5 | 49 |
| 2 | II | 679 | 559 | 1.238 |
| 3 | III | 906 | 1047 | 1.953 |
| 4 | IV | 321 | 222 | 543 |
| | Jumlah | 2.079 | 1.781 | 3.855 |

Sumber Data: Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kutai Barat 2019

Sementara jika dilihat berdasarkan Eselon, sebaran PNS Kabupaten Barat dapat dilihat pada tabel 1.29 sebagai berikut:

Eselon II.a 1 orang; Eselon II.b 31 orang; Eselon III.a 55 orang; Eselon III.b 91 orang; Eselon IV.a 450 orang; Eselon IV.b 57 orang, Eselon Va 2 dan Eselon Vb 7 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.9
Rincian Jumlah Eselon Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kutai Barat Tahun 2017 – 2019

| No. | Eselonisasi | Tahun | | |
|-----|-------------|-------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Eselon IIa | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Eselon IIb | 37 | 31 | 29 |
| 3 | Eselon IIIa | 60 | 55 | 60 |
| 4 | Eselon IIIb | 101 | 91 | 97 |
| 5 | Eselon IVa | 439 | 450 | 443 |
| 6 | Eselon IVb | 59 | 57 | 51 |
| 7 | Eselon Va | | 2 | - |



| | | | | |
|---|-----------|-----|-----|-----|
| 8 | Eselon Vb | | 7 | - |
| | Jumlah | 697 | 694 | 681 |

Sumber Data: Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kutai Barat 2019

Berdasarkan tingkat Pendidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat tahun 2019 rincian sebagai berikut :

1. SD. : 44 orang;
2. SLTP. : 102 orang;
3. SMA/SLTA : 1.573 orang;
4. DI. : 70 orang;
5. DII. : 269 orang;
6. DIII. : 407 orang;
7. D IV/S1 : 1.224 orang;
8. S2. : 93 orang;
9. S3. : 1 orang;

Jumlah Tenaga Kerja Kontrak (TKK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019 menurut tingkat pendidikan dengan rincian sbb :

1. SD. : 127 orang ;
2. SLTP. : 363 orang;
3. SMA/SLTA. : 4.023 orang;
4. D1. : 101 orang;
5. DII. : 48 orang;
6. DIII. : 964 orang;
7. S1. : 2495 Orang;
8. S2. : 62 orang;

Tabel 1.10
Data Tenaga Kerja Kontrak (TKK) Tenaga Kependidikan (Guru)
Tahun 2019

| SEKOLAH | TINGKAT PENDIDIKAN | | | | | | | |
|---------|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|
| | SMA | D I | D 2 | D 3 | S 1 | S 2 | S 3 | TOTA L |
| | | | | | | | | |



| | | | | | | | | |
|---------|-----|---|----|----|-------|---|---|-------|
| PG/PAUD | 144 | 0 | 0 | 3 | 78 | 0 | 0 | 195 |
| TK/RA | 166 | 0 | 0 | 4 | 114 | 0 | 0 | 284 |
| SD/MI | 585 | 5 | 5 | 3 | 697 | 0 | 0 | 1.295 |
| SLB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SMP/MTS | 18 | 1 | 6 | 22 | 520 | 0 | 0 | 567 |
| JUMLAH | 883 | 6 | 11 | 32 | 1.409 | 0 | 0 | 2.341 |

Sumber Data: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kutai Barat 2019

Tabel 1.11
Data Tenaga Kerja Kontrak (TKK) Tenaga Adm Penyelenggara Kependidikan Tahun 2019

| JENJANG PENDIDIKAN | JABATAN | | | | JUMLAH |
|--------------------|---------|--------------|-----------------|---------|--------|
| | TU | PERPUSTAKAAN | PENJAGA SEKOLAH | PELAYAN | |
| PG/PAUD | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| TK/RA | 10 | 2 | 13 | 10 | 35 |
| SD/MI | 56 | 19 | 70 | 39 | 184 |
| SMP/MTs | 75 | 19 | 18 | 20 | 132 |
| JUMLAH | 145 | 40 | 101 | 73 | 359 |

Sumber Data: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kutai Barat 2019

E. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019 ini dilakukan dengan membentuk fokus grup yang melakukan pengumpulan data, kajian, dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sasaran/program yang telah ditetapkan. Berbagai dokumen perencanaan daerah yang telah ada baik itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Barat tahun 2016 – 2021, Arah dan Kebijakan Umum dan Strategi Prioritas APBD tahun 2019, serta dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2019 menjadi bahan perencanaan kinerja untuk diukur dan dievaluasi pencapaiannya.

Dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan, LKjIP tahun 2019 lebih banyak menguraikan hal-hal strategis yang masih memerlukan perbaikan, sedangkan hal-hal yang relatif telah berhasil dengan baik tidak terlalu banyak diungkapkan.



Adapun sistematika penyusunan LAKIP Kabupaten Kutai Barat tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang; maksud dan tujuan; gambaran umum Kabupaten Kutai Barat serta sistematika penulisan.

Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan Perencanaan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat untuk periode 2016 – 2021 dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kutai Barat Tahun 2019.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dikaitkan dengan sasaran strategis untuk tahun 2017 dan penyajian dari hasil pengukuran Kinerja Tahun 2019.

Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah daerah Kabupaten Kutai Barat tahun 2019 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) 2016-2021

Perencanaan yang dimaksudkan didalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perencanaan startegis yang merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai tujuan atau rangkaian pengambilan keputusan berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun, yang secara sistematis dan berkesinambungan serta dengan memperhatikan dan mempertimbangkan lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) serta lingkungan eksternal (peluang dan tantangan). Perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban sekaligus instrumen manajemen kinerja, perencanaan yang dimaksud disini adalah perencanaan strategis yang merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar dapat mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tantangan sistem manajemen nasional. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar dapat mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Dalam Perpres Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa rencana strategis menjadi landasan penyelenggaraan SAKIP artinya rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis Instansi Pemerintah, yang setidaknya



memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Rencana strategis Pemerintah Kabupaten Kutai Barat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat nomor 03 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 – 2021 dimana RPJMD berfungsi sebagai pedoman manajerial taktis strategis Bupati beserta perangkatnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan dan pelaksanaan pembangunan serta Pemerintah Kabupaten Kutai Barat pelayanan kepada masyarakat. Untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan tahunan maka RPJMD tersebut dijabarkan ke dalam perencanaan kinerja tahunan yang memuat sasaran-sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu satu tahunan dan strategi yang digunakan untuk mewujudkan pencapaian sasaran tersebut serta tolok ukur dan target kinerja apa saja yang akan digunakan untuk menunjukkan kualitas pencapaian sasaran yang bersangkutan.

Rencana strategis Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam RPJMD tersebut diatas meliputi visi, misi, tujuan, sasaran serta strategi pokok pembangunan adalah sebagai berikut :

1. VISI PEMBANGUNAN DAERAH

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Dengan demikian, visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kutai Barat 2016-2021 sejalan dengan permasalahan dan isu strategis yang dihadapi serta pelaksanaan pemerintah dan pembangunan daerah dapat terarah, berkelanjutan, maka diperlukan adanya Visi Daerah baik untuk jangka panjang maupun jangka menengah. Visi Daerah jangka menengah yang tertuang dalam RPJMD Kutai Barat Tahun 2016 – 2021 adalah :

"TERWUJUDNYA KUTAI BARAT YANG SEMAKIN ADIL, MANDIRI DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN EKONOMI KERAKYATAN DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA"

Visi pembangunan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016-2021 ini menjadi arah cita-cita bagi pembangunan yang secara sistematis bagi penyelenggara Pemerintahan daerah dan segenap pemangku kepentingan pembangunan Kabupaten Kutai Barat, Penjelasan dari Visi tersebut adalah sebagai berikut: mengandung makna bahwa pada akhir tahun 2021 mendatang, kehidupan masyarakat Kutai Barat akan:



a. Semakin Adil

Semakin adil diartikan bahwa secara bertahap dan pasti berbagai kesenjangan (*gap*) atau disparitas hasil-hasil pembangunan akan semakin berkurang dan Hasil-hasil pembangunan akan semakin dirasakan manfaatnya secara lebih meluas dan merata ke seluruh wilayah dan lapisan masyarakat Kutai Barat, tidak lagi terfokus di pusat-pusat pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi atau kelompok-kelompok masyarakat tertentu saja, sehingga pembangunan merata pada semua wilayah menuju kesejahteraan yang merata.

b. Semakin Mandiri

Semakin mandiri diartikan bahwa masyarakat Kutai Barat di masa mendatang diharapkan akan semakin mampu untuk terus maju dengan bertumpu pada kekuatan serta daya inovasi masyarakat dan daerah, kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan mewujudkan kehidupan yang sejajar serta sederajat dengan daerah lain yang mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri. Dalam membangun kemandirian ini mutlak harus dibangun kemampuan daya saing daerah.

Kemandirian ini tercermin antara lain pada ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunan, ketahanan ekonomi wilayah yang disertai ketahanan lingkungan hidup untuk menunjang pembangunan berkelanjutan, kemampuan aparatur pemerintah dalam menjalankan tugasnya, terus meningkatkan kemampuan pembiayaan pembangunan yang bersumber dari sumber daya lokal sehingga mengurangi ketergantungan sumber daya dari daerah lain, serta mampu membangun jaringan kerjasama (*networking*) untuk mendukung peningkatan kemampuan daerah.

c. Semakin Sejahtera

Semakin sejahtera diartikan bahwa di masa mendatang dapat terciptanya kualitas hidup masyarakat Kutai Barat pada semua aspek kehidupan, Pembangunan yang akan dilaksanakan pada lima tahun mendatang diharapkan mampu mewujudkan suatu keadaan masyarakat yang tercukupi kebutuhan dasar baik sandang, pangan, papan, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan memiliki pendapat yang lebih baik.



Aspek kehidupan disini antara lain meningkatnya mutu sumber daya manusia yang disertai kelayakan tingkat kesejahteraan ekonomi dalam keseimbangan dengan konservasi dan perlindungan lingkungan hidup serta tingkat kesejahteraan sosial budaya. Mutu Sumber Daya Manusia yang tinggi di tandai oleh ukuran-ukuran tingkat dan kualitas pendidikan, kualitas kesehatan penduduk. Tingkat Kesejahteraan ekonomi di ukur dengan rendahnya tingkat kemiskinan, ketahanan pangan yang mantap, menurunnya tingkat pengangguran, pendapatan perkapita yang layak dan pertumbuhan ekonomi yang mantap serta terjaganya kualitas lingkungan hidup yang lebih baik.

Sedangkan kesejahteraan sosial budaya dicirikan berkembangnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap orang - orang rentan, kemantapan kesehatan rohani, toleransi dalam kehidupan sosial serta tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

d. Berbasiskan Ekonomi Kerakyatan

Berbasiskan Ekonomi Kerakyatan diartikan bahwa masyarakat Kutai Barat di masa mendatang diharapkan mampu menyelenggarakan sistem ekonomi kerakyatan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Kutai Barat melalui peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian. Sasaran pokok ekonomi kerakyatan meliputi lima hal berikut:

- 1). Tersedianya peluang kerja dan penghidupan yang layak bagi seluruh anggota masyarakat.
- 2). Terselenggaranya sistem jaminan sosial bagi anggota masyarakat yang membutuhkan, terutama fakir miskin dan anak-anak.
- 3) Terdistribusikannya kepemilikan modal material secara relatif merata di antara anggota masyarakat.
- 4). Terselenggaranya pendidikan nasional secara Cuma-cuma bagi setiap anggota masyarakat.

e. Peningkatan Kualitas SDM

Peningkatan Kualitas SDM diartikan bahwa masyarakat Kutai Barat di masa mendatang diharapkan akan menjadi modal dasar dalam proses pembangunan di



Kutai Barat. Hal ini berarti bahwa di masa mendatang, dengan meningkatnya kualitas SDM masyarakat Kutai Barat, maka masyarakat akan lebih mampu berperan sebagai subjek pembangunan, dan bukannya sebagai objek pembangunan. Melalui SDM yang unggul, tangguh dan berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif tidak hanya peningkatan daya saing dan kemandirian masyarakat namun juga mendukung pembangunan Nasional.

Dalam kaitan ini, terdapat beberapa hal yang harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan kualitas SDM antara lain, Pertama adalah sistem pendidikan yang baik dan bermutu. Untuk mencapai hal tersebut maka diperlukan penataan terhadap sistem pendidikan secara menyeluruh. Terutama berkaitan dengan kualitas pendidikan. Serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.

Kedua adalah penguatan peran agama dalam kehidupan sosial masyarakat dalam rangka memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa. Ketiga adalah peningkatan kapasitas SDM melalui berbagai diklat, kompetensi, pembinaan dan lain-lain. Tenaga kerja profesional dan terampil sesuai tuntutan/kebutuhan pasar merupakan faktor keunggulan suatu bangsa dalam menghadapi persaingan global.

Pemerintah memegang peranan penting dalam menyiapkan program strategis guna menghasilkan SDM BERKUALITAS DAN SIAP MEMASUKI PASAR KERJA. Terakhir adalah pembinaan dan pengembangan masyarakat terutama generasi muda, sebagai penopang utama dalam roda pembangunan di Kutai Barat, pemberdayaan generasi diharapkan dapat menciptakan generasi yang kreatif, inovatif dan berdaya saing tinggi, Karakteristik generasi muda seperti inilah yang diharapkan mampu berkontribusi dan memenangkan persaingan global.

2. MISI PEMBANGUNAN DAERAH

Untuk mewujudkan Visi di atas, perlu di pandu melalui misi, hal ini tidak lepas dari pemaknaan misi yaitu perwujudan dari keinginan menyatukan langkah dan gerak dalam mencapai Visi yang telah di tetapkan. Sedangkan Misi untuk mewujudkan Visi di atas ditetapkan Tujuh butir sebagai berikut:

- 1. Peningkatan pembangunan infrastruktur dasar publik yang semakin merata ke seluruh wilayah Kutai Barat;**



Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Kabupaten Kutai Barat. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan. Sarana dan prasarana fisik, atau sering disebut dengan infrastuktur, merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat. Berbagai fasilitas fisik merupakan hal yang vital guna mendukung berbagai kegiatan pemerintahan, perekonomian, industri dan kegiatan sosial di masyarakat dan pemerintahan.

Mulai dari sistem energi, transportasi jalan raya, bangunan-bangunan perkantoran dan sekolah, hingga telekomunikasi, rumah peribadatan dan jaringan layanan air bersih, semuanya itu memerlukan adanya dukungan infrastruktur yang memadai. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat pada pembangunan infrastruktur lebih menekankan pada : Pembangunan infrastruktur transportasi kampung guna mendukung peningkatan aksesibilitas masyarakat kampung, yaitu: jalan, jembatan, tambatan perahu; Pembangunan infrastruktur yang mendukung produksi pertanian, yaitu: irigasi perdesaan. Pembangunan infrastruktur yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, meliputi: penyediaan air minum, sanitasi perdesaan.

2. Peningkatan kualitas SDM melalui penyediaan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang semakin berkualitas dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat;

Sumberdaya manusia yang berkualitas adalah sumberdaya manusia yang memiliki keahlian, berprofesionalitas, produktif dan mampu secara mandiri bersaing dengan sehat di dunia kerja. Sudah bukan rahasia lagi, bahwa banyak negara maju di dunia ini bukan karena semata-mata ditunjang oleh adanya sumber daya alam yang melimpah, namun karena sumber daya manusia yang berkualitas. Dan sumber daya manusia yang berkualitas karena mereka telah melakukan investasi yang benar, yakni investasi di bidang pendidikan dan kesehatan. Investasi di bidang pendidikan dan kesehatan akan melahirkan manusia-manusia yang unggul dan kompetitif, dan pastinya memiliki kecerdasan dan mampu mengembangkan potensi kemanusiaannya. Investasi di bidang pendidikan dan kesehatan merupakan investasi jangka panjang yang akan menentukan kualitas dan nasib suatu negeri demikian juga halnya dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat yang pada Misi yang ke 2 pada RPJMD menekankan pada peningkatan kualitas SDM.



3. Reformasi tata kelola pemerintahan dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang semakin cepat, mudah, dan murah;

Adanya perubahan paradigma yang berpusat pada rakyat dan sejalan dengan perubahan paradigma dari UU No. 5 tahun 1974 yang menggunakan "The structural efficiency model", menuju UU No. 22 Tahun 1999 dan selanjutnya diperbaharui dengan UU No. 32 Tahun 2004 dan terakhir dengan UU No. 23 Tahun 2014 yang lebih cenderung menggunakan "The local democracy model". Pemerintah Daerah Kabupaten diharapkan dapat menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di daerah. Semangat otonomi daerah pada dasarnya merupakan upaya memandirikan Pemerintah Daerah dalam menjalankan dan menyelenggarakan tugas pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di daerah. Untuk itu Pemerintah Daerah haruslah selalu tanggap dalam merespon serta menyikapi kebutuhan dan keinginan masyarakatnya. Dengan pelaksanaan otonomi daerah diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan lebih murah. Perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin dinamis, sejalan dengan tingkat kehidupan yang semakin baik, telah meningkatkan kesadarannya akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

4. Pembangunan ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan dan sektor ekonomi potensial dalam upaya penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup;

Ekonomi Kerakyatan adalah upaya memberdayakan (kelompok/satuan) ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha. Di Indonesia, ekonomi kerakyatan dijelaskan sebagai kesatuan besar individu aktor ekonomi dengan jenis kegiatan usaha yang sederhana, manajemen usaha yang belum bersistem, dan bentuk kepemilikan usaha secara pribadi. Tujuan utama penyelenggaraan sistem ekonomi kerakyatan adalah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian. Bila tujuan utama ekonomi kerakyatan itu dijabarkan lebih lanjut, maka sasaran pokok ekonomi kerakyatan meliputi lima hal berikut: Tersedianya peluang kerja dan penghidupan yang layak bagi seluruh anggota masyarakat,



Terselenggaranya sistem jaminan sosial bagi anggota masyarakat yang membutuhkan, terutama fakir miskin dan anak-anak terlantar, Terdistribusikannya kepemilikan modal material secara relatif merata di antara anggota masyarakat, Terselenggaranya pendidikan nasional secara cuma-cuma bagi setiap anggota masyarakat, Terjaminnya kemerdekaan setiap anggota masyarakat untuk mendirikan dan menjadi anggota serikat-serikat ekonomi.

5. Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat lokal, terutama masyarakat miskin dan tidak mampu;

Pemberdayaan masyarakat pada prinsipnya merupakan konsep mengaktualisasikan potensi yang sebenarnya telah dimiliki oleh individu dalam masyarakat untuk mengorganisir diri mereka sendiri. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mendorong masyarakat untuk mengambil perannya sebagai individu, bukan sebagai obyek, melainkan sebagai subyek atau pelaku yang menentukan kehidupan dan masa depannya sendiri. Proses pemberdayaan masyarakat ini bertitik tolak untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya sendiri dengan menggunakan dan mengakses sumber daya setempat sebaik mungkin. Sasaran utama pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat miskin. Pendekatan yang dipakai dalam pemberdayaan masyarakat memiliki maksud untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan kapasitas untuk mampu mempengaruhi perubahan kebijakan yang lebih berpihak kepada rakyat. Pemberdayaan masyarakat mendorong terjadi internalisasi pembangunan untuk masyarakat miskin dan marginal penciptaan lapangan kerja, serta partisipasi penduduk miskin dalam membangun, pembentukan modal sosial dan tata pemerintahan yang baik. Agar lebih dapat memantapkan dan mensukseskan program-program perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sangat perlu untuk mengikutsertakan dan memberdayakan seluruh lapisan masyarakat sebagaimana undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, yang didalamnya mengamanatkan pola perencanaan pembangunan yang berbasis masyarakat, sehingga diharapkan proses dan hasil pembangunan yang sudah dihasilkan dapat dinikmati oleh masyarakat.

6. Penerapan nilai-nilai keagamaan dan budaya luhur dalam upaya menciptakan lingkungan dan hubungan sosial yang harmonis, tertib



dan aman berbasiskan sikap toleransi, tenggang rasa, dan gotong royong;

Di negara multikultur seperti Indonesia, persoalan hubungan antar manusia yang serba multi dalam berbagai aspek seperti multi kultur, multi ras, multi agama dan lain sebagainya, kerap menjadi pemicu dan pemacu timbulnya konflik antar golongan yang berpotensi melemahkan stabilitas ketahanan bangsa. Sejarah menunjukkan bahwa kekuatan bangsa multikultur yang sangat kaya akan ragam budaya dan kekayaan alamnya ini justru telah dimanfaatkan oleh bangsa asing yang berhasil "memerah" bangsa kita selama berabad-abad dengan cara memecah belah dan mengadu domba antar golongan, strata, dan lain sebagainya. Karakter masyarakat lokal yang setiap daerah memiliki beragam kearifan yang khas dan unik, ternyata memiliki benang merah yang bisa saling terhubung antara satu dengan yang lainnya, seperti kepingan yang bisa membentuk satu bangun yang sama, dengan hasil akhir dan tujuan sama, namun setiap keping mempunyai bentuk dan bangun serta ukuran yang berbeda. Benang merah yang dimiliki setiap daerah itu adalah toleransi dan tenggang rasa.

7. Pemberdayaan peran kampung, pemuda dan perempuan sebagai basis pembangunan masyarakat.

Aspek pemberdayaan memandang pentingnya peran masyarakat itu sendiri agar mampu menentukan sendiri arah hidupnya tanpa harus tergantung faktor luar. Di sinilah pondasi pembangunan yang tepat yakni pembangunan manusia, bahwa masyarakat memiliki *local wisdom, teknologi dan knowledge* yang berkembang atas rasionalitas sistem sosial mereka, mereka bukan bangsa yang bodoh, maka dari itu agar mereka *powerfull* mereka harus diberi kesempatan untuk mengaktualisasikan peran mereka sesuai dengan logika sistem sosial yang mereka miliki, sedangkan orang luar memfasilitasinya sesuai dengan kebutuhan mereka. Alasan inilah yang mendasari mengapa perlu dilakukan upaya atau gerakan pemberdayaan masyarakat (*community development*).

Upaya pemberdayaan masyarakat kampung tidak terlepas dari berbagai komponen masyarakat sebagai sebuah proses sosial termasuk kelompok masyarakat yang lahir karena sifat dasar manusia yang selalu ingin hidup bersama dengan sesama dan alam sekitarnya. Keinginan itu yang kemudian melalui kaum kelompok masyarakat yang mempunyai ciri-ciri tertentu. Diantara mereka ada hubungan



timbang balik yang erat antara satu dengan yang lainnya. Kelompok sosial di kampung yang tergolong teratur adalah kelompok yang keberadaannya telah lama dan mempunyai pola tertentu. Seperti kelompok PKK (*pemberdayaan perempuan*) dan Karang Taruna (*pemberdayaan pemuda*) kelompok ini ada di seluruh kampung sebagai subsistem dari pemerintah secara struktural dari pusat daerah sampai ke kampung-kampung (pedesaan).

3. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

3.1. Tujuan Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Berdasarkan hasil reviu RPJMD 2016-2021 yang pelaksanaannya dilakukan dengan meminta pendampingan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terdapat beberapa perbaikan pada Dokumen RPJMD yang meliputi Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Utama serta Program dan Kegiatan.

Sejalan dengan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kutai Barat 2016-2021, maka tujuan Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Barat 2016-2021 ini adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan Peningkatan Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas;
- 2) Mewujudkan Peningkatan SDM Masyarakat yang Berkualitas;
- 3) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik;
- 4) Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan;
- 5) Mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup yang baik;
- 6) Penurunan Kemiskinan di Kutai Barat;
- 7) Menciptakan Lingkungan dan Hubungan Sosial yang lebih harmonis, tertib dan aman bagi masyarakat;
- 8) Meningkatkan Peran Pemerintahan Kampung, Pemuda dan Perempuan dalam Pembangunan Daerah.

3.2. Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Sejalan dengan tujuan pembangunan jangka menengah daerah di atas, maka sasaran pembangunan jangka menengah daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Barat 2016-2021 ini adalah sebagai berikut:



1. Misi : Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Dasar Publik yang semakin merata ke seluruh Wilayah Kutai Barat, dengan sasaran sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah;
 - b. Meningkatnya Infrastruktur Dasar di Wilayah Kutai Barat.
2. Misi : Peningkatan Kualitas SDM melalui Penyediaan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan yang semakin berkualitas dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, dengan sasaran sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat;
 - b. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.
3. Misi : Reformasi Tata Kelola Pemerintahan dalam upaya menciptakan Pemerintahan yang bersih dan Pelayanan Publik yang semakin cepat, mudah, dan murah, dengan sasaran sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan;
 - b. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Daerah.
4. Misi : Pembangunan Ekonomi Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Sektor Ekonomi Potensial dalam upaya penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, dengan sasaran sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari sektor unggulan;
 - b. Meningkatnya Nilai Investasi;
 - c. Meningkatnya Pendapatan Perkapita;
 - d. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (Angka Pengangguran);
 - e. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.
5. Misi : Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Llokal, terutama masyarakat miskin dan tidak mampu, dengan sasaran sebagai berikut :
 - a. Prosentase Penduduk diatas garis kemiskinan.
6. Misi : Penerapan Nilai-nilai Keagamaan dan Budaya Luhur dalam upaya menciptakan lingkungan dan hubungan sosial yang harmonis, tertib dan aman



berbasiskan sikap toleransi, tenggang rasa, dan gotong royong, dengan sasaran sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban bagi Masyarakat.
7. Misi : Pemberdayaan Peran Kampung, Pemuda dan Perempuan sebagai Basis Pembangunan Masyarakat, dengan sasaran sebagai berikut :
- a. Meningkatnya Kampung Maju;
 - b. Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan;
 - c. Meningkatnya Kesetaraan Gender (IDG/IPG).



**Tabel 2.1. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Kabupaten Kutai Barat**

VISI

**"TERWUJUDNYA KUTAI BARAT YANG SEMAKIN ADIL, MANDIRI DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN EKONOMI KERAKYATAN DAN
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA"**

| NO. | MISI | TUJUAN | SASARAN |
|-----|--|---|--|
| 1 | Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Dasar Publik yang semakin merata ke seluruh Wilayah Kutai Barat. | Mewujudkan Peningkatan Insfrakstruktur Wilaya yang berkualitas. | Meningkatnya Konektivitas antar wilayah; |
| | | | Meningkatnya Infrastruktur Dasar di Wilayah Kutai Barat. |
| 2 | Peningkatan Kualitas SDM melalui Penyediaan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan yang semakin berkualitas dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. | Mewujudkan Peningkatan SDM Masyarakat yang berkualitas. | Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat; |
| | | | Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat. |
| 3 | Reformasi Tata Kelola Pemerintahan dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik. | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan; |



VISI

"TERWUJUDNYA KUTAI BARAT YANG SEMAKIN ADIL, MANDIRI DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN EKONOMI KERAKYATAN DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA"

| NO. | MISI | TUJUAN | SASARAN |
|-----|--|--|---|
| | pelayanan publik yang semakin cepat, mudah, dan murah. | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Daerah. |
| 4 | Pembangunan Ekonomi Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Sektor Ekonomi Potensial dalam upaya penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. | Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan. | Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari sektor unggulan; Meningkatnya Nilai Investasi; Meningkatnya Pendapatan Perkapita; |
| | | Mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup yang baik | Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (Angka Pengangguran). Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup. |



VISI

"TERWUJUDNYA KUTAI BARAT YANG SEMAKIN ADIL, MANDIRI DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN EKONOMI KERAKYATAN DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA"

| NO. | MISI | TUJUAN | SASARAN |
|-----|---|--|---|
| 5 | Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Lokal, terutama masyarakat miskin dan tidak mampu. | Penurunan Kemiskinan di Kutai Barat. | Prosentase Penduduk diatas garis kemiskinan. |
| 6 | Penerapan Nilai-nilai Keagamaan dan Budaya Luhur dalam upaya menciptakan lingkungan dan hubungan sosial yang harmonis, tertib dan aman berbasiskan sikap toleransi, tenggang rasa, dan gotong royong. | Menciptakan lingkungan dan hubungan sosial yang lebih harmonis, tertib dan aman bagi masyarakat. | Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban bagi Masyarakat. |
| 7 | Pemberdayaan Peran Kampung, Pemuda dan Perempuan sebagai Basis Pembangunan Masyarakat. | Meningkatkan peran pemerintahan kampung, pemuda dan perempuan dalam pembangunan daerah. | Meningkatnya Kampung Maju; |
| | | | Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan; |
| | | | Meningkatnya Kesetaraan Gender (IDG/IPG) |



3.3. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan stratejik selain mengagendakan aktivitas pembangunan, juga mengakomodasi segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat yang dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun.

Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* pembangunan daerah. Di sini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategis tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya "berpikir strategik" dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*).

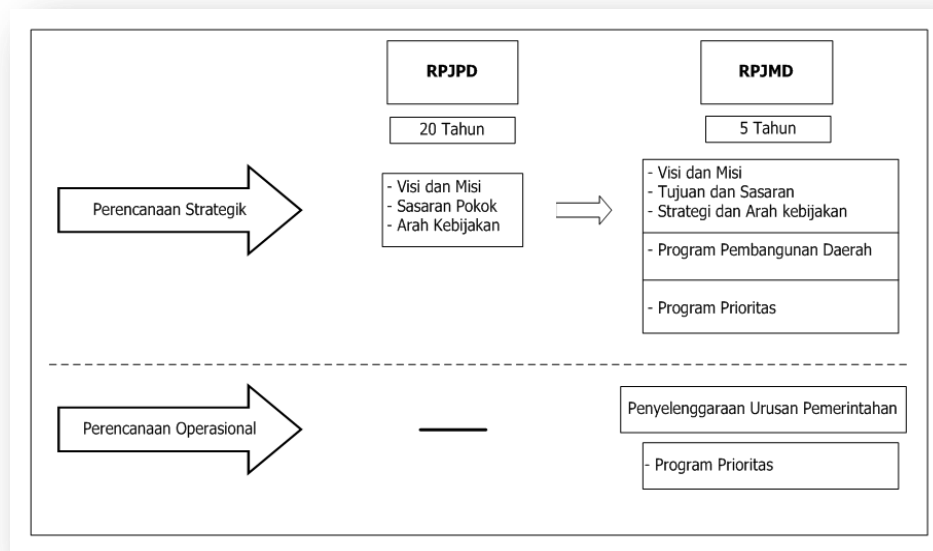
Arsitektur perencanaan pembangunan daerah dipisahkan menjadi dua:

1. Perencanaan Strategik yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.
2. Perencanaan Operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan.

Perencanaan sekaligus dimaksudkan untuk menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam rencana kerja yang *actionable*. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD maka dianggap strategis.

Perencanaan strategik didukung oleh keberhasilan kinerja dari implementasi perencanaan operasional dengan kerangka sebagaimana dijelaskan dalam bagan berikut ini:

Gambar 2.1.
Pemisahan Rencana Strategis dan Operasional



Langkah-langkah yang telah ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam menentukan strategi pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Menyusun alternatif pilihan langkah yang dinilai realistis dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan;
2. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk setiap langkah yang akan dipilih; dan
3. Melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan langkah yang paling tepat antara lain dengan menggunakan metode SWOT (kekuatan / *strengths*, kelemahan / *weaknesses*, peluang / *opportunities* dan tantangan / *threats*), dengan langkah-langkah meliputi: **Pertama**, menentukan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran; **Kedua**, menentukan strategi dari



beberapa alternatif strategi; **Ketiga**, alternatif strategi yang dipilih; dan **keempat**, untuk menghasilkan perumusan strategi yang pada akhirnya dapat selaras dengan pilihan program yang tepat maka rumusan strategi harus dipetakan (*strategy mapping*), agar secara seimbang melintasi lebih kurang empat perspektif: *Perspektif masyarakat/layanan, Perspektif proses internal, Perspektif kelembagaan, Perspektif keuangan.*

Pembangunan jangka menengah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016-2021, dapat dilihat pada gambar 2.2.

Tabel 2.2
Strategi Pembangunan Jangka Menengah

| SASARAN | STRATEGI 2016 - 2021 |
|---|---|
| MISI 1 | |
| Sasaran 1 : Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah. | 1. Meningkatkan keterbukaan akses, antar wilayah kecamatan dan kampung maupun dengan daerah lain. |
| | 2. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak dan terjangkau |
| | 3. Meningkatnya cakupan penyediaan sarana dan prasarana perhubungan dan telekomunikasi |
| Sasaran 2 : Meningkatnya Infrastruktur Dasar di Wilayah Kutai Barat. | 4. Meningkatnya Cakupan Layanan Air Minum. |
| MISI 2 | |
| Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat. | 5. Meningkatnya kualitas dan mutu pelayanan pendidikan yang layak |
| | 6. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya minat masyarakat untuk membaca dan belajar |
| Sasaran 4 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. | 7. Meningkatkan akses bagi masyarakat terhadap pelayanan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat |
| | 8. Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan di kampung-kampung |
| | 9. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam ber- |



| SASARAN | STRATEGI 2016 - 2021 |
|---|--|
| | KB |
| MISI 3 | |
| Sasaran 5 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan. | 10. Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat |
| Sasaran 6 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Daerah. | 11. Peningkatan kualitas Pelayanan Publik dan Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. |
| MISI 4 | |
| Sasaran 7 : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari Sektor Unggulan. | 12. Peningkatan efisiensi, modernisasi, dan nilai tambah pertanian dan meningkatkan daya saing koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kutai Barat, sehingga mampu menjadi soko guru perekonomian. |
| Sasaran 8 : Meningkatnya Nilai Investasi. | 13. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan prosedur serta mekanisme perijinan yang lebih cepat (<i>faster</i>), lebih mudah (<i>easier</i>) dan lebih murah (<i>cheaper</i>). |
| Sasaran 9 : Meningkatnya Pendapatan Perkapita. | 14. Upaya untuk meningkatkan daya saing koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kutai Barat, sehingga mampu menjadi soko guru perekonomian 15. Peningkatan efisiensi, modernisasi dan nilai tambah pertanian 16. Pengembangan kemitraan Pariwisata baik antar pemerintah maupun antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha wisata yang ada ditingkat local, nasional maupun internasional |
| Sasaran 10 : Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (Angka Pengangguran). | 17. Meningkatkan terciptanya lapangan kerja formal dan informal di masyarakat. |
| Sasaran 11 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup. | 18. Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, social dan budaya masyarakat secara berkesinambungan. |



| SASARAN | STRATEGI 2016 - 2021 |
|---|--|
| MISI 5 | |
| Sasaran 12 : Prosentase Penduduk diatas garis kemiskinan. | 19. Terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang dan papan bagi masyarakat miskin. |
| MISI 6 | |
| Sasaran 13 : Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban bagi masyarakat. | 20. Menciptakan rasa aman, tertib dan toleransi, saling pengertian dan kebersamaan antar etnik dan golongan dalam kehidupan bermasyarakat, |
| MISI 7 | |
| Sasaran 14 : Meningkatnya Kampung Maju. | 21. Meningkatkan peran aktif, partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan pemerintahan kampung. |
| Sasaran 15 : Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan. | 22. Meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dan organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan daerah. |
| Sasaran 16 : Meningkatnya Kesetaraan Gender (IDG/IPG). | 23. Meningkatkan partisipasi dan peran aktif perempuan dan organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan daerah. |

Berdasarkan gambar 2.2 diatas, terlihat jelas bahwa pencapaian sasaran pembangunan (RPJMD) ditentukan oleh keberhasilan dalam perumusan strategi yang kemudian ditindaklanjuti dengan realisasi pelaksanaan strategi sebagai prioritas pembangunan (*strategy focused organization*) lima tahun mendatang. Dalam manajemen kinerja, prioritas pembangunan merupakan salah satu teknik dalam mengarahkan perhatian birokrasi terhadap fokus utama pembangunan daerah. Untuk itu, pemerintah daerah telah menyusun strategi pembangunan sebagaimana telah digambarkan di atas sehingga dapat dijadikan sebagai prioritas pembangunan daerah lima tahun ke depan.

Prioritas pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Barat 2016-2021, meliputi:



- 1) Meningkatkan keterbukaan akses, antar wilayah kecamatan dan kampung maupun dengan daerah lain.
- 2) Meningkatnya aksesibilitas masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak dan terjangkau.
- 3) Meningkatnya cakupan penyediaan sarana dan prasarana perhubungan dan telekomunikasi.
- 4) Meningkatnya pemanfaatan ruang wilayah sesuai peruntukkannya.
- 5) Meningkatnya kualitas dan mutu pelayanan pendidikan yang layak.
- 6) Meningkatkan kesadaran akan pentingnya minat masyarakat untuk membaca dan belajar.
- 7) Meningkatkan akses bagi masyarakat terhadap pelayanan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- 8) Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan di kampung-kampung.
- 9) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam ber-KB.
- 10) Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- 11) Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian dalam perencanaan pembangunan.
- 12) Penataan dan penguatan sistem administrasi kependudukan.
- 13) Meciptakan tertib administrasi kearsipan dan penyelamatan/pelestarian dokumen/arsip daerah.
- 14) Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan prosedur serta mekanisme perijinan yang lebih cepat (*faster*), lebih mudah (*easier*) dan lebih murah (*cheaper*).
- 15) Upaya untuk meningkatkan daya saing koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kutai Barat, sehingga mampu menjadi soko guru perekonomian.
- 16) Peningkatan efisiensi, modernisasi, dan nilai tambah pertanian.
- 17) Upaya mendukung kebijakan kedaulatan pangan di tingkat lokal, regional dan nasional.
- 18) Pengembangan kemitraan pariwisata, baik antar pemerintah, maupun antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha wisata yang ada di tingkat lokal, nasional maupun internasional.
- 19) Meningkatkan terciptanya lapangan kerja formal dan informal di masyarakat.



- 20) Pembangunan hutan secara berkelanjutan, melibatkan partisipasi masyarakat secara luas dan memperkuat basis produksi.
- 21) Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan.
- 22) Terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang dan papan bagi masyarakat miskin.
- 23) Upaya tanggap darurat penanggulangan bencana.
- 24) Menciptakan rasa aman, toleransi, saling pengertian dan kebersamaan antar etnik dan golongan dalam kehidupan bermasyarakat.
- 25) Upaya pengembangan nilai budaya yang berorientasi pada pelestarian dan aktualisasi adat budaya lokal.
- 26) Meningkatkan peran aktif, partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan pemerintahan kampung.
- 27) Meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dan organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan daerah.
- 28) Meningkatkan partisipasi dan peran aktif perempuan dan organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan daerah.

Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Dapat disimpulkan bahwa strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan rumusan perencanaan komprehensif dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016-2021 dengan efektif dan efisien. Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016-2021, yang dilaksanakan melalui 7 (tujuh) misi, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan kurun waktu 2016-2021 per Misi, adalah sebagai berikut:

1. Misi 1: Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Dasar Publik yang semakin merata ke seluruh Wilayah Kutai Barat;

| Strategi | Arah Kebijakan |
|--|--|
| 1. Meningkatkan keterbukaan akses, antar wilayah kecamatan dan kampung maupun dengan daerah lain. | 1.1. Peningkatan kualitas dan pembangunan jalan, jembatan, drainase /gorong-gorong dan talud; |
| | 1.2. Peningkatan kualitas perencanaan jalan dan jembatan melalui penguatan sistem informasi atau data base jalan dan jembatan; |



| Strategi | Arah Kebijakan |
|---|--|
| 2. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak dan terjangkau | 2.1. Pembangunan perumahan dan pemukiman diarahkan pada upaya menciptakan lingkungan pemukiman yang sehat |
| 3. Meningkatnya cakupan penyediaan sarana dan prasarana perhubungan dan telekomunikasi | 3.1. Pembangunan perhubungan dan telekomunikasi diarahkan pada upaya untuk membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat terhadap arus transportasi dan informasi |
| 4. Meningkatnya pemanfaatan ruang wilayah sesuai peruntukkannya | 4.1. Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah |

- 2. Misi 2: Peningkatan Kualitas SDM melalui Penyediaan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang semakin berkualitas dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat;**

| Strategi | Arah Kebijakan |
|--|---|
| 5. Meningkatnya kualitas dan mutu pelayanan pendidikan yang layak | 5.1. Peningkatan kualitas dan mutu pelayanan pendidikan formal dan non formal |
| | 5.2. Peningkatan kualitas dan mutu pendidik dan tenaga kependidikan |
| 6. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya minat masyarakat untuk membaca dan belajar | 6.1. Peningkatan Kesadaran masyarakat akan minat membaca |
| 7. Meningkatkan akses bagi masyarakat terhadap pelayanan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | 7.1. Peningkatan pelayanan kesehatan yang merata di seluruh masyarakat |
| 8. Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan di kampung-kampung | 8.1. Upaya peningkatan standarisasi sarana dan prasana kesehatan |
| 9. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam ber-KB | 9.1. Peningkatan akses dan kualitas |
| | 9.2. Pelayanan keluarga berencana |

- 3. Misi 3: Reformasi Tata Kelola Pemerintahan dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang semakin cepat, mudah, dan murah;**

| Strategi | Arah Kebijakan |
|---|--|
| 10. Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat | 10.1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih |
| 11. Peningkatan kualitas | 11.1. Meningkatkan partisipasi |



| Strategi | Arah Kebijakan |
|--|--|
| perencanaan dan pengendalian dalam perencanaan pembangunan | masyarakat, transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah |
| 12. Penataan dan penguatan sistem administrasi kependudukan | 12.1. Peningkatan kualitas pelayanan kependudukan |
| 13. Meciptakan tertib administrasi kearsipan dan penyelamatan/pelestarian dokumen/arsip daerah | 13.1. Perbaiki sistem administrasi kearsipan dan pelestarian dokumen/arsip daerah |

4. **Misi 4: Pembangunan Ekonomi Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Sektor Ekonomi Potensial dalam upaya penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.**

| Strategi | Arah Kebijakan |
|--|--|
| 14. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan prosedur serta mekanisme perijinan yang lebih cepat (<i>faster</i>), lebih mudah (<i>easier</i>) dan lebih murah (<i>cheaper</i>). | 14.1. Peningkatan upaya promosi dan kerjasama investasi penanaman modal baik antar lembaga pemerintahan maupun dengan pihak swasta |
| 15. Upaya untuk meningkatkan daya saing koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kutai Barat, sehingga mampu menjadi soko guru perekonomian | 15.1. Menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah bagi masyarakat local |
| 16. Peningkatan efisiensi, modernisasi, dan nilai tambah pertanian | 16.1. Mengembangkan pertanian menuju agribisnis dan peningkatan daya saing sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani |
| 17. Upaya mendukung kebijakan kedaulatan pangan di tingkat lokal, regional dan nasional. | 17.1. Peningkatan distribusi dan akses pangan bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat miskin kronis dan transien |
| 18. Pengembangan kemitraan pariwisata, baik antar pemerintah, maupun antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha wisata yang ada di tingkat lokal, nasional maupun internasional | 18.1. Pengembangan destinasi atau objek dan daya tarik wisata yang potensial di Kutai Barat |
| 19. Meningkatkan terciptanya lapangan kerja formal dan informal di masyarakat | 19.1. Peningkatan perlindungan bagi tenaga kerja dan penciptaan hubungan industrial yang harmonis |
| 20. Pembangunan hutan secara berkelanjutan, melibatkan | 20.1. Meningkatkan rehabilitasi hutan, perlindungan dan konservasi |



| Strategi | Arah Kebijakan |
|---|---|
| partisipasi masyarakat secara luas dan memperkuat basis produksi | sumber daya hutan |
| 21. Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan. | 21.1. Peningkatan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta efektifitas pengelolaan dan konservasi SDA |

5. Misi 5: Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Lokal, terutama masyarakat miskin dan tidak mampu;

| Strategi | Arah kebijakan |
|---|---|
| 22. Terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang dan papan bagi masyarakat miskin | 22.1. Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat secara bertahap dengan mengutamakan prinsip demokrasi, partisipasi, kesetaraan dan non diskriminasi. |
| 23. Upaya tanggap darurat penanggulangan bencana | 23.1. Mengedepankan upaya pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana secara cepat dan tepat |

6. Misi 6: Penerapan Nilai-nilai Keagamaan dan Budaya Luhur dalam upaya menciptakan lingkungan dan hubungan sosial yang harmonis, tertib dan aman berbasiskan sikap toleransi, tenggang rasa, dan gotong royong

| Strategi | Arah kebijakan |
|---|---|
| 24. Menciptakan rasa aman, toleransi, saling pengertian dan kebersamaan antar etnik dan golongan dalam kehidupan bermasyarakat, | 24.1. Meningkatkan upaya menciptakan keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal; |
| 25. Upaya pengembangan nilai budaya yang berorientasi pada pelestarian dan aktualisasi adat budaya local | 25.1. Peningkatan Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya |



7. Misi 7: Pemberdayaan Peran Kampung, Pemuda dan Perempuan sebagai basis pembangunan masyarakat.

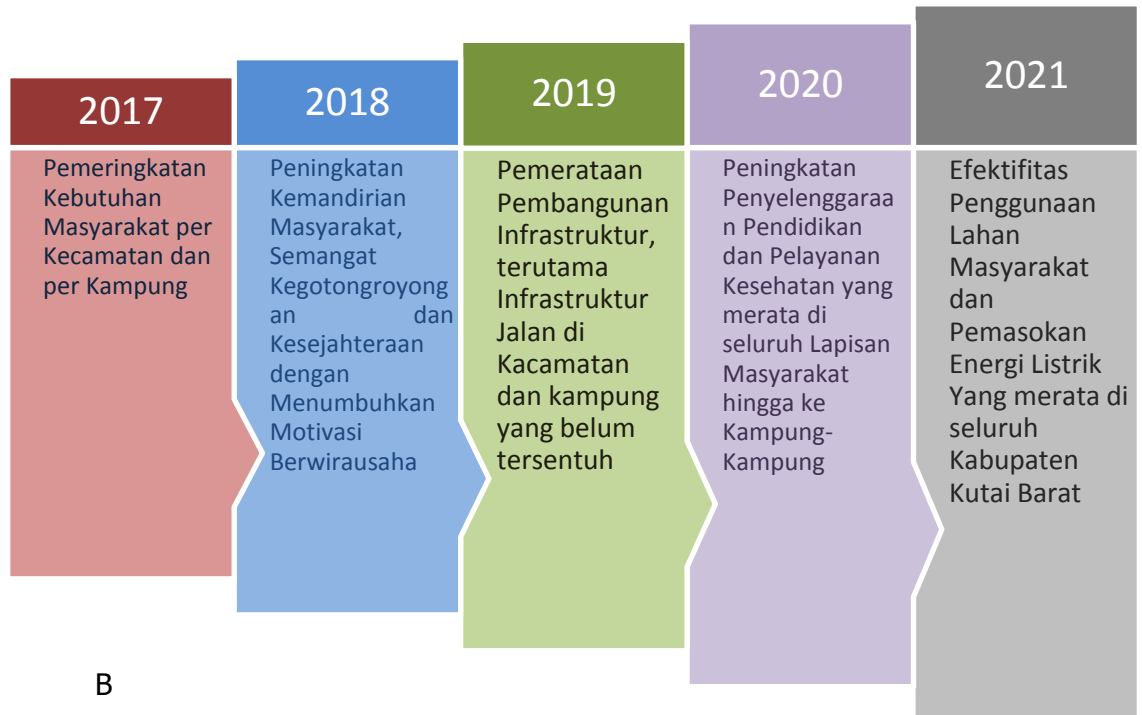
| Strategi | Arah Kebijakan |
|--|--|
| 26. Meningkatkan peran aktif, partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan pemerintahan kampung | 26.1. Peningkatan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan pemerintahan kampung |
| 27. Meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dan organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan daerah | 27.1. Peningkatan peran aktif pemuda diarahkan pada upaya untuk mendorong kreativitas, dan inovasi |
| 28. Meningkatkan partisipasi dan peran aktif perempuan dan organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan daerah | 28.1. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak |

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Kriteria suatu rumusan arah kebijakan, antara lain:

1. Memperjelas kapan suatu sasaran dapat dicapai dari waktu ke waktu;
2. Dirumuskan bersamaan dengan formulasi strategi, sebelum atau setelah alternatif strategi dibuat;
3. Membantu menghubungkan tiap-tiap strategi kepada sasaran secara lebih rasional; dan
4. Mengarahkan pemilih strategi agar selaras dengan arahan dan sesuai/tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD Kabupaten Kutai Barat memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Fokus atau tema pembangunan Kabupaten Kutai Barat adalah sebagai berikut :

Gambar 2.2.
Fokus/Tema Pembangunan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2017-2021



B

Rumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Kutai Barat 2016-2021 selengkapnya dituangkan dalam tabel berikut ini:



Tabel 2.3.
Strategi dan Arah Kebijakan
Kabupaten Kutai Barat

| VISI : | | | |
|--|---|---|---|
| TERWUJUDNYA KUTAI BARAT YANG SEMAKIN ADIL, MANDIRI DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN EKONOMI KERAKYATAN DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA | | | |
| MISI I : | | | |
| Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Dasar Publik Yang Semakin Merata Ke Seluruh Wilayah Kutai Barat | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| Mewujudkan Peningkatan Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas | Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah | Meningkatkan keterbukaan akses, antar wilayah kecamatan dan kampung maupun dengan daerah lain. | Peningkatan kualitas dan pembangunan jalan, jembatan, drainase /gorong-gorong dan talud; Peningkatan kualitas perencanaan jalan dan jembatan melalui penguatan sistem informasi atau data base jalan dan jembatan; |
| | | Meningkatnya aksesibilitas masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak dan terjangkau | Pembangunan perumahan dan pemukiman diarahkan pada upaya menciptakan lingkungan pemukiman yang sehat |
| | | Meningkatnya cakupan penyediaan sarana dan prasarana perhubungan dan telekomunikasi | Pembangunan perhubungan dan telekomunikasi diarahkan pada upaya untuk membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat terhadap arus transportasi dan informasi |
| | Meningkatnya Infrastruktur Dasar di Wilayah Kutai Barat | Meningkatnya pemanfaatan ruang wilayah sesuai peruntukkannya | Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah |



VISI :

TERWUJUDNYA KUTAI BARAT YANG SEMAKIN ADIL, MANDIRI DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN EKONOMI KERAKYATAN DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

MISI II :

Peningkatan Kualitas SDM Melalui Penyediaan Pelayanan Kesehatan Dan Pendidikan Yang Semakin Berkualitas Dan Menjangkau Seluruh Lapisan Masyarakat

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|---|---|--|--|
| Mewujudkan Peningkatan Masyarakat Berkualitas SDM yang | Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat | Meningkatnya kualitas dan mutu pelayanan pendidikan yang layak | Peningkatan kualitas dan mutu pelayanan pendidikan formal dan non formal |
| | | Meningkatkan kesadaran akan pentingnya minat masyarakat untuk membaca dan belajar | Peningkatan Kesadaran masyarakat akan minat membaca |
| | Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat | Meningkatkan akses bagi masyarakat terhadap pelayanan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Peningkatan pelayanan kesehatan yang merata di seluruh masyarakat |
| | | Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan di kampung-kampung | Upaya peningkatan standarisasi sarana dan prasana kesehatan |
| | | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam ber-KB | Peningkatan akses dan kualitas Pelayanan keluarga berencana |



VISI :

TERWUJUDNYA KUTAI BARAT YANG SEMAKIN ADIL, MANDIRI DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN EKONOMI KERAKYATAN DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

MISI III :

Reformasi Tata Kelola Pemerintahan Dalam Upaya Menciptakan Pemerintahan Yang Bersih Dan Pelayanan Publik Yang Semakin Cepat, Mudah, Dan Murah

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|---|---|--|---|
| Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan | Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih |
| | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Daerah | Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian dalam perencanaan pembangunan | Meningkatkan partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah |
| | | | |
| | | | |



VISI :

TERWUJUDNYA KUTAI BARAT YANG SEMAKIN ADIL, MANDIRI DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN EKONOMI KERAKYATAN DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

MISI IV :

Pembangunan Ekonomi Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Sektor Ekonomi Potensial Dalam Upaya Penciptaan Lapangan Kerja Dan Peningkatan Pendapatan Masyarakat, Dengan Tetap Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|--|---|--|--|
| Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan | Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari Sektor Unggulan | Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan prosedur serta mekanisme perijinan yang lebih cepat (<i>faster</i>), lebih mudah (<i>easier</i>) dan lebih murah (<i>cheaper</i>). | Peningkatan upaya promosi dan kerjasama investasi penanaman modal baik antar lembaga pemerintahan maupun dengan pihak swasta |
| | Meningkatnya Nilai Investasi | Upaya untuk meningkatkan daya saing koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kutai Barat, sehingga mampu menjadi soko guru perekonomian | Menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah bagi masyarakat lokal |
| | Meningkatnya Pendapatan Perkapita | Peningkatan efisiensi, modernisasi, dan nilai tambah pertanian | Mengembangkan pertanian menuju agribisnis dan peningkatan daya saing sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani |
| | Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka | Upaya mendukung kebijakan kedaulatan pangan | Peningkatan distribusi dan akses pangan bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat miskin |



VISI :

TERWUJUDNYA KUTAI BARAT YANG SEMAKIN ADIL, MANDIRI DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN EKONOMI KERAKYATAN DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

MISI IV :

Pembangunan Ekonomi Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Sektor Ekonomi Potensial Dalam Upaya Penciptaan Lapangan Kerja Dan Peningkatan Pendapatan Masyarakat, Dengan Tetap Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|--|--|---|---|
| | (Angka Pengangguran) | di tingkat lokal, regional dan nasional. | kronis dan transien |
| Mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup yang baik | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup | Pengembangan kemitraan pariwisata, baik antar pemerintah, maupun antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha wisata yang ada di tingkat lokal, nasional maupun internasional | Pengembangan destinasi atau objek dan daya tarik wisata yang potensial di Kutai Barat |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



VISI :

TERWUJUDNYA KUTAI BARAT YANG SEMAKIN ADIL, MANDIRI DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN EKONOMI KERAKYATAN DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

MISI V :

Penanggulangan Kemiskinan Dan Pemberdayaan Masyarakat Lokal, Terutama Masyarakat Miskin Dan Tidak Mampu

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah kebijakan |
|-------------------------------------|---|---|---|
| Penurunan Kemiskinan di Kutai Barat | Prosentase Penduduk diatas garis kemiskinan | Terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang dan papan bagi masyarakat miskin | Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat secara bertahap dengan mengutamakan prinsip demokrasi, partisipasi, kesetaraan dan non diskriminasi. |
| | | | |



VISI :

TERWUJUDNYA KUTAI BARAT YANG SEMAKIN ADIL, MANDIRI DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN EKONOMI KERAKYATAN DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

MISI VI :

Penerapan Nilai-Nilai Keagamaan Dan Budaya Luhur Dalam Upaya Menciptakan Lingkungan Dan Hubungan Sosial Yang Harmonis, Tertib Dan Aman Berbasis Sikap Toleransi, Tenggang Rasa, Dan Gotong Royong

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah kebijakan |
|---|---|---|---|
| Menciptakan Lingkungan dan Hubungan Sosial yang lebih harmonis, tertib dan aman bagi masyarakat | Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat | Menciptakan rasa aman, toleransi, saling pengertian dan kebersamaan antar etnik dan golongan dalam kehidupan bermasyarakat, | Meningkatkan upaya menciptakan keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal; |
| | | | |



VISI :

TERWUJUDNYA KUTAI BARAT YANG SEMAKIN ADIL, MANDIRI DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN EKONOMI KERAKYATAN DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

MISI VII :

Pemberdayaan Peran Kampung, Pemuda Dan Perempuan Sebagai Basis Pembangunan Masyarakat

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|--|---|---|--|
| Meningkatkan Peran Pemerintahan Kampung, Pemuda dan Perempuan dalam Pembangunan Daerah | Meningkatnya Kampung Maju | Meningkatkan peran aktif, partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan pemerintahan kampung | Peningkatan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan pemerintahan kampung |
| | Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan | Meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dan organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan daerah | Peningkatan peran aktif pemuda diarahkan pada upaya untuk mendorong kreativitas, dan inovasi |
| | | Meningkatkan partisipasi dan peran aktif perempuan dan organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan daerah | Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak |
| | Meningkatnya Kesetaraan Gender (IDG/IPG) | | |



4. PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2019

Rumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kutai Barat Tahun 2019, mengacu kepada : (1) Permasalahan hasil pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016-2021; (2) Hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2017; (3) Prioritas Provinsi Kalimantan Timur dalam rancangan awal RKPD Provinsi Kaltim 2019; (4) Prioritas nasional dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019; (4) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 khususnya sembilan prioritas pembangunan (Nawacita); (5) Kondisi lingkungan eksternal (kondisi global); dan pokok pikiran DPRD. Selain memperhatikan kelima aspek tersebut, rumusan prioritas pembangunan Kutai Barat Tahun 2019 juga berpedoman kepada kebijakan pengembangan wilayah yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kutai Barat Tahun 2011-2031. Rumusan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kutai Barat Tahun 2019 merupakan penjabaran dari isu strategis yang akan terjadi pada Pelaksanaan Pembangunan Kutai Barat Tahun 2019, yang selanjutnya sebagai acuan dalam penetapan strategi, yang dijabarkan tujuan dan sasaran pembangunan, strategi, dan arah kebijakan serta prioritas pembangunan, yang merupakan acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja perangkat daerah. Penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan diarahkan untuk menjamin terwujudnya visi misi Pemerintah Kabupaten Kutai Barat sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 dan mendukung terwujudnya prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 dan prioritas nasional sebagaimana tercantum dalam RKP 2019.

A. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional

Tujuan Pembangunan pada dasarnya harus selaras dengan tujuan Nasional, sebagaimana disebutkan didalam Pembukaan UUD 1945, yaitu Melindungi Segenap Bangsa Indonesia dan Seluruh Tumpah Darah Indonesia dan untuk Memajukan Kesejahteraan Umum, Mencerdaskan Kehidupan Bangsa dan Ikut Melaksanakan Ketertiban Dunia yang berdasarkan Kemerdekaan, Perdamaian Abadi dan Keadilan Sosial. Esensi dasar inilah yang dijadikan landasan dalam merencanakan pembangunan, baik pembangunan dalam skala Nasional maupun lingkup daerah.



Sasaran Pokok Pembangunan Nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 Adalah Sebagai Berikut :

1. Pembangunan Ekonomi dengan indikator : Pertumbuhan ekonomi, PDB perkapita, Penurunan kemiskinan, Pengangguran.
2. Pembangunan Ketahanan Pangan dengan indikator : Produksi padi, Produksi Jagung, Produksi kedelai, Produksi gula, Produksi daging dan Produksi ikan.
3. Kebutuhan Energi dengan Indikator : Produksi minyak bumi, Produksi gas bumi, Produksi batubara, Penggunaan gas bumi dalam negeri, Penggunaan batubara dalam negeri.
4. Ketahanan Air dengan indikator : terselesaikannya status DAS lintas Negara, Berkurangnya luasan lahan kritis melalui rehabilitasi dalam KPH, Pulihannya kesehatan 4 DAS Prioritas Nasional (DAS Ciliwung, DAS Citarum, DAS Kapuas, dan DAS Siak) dan 26 DAS prioritas sampai dengan tahun 2019, Terjaganya meningkatnya jumlah mata air di 4 DAS prioritas nasional dan 26 DAS prioritas sampai dengan 2019 melalui konservasi sumber daya air.
5. Kapasitas/Daya tampung dengan indikator : Ketersediaan air irigasi yang bersumber dari waduk, Pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi (permukaan, air tanah, pompa, rawa, dan tambak), Rata-rata kapasitas Desain Pengendalian Struktural dan Non Struktural Banjir.
6. Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas dengan indikator : Rasio elektrifikasi, Akses Air Minum Layak, Sanitasi Layak, Kondisi Mantap Jalan, Pembangunan Jalan, Panjang Jalur Kereta Api, *Dwelling Time* Pelabuhan, *On-time Performance* Penerbangan, Kab/Kota yang dijangkau *broadband*.
7. Lingkungan dengan indikator Emisi Gas Rumah Kaca, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Tambahan Rehabilitasi Hutan 2 juta ha (dalam dan luar kawasan).
8. Politik dengan indikator : Tingkat Partisipasi Politik Pemilu, Angka Indeks Demokrasi Indonesia, Kualitas Penyelenggaraan Pemilu 2019 Aman, Adil dan Demokratis, Peringkat Indonesia dalam Mengirimkan Pasukan Perdamaian Indonesia di PBB;
9. Penegakan Hukum dengan indikator : Indeks Pembangunan Hukum N.A. 75%,



- Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 3,63 4,0, Indeks Penegakan Hukum Tipikor N.A. Naik 20% (skala 5), Persentase Penyelesaian Rekomendasi UNCAC N.A. 100%.
10. Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi dengan indikator : Opini WTP atas Laporan Keuangan - Kementerian/Lembaga, Provinsi, Kabupaten, Kota, Instansi Pemerintah yang akuntabel , Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Integritas Nasional, Integritas Pelayanan Publik (pusat), Integritas Pelayanan Publik (Daerah).
 11. Pertahanan dan Keamanan dengan Indikator : Persentase pemenuhan MEF, Persentase pemenuhan pemeliharaan dan perawatan Alutsista, Persentase Kontribusi industri pertahanan DN terhadap MEF, Jumlah Rumkit Polri yang ditingkatkan Faskesnya Angka prevalensi penyalahgunaan narkoba.
 12. Kesejahteraan Rakyat dengan indikator, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Meningkat, Indeks Gini 0,41 menurun, Meningkatnya presentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan, Kepesertaan Program SJSN Ketenagakerjaan Pekerja formal dan Pekerja informal.
 13. Kependudukan dan Keluarga Berencana dengan indikator : Laju Pertumbuhan Penduduk, Angka kelahiran total (*Total Fertility Rate/TFR*), Pemakaian kontrasepsi (CPR) suatu cara (*all methods*).
 14. Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun meningkat, Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 meningkat, Prodi Perguruan Tinggi Minimal Terakreditasi meningkat.
 15. Kesehatan dengan indikator : Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup, Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup, Prevalensi stunting pada anak baduta (dibawah 2 tahun).
 16. Pembangunan Kewilayahan Peran Luar Jawa dalam pembentukan PDB meningkat, Jumlah Kabupaten Tertinggal menurun.
 17. Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan dengan indikator Peningkatan kesejahteraan masyarakat di pulau-pulau kecil terluar, Peningkatan dan pengembangan jumlah kapal perintis, Pembangunan dan pengembangan pelabuhan umum, Pengembangan pelabuhan perikanan berskala nasional, Peningkatan produksi perikanan dan kelautan luas kawasan konservasi



laut/perairan.

Sasaran Pembangunan Nasional tersebut diatas ditujukan untuk mencapai keberhasilan 9 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (NawaCita), Yaitu :

- Cita 1 : Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara;
- Cita 2 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
- Cita 3 : Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam Kerangka Negara Kesatuan;
- Cita 4 : Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
- Cita 5 : Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
- Cita 6 : Meningkatkan Produktivitas rakyat dan daya saing di Pasar Internasional;
- Cita 7 : Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
- Cita 8 : Melakukan revolusi karakter bangsa; dan
- Cita 9 : Memperteguh Kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Untuk mencapai keberhasilan dari sembilan agenda prioritas pembangunan (Nawa Cita) tersebut, diperlukan strategi sebagai berikut :(1) Kabinet kerja harus memiliki norma pembangunan yang berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat dan menjaga kondisi lingkungan ; (2) berpedoman pada tiga dimensi pembangunan; (3) untuk memenuhi norma dan dimensi pembangunan diperlukan prasyarat yang harus dipenuhi yaitu kepastian dan penegakan hukum, kemanan dan ketertiban, politik & demokrasi dan tata kelola pemerintahan & Reformasi Birokrasi. kondisi perlu agar pembangunan dapat berlangsung; serta (4) berdasarkan ketiga strategi tersebut untuk mencapai keberhasilan 9 agenda prioritas pembangunan diperlukan program-program yang bersifat *quick wins* (Gambar 2.3) :

Gambar 2.3. Strategi Pembangunan Nasional



Sumber : RPJMN 2015-2019

2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah membuat Visi Pembangunan adalah **“Mewujudkan Kaltim Sejahtera yang Merata dan Berkeadilan Berbasis Agroindustri dan Energi Ramah Lingkungan”**.

Misi Pembangunan dalam rangka perwujudan Visi adalah :

1. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kaltim yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi;



2. Mewujudkan Daya Saing Ekonomi yang Berkerakyatan Berbasis Sumber Daya Alam dan Energi Terbarukan
3. Mewujudkan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas bagi Rakyat Secara Merata;
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, dan Berorientasi pada Pelayanan Publik;
5. Mewujudkan Kualitas Lingkungan yang Baik dan Sehat serta Berprespektif Perubahan Iklim.

Dengan Prioritas Pembangunan daerah adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sistem penyelenggaraan Pendidikan
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
3. Percepatan Transformasi ekonomi
4. Percepatan pengentasan kemiskinan
5. Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja
6. Pengembangan ekonomi kerakyatan
7. Pemenuhan kebutuhan energi ramah lingkungan
8. Pengembangan agroindustri
9. Penguatan cadangan pangan
10. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar
11. Reformasi birokrasi dan layanan publik
12. Peningkatan kualitas lingkungan hidup

3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Kutai Barat

Sesuai dengan Dokumen RPJMD 2016-2021, Visi Kabupaten Kutai Barat ditetapkan sebagai berikut :

“Terwujudnya Kutai Barat yang semakin adil, mandiri dan sejahtera berdasarkan ekonomi kerakyatan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia”.

Untuk mewujudkan Visi di atas, perlu dipandu melalui misi yang secara sistematis dioprasionalisasikan dalam bentuk tujuan dan sasaran pembangunan daerah, hal ini tidak lepas dari pemaknaan misi yaitu perwujudan dari keinginan menyatukan langkah dan gerak dalam mencapai Visi yang telah ditetapkan. Berikut visi dan tujuan pembangunan Kabupaten Kutai Barat 2016-2021:



1. Peningkatan pembangunan infrastruktur dasar publik yang semakin merata ke seluruh wilayah Kutai Barat;
2. Peningkatan kualitas SDM melalui penyediaan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang semakin berkualitas dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat;
3. Reformasi tata kelola pemerintahan dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang semakin cepat, mudah, dan murah;
4. Pembangunan ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan dan sektor ekonomi potensial dalam upaya penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup;
5. Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat lokal, terutama masyarakat miskin dan tidak mampu;
6. Penerapan nilai-nilai keagamaan dan budaya luhur dalam upaya menciptakan lingkungan dan hubungan sosial yang harmonis, tertib dan aman berbasiskan sikap toleransi, tenggang rasa, dan gotong royong;
7. Pemberdayaan peran kampung, pemuda dan perempuan sebagai basis pembangunan masyarakat.

Berdasarkan Rekomendasi Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2018 disebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kutai Barat direkomendasikan untuk melakukan reviu dan perbaikan terhadap Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah (RPJMD dan RENSTRA), untuk memastikan bahwa Dokumen-dokumen tersebut dapat memberikan arah yang jelas sesuai dengan prioritas daerah dalam upaya pencapaian target-target jangka pendek dan menengah yang berorientasi pada *outcome*. Reviu sebagaimana dimaksud diatas mencakup reviu atas tujuan dan sasaran yang dilengkapi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang relevan, spesifik dan terukur serta benar-benar sesuai dengan tugas dan fungsi yang dijalankan.

Berdasarkan Rekomendasi tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Kutai Barat meminta pendampingan langsung dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan untuk mereviu dan melakukan perbaikan terhadap Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah. Hasil reviu dan perbaikan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Tujuan pembangunan semula yang meliputi :



1. Mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah dan memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui peningkatan cakupan sarana dan prasarana dasar publik ke kecamatan-kecamatan dan kampung-kampung yang relatif terbelakang, menjadi :
Mewujudkan Peningkatan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas.
2. Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat, menjadi :
Mewujudkan Peningkatan SDM Masyarakat yang berkualitas.
3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat, menjadi :
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik.
4. Mendorong peningkatan kinerja dalam pengelolaan pembangunan dan pemerintahan, sehingga terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, menjadi :
Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan.
5. Menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat, menjadi :
Mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup yang baik.
6. Meningkatkan kemampuan masyarakat miskin dan rentan dalam memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) dan meningkatkan derajat kehidupan masyarakat miskin pada kehidupan yang lebih bermartabat, menjadi :
Penurunan Kemiskinan di Kutai Barat.
7. Menciptakan lingkungan dan hubungan sosial yang lebih harmonis, tertib dan aman bagi masyarakat.
8. Meningkatkan peran pemerintahan kampung, pemuda dan perempuan dalam pembangunan daerah.

Mengacu kepada Misi yang telah ditetapkan, maka Sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut :

1. Misi : Peningkatan pembangunan infrastruktur dasar publik yang semakin merata ke seluruh wilayah Kutai Barat, dengan sasaran sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah;
 - b. Meningkatnya Infrastruktur Dasar di Wilayah Kutai Barat.
2. Misi : Peningkatan kualitas SDM melalui penyediaan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang semakin berkualitas dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, dengan sasaran sebagai berikut :



- a. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat;
- b. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.
3. Misi : Reformasi tata kelola pemerintahan dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang semakin cepat, mudah, dan murah, dengan sasaran sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan;
 - b. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Daerah.
4. Misi : Pembangunan ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan dan sektor ekonomi potensial dalam upaya penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, dengan sasaran sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya Pertumbuhna Ekonomi dari Sektor Unggulan;
 - b. Meningkatnya Nilai Investasi;
 - c. Meningkatnya Pendapatan Perkapita;
 - d. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (Angka Pengangguran);
 - e. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup;
5. Misi : Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat lokal, terutama masyarakat miskin dan tidak mampu, dengan sasaran sebagai berikut :
 - a. Prosentase Penduduk diatas garis kemiskinan.
6. Misi : Penerapan nilai-nilai keagamaan dan budaya luhur dalam upaya menciptakan lingkungan dan hubungan sosial yang harmonis, tertib dan aman berbasiskan sikap toleransi, tenggang rasa, dan gotong royong, dengan sasaran sebagai berikut :
 - a. Mdeningkatnya Keamanan dan Ketertiban badi Masyarakat;
7. Misi : Pemberdayaan peran kampung, pemuda dan perempuan sebagai basis pembangunan masyarakat, dengan sasaran sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya Kampung Maju;
 - b. Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan;
 - c. Meningkatnya Kesetaraan Gender (IDG/IPG).

B. PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2019

1. Prioritas Pembangunan Nasional 2019



Berdasarkan Draf Rancangan Awal RKP Tahun 2019, Pemerintah Pusat menetapkan Tema Pembangunan Nasional Tahun 2019 sebagai berikut **“Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”**.

Masih sama seperti tahun sebelumnya yaitu tahun 2018, pendekatan pembangunan tahun 2019 menggunakan paradigma *money follows program* dengan 5 Prioritas Nasional (PN) sebagai berikut :

1. Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar;
2. Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman.
3. Peningkatan Nilai Tambah melalui Pertanian, Industri dan Jasa Produktif.
4. Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air.
5. Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu.

2. Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan rancangan awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019, ditetapkan tema pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 sebagai berikut **“Memperkuat Daya Saing Investasi Untuk Mempercepat Hilirisasi Industri”**.

Berdasarkan tema tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan 5 prioritas daerah sebagai berikut:

1. Penguatan Pendidikan Vokasi dan Keterampilan Tenaga Kerja;
2. Peningkatan Kemudahan Berusaha dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan;
3. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Sentra Produksi, Kawasan Industri dan Outlet.
4. Peningkatan Produksi Pertanian dan Perikanan.
5. Peningkatan Sumberdaya Aparatur dan Kualitas Pelayanan Publik.

3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Kutai barat 2019

A. Isu Strategis dan Tema Pembangunan Kabupaten Kutai Barat 2019



Isu strategis Kabupaten Kutai Barat yang perlu diantisipasi pada tahun 2019 meliputi isu eksternal berupa: kebijakan nasional, kebijakan provinsi dan agenda global dan isu internal berupa isu kewilayahan dan isu sektoral.

Kebijakan Nasional, Kebijakan Provinsi telah dibahas pada bagian 4.2.1 dan 4.2.2 sebelumnya, sedangkan isu global yang perlu diantisipasi adalah agenda SDGs. Berikut 17 goals SDGs (cetak tebal miring sesuai dengan kewenangan daerah):

- 1. No Poverty**
- 2. Zero Hunger**
- 3. Good Health and well-being**
- 4. Quality Education**
- 5. Gender Equity**
- 6. Clean and Water Sanitation**
- 7. Appropriate and Clean Energy*
- 8. Decent Work and Economic Growth**
- 9. Innovation and Infrastructure**
- 10. Reduce Inequalities**
- 11. Sustainable Cities and Communities*
- 12. Responsible Consumption*
- 13. Climate Action*
- 14. Life Below Water*
- 15. Life on Land*
- 16. Peace, Justice and strong institutions**
- 17. Partnerships for The Goals*

PDRB Kabupaten Kutai Barat tahun 2013 – 2017 menunjukkan bahwa perekonomian wilayah didominasi sektor galian dan pertambangan, sementara perekonomian sebagian besar masyarakat lokal ditopang oleh sektor pertanian dalam arti luas.

TABEL 2.4

| Kategori | 2013 | 2014 ^r | 2015 [*] | 2016 [*] | 2017 ^e | |
|----------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019

| | | | | | | |
|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 10,87 | 13,68 | 14,30 | 15,20 | 14,74 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 61,81 | 53,66 | 49,42 | 46,95 | 50,16 |
| C | Industri Pengolahan | 4,56 | 5,24 | 5,51 | 5,93 | 5,69 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| F | Konstruksi | 8,93 | 10,77 | 12,15 | 12,20 | 11,28 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; reparasi mobil dan sepeda motor | 5,16 | 6,21 | 6,99 | 7,43 | 6,89 |



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019

| Kategori | | 2013 | 2014 ^r | 2015 [*] | 2016 ^{**} | 2017 ^e |
|---------------------------------------|---|---------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 1,28 | 1,44 | 1,52 | 1,54 | 1,41 |
| | Penyediaan Akomodasi dan Makan | | | | | |
| I | Minum | 0,23 | 0,27 | 0,31 | 0,32 | 0,30 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 0,76 | 0,87 | 0,96 | 1,01 | 0,95 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,12 |
| L | Real Estate | 0,50 | 0,55 | 0,59 | 0,58 | 0,53 |
| M,N | Jasa Perusahaan | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 3,95 | 4,92 | 5,47 | 5,84 | 5,18 |
| P | Jasa Pendidikan | 1,05 | 1,30 | 1,53 | 1,64 | 1,57 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 0,52 | 0,63 | 0,75 | 0,81 | 0,77 |
| R,S, T,U | Jasa lainnya | 0,19 | 0,22 | 0,27 | 0,30 | 0,30 |
| PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Sumber : BPS Kabupaten Kutai Barat, 2017

Ket. :

r : angka revisi

* : angka sementara

** : angka sangat sementara

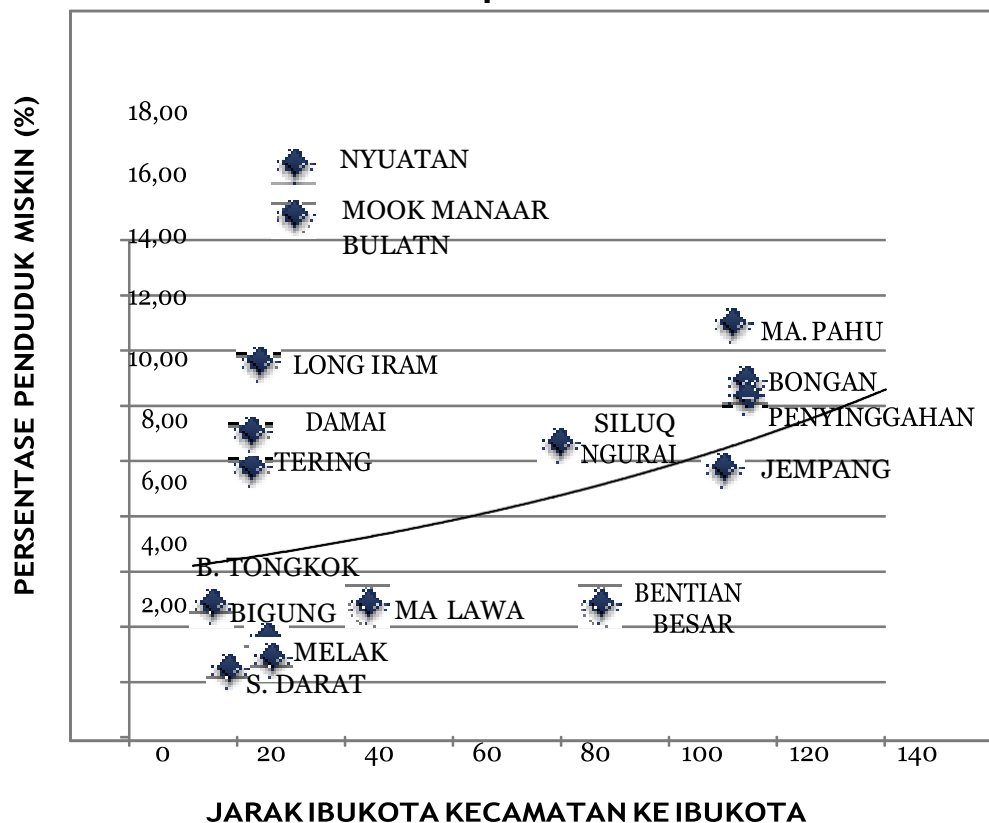
e : angka estimasi



Dominasi sektor galian dan pertambangan tidak berkorelasi positif terhadap perekonomian masyarakat lokal, sebaliknya perkembangan sektor galian dan pertambangan justru semakin menekan lahan pertanian masyarakat lokal. Kondisi ini memicu permasalahan lain yaitu alih fungsi lahan.

Akibatnya kemiskinan/ketimpangan terjadi pada daerah-daerah pinggiran, jauh dari pusat pertumbuhan, yang pola nafkah masyarakatnya hanya bergantung pada sektor pertanian dalam arti luas.

GRAFIK 2.1
Persentase Penduduk Sangat Miskin/Miskin Per
Kecamatan vs Jarak Ibukota Kecamatan Ke Ibukota
Kabupaten



Sumber : TNP2K, 2017; Hasil analisis, 2018

Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar. Karakteristik umum penduduk miskin: 1). Aksesibilitas ekonomi yang rendah terhadap pendidikan, kesehatan, sanitasi dll. 2) Kualitas SDM dan penguasaan SDA rendah. 3) Terbatasnya akses terhadap lapangan kerja. 4) Ketidakmampuan berusaha karena tidak sehat secara jasmani/rohani. (disarikan dari Sudaryanto dan



Rusastra, 2006). Dengan karakteristik tersebut sarana dan prasarana pelayanan dasar tidak akan dapat diakses oleh penduduk miskin. Oleh karena itu disamping pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar, RKPD 2019 juga memprioritaskan akses pelayanan dasar.

Ketimpangan wilayah diukur berdasarkan indeks Williamson. Ketimpangan wilayah dapat juga diinterpretasikan dari presentasi penduduk miskin perkecamatan. Berdasarkan grafik, kecamatan-kecamatan yang dekat dengan pusat pertumbuhan (daerah cepat tumbuh) lebih sejahtera dibanding kecamatan-kecamatan di daerah pinggiran.

Selain isu regional (wilayah), isu sektoral juga perlu diperhatikan. Sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen RPJM sesungguhnya dilakukan oleh sektoral terkait.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Kutai Barat tahun 2018, angka kemiskinan Kabupaten Kutai Barat di tahun 2017 berkisar 8,72 persen. Kondisi ini mengalami kenaikan sebesar 0,1 persen dari angka kemiskinan tahun 2016 yang tercatat sebesar 8,65 persen. Meningkatnya angka kemiskinan di Kutai Barat dipengaruhi oleh terjadinya kelesuan pada sektor pertambangan yang merupakan sektor terbesar dalam memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan PDRB. Sedangkan di lain pihak, sektor-sektor lapangan usaha lain belum menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam mendongkrak perekonomian di Kutai Barat. Kebijakan pemotongan dana perimbangan oleh Pemerintah Pusat juga memberikan pengaruh signifikan terhadap terhambatnya percepatan pembangunan daerah pada sektor konstruksi.

Meskipun demikian tetap menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kutai Barat untuk tetap memprioritaskan program kegiatan yang memberikan dampak langsung terhadap penurunan angka kemiskinan.

Sektor Pertambangan dan Pertanian dalam arti luas (perkebunan sawit), belum berkorelasi positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat lokal. Walaupun secara makro Sektor Pertambangan dan Pertanian tersebut masing – masing menunjang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Barat sebesar 50% dan 14% dari total PDRB pada tahun 2017. Kondisi sosial ekonomi masyarakat lokal disekitar lahan pertambangan dan Perkebunan Sawit tidak mengalami peningkatan kesejahteraan secara signifikan, penduduk yang bekerja di sektor pertanian semakin kecil dan mereka beralih ke sektor ekonomi lainnya akibat alih fungsi lahan.



Penurunan proporsi sektor pertanian lokal disebabkan oleh banyak faktor, seperti kurangnya nilai tambah, teknologi, pemasaran, maupun produksi. Kondisi ini dapat terjadi karena beberapa hal: (1) lahan pertanian, perkebunan, kehutanan, dan peternakan semakin sedikit akibat luasnya izin pertambangan dan perkebunan sawit, sehingga aktivitas di sektor pertanian lokal semakin terbatas, (2) penduduk yang bekerja di sektor pertanian semakin kecil dan mereka beralih ke sektor ekonomi lainnya, (3) produktivitas sektor pertanian menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun sehingga produksi di sektor pertanian menjadi semakin berkurang, atau (4) terjadi transformasi ekonomi di Kutai Barat dari sektor pertanian menuju sektor industri, jasa, dan perdagangan. Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana upaya Kutai Barat untuk mengaitkan sektor pertanian ke sektor industri dan perdagangan, sehingga pengembangan sektor industri dan perdagangan merupakan pengembangan yang berbasis pada sektor pertanian, hal ini dilakukan pula sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Barat untuk mengurangi ketergantungan pada sektor Pertambangan.

Sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan secara ekonomi masyarakat lokal melalui pertanian, maka dilakukan intensifikasi lahan masyarakat yang ada, baik untuk perkebunan lokal, peternakan dan perikanan, namun konektivitas berupa akses bagi masyarakat antar kampung dan kecamatan juga belum merata. Distribusi hasil produktifitas pertanian masyarakat lokal belum dapat dilakukan dengan cepat, mudah dan murah, akibat keterbatasan akses jalan yang baik.

Dari sektor pendidikan, menurut data Dinas Pendidikan dari 1.186 ruang kelas SD terdapat 327 yang rusak ringan, 313 SD kekurangan ruang perpustakaan, 355 SD belum mempunyai ruang Kepala Sekolah dan 329 SD kekurangan ruang guru. Tingkat SMP, 27 ruang kelas rusak ringan, 88 SMP kekurangan ruang perpustakaan, 96 SMP belum mempunyai ruang Kepala Sekolah dan 91 SMP belum mempunyai ruang guru yang memadai. Tahun 2019 direncanakan untuk tidak membangun sekolah baru, baik bangunan sekolah tingkat SD maupun SMP, namun lebih diutamakan pada peningkatan sarana dan prasarana berupa pemeliharaan bangunan sekolah yang rusak, pembangunan ruang perpustakaan, ruang Kepala Sekolah dan ruang Guru.

Rasio antara murid dan guru menggambarkan beban yang harus dihadapi seorang guru dalam mengajar. Dalam tahun 2017 jumlah guru SD/MI mengalami kenaikan menjadi 2.467 orang, demikian pula jumlah murid bertambah menjadi 20.856 orang. Sehingga rasio murid terhadap guru adalah 8,45, artinya seorang guru rata-rata mengajar sebanyak 9 murid.



Adapun pada jenjang pendidikan SMP/MTs, dalam tahun 2017 tercatat sebanyak

9.351 murid dengan jumlah guru sebanyak 958. Sehingga rasio murid terhadap guru sebesar 9,761, artinya seorang guru mengajar 10 orang murid. Menurut rasio guru dan murid diatas, secara umum dapat disimpulkan bahwa jumlah tenaga pendidik masih mencukupi, namun secara penempatan belum merata.

Kondisi akses jalan antar kampung dan dari kampung ke ibu kota kecamatan masih ada yang belum memadai, sehingga menyebabkan keengganan dari tenaga pendidik untuk ditempatkan didaerah tertentu. Demikian pula banyak anak usia sekolah yang enggan untuk melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi karena akses jalan dan transportasi belum memadai, walaupun cukup banyak asrama bagi pelajar yang dibangun untuk menampung para pelajar dari wilayah yang cukup jauh. Hal ini juga mempengaruhi pencapaian salah satu Indikator Kinerja Utama yaitu Angka Rata-Rata Lama Sekolah.

Sektor kesehatan, dari hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2017, indikator kesehatan menunjukkan masih tingginya Angka Kematian Bayi yaitu sebanyak 38 kasus dan Angka Kematian Ibu sebanyak 5 kasus. Tingginya AKB dan AKI pada tahun 2017 disebabkan oleh beberapa kendala sebagai berikut : 1) Terlambat penanganan akibat jauhnya jarak tempuh dari lokasi pasien ke lokasi pelayanan kesehatan terdekat; 2) Kurangnya kesadaran ibu hamil untuk memeriksakan kesehatan secara rutin ke pelayanan kesehatan, sehingga dalam beberapa kasus baru diketahui ada penyakit penyerta yang tidak tertangani seperti TBC ; 3) Masih menggunakan dukun kampung yang belum terlatih untuk membantu persalinan, sehingga apabila terjadi permasalahan menjadi sulit tertangani.

Peningkatan infrastruktur di wilayah kampung dan pinggiran dilakukan untuk mempermudah akses masyarakat dalam berusaha dan beraktifitas. Dengan konektivitas diharapkan simpul-simpul kegiatan ekonomi masyarakat dapat terintegrasi secara efisien dan efektif, sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat diwilayah kampung dan pinggiran. Demikian pula akses masyarakat dari dan menuju fasilitas pelayanan dasar dapat dengan mudah dilakukan.

Pengembangan sektor pertanian dalam arti luas dapat dilakukan dengan upaya identifikasi lahan pertanian yang produktif melalui peningkatan kinerja penyuluh pertanian, optimalisasi sistem pengairan, fasilitasi pemilihan bibit unggul, pengendalian hama dan penyakit, dsb. Peningkatan produktif dan produktifitas



pertanian diharapkan nantinya akan terus dikembangkan sebagai industri hilir yang mampu bersaing dengan produk dari luar Kutai Barat.

Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi masyarakat juga diharapkan dari peran serta sektor pariwisata, berdasarkan hasil inventarisasi potensi-potensi pariwisata seperti Jantur (air terjun), Danau, *flying fox*, *outbond*, dsb yang ada di Kabupaten Kutai Barat menunjukkan bahwa sektor ini sebenarnya dapat menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Namun, tantangan yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam upaya pengembangan sektor ini cukup berat. Hal ini disebabkan bahwa lokasi potensi pariwisata yang ada sebagian besar masih dimiliki secara individu oleh masyarakat sekitar, sehingga dalam pengembangan sarana dan prasarana pariwisata tersebut perlu dilakukan pembebasan lahan terlebih dahulu. Untuk itu, selain upaya pembebasan lahan pariwisata, juga perlu dikembangkan sektor pariwisata berbasis masyarakat, dimana masyarakat juga digandeng untuk berperan aktif dalam mengembangkan potensi pariwisata yang ada di wilayah masing-masing.

Pengembangan pemasaran hasil produksi, terutama hasil UKM dan UMKM dilakukan dengan meningkatkan promosi melalui event-event yang diselenggarakan oleh Provinsi Kalimantan Timur maupun diluar provinsi melalui koordinasi Dinas Perdagangan maupun Dinas Pariwisata. Pengembangan ini juga terkait dengan ketersediaan sarana infrastruktur jalan dan jembatan serta perkembangan Informasi dan Telekomunikasi.

Melalui peningkatan konektivitas antar wilayah dan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai serta kondisi daerah yang kondusif, maka diharapkan pihak- pihak yang ingin berinvestasi di Kabupaten Kutai Barat semakin meningkat.

Berikut permasalahan sektoral Kabupaten Kutai Barat yang dihimpun per urusan:

1. **Urusan Pendidikan.**

- ✓ **Angka putus sekolah** tinggi pada jenjang SMA dan SMK karena faktor ekonomi dan akses (geografis, sarana transportasi).
- ✓ Rendahnya **kualitas pendidikan** mengacu pada hasil UAS SD dan SMP Banyak guru yang belum berpendidikan S1 dan guru yang berlatar belakang pendidikan non-keguruan.
- ✓ **Sarana pendukung** kurang (lab, buku, alat peraga dll).

2. **Urusan Kesehatan.**



- ✓ **Kekosongan obat**, proses lelang baru dimulai pada bulan juni.
 - ✓ Jumlah tenaga kesehatan pada pustu terlatih masih kurang (terlatih APN, MTBS, BBLR, SDIDTK dsb).
 - ✓ Jumlah pengelola program promkes masih kurang. Sebagian pengelola program Promkes di PKM belum mengetahui uraian tugas sebagai penyuluh.
 - ✓ Kondisi Gedung RS banyak yang tidak sesuai persyaratan.
 - ✓ Masih ada peralatan canggih yang belum beroperasi karena SDM belum bersertifikasi.
- 3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.**
- ✓ Aksesibilitas antar kampung, kecamatan dan pusat kegiatan ekonomi belum maksimal.
 - ✓ Alih fungsi lahan tinggi.
 - ✓ Rencana Tata Ruang Wilayah masih belum digunakan sebagai acuan dalam pembangunan di daerah.
 - ✓ Pranata bidang penataan ruang masih belum memadai.
- 4. Urusan Perencanaan Pembangunan.**
- ✓ Ketersediaan data yang dibutuhkan dalam perencanaan dari SKPD terkait masih belum optimal.
 - ✓ Hasil-hasil penelitian belum digunakan dalam proses perencanaan.
 - ✓ Penelitian terkait isu-isu strategis daerah belum banyak.
 - ✓ Stakeholder belum terlibat secara maksimal dalam proses perencanaan.
 - ✓ Adanya program dan kegiatan SKPD yang belum sesuai dengan arah RPJMD dan Renstra.
- 5. Urusan Perhubungan.**
- ✓ Moda transportasi umum belum tersedia.
 - ✓ Fasilitas perlengkapan transportasi darat, sungai dan udara masih kurang.
 - ✓ Penggunaan transportasi darat cenderung meningkat, namun kondisi sarana dan prasarana pendukung masih belum kurang.
- 6. Urusan otonomi daerah, Pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawian daerah, dan persandian.**
- ✓ Kualitas SDM aparatur sangat perlu ditingkatkan terutama dalam hal



disiplin dan profesionalisme.

- ✓ Penataan pegawai belum sepenuhnya sesuai dengan kompetensi dan analisis kebutuhan jabatan.
- ✓ Pendataan aset belum tuntas, masih ada asset - asset yang belum terverifikasi.
- ✓ PAD kecil, salah satunya diakibatkan pendapatan BUMD masih terbatas.
- ✓ Dana perimbangan semakin menurun.
- ✓ Pelayanan publik masih terbatas .

7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

- ✓ Belum optimalnya pengelolaan dan penggunaan usaha bersama kampung (UBK).
- ✓ Rendahnya kualitas SDM aparatur kampung.
- ✓ Rendahnya kemampuan masyarakat desa dalam mengakses kesempatan berusaha.

8. Urusan Koperasi dan UKM.

- ✓ Daya saing produk koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah lebih rendah dibanding barang luar.
- ✓ Inovasi produksi, proses masih kurang.
- ✓ Kemitraan dengan lembaga keuangan dalam pembiayaan belum terwujud.

9. Urusan Pertanian.

- ✓ Produksi dan produktivitas pertanian masih rendah.
- ✓ Sektor pertanian belum terkait dengan industri pengolahan.
- ✓ Tenaga penyuluh pertanian masih terbatas.
- ✓ Dukungan subsistem agribisnis masih belum tersedia (penyediaan bibit, budidaya, pemasaran, dan permodalan).

10. Urusan Pariwisata.

- ✓ Objek daya tarik wisata belum optimal dikembangkan.
- ✓ Sarana prasarana pendukung pariwisata masih terbatas.
- ✓ Belum memiliki ikon wisata yang mampu bersaing dengan kabupaten lain.
- ✓ Kesiapan masyarakat sebagai tuan rumah masih perlu ditingkatkan.

11. Urusan Perdagangan.

- ✓ Jejaring pasar keluar wilayah kabupaten belum terbentuk.



- ✓ Kerjasama dengan berbagai *stakeholder* masih kurang.

Permasalahan sektoral tersebut menggambarkan isu sektoral kabupaten Kutai Barat meliputi: (1) Mutu pendidikan rendah; (2) Layanan kesehatan terbatas; (3) Konektivitas belum merata; (4) SDM masyarakat masih rendah; (5) Produktivitas lahan pertanian masih rendah; (6) ODTW Belum berkembang; (7) Produk Kutai Barat masih belum bisa bersaing dengan Produk luar; dan (8) Alih fungsi lahan tinggi;

Berdasarkan isu strategis dan target-target indikator pembangunan Kabupaten Kutai Barat yang tertuang di dalam RPJMD 2016-2021, tema RKPD Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019 yaitu **"Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Dalam Rangka Menurunkan Ketimpangan Wilayah dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat"**.

B. Sasaran dan Prioritas Daerah Kabupaten Kutai Barat 2019.

Rumusan sasaran pembangunan daerah dalam dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kutai Barat telah dipaparkan pada bagian 4.3.1 selanjutnya Prioritas pembangunan daerah di dalam RPJMD meliputi:

1. Meningkatkan keterbukaan akses, antar wilayah kecamatan dan kampung maupun dengan daerah lain.
2. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak dan terjangkau.
3. Meningkatnya cakupan penyediaan sarana dan prasarana perhubungan dan telekomunikasi.
4. Meningkatnya pemanfaatan ruang wilayah sesuai peruntukannya.
5. Meningkatnya kualitas dan mutu pelayanan pendidikan yang layak.
6. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya minat masyarakat untuk membaca dan belajar.
7. Meningkatkan akses bagi masyarakat terhadap pelayanan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
8. Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan di kampung-kampung.
9. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam ber-KB.
10. Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*)



dan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

11. Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian dalam perencanaan pembangunan.
12. Penataan dan penguatan sistem administrasi kependudukan.
13. Meciptakan tertib administrasi kearsipan dan penyelamatan/pelestarian dokumen/arsip daerah.
14. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan prosedur serta mekanisme perijinan yang lebih cepat (*faster*), lebih mudah (*easier*) dan lebih murah (*cheaper*).
15. Upaya untuk meningkatkan daya saing koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kutai Barat, sehingga mampu menjadi soko guru perekonomian.
16. Peningkatan efisiensi, modernisasi, dan nilai tambah pertanian.
17. Upaya mendukung kebijakan kedaulatan pangan di tingkat lokal, regional dan nasional.
18. Pengembangan kemitraan pariwisata, baik antar pemerintah, maupun antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha wisata yang ada di tingkat lokal, nasional maupun internasional.
19. Meningkatkan terciptanya lapangan kerja formal dan informal di masyarakat.
20. Pembangunan hutan secara berkelanjutan, melibatkan partisipasi masyarakat secara luas dan memperkuat basis produksi.

Mencermati analisis isu strategis eksternal (SDGs, rancangan awal RKP Nasional 2019, rancangan awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur 2019), internal (isu wilayah dan isu sektoral) kondisi keuangan daerah, dan Dokumen RPJMD Kabupaten Kutai Barat 2016-2021. Ditetapkan 5 prioritas daerah dalam RKPD 2019 yaitu:

1. Pengurangan Ketimpangan wilayah melalui peningkatan konektivitas.
2. Peningkatan perekonomian masyarakat melalui pertanian dan industri kecil.
3. Pembangunan sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pelayanan dasar.
4. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan tata kelola pemerintahan.



5. Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif dalam rangka meningkatkan daya saing daerah.

Kelima prioritas tersebut disintesis dari prioritas daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD. berikut matrik keterkaitan antara prioritas RKPD 2019 dengan RPJMD 2016 - 2021.

TABEL 2.5

Keterkaitan RKPD 2019 Dengan Dokumen RPJMD 2016-2021

| PRIORITAS DAERAH RKPD 2019 | | PRIORITAS DAERAH RPJMD 2016-2021 | |
|---|--|---|--|
| Pengurangan Wilayah Konektivitas | Ketimpangan melalui Peningkatan | ✓ | Meningkatkan keterbukaan akses, antar wilayah Kecamatan dan Kampung maupun dengan daerah lain. |
| Peningkatan Masyarakat dan Industri Kecil. | Perekonomian melalui Pertanian | ✓ | Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan prosedur serta mekanisme perijinan yang lebih cepat (<i>faster</i>), lebih mudah (<i>easier</i>) dan lebih murah (<i>cheaper</i>). |
| | | ✓ | Upaya untuk meningkatkan daya saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kutai Barat, sehingga mampu menjadi Soko Guru Perekonomian. |
| | | ✓ | Peningkatan Efisiensi, Modernisasi dan nilai tambah Pertanian. |
| | | ✓ | Meningkatkan terciptanya lapangan kerja formal dan informal di masyarakat. |
| | | ✓ | Pembangunan hutan secara berkelanjutan, melibatkan partisipasi masyarakat secara luas dan memperkuat basis produksi. |



PRIORITAS DAERAH RKPD 2019

PRIORITAS DAERAH RPJMD

2016-2021

- | | |
|--|---|
| <p>Pembangunan Sumber Daya Manusia melalui peningkatan kualitas pelayanan dasar</p> | <ul style="list-style-type: none">✓ Meningkatnya aksesibilitas masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hubian yang layak dan terjangkau.✓ Meningkatnya kualitas dan mutu Pelayanan Pendidikan yang layak.✓ Meningkatkan kesadaran akan pentingnya minat masyarakat untuk membaca dan belajar.✓ Meningkatkan akses bagi masyarakat terhadap pelayanan Kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.✓ Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan di Kampung-kampung. |
| <p>Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan.</p> | <ul style="list-style-type: none">✓ Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) dan pemerintahan yang bersih (<i>clean government</i>) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.✓ Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian dalam perencanaan pembangunan.✓ Penataan dan penguatan sistem administrasi kependudukan.✓ Menciptakan tertib administrasi kearsipan dan penyelamatan/pelestarian dokumen/arsip daerah. |



PRIORITAS DAERAH RKPD 2019

PRIORITAS DAERAH RPJMD

2016-2021

| | |
|--|---|
| Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam rangka meningkatkan daya saing daerah | ✓ Pengembangan kemitraan pariwisata, baik antar pemerintah, maupun antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha wisata yang ada ditingkat lokal, nasional maupun internasional. |
|--|---|

Sesuai dengan kaidah *money follows program* kelima prioritas daerah tersebut diturunkan hingga level kegiatan dengan menggunakan pendekatan tematik-holistik dan integratif-spasial. Berikut prioritas daerah, sasaran daerah dan arah kegiatan prioritas Kabupaten Kutai Barat tahun 2019 :

Tabel 2.7

| Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Arah Kegiatan Prioritas |
|---|---|--|
| Pengurangan Ketimpangan Wilayah melalui peningkatan konektivitas | Peningkatan konektivitas perekonomian masyarakat kampung dengan pusat pertumbuhan | ✓ Perluasan jejaring pemasaran produk pertanian. ✓ Penguatan kapasitas pertanian (poktan dan gapoktan). |
| | Peningkatan/pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan | ✓ Peningkatan pembangunan infrastruktur jalan bagi Kecamatan dan Kampung yang belum terkoneksi. |

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Arah Kegiatan Prioritas



| | | |
|---|--|--|
| Peningkatan Perekonomian Masyarakat melalui Pertanian dan Industri Kecil | Peningkatan produktivitas dan produksi pertanian masyarakat secara berkelanjutan | <ul style="list-style-type: none">✓ Peningkatan pelayanan penyediaan bibit.✓ Peningkatan pelayanan akses permodalan.✓ Peningkatan pelayanan proses produksi.✓ Peningkatan pelayanan penanggulangan hama dan penyakit.✓ Pengendalian alih fungsi lahan. |
| | Peningkatan daya saing produk pertanian dan industri kecil | <ul style="list-style-type: none">✓ Peningkatan mutu produk pertanian dan industri kecil.✓ Penurunan penggunaan pestisida.✓ Standarisasi produk industri kecil.✓ Pengembangan ekonomi kreatif berbasis bahan lokal.✓ Peningkatan akses permodalan. |
| | Peningkatan Kapasitas SDM Petani dan Pelaku Usaha Kecil Menengah. | <ul style="list-style-type: none">✓ Peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani dan pelaku usaha kecil menengah.✓ Peningkatan kapasitas manajerial petani dan pelaku usaha kecil menengah. |
| Pembangunan Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar | Peningkatan Kualitas pelayanan pendidikan | <ul style="list-style-type: none">✓ Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.✓ Peningkatan kualitas guru.✓ Peningkatan akses terhadap pelayanan pendidikan. |



| Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Arah Kegiatan Prioritas |
|---|---|--|
| Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan | Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat | ✓ Peningkatana sarana dan prasarana kesehatan. ✓ Peningkatan kualitas tenaga kesehatan. ✓ Peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan dan gizi (<i>dikonfirmasi kasus gizi buruk</i>). |
| | Peningkatan pemukiman layak bagi masyarakat | ✓ Peningkatan sanitasi. ✓ Peningkatan pelayanan air minum. |
| | Peningkatan Kompetensi Aparatur | ✓ Pendidikan dan Pelatihan Aparatur. ✓ Peningkatan Kinerja Aparatur. |
| | Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur | ✓ Pemantapan Pengelolaan Aset Daerah. ✓ Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur. |
| | Peningkatan Good dan Clean Governance | ✓ Peningkatan Kualitas Perencanaan Monitoring dan Evaluasi. ✓ Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah. ✓ Peningkatan Kinerja (transparansi, efesiensi dan efektivitas) Pengelolaan Keuangan Daerah. |
| | Kesuksesan Umum | ✓ Pendidikan dan Pelatihan KPU. ✓ Peningkatan Kinerja KPU. |



| Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Arah Kegiatan Prioritas |
|--|---|--|
| Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam rangka meningkatkan daya saing daerah | Peningkatan Koordinasi antar Instansi dan Lembaga | ✓ Peningkatan Koordinasi dengan Polres Kutai Barat. ✓ Peningkatan Koordinasi dengan Kodim. ✓ Peningkatan Koordinasi dengan Lembaga Adat. |
| | Peningkatan Keamanan Wilayah | ✓ Pemantapan Keamanan Lingkyngan. ✓ Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan keamanan. |
| | Pengembangan Destinasi Pariwisata | ✓ Peningkatan Sarana dan Prasarana Destinasi Pariwisata. |
| | Pengembangan daya tarik wisata | ✓ Peningkatan kapasitas masyarakat lokal melalui pendidikan dan pelatihan kepariwisataan. ✓ Peningkatan kopetensi sosial dan kesiapan sebagai tuan rumah melalui pengembangan karakter. |
| | | ✓ Pengembangan ekonomi kreatif berbasis bahan lokal. |

Sumber : Hasil Analisis 2019

Selanjutnya urusan wajib dan pilihan dijabarkan lagi dalam bentuk program, kegiatan, sasaran program, instansi penanggung jawab serta pagu indikatif, seperti Rencana Kerja dan Pendanaan menurut Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019.

Berdasarkan alokasi tersebut diatas Program pada masing-masing Perangkat Daerah diuraikan sebagai sebagai berikut.

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum;
4. Perencanaan Pembangunan Daerah;



5. Perhubungan;
6. Lingkungan;
7. Kependudukan;
8. Sosial;
9. Ketenagakerjaan;
10. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
11. Pemerintahan Umum;
12. Kepegawaian;
13. Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
14. Kearsipan;
15. Penanaman Modal;
16. Pertanian;
17. Pertambangan;
18. Kehutanan;
19. Pariwisata;
20. Perindustrian.

Estimasi pendanaan pembangunan APBD tahun 2019 didasarkan pada perkembangan pendanaan APBD selama tahun 2017 dan 2018 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran. Perkembangan anggaran menunjukkan terjadinya fluktuasi meskipun tidak terlalu besar. Kecenderungan peningkatan terjadi pada Pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi pajak daerah, retribusi daerah dan bagian laba BUMD.

Sementara itu kecenderungan terjadi penurunan pada Pos Dana Perimbangan, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat pada tahun 2019 menetapkan target tanpa memperhitungkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), sehingga pendapatan Kabupaten Kutai Barat tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp. 1,8 Trilyun. Dasar pertimbangan yang digunakan adalah berdasarkan potensi yang cukup terbuka pada pos PAD yang dapat dioptimalkan, demikian halnya dengan Dana Alokasi Umum (DAU) diupayakan untuk dapat ditingkatkan.

Dalam jangka panjang pembangunan Kabupaten Kutai Barat berupaya mengoptimalkan pendapatan dari dana perimbangan, terutama yang bersumber dari Bagi Hasil Bukan Pajak, sedangkan Pendapatan Asli Daerah mengandalkan pada Pajak Daerah, terutama melalui kebijakan pengembangan lapangan usaha dan



kesempatan kerja yang seluas-luasnya pada sektor-sektor potensial. Seiring dengan peningkatan pendapatan penduduk, pemerintah juga melakukan penataan pelayanan, dan perluasan obyek pajak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap mempertimbangkan suasana kondusif untuk mendukung berkembangnya investasi di Kabupaten Kutai Barat.

Pada tahun anggaran 2019 Pemerintah Kabupaten Kutai Barat mengusulkan kebutuhan pembiayaan Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp. 1,6 Trilyun untuk membiayai program prioritas pembangunan di Kabupaten Kutai Barat yang mendukung program prioritas Provinsi Kalimantan Timur.

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun dengan mempertimbangkan sumber daya dan proporsi anggaran yang tersedia. Dokumen Penetapan Kinerja memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama, beserta target kinerja dan anggaran.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari capaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016-2021 telah disusun Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja yang mempresentasikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja pada tingkat sasaran strategis. Indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran merupakan indikator-indikator kinerja berskala *outcome* yang dianggap mampu mengukur pencapaian sasaran-sasaran dalam RPJMD tersebut. Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja ini, sasaran, indikator kinerja, dan target mengacu pada substansi yang telah termuat dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016-2021.

Agar sasaran strategis yang ditetapkan tersebut dapat terukur pencapaiannya maka ditetapkan indikator kinerja dan target yang harus dicapai pada tahun 2019 selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.4 dan lampiran 1.



Tabel 2.7
Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----|---|--|--------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Meningkatnya Konektivitas antar wilayah | Proporsi panjang jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi mantap (%) | 54,40% |
| 2. | Meningkatnya Infrastruktur Dasar di Wilayah Kutai Barat | Cakupan Layanan Air Minum (%) | 64,60% |
| 3. | Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat | Rata-rata lama sekolah | 8,8 tahun |
| | | Angka harapan lama sekolah | 14,17 tahun |
| 4. | Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat | Angka Usia Harapan Hidup | 73,6 tahun |
| 5. | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan | Nilai SAKIP | B |
| | | Opini BPK | WTP |
| 6. | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Daerah | Nilai IKM | 76 |
| | | Nilai EKPPD | 2,8 |
| 7. | Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari sektor unggulan | Nilai PDRB Sektor Pertanian dalam arti luas | 15,3 |
| | | Nilai PDRB Industri Pengolahan | 6,50% |
| 8. | Meningkatnya Nilai Investasi | Nilai Investasi (PMDN PMDA) Rp. Juta | 2.428.898,50 |
| 9. | Meningkatnya Pendapatan Perkapita | PDRB Perkapita | 169 Juta |



| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----|--|--|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 10. | Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (Angka Pengangguran) | Angka Pengangguran Terbuka (Rasio Penduduk yang bekerja (%)) | 5,4% |
| 11. | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | 81,11 |
| 12. | Prosentase Penduduk diatas garis kemiskinan | Prosentase penduduk diatas garis kemiskinan | 92,80% |
| 13. | Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban bagi Masyarakat | (%) Konflik Sosial (Kesbangpol) / (%) Angka Konflik | 75% |
| | | (%) gangguan ketertiban yang terselesaikan K3 | 89,00% |
| 14. | Meningkatnya Kampung Maju | Jumlah Kampung Maju | 10 Kampung |
| 15. | Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan | Pemuda Berprestasi | 90 |
| 16. | Meningkatnya Kesetaraan Gender (IDG/IPG) | IPG/IDG | 83% |

D. RENCANA ANGGARAN

Sebagaimana yang telah dituangkan dalam dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) dan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2019, belanja daerah diprioritaskan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan dasar yang sesuai dengan kewenangan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Total anggaran belanja yang ditargetkan pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 2.798.104.450.170,26 terdiri dari Belanja Langsung sebesar Rp. 1.712.682.150.672,68 dan Belanja Tidak Langsung ditargetkan sebesar Rp. 1.085.422.299.497,58



Tabel 2.8
Target Belanja Daerah

| No | Uraian | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|---------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------|
| 1 | Belanja Tidak Langsung | 1.085.422.299.497,58 | 899.561.492.758,00 | 82,87 |
| 2 | Belanja Langsung | 1.712.682.150.672,68 | 1.295.089.166.699,26 | 75,61 |
| Jumlah | | 2.798.104.450.170,26 | 2.194.650.659.457,26 | 78,43 |

Sumber Data : BPKAD Kab. Kutai Barat Tahun 2019

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2019 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran-sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.9
Alokasi Anggaran per Sasaran Pembangunan Tahun 2019

| No | Sasaran Strategis | Anggaran (Rp.) | Persentase Anggaran |
|----|---|--------------------|---------------------|
| 1 | Meningkatnya Konektivitas antar wilayah | 508.043.113.207,61 | 40,96 |
| 2 | Meningkatnya Infrastruktur Dasar di Wilayah Kutai Barat | 29.836.161.587,39 | 2,41 |
| 3 | Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat | 204.684.021.153,08 | 16,50 |
| 4 | Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat | 123.552.590.988,00 | 9,96 |
| 5 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan | 39.837.101.000,00 | 3,21 |
| 6 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Daerah | 24.852.997.100,00 | 2,00 |
| 7 | Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Dari Sektor Unggulan | 44.416.654.600,00 | 3,58 |
| 8 | Meningkatnya Nilai Investasi | 3.724.911.000,00 | 0,30 |
| 9 | Meningkatnya Pendapatan Perkapita | 783.000.000,00 | 0,06 |



| No | Sasaran Strategis | Anggaran (Rp.) | Persentase Anggaran |
|---|--|-----------------------------|---------------------|
| 10 | Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (Angka Pengangguran) | 1.150.000.000,00 | 0,09 |
| 11 | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup | 32.133.065.400,00 | 2,59 |
| 12 | Prosentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan | 5.411.514.000,00 | 0,44 |
| 13 | Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban bagi Masyarakat | 178.474.402.504,78 | 14,39 |
| 14 | Meningkatnya Kampung Maju | 26.197.777.625,33 | 2,11 |
| 15 | Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan | 7.287.204.000,00 | 0,59 |
| 16 | Meningkatnya Kesetaraan Gender (IDG/IPG) | 9.874.209.818,00 | 0,80 |
| JUMLAH BELANJA LANGSUNG YANG MENDUKUNG SASARAN | | 1.240.258.723.984,19 | 100 |

Pada tabel 2.2 di atas, pada pos belanja langsung anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang secara langsung mendukung masing-masing sasaran dan anggaran untuk belanja langsung program/kegiatan pendukung (Program/Kegiatan rutin OPD dan Program/Kegiatan yang tidak berhubungan dengan sasaran strategis). Jumlah anggaran untuk program/kegiatan yang mendukung sasaran sebesar **Rp. 1.240.258.723.984,19** atau **72,43%** dari total anggaran belanja langsung sebesar **Rp. 1.712.682.150.672,68**.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. REKOMENDASI DAN TINDAKLANJUT HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2019

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 11 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, disebutkan bahwa sistematika penyajian Laporan Kinerja khususnya pada Bab III diamanatkan untuk menyajikan informasi terkait evaluasi atas implementasi SAKIP tahun lalu dengan memuat tindaklanjut atas rekomendasi hasil evaluasi SAKIP. Dengan melaksanakan rekomendasi tersebut diharapkan akan terjadi perbaikan manajemen kinerja yang berakibat pada meningkatnya skor Akuntabilitas Kinerja pemerintah Kabupaten Kutai Barat.

Pelaksanaan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019 telah dievaluasi langsung oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pelaksanaan Evaluasi SAKIP berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Tujuan evaluasi SAKIP adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Hasil Evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memperoleh nilai **60,61** atau predikat **B**. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar 4,38 dari hasil Evaluasi tahun lalu yang memperoleh Nilai 56,23. Penilaian tersebut **menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capain kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintah berorientasi hasil pada**



Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menunjukkan hasil yang baik, namun masih memerlukan perbaikan lebih lanjut. Rincian hasil penilaian Evaluasi SAKIP dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 3.1
Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten Kutai Barat
Tahun 2018 – 2019

| KOMPONEN YANG DINILAI | HASIL PENILAIAN EVALUASI SAKIP | | | PENINGKATAN / PENURUNAN CAPAIAN |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|
| | Bobot Penilaian (%) | Nilai Tahun 2018 | Nilai Tahun 2019 | |
| PERENCANAAN KINERJA | 30 | 19,93 | 21,17 | 1,24 |
| PENGUKURAN KINERJA | 25 | 13,15 | 14,14 | 0,99 |
| PELAPORAN KINERJA | 15 | 9,00 | 9,52 | 0,52 |
| EVALUASI INTERNAL | 10 | 3,23 | 4,88 | 1,65 |
| CAPAIAN KINERJA | 20 | 10,92 | 10,91 | -0,02 |
| Nilai Hasil Evaluasi | 100 | 56,23 | 60,61 | 4,38 |
| Tingkat Akuntabilitas Kinerja | | CC | B | |

Nilai Hasil Evaluasi tersebut telah memenuhi target yang sudah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2019, Namun masih jauh dari target akhir di RPJMD yang menargetkan BB di akhir tahun RPJMD 2016 -2021. Berdasarkan uraian diatas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan penerapan budaya kinerja, Kemen PAN RB merekomendasikan beberapa hal terkait perbaikan manajemen kinerja dalam rangka peningkatan Nilai Akuntabilitas diantaranya :

1. Memastikan tersedianya ukuran kinerja pada setiap jenjang jabatan samapi individu yang memenuhi kriteria spesifik, relevan dan terukur.

Terhadap rekomendasi ini, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Tim SAKIP Kabupaten melakukan *Road Show* ke Perangkat Daerah yang ditunjuk menjadi sampling. Tujuan *road show* dimaksudkan untuk memberikan pendampingan dan masukan terhadap perangkat daerah terhadap pembuatan dokumen-dokumen SAKIP. Memastikan apakah dalam Renstra telah memuat tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama yang sudah selaras dengan RPJMD dan sesuai dengan tugas dan



fungsi Perangkat Daerah tersebut. Juga memberikan pendampingan dalam pembuatan Perjanjian Kinerja mulai level eselon II, III dan IV.

Pendampingan difokuskan pada pembuatan *Cascading* untuk mempermudah menterjemahkan Visi dan Misi Kepala daerah ke dalam Tujuan dan Sasaran strategis Perangkat daerah serta memastikan pembuatan Indikator Kinerja yang spesifik, relevan dan terukur sesuai Tupoksi Perangkat Daerah baik untuk level Kepala PD (Eselon II), Kepala Bidang (Eselon III), Kepala Sub bidang (Eselon IV) dan Staf Pelaksana (Individu)

2. Melakukan pembinaan SAKIP yang intensif pada seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Kutai Barat, sehingga pencapaian Kinerja pada tingkat Perangkat Daerah dapat memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

Terhadap rekomendasi ini, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menjadwalkan Road Show Tim SAKIP Kabupaten ke Perangkat Daerah sampai tingkat kecamatan untuk memberikan Pendampingan Penguatan SAKIP dan membuat ruangan khusus (Klinik Reformasi Birokrasi) untuk tempat *Coaching Klinik*, konsultasi dan koordinasi permasalahan implementasi SAKIP bagi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Kegiatan Road Show Tim SAKIP dan Klinik Reformasi Birokrasi akan menjadi agenda rutin yang akan terus dilakukan sebagai upaya memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap Implementasi SAKIP kepada Perangkat Daerah sebagai manajemen kinerja dalam menjabarkan Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD ke dalam Renstra Perangkat Daerah dalam merumuskan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja, serta Program dan kegiatan yang tepat sesuai Tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah

3. Menerapkan *Performance Based Organization* dengan menjadikan RPJMD yang telah ditetapkan sebagai acuan dalam organisasi selain memperhatikan ketentuan tentang penyusunan organisasi perangkat daerah.

Terhadap rekomendasi ini, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah melakukan upaya evaluasi terhadap seluruh kegiatan yang akan menjadi Rencana Kerja dengan melakukan analisa secara detail dengan menggunakan beberapa format berdasarkan



Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Hal ini dilakukan agar setiap kegiatan yang diusulkan benar-benar memiliki target yang jelas baik outputnya serta kaitannya dengan outcome program yang menjadi induk program tersebut. Pencapaian dari target yang sudah ditetapkan juga menjadi perhatian untuk menentukan besaran anggaran yang diusulkan.

Melalui Bagian Organisasi akan melakukan evaluasi kelembagaan terhadap Tupoksi yang ada sesuai dengan urusan dan kewenangan yang diberikan berdasarkan UU 23 Tahun 2014 dan Peraturan perundang-undangan (regulasi) terbaru terkait pembentukan Perangkat Daerah. Evaluasi juga dilakukan terhadap Perangkat Daerah yang mengampu (penanggung Jawab) Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja Utama dalam RPJMD terkait upaya pencapaian sasaran melalui program dan kegiatan yang mendukung .

4. Menyempurnakan Peta Proses bisnis dengan mengacu pada hasil cascading kinerja, sehingga dapat memberikan gambaran proses pencapaian kinerja pada berbagai tingkatan organisasi sampai Pelaksana paling bawah. Kemudian proses bisnis ini dijadikan acuan untuk menselaraskan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja Pemerintah.

Melalui Bagian Organisasi akan meminta saran dan masukan serta pendampingan dari Kasubag Tatalaksana dan Pelayanan Publik Bagian Organisasi untuk membuat Peta Proses Bisnis dengan mengacu pada Cascading kinerja.

5. Memperbaiki Penjabaran Kinerja dari level Pemerintah Kabupaten sampai ke Individu dengan berpedoman pada kerangka berpikir logis (logical framework) sehingga keterkaitan kinerja antar jenjang menjadi lebih jelas dan juga dapat dipastikan bahwa setiap pegawai memiliki kontribusi dalam pencapaian sasaran pembangunan.

Terhadap rekomendasi ini, Melakukan rapat koordinasi yang akan membahas dan membuat penjabaran Kinerja dari Level Pemerintah Kabupaten sampai ke level individu.

6. Melakukan reviu terhadap program, kegiatan dan komponen anggaran secara berkala dengan mengacu pada IKU yang telah diperbaiki. Hasil reviu ini harus memastikan bahwa anggaran memang dialokasikan hanya untuk pencapaian sasaran strategis pembangunan..



Terhadap rekomendasi ini, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melakukan evaluasi terhadap Program dan kegiatan yang ada dengan mengacu pada IKU yang ada dan memastikan bahwa Program dan Kegiatan yang ada adalah program dan kegiatan yang mendukung pada pencapaian sasaran strategis pembangunan yang terdapat dalam RPJMD

7. Mengevaluasi efektifitas dan efisiensi rumusan program serta kegiatan dengan memfokuskan kepada hasil yang diharapkan sehingga akan memberikan manfaat yang lebih dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kutai Barat.

Terhadap rekomendasi ini, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melakukan evaluasi terhadap Program dan kegiatan yang ada dengan mengacu pada Tujuan dan Sasaran strategis serta IKU Daerah dengan memprioritaskan hanya pada Program dan Kegiatan yang memberikan dampak langsung pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat

8. Membangun sistem penilaian Kinerja Individu yang diselaraskan dengan ukuran kinerja organisasi, untuk memastikan setiap individu memiliki manfaat dalam pencapaian sasaran kinerja organisasi. Sistem Penilaian Kinerja Individu hendaknya dijadikan dasar dalam pemberian tunjangan kinerja pegawai.

Terhadap rekomendasi ini, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat akan melakukan pengukuran Kinerja tidak hanya pada level pejabat struktural tetapi sampai pada level Individu melalui pembuatan perjanjian kinerja pelaksana (Individu) yang merupakan penjabaran dari tahapan kegiatan pada tingkat Pengawas (Pejabat struktural eselon IV)

Agar pelaksanaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Kabupaten Kutai Barat berjalan dengan maksimal, maka dibuat rencana aksi (action plan) terhadap rekomendasi hasil evaluasi SAKIP seperti tertera dalam lampiran tabel berikut ini :



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019

| No | PERMASALAHAN (REKOMENDASI HASIL EVALUASI SAKIP DARI KEMENPAN RB TAHUN 2019) | PENANGGUNG JAWAB | TINDAK LANJUT | BUKTI TINDAK LANJUT | WAKTU PENYELESAIAN | KETERANGAN |
|----|--|--|---|---|-----------------------|---|
| 1. | Memastikan tersedianya ukuran kinerja pada setiap jenjang jabatan sampai individu yang memenuhi kriteria spesifik, relevan dan terukur | Bapelitbagda dan Bagian Organisasi Setda | Melakukan pendampingan bersama Tim SAKIP Kabupaten ke Perangkat Daerah untuk mendampingi pembuatan Indikator Kinerja yang spesifik, relevan dan terukur sesuai Tupoksi Perangkat Daerah baik untuk level Kepala PD (Eselon II), Kepala Bidang (Eselon III), Kepala Sub bidang (Eselon IV) dan Staf Pelaksana (Individu) | Surat Sekretaris Daerah Nomor : 060/...../TUP/III/2020 tertanggaltentang Road Show Tim SAKIP Kabupaten Ke Perangkat Daerah | Mei 2020 | Road Show dilakukan dengan mendatangi ke Perangkat Daerah, khususnya PD yang dijadikan sampling penguatan SAKIP menuju BB |
| 2. | Melakukan Pembinaan SAKIP yang intensif pada seluruh PD di Kabupaten Kutai Barat, sehingga pencapaian Kinerja pada tingkat PD dapat memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat | Bagian Organisasi Setda | Menjadwalkan Road Show Tim SAKIP Kabupaten ke Perangkat Daerah sampai tingkat kecamatan untuk memberikan Pendampingan Penguatan SAKIP dan membuat ruangan khusus (Klinik Reformasi Birokrasi) untuk tempat Coaching Klinik, konsultasi dan koordinasi permasalahan implementasi SAKIP bagi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah | Telaahan staf Nomor : 060/ tanggal Februari 20120 tentang Permohonan pembuatan Skat Ruang untuk Klinik Reformasi Birokrasi, dan Surat Pendampingan Penguatan SAKIP bagi Kecamatan | Mei 2020 | |



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019

| | | | Kabupaten Kutai Barat | | | |
|----|--|--|---|--|----------------|--|
| 3. | Menerapkan Performance Based Organization dengan menjadikan RPJMD yang telah ditetapkan sebagai acuan dalam membangun organisasi selain memperhatikan ketentuan tentang penyusunan Organisasi Perangkat Daerah | Bapelitbagda dan Bagian Organisasi Setda | Melakukan evaluasi kelembagaan terhadap Tupoksi yang ada sesuai dengan urusan dan kewenangan yang diberikan berdasarkan UU 23 Tahun 2014 dan Peraturan perundang-undangan (regulasi) terbaru terkait pembentukan Perangkat Daerah. Evaluasi juga dilakukan terhadap Perangkat Daerah yang mengampu (penanggung Jawab) Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja Utama dalam RPJMD terkait upaya pencapaian sasaran melalui program dan kegiatan yang mendukung . | Foto Copy DPA SKPD Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kegiatan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan Foto Copy undangan rapat | September 2020 | Penataan terhadap Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dengan menyusun rancangan Peraturan Bupati, melaksanakan rapat pembahasan dan menyampaikan bahan fasilitasi ke pemerintah Provinsi. |
| 4. | Menyempurnakan Peta Proses bisnis dengan mengacu pada hasil cascading kinerja, sehingga dapat memberikan gambaran proses pencapaian kinerja pada berbagai tingkatan organisasi sampai Pelaksana paling bawah. Kemudian proses bisnis ini dijadikan acuan untuk menselaraskan program dan | Bapelitbagda dan Bagian Organisasi Setda | Meminta saran dan pendampingan dari Kasubag Tatalaksana dan Pelayanan Publik Bagian Organisasi untuk membuat Peta Proses Bisnis dengan mengacu pada Cascading kinerja. | Surat Undangan Rapat Pembahasan dan Coaching klinik Pembuatan Peta Proses Bisnis dengan mengacu pada cascading kinerja | Mei 2020 | |



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019

| | | | | | | |
|----|---|--|---|--|------------|--|
| | kegiatan antar Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja Pemerintah Daerah | | | | | |
| 5. | Memperbaiki Penjabaran Kinerja dari level Pemerintah Kabupaten sampai ke Individu dengan berpedoman pada kerangka berpikir logis (logical framework) sehingga keterkaitan kinerja antar jenjang menjadi lebih jelas dan juga dapat dipastikan bahwa setiap pegawai memiliki kontribusi dalam pencapaian sasaran pembangunan | Bapelitbagda dan Bagian Organisasi Setda | Melakukan rapat koordinasi yang akan membahas dan membuat penjabaran Kinerja dari Level Pemerintah Kabupaten sampai ke level individu | Surat Undangan Rapat Pembahasan dan Coaching klinik Pembuatan Peta Proses Bisnis dengan mengacu pada cascading kinerja | Juni 2020 | |
| 6. | Melakukan reviu terhadap program, kegiatan dan komponen anggaran secara berkala dengan mengacu pada IKU yang telah diperbaiki. Hasil reviu ini harus memastikan bahwa anggaran memang dialokasikan hanya untuk pencapaian sasaran strategis pembangunan. | Bapelitbagda dan Bagian Organisasi Setda | Melakukan evaluasi terhadap Program dan kegiatan yang ada dengan mengacu pada IKU yang ada dan memastikan bahwa Program dan Kegiatan yang ada adalah program dan kegiatan yang mendukung pada pencapaian sasaran strategis pembangunan yang terdapat dalam RPJMD dengan mengacu pada Permendagri 86 Tahun 2017 form E.81. | Suat Undangan Rapat Pembahasan reviu terhadap program dengan menggunakan Form E.81 | April 2020 | |
| 7. | Mengevaluasi efektifitas dan | Bapelitbagda dan | Melakukan evaluasi terhadap | Suat Undangan Rapat | Juli 2020 | |



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019

| | | | | | | |
|----|---|---|---|--|----------|---|
| | efisiensi rumusan program serta kegiatan dengan memfokuskan kepada hasil yang diharapkan sehingga akan memberikan manfaat yang lebih dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kutai Barat | Bagian Organisasi Setda | Program dan kegiatan yang ada dengan mengacu pada Tujuan dan Sasaran strategis serta IKU Daerah dengan memprioritaskan hanya pada Program dan Kegiatan yang memberikan dampak langsung pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mengacu pada form TC.27 pada Evaluasi RENJA Perangkat Daerah. | Pembahasan efektifitas dan efisiensi rumusan program serta kegiatan dengan mengacu pada form TC.27 pada Evaluasi RENJA Perangkat Daerah. | | |
| 8. | Membangun sistem penilaian Kinerja Individu yang diselaraskan dengan ukuran kinerja organisasi, untuk memastikan setiap individu memiliki manfaat dalam pencapaian sasaran kinerja organisasi. Sistem Penilaian Kinerja Individu hendaknya dijadikan dasar dalam pemberian tunjangan kinerja pegawai. | Bapelitbagda, Bagian Organisasi Setda dan seluruh Perangkat Daerah. | Melakukan pengukuran Kinerja tidak hanya pada level pejabat struktural tetapi sampai pada level Individu melalui pembuatan perjanjian kinerja pelaksana (Individu) yang merupakan penjabaran dari tahapan kegiatan pada tingkat Pengawas (Pejabat struktural eselon IV) | Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengukuran Kinerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat | Mei 2020 | Mekanisme Pengukuran Kinerja dilakukan setiap tiga bulan sekali (triwulan) dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja yang sudah dibuat diawal tahun. Pengukuran Kinerja dilakukan mulai dari Tingkat Pelaksana (Individu), Pejabat Pengawas (eselon IV) Administrator (Eselon III) dan JPT (eselon II) |



B. METODOLOGI PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2019

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja sasaran. Metode perbandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi kinerja (*performance plan*) yang dicapai organisasi. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja utama yang dirumuskan ini memang masih jauh dari sempurna, namun diharapkan telah memberikan gambaran kepada berbagai pihak yang berkepentingan tentang hasil-hasil yang akan diwujudkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat. Namun secara bertahap akan selalu dilakukan review terhadap indikator kinerja utama ini agar selalu dapat menggambarkan kesesuaian dengan harapan masyarakat Kabupaten Kutai Barat.

Pencapaian kinerja sasaran pembangunan merupakan hasil dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat berupa pelaksanaan program dan kegiatan yang relevan dengan RPJMD 2016 - 2021. Selanjutnya analisa dan evaluasi kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi dan regulasi pada periode berikutnya.

Untuk mengukur persentase capaian kinerja dari masing-masing indikator maka ada dua jenis rumus yang digunakan yaitu :

1. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Persentase}}{\text{Capaian}} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

2. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :



$$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Pengukuran terhadap pencapaian komponen kegiatan dan sasaran ini dituangkan dalam form Pengukuran Kinerja (PK).

Selanjutnya untuk menilai dan menyimpulkan sampai sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran tersebut digunakan alat bantu berupa skala ordinal. Adapun skala ordinal yang digunakan dalam laporan akuntabilitas ini disajikan pada tabel 3.1

Tabel 3.3
Skala Ordinal Pengukuran Sasaran

| NO | JUMLAH NILAI | KATEGORI | KET |
|----|-----------------------|-----------------|------|
| 1. | Nilai diatas 85 | Sangat Berhasil | (SB) |
| 2. | 70 s/d kurang dari 85 | Berhasil | (B) |
| 3. | 55 s/d kurang dari 70 | Cukup Berhasil | (CB) |
| 4. | Kurang dari 55 | Kurang Berhasil | (KB) |

Hasil dari pengukuran kinerja melalui skala ordinal tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan penghargaan maupun hukuman kepada pelaksana kegiatan, namun digunakan untuk menilai sampai sejauh mana tingkat keberhasilan maupun ketidak keberhasilan kinerja guna meningkatkan dan memperbaiki kinerja organisasi, serta mengidentifikasi faktor-faktor apa yang menjadi hambatan dan kendala pencapaian sasaran, untuk selanjutnya menjadi bahan perumusan langkah dan strategi ke depan yang perlu dilaksanakan.

C. ANALISIS ATAS PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2019

Secara umum, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Penetapan tugas utama berdasarkan RPJMD kabupaten Kutai Barat 2016 - 2021 telah dilaksanakan secara bertahap. Dari 179 program yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Kutai Barat 2016 - 2021, pada tahun 2019 dilaksanakan sebanyak 132 program, namun tingkat keberhasilannya belum dapat diukur dengan optimal hal ini disebabkan kurang representatifnya data yang diperoleh dari LKjIP masing-masing Perangkat Daerah terutama mengenai indikator kinerja dari masing-masing sasaran. Oleh karena itu dalam penyusunan LKjIP Kabupaten Kutai Barat



2019 dan Perjanjian Kinerja tahun 2020, upaya yang ditempuh adalah koordinasi yang intensif dengan mengadakan asistensi terhadap Perangkat Daerah untuk memperoleh data indikator kinerja yang dibutuhkan dan meminta klarifikasi terhadap data yang dianggap tidak valid/sinkron. Berdasarkan Hasil analisis pengukuran terhadap 16 sasaran tersebut dibawah ini, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

- a. Sebanyak 16 sasaran atau sebesar 100% dengan Capaian Kinerja Sangat Berhasil.

Sasaran 1 : Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah.

Perangkat Daerah pelaksana untuk indikator sasaran ini adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, untuk mewujudkan sasaran 1 ini.

1. Perbandingan Target dan Realisasi serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun sebelumnya.

Untuk menilai keberhasilan/kegagalan sasaran 1 menggunakan 1 indikator kinerja dengan tingkat keberhasilan **95,98%** dengan kategori **"SANGAT BERHASIL (SB)"**. Pencapaian target kinerja sasaran 1 seperti tampak pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.4
Persentase keberhasilan/kegagalan sasaran 1

| Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2018 | | Capaian Tahun 2018 | Tahun 2019 | | Capaian Tahun 2019 | |
|--|--------|------------|-----------|--------------------|------------|-----------|--------------------|----------|
| | | Target | Realisasi | | Target | Realisasi | % | Kategori |
| Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten dalam Kondisi mantap (%) | % | 47,90 | 48,44 | 101,12 | 54,40 | 52 | 95,58 | (SB) |
| Tingkat Keberhasilan | | | | | | | 95,58 | (SB) |

Berdasarkan tabel 3.2 diketahui bahwa capaian kinerja pada tahun 2019 untuk sasaran 1 yakni **Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah** dapat disimpulkan bahwa sasaran 1 memberikan hasil kinerja yang baik meskipun ditahun 2019 ini belum memenuhi target yang sudah ditetapkan.

Adapun pencapaian sasaran pada indikator kinerja dapat di jelaskan melalui analisis sebagai berikut :



Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap.

Capaian indikator 1 dengan proporsi Panjang Jaringan jalan Kabupaten Dalam kondisi Mantap (%), tentunya dengan kondisi jalan yang baik akan sangat mendukung kelancaran mobilitas barang dan jasa sehingga akan berpengaruh pada berjalannya roda perekonomian daerah dengan lancar. Pembangunan infrastruktur jalan di Kutai Barat, sesuai target RPJMD untuk mewujudkan jaringan jalan dalam kondisi mantap. Oleh sebab itu sebagai upaya peningkatan persentase realisasi kondisi jalan mantap/baik pada tahun 2019 yakni 52 % dengan capaian 95,58% dari target yang ditetapkan sebesar 54,40%, Hal ini disebabkan karena telah dilaksanakannya peningkatan dan Pembangunan Jalan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

Dari keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kutai Barat dan Dinas Pekerjaan Umum Propinsi dengan Total Panjang Jalan Kabupaten di Kutai Barat tahun 2019 adalah sepanjang 1.283,99 Km bertambah dibandingkan panjang jalan tahun 2018 sepanjang 1.269,64 Km. Untuk melihat perkembangan Panjang Jalan Kabupaten di Kutai Barat selama 5 tahun terakhir disajikan pada tabel :

Tabel. 3.5
Panjang Jalan Dirinci Menurut Status di Kabupaten Kutai Barat
Tahun 2015– 2019 (Dalam Km)

| Status Jalan | Tahun | | | | |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Jalan Nasional | 233,4 | 233,4 | 233,4 | 233,4 | 233,4 |
| Jalan Provinsi | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 |
| Jalan Kabupaten | 1.198,58 | 1.219,73 | 1.239,83 | 1.269,64 | 1.283,99 |
| Jalan Desa | 227,24 | 254,36 | 305,23 | 305,23 | 305,23 |
| Non-Status | 227 | 235,08 | 235,08 | 675,79 | 675,79 |

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kutai Barat

Berdasarkan tabel di atas Jika dibandingkan dengan data tahun 2018, maka tahun 2019 terdapat penambahan panjang jalan kabupaten sepanjang 14,34 Km. Penambahan panjang jalan tersebut dikarenakan dibangun jalan-jalan baru yang berstatus jalan Kabupaten dan Jalan Desa guna mengakses Desa/Kampung satu dengan Desa/Kampung lainnya sebagai implementasi dari RPJMD Kutai Barat 2016-2021 pada Misi Pertama yaitu "*Meningkatnya infrastruktur dasar publik yang semakin merata ke seluruh wilayah Kutai Barat*".



Selanjutnya dapat dijelaskan kewenangan penanganan jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kabupaten Kutai Barat adalah jalan dengan status Kabupaten dan jalan Desa. Sehingga untuk menilai kinerja penanganan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kabupaten Kutai Barat digunakan indikator Persentase Jalan Kabupaten/Desa dalam Kondisi Mantap. Menurut kriteria Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, jalan dalam kondisi mantap adalah jalan dalam kondisi baik dan kondisi sedang.

Tabel 3.6
Total rekapitulasi kondisi jalan Kabupaten
Tahun 2019

| Baik (Mantap) | Sedang Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Tanah | Total Panjang |
|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------|----------------------|
| 667,67 | 227,173 | 148,097 | 91,265 | 149,785 | 1.283,99 |

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kutai Barat

2. Perbandingan Target dan Realisasi serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Beberapa Tahun sebelumnya.

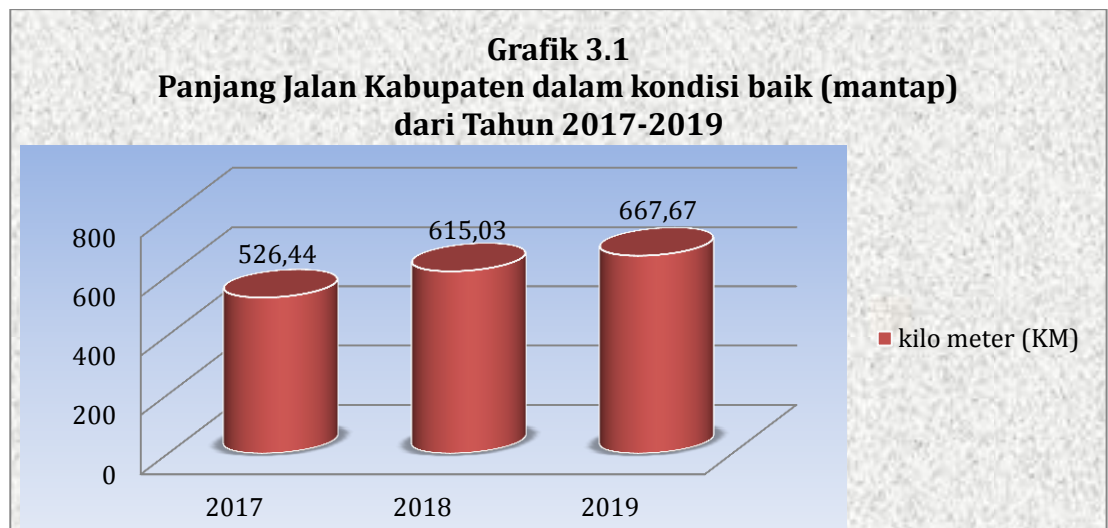
Untuk melihat perkembangan panjang jalan di Kabupaten Kutai Barat dalam kondisi baik (mantap) selama 3 tahun terakhir disajikan pada tabel :

Tabel. 3.7
Panjang Jalan Kabupaten Kutai Barat Dalam Kondisi Baik (Mantap)
Tahun 2017-2019 (Dalam Km)

| Item | Tahun | | | Keterangan |
|----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | |
| Jalan Kabupaten (KM) | 526,44 | 615,03 | 667,67 | |

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kutai Barat 2019

Dari data yang ada pada tabel diatas dari tahun 2017 sampai sekarang terus adanya peningkatan panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik (mantap) yang akan dirincikan pada grafik dibawah ini :



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kutai Barat 2019

Berikut adalah Panjang Jalan Dirinci Menurut Kondisi di Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019, yang dirincikan pada tabel dibawah ini :

Tabel. 3.8
Panjang Jalan Dirinci Menurut Kondisi di Kabupaten Kutai Barat
Tahun 2019 (Dalam Km)
Kondisi

| Jalan | Baik | Jalan Tanah | Rusak Berat | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Total |
|--------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| Jalan Kabupaten | 547,81 | 625,63 | 24,11 | 34,00 | 52,41 | 1283,99 |
| Jalan Kampung | 369,06 | 406,11 | 21,96 | 60,80 | 34,25 | 892,20 |
| Jalan Provinsi | 212,11 | - | 6,74 | 31,30 | 19,58 | 269,75 |
| Grand Total | 1129,00 | 1031,75 | 52,82 | 126,12 | 106,25 | 2445,95 |

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kutai Barat 2019

Berikut ini adalah gambar-gambar Peningkatan Jalan yang dilakukan sebagai berikut :

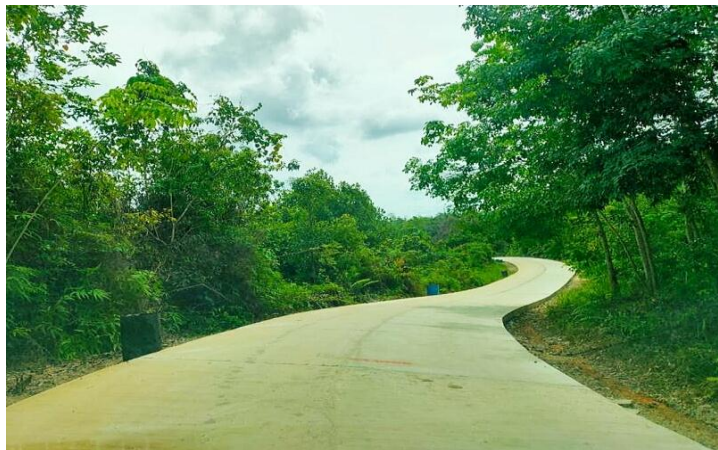


Gambar 3.1



Peningkatan Jalan Poros Mendika (Sebelum di Semenisasi)

Gambar 3.2



Peningkatan Jalan Poros Mendika (Setelah di Semenisasi)

Gambar 3.3



Peningkatan Jalan Poros SP. Muara Tokong – Simpang GBU
(Sebelum di Semenisasi)

Gambar 3.4



Peningkatan Jalan Poros SP. Muara Tokong – Simpang GBU
(Setelah di Semenisasi)

3. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan target Kinerja Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen RPJMD/RENSTRA.

Dengan target akhir yang di tetapkan dalam RPJMD 2016 -2021 yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.9
Realisasi Kinerja Sasaran 1 Di Bandingkan Target Akhir RPJMD

| Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi Kinerja s/d Tahun 2019 | Target Akhir RPJMD | Persentase Capaian Kinerja (%) |
|--|--------|----------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantab | % | 52 | 67,20 | 77,38 |
| Jumlah | | | | 77,38 |

Berdasarkan sasaran **“Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah”** dapat disimpulkan bahwa Realisasi dari Indikator Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantab di tahun 2019 ini adalah **52%** dari Target Akhir RPJMD adalah **67,20%** dengan persentase capaian kinerja sampai dengan sekarang ini yakni sebesar **77,38%**. Untuk itu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang akan terus meningkatkan kinerja yang baik untuk memenuhi target yang sudah ditetapkan didalam RPJMD 2016-2021.



Faktor-faktor penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan yaitu :

1. Infrastruktur jalan, armada tahun 2019 mengalami peningkatan sehingga arus penumpang semakin meningkat dengan pesat.
2. Perekonomian di Kutai Barat semakin baik dan maju yang berimbas pada penanaman modal.
3. Adanya perubahan data pasca Reviu RPJMD dan Penguatan Dokumen SAKIP sehingga ada pemisahan secara mendetail antara Jalan Kabupaten dan Jalan Kampung.
4. Kondisi Baik (Mantap) dikategorikan berdasarkan jenis permukaan aspal dan semenisasi.
5. Jalan tanah (permukaan tanah) tidak bisa dikategorikan dalam kondisi karena diasumsikan masih bersifat dasar (belum tersentuh pembangunan/peningkatan).
6. Terjadi perubahan total panjang jalan Kabupaten dan jumlah (Persentasi) jalan dalam kondisi mantab (baik) karena adanya pemisahan secara mendetail dari Jalan Kabupaten dan Jalan Kampung pasca reviu RPJMD dan Penguatan Dokumen SAKIP.
7. Program tahun 2018 tepat sasaran dengan diiringi infrastruktur berupa jalan darat yang semakin membaik, penerbangan udara lancar dengan penambahan runway di Bandara Melalan.

Analisis Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan Sasaran **"Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah"**, Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantab yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Menggunakan 4 Program dan 185 Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.10

No Program / Kegiatan

1. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan

- Peningkatan Jalan Tebisaq - Gunung Bayan
- Peningkatan Jalan Sp. Muara Tokong - Simpang GBU
- Peningkatan Jalan Sungai Merah - Sp 3 Karang -
- Peningkatan Jalan Muhur - Bentas - Betung - Kiaq -
- Peningkatan Jalan Lakan Bilem - Intu Lingau
- Peningkatan Jalan Sp. GBU – Besiq
- Peningkatan Jalan Engkuni Pasek – Benung



- Peningkatan Jalan Menuju TPA Belau
- AP Kegiatan DAK TA. 2019
- Sinkronisasi dan Koordinasi Kegiatan Bidang Bina Marga
- Lanjutan Peningkatan Jalan Gang Kanaan Ngenyan Asa
- Lanjutan Peningkatan Jalan SMKN 3 Ngenyan Asa
- Peningkatan Jalan Perkantoran II
- Peningkatan Jalan Tering Lama - Danau Behadaq
- Peningkatan Jalan Temula – Sentalar
- Peningkatan Jalan Dalam Kampung Resak (Trans Jambuk Makmur)
- Peningkatan Jalan Sembuan - Intu Lingau
- Peningkatan Jalan Dalam Kampung Tanjung Isuy
- Peningkatan Jalan RT.03 Kampung Sekolaq Oday (Tembusan Blok F Perumahan Kopri)
- Peningkatan Jalan Poros – Lotaq
- Lanjutan Peningkatan Jalan Mencecoretn Kelurahan Simpang Raya
- Lanjutan Peningkatan Jalan Poros - Muara Siram
- Lanjutan Peningkatan Jalan Poros - Siram Makmur Siram Jaya
- Lanjutan Peningkatan Jalan Tanjung Isuy - Tanjung Jaan - Pulau Lanting
- Lanjutan Peningkatan Jalan Perigiq - Muara Ohong - Tanjung Jone
- Peningkatan Jalan Poros - Tanjung Sari
- Peningkatan Jalan Poros Dalam Kampung Tanjung Isuy
- Lanjutan Peningkatan Jalan Muara Jawaq - Abit
- Lanjutan Peningkatan Jalan Dalam Kampung Juaq Asa
- Peningkatan Jalan Juhan - Awai – Muut
- Peningkatan Jalan Gang Moulding Ngeyan Asa
- Perencanaan Jalan Poros – Mendika
- Peningkatan Jalan Poros Tanjung Isuy - Mancong (DAK Fisik)
- Peningkatan Jalan Poros - Mendika (DAK Fisik)
- Pengawasan Peningkatan Jalan Poros Tanjung Isuy - Mancong (DAK Fisik)
- Pengawasan Peningkatan Jalan Poros - Mendika (DAK Fisik)
- Biaya Pengendalian (DAK Fisik)
- Peningkatan Jalan Rapak Oros
- Peningkatan Jalan Muso Binsalim - Simpang Kampung Asa
- Penguatan Database Jaringan Jalan/Survey (DAK Fisik)
- Lanjutan Peningkatan Jalan Poros - Kampung Dingin
- Lanjutan Peningkatan Jalan Poros - Peninggir
- Peningkatan Badan Jalan Danau Aco - Pajaai - Ataa
- Peningkatan Jalan Swalas Gunaq
- Peningkatan Jalan Poros Lingau - Lapangan Paralayang
- Peningkatan Jalan Tebisaq - Gunung Bayan - Muara Pahu- Penyinggahan
- Peningkatan Jalan Muhur - Sangsang - Kaliq - Tana Mea - Tebisaq
- Peningkatan Jalan Dalam Ibu Kota Kec. Penyinggahan (Bankeu Provinsi TA 2019)
- Peningkatan Jalan Dalam Ibu Kota Kec. Muara Pahu(Bankeu Provinsi TA 2019)
- Peningkatan Jalan Resak - Bukit Harapan-Sp. Pering Taliq-Lemper-Deraya---Gerunggung-Tanjung Soke (Bankeu Provinsi TA 2019)
- Peningkatan Jalan Kampung Tanjung Laong – Gunung Bayan Kecamatan Muara Pahu (Bankeu Provinsi TA 2019)
- Peningkatan Jalan SP. Estafet Gunung Es - Lakan Bilem (Bankeu



- Provinsi TA 2019)
- Peningkatan Jalan Petunak Ngenyan Asa (Bankeu Provinsi TA 2019)
 - Peningkatan Jalan Tering Lama Ulu - Long Iram (Bankeu Provinsi TA 2019)
 - Peningkatan Jalan Dalam Kampung Linggang Mencelew (Bankeu Provinsi TA 2019)
 - Peningkatan Jalan Poros Muara Asa – Encalin – Belaban - Muyub Ilir (Bankeu Provinsi TA 2019)
 - Peningkatan Jalan Poros Muyub Ilir - Muara Benangaq (Bankeu Provinsi TA 2019)
 - Peningkatan Jalan Poros Geleo Baru (Moboq) – Ngenyan Asa Kecamatan Barong Tongkok (Bankeu Provinsi TA 2019)
 - Peningkatan Jalan Kampung Juaq Asa – Linggang Amer (Bankeu Provinsi TA 2019)
 - Peningkatan Jalan Dalam Kampung Sekolaq Joleq Kecamatan Sekolaq Darat (Bankeu Provinsi TA 2019)
 - Peningkatan Badan Jalan Kampung Jerang Dayak Rt.01
 - Peningkatan Jalan Muhur - Bentas - Betung - Kiaq - Penawang - Kendesiq – Lendian
 - Peningkatan Jalan kampung Gunung Rampah Kecamatan Mook Manaar Bulatn
 - Peningkatan Jalan Poros (POM BENSIN) - Tanjung Isuy (Lanjutan DAK 2017) dan Pemeliharaan
 - Peningkatan Jalan Sp. Manis - Kenyanyan - Ponak - Rikong - Kiaq - Tendiq
 - Peningkatan Jalan Simpang Ketang Sungai Lakan
 - Peningkatan Jalan Damai Seberang - Muara Bomboy
 - Perencanaan Peningkatan Jalan Sp.Jerang Melayu - Jerang Dayak
 - Peningkatan Jalan Kampung Merayaq-Kelumpang
 - Peningkatan Jalan Poros – Penawai
 - Peningkatan Jalan Gang Senaik Kampung Sekolaq Joleq
 - Peningkatan Badan Jalan Simpang Batu Bura ke Mentit
 - Peningkatan Jalan Poros - Penawai - Muara Kedang
 - Peningkatan Jalan Pasar Perjuangan KEM Baru
 - Peningkatan Badan Jalan Kampung Delta (Jalan Tanjung Isuy-Mancong) ke Tanjung Jiwai
 - Penerapan Turap Kampung Banjarejo
 - Peningkatan Badan Jalan Sentalar – Temula
 - Perencanaan Jalan Dalam Kampung Jengan Danum-Benung-Engkuni
 - Perencanaan Peningkatan Jalan Ma. Tokong-Lumpat Dahuq
 - Perencanaan Peningkatan Jalan Poros-Gadur
 - Perencanaan Peningkatan Jalan Poros Juaq Asa-Wisata Air Hemaq Beniung
 - Pembangunan Parit Jalan Poros Dalam Dalam Kampung Muut
 - Perencanaan Peningkatan Jalan Saping-Pepas Eheng
 - Peningkatan Jalan Sakaq Tada-Muara Jawaq
 - Peningkatan Jalan Gang Tasbeh 3 dan 4 RT. 29 Kec. Melak (Bankeu Perubahan 2019)
 - Lanjutan Peningkatan Jalan dalam Kampung Linggang Mencelew Kec. Linggang Bigung (Bankeu Perubahan APBD 2019)
 - Peningkatan Jalan dalam Kampung Kelumpang RT. 005 Kec. Mook Manaar Bulatn (Bankeu Perubahan APBD 2019)



- Lanjutan Peningkatan Jalan Kampung Tanjung Laong-Gunung Bayan Kec. Ma. Pahu (Bankeu Perubahan APBD 2019)
- Lanjutan Peningkatan Jalan SP. Estapet Gunung Es - Lakan Bilem (Bankeu Perubahan APBD 2019)
- Perencanaan Jalan Dalam Kampung Jengan Danum
- Penyelidikan Tanah Kegiatan Usulan DAK
- Peningkatan Jalan Telasaak Kampung Melapeh Baru
- Peningkatan Jalan Pasar Gencarah Kampung Muara Asa

2. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan

- Pemeliharaan Jalan Poros – Asa
- Pemeliharaan Jalan Sendawar Raya
- Pemeliharaan Jalan Kabupaten
- Pemeliharaan Drainase Jalan Kabupaten
- Pemeliharaan Jembatan Ulin Sei. Asa (batas kampung pepas asa- ongko asa) kec.barong tongkok
- Pemeliharaan Jembatan Ulin Sungai Selabuq Ongko Asa
- Pemeliharaan Jalan Simpang Muara Tokong-Kampung Muara Tokong

3. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

- Pembangunan Jembatan Sei Siat
- Pembangunan Jembatan Sei Ohong Kampung Mancong
- Pembangunan Jalan Perjuangan Kampung Ngenyan Asa
- Pembangunan Jalan Lembo Empo Muka Kampung Asa
- Pembangunan Turap Kelauq
- Pembangunan Jalan Tembus SMA 7 Simpang Raya
- Pembangunan Drainase SP. Perkantoran
- Rehab Berat Jembatan Ulin Tanjung Isuy - Tanjung Jan
- Pembangunan Jembatan Aji Tullur Jejangkat
- Perkuatan Pondasi Pylon 2 Aji Tullur Jejangkat
- Lanjutan Pembangunan Drainase Jalan Damai Raya
- Lanjutan Penanganan Longsor Gunung Melengen
- Perencanaan Pembangunan Turap Jalan Poros Kampung
- Pembangunan Jalan Muara Pahu - Penyinggahan (Bankeu Provinsi TA 2019)
- Pembangunan Jalan Poros Kenyanyan - Ponak - Rikong - Kendesiq (Bankeu Provinsi TA 2019)
- Lanjutan Pembangunan Jalan Muyub Ilir - Jelmuq (Bankeu Provinsi TA 2019)
- Pembangunan Jalan Jelemuq – Kampung Tukul Kecamatan Tering (Bankeu Provinsi TA 2019)
- Pembangunan Jalan Sungai Mengkerant Kec. Linggang Bigung (Bankeu Provinsi TA 2019)
- Pembangunan Saluran Drainase Barong Tongkok
- Semenisasi Jalan Abit Muara Jawaq
- Pembangunan Jalan dari Sp. Ombau-JUaq Asa-Linggang Amer-Mencelew
- Lanjutan Semenisasi Belempung - Ngenyan Asa
- Semenisasi Menuju Lahan Polres Samping Hotel Sidodadi
- Pembangunan Jalan Mantuq 1,2,3 dan 4 RT 2 Simpang Raya
- Pembangunan Drainase Jalan Ki Hajar Dewantara RT. 28 Melak Ulu
- Pembangunan Badan Jalan Muara Benangaq – Muara Kalaq - Linggang Marimun
- Semenisasi Jalan Masuk ke Asrama Kodim 0912/KBR (Lay)
- Semenisasi Jalan Sembuan – Jontai



- Pembangunan Jalan Sembuan - Intu Lingau
- PENGAWASAN Pembuatan Darinas Beton Jalan Bangkang RT.04 Ponpes SAS Simpang Raya
- Peningkatan Jalan Kampung Sekolaq Oday
- PENGAWASAN Semenisasi Jalan Untung Suropati RT. 7 Kelurahan Barong Tongkok
- Pembangunan Box Culvert RT. 6 Ngenyan Asa
- Pembangunan Jalan poros - Kamp Tanjung Pagar Kec. Muara Pahu
- Pembangunan Jalan Awai - Jantur Dora
- Pembangunan Jalan Ujoh Halang Seberang - Keliwai
- Semenisasi Pelebaran Jalan Dalam Kampung Tukul Kecamatan Tering
- Pembangunan Jalan Semenisasi Geleo Asa- Muara Benangaq
- Pembangunan Parit Jalan RT. 12 Kelurahan Simpang Raya
- Pembangunan Drainase Ngenyan Asa - Belempung
- Peningkatan Jalan Pelabuhan Penyeberangan Manaar Bulatn-Jembatan Sungai Merah
- Peningkatan Jalan Gemuruh-Sakaq Lotoq
- Peningkatan Jalan Linggang Merimun
- Perencanaan Pembangunan Jembatan Melak Ulu
- Peningkatan Jalan Poros - Balok Asa
- Pemeliharaan Jalan Kabupaten
- Pengaspalan jalan Aji Tullur Jejangkat II
- Kekurangan Overlay Aspal dan Pelebaran jalan Serta Pembuatan Drainase Jalan Sp.Raya-Sekolaq -Sp PLTD jalan jembatan ATJ

4. Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

- Pemeliharaan Jalan Sendawar Raya
- Pemeliharaan dan Pengecetan Kastin Jalan dalam Lingkungan Perkantoran
- Pembersihan Kiri Kanan Jalan Simpang JB – Kampung Empakuq - Muara Bunyut
- Pembersihan Kiri Kanan Jalan Puncak Lomuq – Jengan Danum
- Pemeliharaan dan Pengecetan Kastin Jalan Sendawar Raya
- Pemeliharaan Jembatan Idan jalan Poros Sp. Mencimai - Dempar
- Rehab Berat Jembatan Kayu Ulin Menuju Kampung Muara Jawaq
- Rehab Berat Jembatan Kerayau Kampung Abit
- Rehab Berat Jembatan Kayu Ulin Nabah Dongan Kampung Empas
- Rehab Jembatan Ulin Kampung Muara Bunyut
- Pemeliharaan Jalan Kabupaten
- Pembersihan Kiri Kanan Jalan Danau Gab RT.04 Kampung Long Iram Kota Tering Lama
- Pembersihan Kiri dan Kanan Jalan Muhur - Tebisaq
- Pembersihan Kiri dan Kanan Jalan Simpang Mancong - Tanjung Isuy
- Pemeliharaan Jalan SP. Poros - Asa - Juaq Asa
- Pemeliharaan Jalan Geleo Asa - Ombau Asa
- Pemeliharaan Jembatan Ulin Sei Suwo Kecamatan Jempang Kampung Tanjung Isuy
- Pemeliharaan Jalan Jembatan Sungai Merah-Sp. Karangan
- Rehab Jembatan Sungai Kelepapak dalam Kampung Bentas
- Pemeliharaan Jalan Poros Tering-Jelemuq
- Penebasan bahu jalan sp.melalan-kampung bohoq-kampung geleo asa
- Pemeliharaan Drainase Melak Ulu.Rt.23
- Pemeliharaan bahu jalan Sp.PERUM KORPRI-Sekolaq Oday-Sp.Mentiwan



- Penebasan kiri-kanan Jalan Poros-kampung asa-juaq asa-pepas asa
- Pemeliharaan Jembatan Kayu Ulin Sei.Asa Kampung Juaq Asa
- Penebasan kiri-kanan jalan Simpang Engkuni-Kampung Eheng
- Perencanaan pemeliharaan jalan Sumber sari-Belempung-Sp.Puskesmas Melak
- Perencanaan pemeliharaan jalan melak ilir-empakuq-muara bunyut
- Penebasan Bahu Jalan Sei. Merah - Sp. 3 Karang - Gunung Rampah - Jengan – Kelumpang
- Rehab Jembatan Ulin Kampung Sekolaq Oday
- Pembersihan Bahu Jalan Kelubaq - Purworejo
- Pembersihan Bahu Jalan Jengan Danum - Engkuni Pasek
- Pembersihan Bahu Jalan Poros Tanjung Isuy - SP. Pom Bensin
- Pemeliharaan Jalan Kelubaq – Purworejo
- Pemeliharaan Jalan Sp.Gruti-Pelabuhan Gruti
- Pembersihan Bahu Jalan Sp. Dempar - Kampung Sembuan

Sasaran 2 : Meningkatnya Infrastruktur Dasar di Wilayah Kutai Barat.

Untuk mewujudkan sasaran 2, telah diimplementasikan ke dalam program Perencanaan Tata Ruang yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Barat

1. Perbandingan Target dan Realisasi serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun sebelumnya.

Untuk menilai keberhasilan/kegagalan sasaran 2 menggunakan 1 indikator dengan tingkat keberhasilan **106,50 %** dengan kategori **"SANGAT BERHASIL (SB)"**. Pencapaian target kinerja sasaran 2 seperti tampak pada tabel :

Tabel 3.11
Persentase keberhasilan/kegagalan Sasaran 2

| Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2018 | | Capaian Tahun 2018 | Tahun 2019 | | Capaian Tahun 2019 | |
|---------------------------|--------|------------|-----------|--------------------|------------|-----------|--------------------|----------|
| | | Target | Realisasi | | Target | Realisasi | % | Kategori |
| Cakupan Layanan Air Minum | % | 47,60 | 56,92 | 119,57 | 64,60 | 68,80 | 106,50 | (SB) |
| Tingkat Keberhasilan | | | | 119,57 | | | 106,50 | (SB) |

Berdasarkan Data diatas Persentase Keberhasilan/Kegagalan Sasaran **"Meningkatnya Infrastruktur Dasar di Wilayah Kutai Barat"** di tahun 2019 adalah 106,50%. Capaian tersebut didapat dari target Cakupan Layanan Air Minum di tahun 2019 ini yakni sebesar 64,60% terealisasi dengan sangat baik yakni sebesar



68,80%. Dari jumlah penduduk Kabupaten Kutai Barat yakni 164.048 jiwa, jumlah penduduk yang terlayani fasilitas instruktur air minum sebesar 112.878 jiwa dan akan terus bertambah di tahun-tahun selanjutnya.

Berikut adalah Data Jumlah Penduduk yang terlayani Fasilitas Instruktur Air Minum Kabupaten Kutai Barat tahun 2019 dalam bentuk tabel dibawah ini :

Tabel 3.12
Jumlah Penduduk Yang Terlayani Fasilitas Instruktur Air Minum
di Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019

| No | Nama Unit Infrastruktur | Wilayah Cakupan Layanan | Jlh Penduduk Terfasilitasi | Ket |
|--|-------------------------|---------------------------|----------------------------|-----|
| 1 | WTP 1 (Kota Sendawar) | Kecamatan Barong Tongkok | 31.050 | |
| | | Kecamatan Sekolaq Darat | 10.179 | |
| | | Kecamatan Melak | 14.751 | |
| 2 | WTP 2 | Kecamatan Tering | 10.583 | |
| | | Kecamatan Linggang Bigung | 15.695 | |
| 3 | WTP Damai | Kecamatan Damai | 10.418 | |
| 4 | WTP Muara Pahu | Kecamatan Muara Pahu | 8.386 | |
| 5 | WTP Penyinggahan | Kecamatan Penyinggahan | 3.819 | |
| 6 | WTP Tanjung Isuy | Kampung Tanjung Isuy | 2.537 | |
| 7 | WTP Muara Nayan | Kampung Muara Nayan | 269 | |
| 8 | WTP Muara Kedang | Kampung Muara Kedang | 1.600 | |
| 9 | WTP Jambuk | Kampung Jambuk | 2.175 | |
| 10 | WTP Muara Jawaq | Kampung Muara Jawaq | 1.416 | |
| Jumlah | | | 112.878 | |
| Total Penduduk Se-Kabupaten Kutai Barat | | | 164.048 | |
| Persentase | | | 68,80% | |

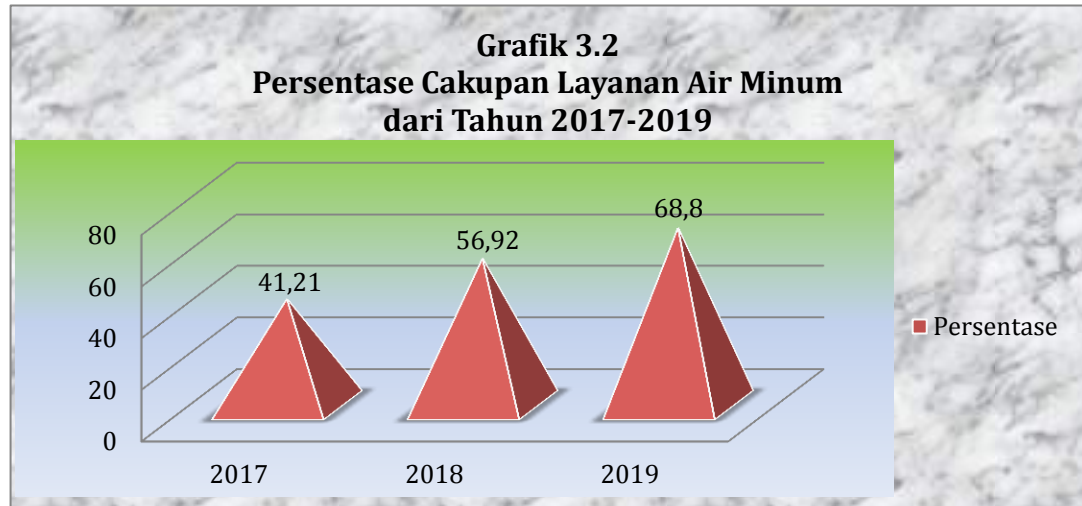
2. Perbandingan Target dan Realisasi serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Beberapa Tahun sebelumnya.

Untuk Persentase Cakupan Layanan Air Minum dari tahun 2017 s/d 2019 dapat dirincikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.13
Persentase Cakupan Layanan Air Minum
Dari Tahun 2017-2019

| Indikator | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------------------|-------|-------|-------|
| Cakupan Layanan Air Minum | 41,21 | 56,92 | 68,80 |

Berikut ini grafik Persentase Cakupan Layanan Air Minum adalah sebagai berikut :



Dari data pada tabel dan grafik diatas terlihat dari tahun ke tahun kebutuhan penduduk untuk layanan air minum ini terus meningkat mengingat karena air minum merupakan kebutuhan dasar manusia yang mutlak harus di penuhi, karena jika tidak akan mengganggu kelangsungan hidup manusia. Penyediaan air minum di kabupaten Kutai Barat di bedakan atas sistem perpipaan dan non perpipaan (sumur). Penyediaan air bersih dengan perpipaan di kelola oleh PDAM Kabupaten Kutai Barat.

Berikut ini adalah tabel Rekapitulasi Laporan Produksi, Distribusi, Air Terjual, Jumlah Pelanggan dan Kebocoran PDAM Tirta Sendawar Kabupaten Kutai Barat tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 3.14

| No | Unit Kerja | Jumlah Air | | Jumlah | | Kehilangan Air | Kebocoran % |
|---------------|----------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|--------------|
| | | Produksi | Distribusi | Pelanggan | Air Terjual | | |
| 1 | Kota Sendawar (WTP I) | 3.763.584 | 3.010.867 | 6.993 | 1.951.563 | 1.059.304 | 35,18 |
| 2 | Tering & L. Bigung (WTPII) | 262.080 | 209.664 | 889 | 142.057 | 67.607 | 32,25 |
| 3 | Long Iram | 85.374 | 71.524 | 373 | 67.337 | 4.187 | 5,85 |
| 4 | Damai | 34.819 | 30.178 | 177 | 28.024 | 2.154 | 7,14 |
| 5 | Muara Pahu | 119.873 | 104.506 | 1.074 | 96.719 | 7.787 | 7,45 |
| 6 | Penyinggahan | 56.225 | 47.628 | 467 | 44.617 | 3.065 | 6,43 |
| 7 | Tanjung Isuy | 25.219 | 24.064 | 306 | 22.763 | 1.301 | 5,41 |
| 8 | Muara Nayan | 87.156 | 73.024 | 603 | 65.084 | 7.940 | 10,87 |
| 9 | Muara Kedang | 51.667 | 42.166 | 222 | 36.359 | 5.907 | 14,01 |
| 10 | Jambuk | 175.000 | 162.553 | 489 | 154.755 | 7.798 | 4,80 |
| 11 | Muara Jawaq | 18.378 | 16.465 | 135 | 15.156 | 1.309 | 7,95 |
| 12 | Muara Lawa | 720 | 713 | 15 | 168 | 545 | 76,43 |
| Jumlah | | 4.680.095 | 3.793.405 | 11.743 | 2.624.502 | 1.168.903 | 30,81 |



3. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan target Kinerja Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen RPJMD/RENSTRA.

Dengan target akhir yang di tetapkan dalam RPJMD 2016 -2021 yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.15
Realisasi Kinerja Sasaran 2 Di Bandingkan Target Akhir RPJMD

| Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi Kinerja s/d Tahun 2019 | Target Akhir RPJMD | Persentase Capaian Kinerja (%) |
|---------------------------|--------|----------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| Cakupan Layanan Air Minum | % | 68,80 | 80,60 | 85,35 |
| Jumlah | | | | 85,35 |

Berdasarkan sasaran " **Meningkatnya Infrastruktur Dasar di Wilayah Kutai Barat**" dapat disimpulkan bahwa Realisasi dari Indikator Cakupan Layanan Air Minum Kabupaten Kutai Barat tahun 2019 ini adalah **68,80%** dari Target Akhir RPJMD adalah **80,60%** dengan persentase capaian kinerja sampai dengan sekarang ini yakni sebesar **85,35%**. Untuk itu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang akan terus meningkatkan kinerja yang baik khususnya untuk sasaran Meningkatkan Infrastruktur Dasar di Wilayah Kabupaten Kutai Barat untuk memenuhi target yang sudah ditetapkan di akhir target RPJMD.

Analisis Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan Sasaran " **Meningkatnya Infrastruktur Dasar di Wilayah Kutai Barat**", dengan Indikator Cakupan Layanan Air Minum yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Menggunakan 2 Program dan 22 Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.16

| No | Program / Kegiatan |
|-----------|---|
| 1. | Program Prasarana Pengembangan Wilayah |
| | - Update Jaringan Jalan |
| | - Monitoring Sarana dan Prasarana Pembangunan Pengembangan Wilayah |
| | - Fasilitasi Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) Kabupaten Kutai Barat |
| | - Koordinasi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Barat |
| | - Updating Topomoni Unsur Buatan |
| | - Fasilitasi Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat |
| | - Updating Buku Rencana Pembangunan Daerah Investasi jangka Menengah (RPIJM) |



| | |
|-----------|---|
| | - Sinkronisasi dan Koordinasi Bidang infrastruktur dan Wilayah |
| | - Pendampingan Penyusunan rencana induk SPAM Kabupaten Kutai BARAT |
| | - Fasilitasi kegiatan pokja PKP |
| | - Monitoring CSR Pembangunan Prasarana dan sarana bidang cipta karya multi pihak |
| | - Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Rencana Induk SPAM Kabupaten Kutai Barat |
| 2. | Program Bangunan dan Lingkungan (PBL) |
| | - Pengadaan dan Pemasangan Pompa Intake di Kampung Besiq |
| | - Optimalisasi SPAM Sederhana di Kecamatan Bentian Besar (Pendampingan CSR) |
| | - Pengadaan & Pemasangan pipa distribusi dan Penambahan daya Booster 1 dan 2 di Kecamatan Barong Tongkok (Bankeu Provinsi TA 2019) |
| | - Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Muara Pahu untuk Desa Tanjung Laong-Desa Sebelang Kecamatan Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat (DAK Reguler) |
| | - Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Tanjung Isuy untuk Desa Tanjung Isuy Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat (DAK Reguler) |
| | - Penyusunan DED Jaringan Pipa Mencimai-Keay-Jengan Danum |
| | - Perencanaan DED Jaringan Pipa Balok Asa-Juhan Asa |
| | - Penyusunan DED P/P Pipa HDPE dia 150-90 mm Kecamatan Jempang |
| | - Penyusunan DED Optimalisasi SPAM IKK Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat |
| | - Penyusunan DED Optimalisasi SPAM IKK Siluq Ngurai, Kabupaten Kutai Barat |

Sasaran 3 : Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat.

Penyediaan akses pendidikan yang layak dan berkualitas bagi seluruh masyarakat di Kutai Barat merupakan suatu upaya yang menjadi perhatian serius bagi pemerintah Kabupaten Kutai Barat mengingat kondisi wilayah yang luas dan terpencar-pencar menjadi faktor penghambat dalam mewujudkan sasaran ini. Secara teknis kinerja sasaran ini diemban oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal kemudahan akses menuju fasilitas pendidikan berupa penyediaan sarana prasarana jalan yang memadai sehingga memudahkan murid untuk menuntut ilmu. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran ini, ditetapkan saya indikator yang dianggap relevan yaitu Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah yang merupakan indeks pendidikan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

1. Perbandingan Target dan Realisasi serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun sebelumnya.



Untuk menilai keberhasilan/kegagalan sasaran 3 menggunakan 2 indikator kinerja dengan tingkat keberhasilan sebesar **92,86 %** dengan kategori **"SANGAT BERHASIL (SB)"**. Pencapaian target kinerja sasaran 3 seperti tampak pada tabel sebagai Berikut :

Tabel 3.17
Persentase keberhasilan/kegagalan Sasaran 3

| Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2018 | | Capaian Tahun 2018 | Tahun 2019 | | Capaian Tahun 2019 | |
|-----------------------------|--------|------------|-----------|--------------------|------------|-----------|--------------------|-------------|
| | | Target | Realisasi | | Target | Realisasi | % | Kategori |
| Rata-Rata Lama Sekolah | tahun | 8,30 | 8,07 | 97,22 | 8,8 | 8,34 | 94,77 | (SB) |
| Angka Harapan Lama Sekolah | tahun | 13,72 | 12,88 | 93,87 | 14,17 | 12,89 | 90,96 | (SB) |
| Tingkat Keberhasilan | | | | | | | 92,86 | (SB) |

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa capaian target indikator kinerja Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2019 tercapai 94,77%. Hasil ini didapat dari target rata-rata lama sekolah yang sudah ditetapkan sebesar 8,8 tahun dengan realisasi mencapai 8,34 tahun dan untuk indikator angka harapan lama sekolah dari target 14,17 tahun terealisasi yakni 12,89 tahun dengan persentase capaian sebesar 90,96%. Dibandingkan dengan tahun 2018, ditahun sekarang ini terjadi peningkatan dari kedua indikator yang menunjang sasaran Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat.

Rata-rata Lama Sekolah menjadi dimensi variabel yang digunakan dalam mengukur Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berdasarkan realease dari BPS Kutai Barat, rata-rata lama sekolah di Kutai Barat tahun 2019 mencapai 8,34 tahun, sedangkan Angka Harapan Lama Sekolah di tahun 2019 mencapai 12,89 tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa penduduk di Kutai Barat telah mengenyam pendidikan hingga jenjang pendidikan SMA.

Indikator ini juga menggambarkan bahwa masyarakat di Kutai Barat tidak lagi mengalami kesulitan untuk meneruskan pendidikan sembilan tahun sebagai program wajib belajar. Faktor pendukung yang mempengaruhi karena oleh tingginya kesadaran masyarakat untuk mengikuti WAJAR DIKDAS dan tingginya perhatian Pemerintah Kutai Barat dalam memberikan layanan akses pendidikan dimana saat ini hampir di setiap Kampung telah memiliki Sekolah Dasar dan semua Kecamatan telah dibangun SMP dan SMA/SMK.



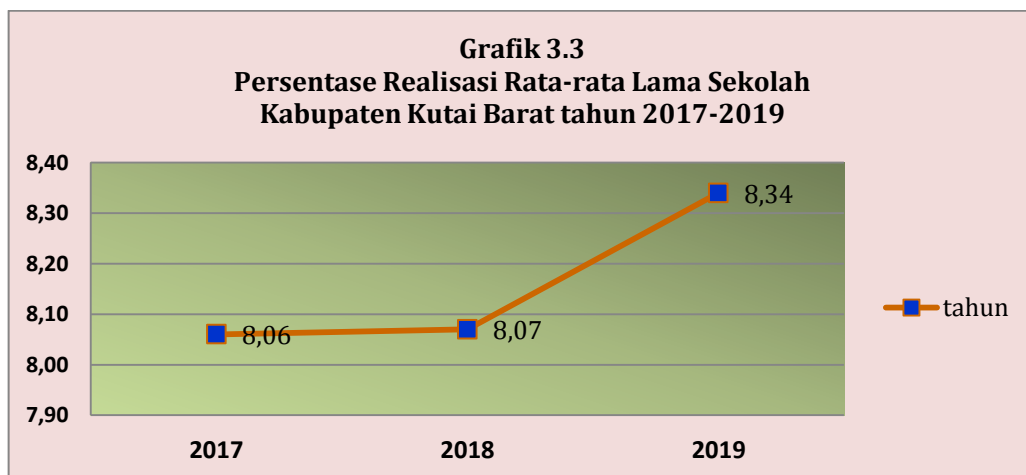
2. Perbandingan Persentase Realisasi Kinerja tahun ini dengan beberapa tahun sebelumnya.

Berikut ini adalah Rincian Persentase Realisasi Rata-rata Lama Sekolah di Wilayah Kabupaten Kutai Barat dari tahun 2017 s/d 2019 pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 3.18
Persentase Realisasi Rata-rata Lama Sekolah
di Wilayah Kabupaten Kutai Barat
Tahun 2017-2019

| Item | Tahun | | | Keterangan |
|--------------------------------|-------|------|------|------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | |
| Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) | 8,06 | 8,07 | 8,34 | |

Selama 3 tahun terakhir tercatat bahwa Rata-Rata Lama Sekolah di Kutai Barat terus memperlihatkan peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2017 rata-rata lama sekolah yakni 8,06 tahun, mengalami kenaikan sebesar 0,01 tahun pada tahun 2018 menjadi 8,07 tahun serta ditahun 2019 ini naik 0,27 tahun dari 8,07 tahun menjadi 8,34 tahun. Untuk gambaran yang lebih jelas disajikan dalam grafik berikut ini.



Sumber Data : BPS Kabupaten Kutai Barat tahun 2019

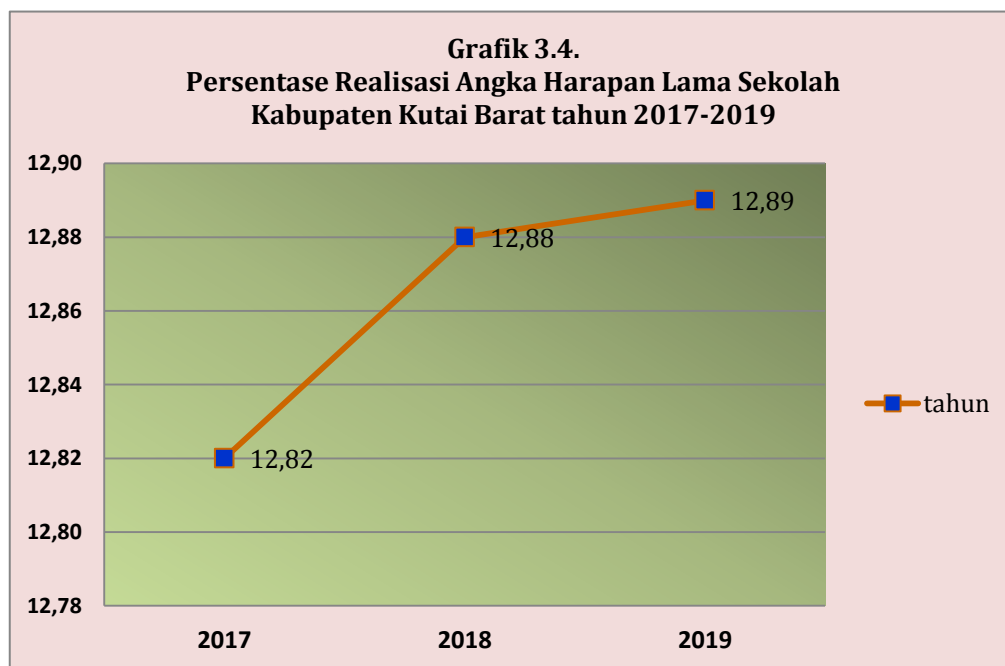
Berikut ini adalah Rincian Persentase Realisasi Angka Harapan Lama Sekolah di Wilayah Kabupaten Kutai Barat dari tahun 2017 s/d 2019 pada tabel sebagai berikut :



Tabel. 3.19
Persentase Realisasi Angka Harapan Lama Sekolah
di Wilayah Kabupaten Kutai Barat
Tahun 2017-2019

| Item | Tahun | | | Keterangan |
|------------------------------------|-------|-------|-------|------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | |
| Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun) | 12,82 | 12,88 | 12,89 | |

Untuk indikator kedua Selama 3 tahun terakhir tercatat bahwa Angka Harapan Lama Sekolah di Kutai Barat meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2017 harapan lama sekolah yakni 12,82 tahun, mengalami kenaikan sebesar 0,06 tahun pada tahun 2018 menjadi 12,88 tahun serta ditahun 2019 ini naik 0,01 tahun menjadi 12,89 tahun. Untuk gambaran yang lebih jelas disajikan dalam grafik berikut ini :



Sumber Data : BPS Kabupaten Kutai Barat tahun 2019

3. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan target Kinerja Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen RPJMD/RENSTRA.

Tingkat capaian indikator kinerja sasaran 3 sampai tahun 2019 terhadap target kinerja akhir RPJMD tahun 2016 - 2021 ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:



Tabel 3.20
Realisasi Kinerja Sasaran 3 Dibandingkan Target Akhir RPJMD

| Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi Kinerja s/d Tahun 2019 | Target Akhir RPJMD | Persentase Capaian Kinerja (%) |
|----------------------------|--------|----------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| Rata-Rata Lama Sekolah | tahun | 8,34 | 9,2 | 90,65 |
| Angka Harapan Lama Sekolah | tahun | 12,89 | 15,07 | 85,53 |
| Jumlah | | | | 88,09 |

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi akumulasi sampai dengan tahun 2019 dibandingkan dengan rencana akhir RPJMD pada tahun 2021 menunjukkan bahwa indikator Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran 3 berada pada jalur pencapaian yang baik yakni mencapai **88,09%**. Upaya pencapaian target dimaksud, akan didorong melalui optimalisasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan terutama pada program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang dianggap paling berkontribusi dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran 3. Selain itu perbaikan akses transportasi menuju lokasi sekolah terutama pada daerah-daerah terpencil.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional.

Berikut ini adalah Perbandingan Realisasi Kinerja dari Sasaran "**Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat**" terkait Indikator Rata-Rata Lama Sekolah dan Indikator Angka Harapan Lama Sekolah dengan Standar Nasional pada tabel dibawah :

Tabel 3.21

| Indikator Kinerja | Realisasi Kinerja s/d Tahun 2019 Kabupaten Kutai Barat | Realisasi Kinerja Standar Nasional | Ket |
|------------------------------------|--|------------------------------------|-----|
| Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) | 8,34 | 8,52 (Susenas,2018) | |
| Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun) | 12,89 | 12,92 (Susenas,2018) | |



Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran

- a. Program Pendidikan Gratis melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi SD/MI dan SMP/MTs, Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) bagi SMA/SMK dan Biaya Pembinaan Pendidikan Daerah (BPPD) untuk jenjang pendidikan TK s/d SMA/MA/SMK
- b. Kerjasama dengan beberapa lembaga pendidikan tinggi seperti Universitas Mulawarman, Universitas Sanata Darma, Universitas Atma Jaya dan Universitas Terbuka dalam peningkatan mutu dan kualifikasi tenaga kependidikan
- c. Tersedianya Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan dalam rangka pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan
- d. Penerapan dalam pengelolaan sekolah dengan pendekatan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (MPMBS)
- e. Penyelenggaraan akreditasi bagi semua jenjang pendidikan
- f. Pelatihan dan Bimbingan Teknis bagi tenaga pendidik pada semua jenjang pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga pendidik
- g. Pemerataan akses pendidikan yang sudah menjangkau daerah-daerah terpencil
- h. Sarana dan prasarana sekolah yang semakin membaik, menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang lebih efektif.

Hambatan dalam pencapaian sasaran

- a. Masih banyak guru di Kabupaten Kutai Barat yang belum berpendidikan S-1.
- b. Database pendidikan belum tersusun dengan baik sehingga menyulitkan dalam merencanakan program kegiatan di bidang pendidikan.
- c. Dalam jenjang pendidikan SMP sederajat dan SMA sederajat pada Kecamatan yang berada jauh dari ibukota Kabupaten masih kekurangan tenaga guru bidang studi Eksakta seperti Matematika, Fisika, Kimia dan Bahasa Inggris.

Strategi pemecahan masalah

- a. Memberikan akses pendidikan gratis kepada guru untuk memenuhi kualifikasi pendidikan S1/D-IV melalui kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi
- b. Mengefektifkan kegiatan pemutakhiran database pendidikan dengan sepenuhnya melibatkan pihak sekolah sebagai sumber penyedia data serta penerapan Konsep Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (SIMDIK) dan Sistem Informasi Aplikasi Pendidikan (SIAP)
- c. Rekrutmen guru untuk ditempatkan pada sekolah-sekolah yang belum



memiliki guru bidang studi Exact dan Bahasa Inggris.

Analisis Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan Sasaran **"Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat"**, yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan & Kebudayaan Menggunakan 3 Program dan 122 Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.22

| No | Program / Kegiatan |
|-----------|--|
| 1. | Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |
| | - Monitoring dan Evaluasi Kegiatan PAUD |
| | - Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK NON FISIK) |
| | - Koordinasi dan Konsultasi PAUD ke Pusat dan Provinsi |
| | - Tamu Wicara Anak Usia Dini dan Penyelenggaraan Pawal PAUD dalam Rangka Hari Anak Nasional |
| | - Akreditasi Lembaga PAUD |
| | - Timbunan TK Tredes Terpadu |
| | - Pelatihan dan Penguatan Lembaga PAUD |
| | - Pelatihan Pengembangan Keprofesian TK/PAUD |
| | - Pembangunan Gedung TK |
| | - Sosialisasi Penyeragaman Ijasah Kelulusan PAUD |
| | - Pembentukan Pengurus Tingkat Kecamatan HIMPAUDI |
| | - Pelatihan PCP Tingkat Dasar, Lanjut, Mahir |
| | - Gebyar PAUD |
| | - Peringatan Hari Anak Nasional |
| | - Pelatihan Kurikulum K13 |
| | - AP Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK NON FISIK) |
| | - Pembangunan Gedung / RKB TK / PAUD |
| | - Rehabilitasi gedung TK/PAUD |
| | - Pengadaan Meubelair TK/PAUD |
| | - Pengadaan Alat Peraga/sarana bermain TK/PAUD |
| | - Pembuatan Pagar TK/PAUD |
| | - Pelatihan Berjenjang Tingkat Lanjut / Mahir untuk Guru / Tutor PAUD Pelatihan Guru / Tutor PAUD |
| | - Peringatan HUT Himpaudi |
| | - Lanjutan Pembangunan Pagar TK Pembina Kabupaten |
| 2. | Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun |
| | - Monitoring dan Evaluasi Ujian Sekolah (US) Jenjang SD / MI |
| | - Penyelenggaraan Akreditasi SD / SMP |
| | - Sosialisasi Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Nasional SD / SMP |
| | - Monitoring dan Evaluasi Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) SD / SMP |
| | - Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat SMP / MTs |
| | - Monitoring dan Evaluasi US dan UN Jenjang SMP / MTs |



| | |
|---|---|
| - | Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Jenjang SMP / MTs |
| - | Peningkatan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara |
| - | RAKOR Pra Pelaksanaan Ujian Sekolah Jenjang SD / MI dan UN SMP / MTs Tapel. 2018/2019 |
| - | Pengadaan Meubelair Tingkat SD dan SMP |
| - | Pengembangan SD Pembina Tingkat Kecamatan |
| - | Pengembangan Kurikulum 2013 Jenjang SMP/MTS |
| - | Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan SMP |
| - | Sosialisasi dan Pendataan Program Indonesia Pintar (PIP) SD dan SMP |
| - | Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Jenjang SD / Mi |
| - | Peninggian Tongkat Gedung Sekolah SD dan SMP |
| - | Pembangunan Rumah Dinas Guru SD dan SMP |
| - | Workshop Penyusunan RAPBS Jenjang SD dan SMP |
| - | Pengadaan Seragam Anak Sekolah |
| - | Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sarana Prasana Pendidikan |
| - | Monitoring dan Supervisi Pengawas TK/SD |
| - | Sosialisasi Pelaksanaan dan Pengadaan Perlengkapan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Jenjang SMP/Mts |
| - | Peningkatan keahlian entri data US Operator Kabupaten dan Operator Staf Kecamatan Jenjang SD/MI |
| - | Pelaksanaan Ujian Sekolah Penyusunan dan Pengadaan Soal US SD/MI Tapel 2018/2019 |
| - | Rapat dan Koordinasi MKKS, KKKS dan KKPS |
| - | Koordinasi Pelaksanaan Ujian Sekolah, Kurikulum dan BOSNAS |
| - | Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013 Jenjang SD/MI |
| - | Peningkatan Keahlian Entri Data US dan UN Operator Kabupaten dan Operator Staf Kecamatan Jenjang SMP/MTs |
| - | Pelaksanaan Ujian Sekolah, Penyusunan dan Pengadaan Soal US SMP/MTs Tapel 2018/2019 |
| - | Lomba Sekolah Sehat Tingkat SD dan SMP se Kabupaten Kutai Barat |
| - | Pengadaan Perlengkapan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Jenjang SMP/MTs |
| - | Pembangunan Ruang Kelas Baru SD dan SMP |
| - | Pemagaran SD dan SMP / Asrama |
| - | Pembangunandan WC Murid dan WC Guru SD dan SMP |
| - | Pembangunan Asrama Belajar |
| - | Biaya Pembinaan Pendidikan Daerah (BPPD) |
| - | Pengelolaan, Pengendalian dan Monitoring Biaya Pembinaan Pendidikan Daerah (AP BPPD) |
| - | Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPK 2 WR. Soepratman Barong Tongkok |
| - | Pembangunan pagar SMA Negeri I Long Iram |
| - | Pembangunan Gedung Aula SDN 001 Barong Tongkok |
| - | DAK PENDIDIKAN SD/SLB (Fisik) |
| - | DAK PENDIDIKAN SMP (Fisik) |
| - | Pengadaan Blanko SHUS Jenjang SD/MI |



| | |
|-----------|--|
| | - AP DAK Pendidikan SD dan SMP |
| | - AP Data Pokok Pendidikan (Dapodikdasmen) |
| | - Pemutahiran dan Sinkronisasi Data Sarana Prasana Pendidikan Tingkat SD dan SMP |
| | - Gala Siswa Indonesia (GSI) Jenjang SMP |
| | - Bimtek Pramuka Saka Widya Budaya Bakti |
| | - Monitoring dan Evaluasi PIP Jenjang SD dan SMP |
| | - Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan Kabupaten |
| | - Pelaksanaan Kurikulum Berlalu Lintas |
| | - Pelaksanaan Hari Pendidikan Nasional (HARDIKNAS) |
| | - Lanjutan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SD dan SMP |
| | - Pembangunan Kantor Kepala Sekolah dan Ruang Guru SD dan SMP |
| | - Rehabilitasi Rumah Dinas Guru SD dan SMP |
| | - Pembangunan Gedung Aula Sekolah Tingkat SD dan SMP |
| | - Pengadaan Buku Paket & Buku Pelajaran/Perpustakaan/Ilmu Pengetahuan Umum |
| | - Semenisasi/Penimbunan Lapangan/Turap/Halaman Bermain/Tempat Apel Tingkat SD dan SMP |
| | - Pembangunan Laboratorium Tingkat SMP |
| | - Pengadaan Laptop Untuk Staf Tata Usaha Sekolah, Admin Sekolah, Operator Sekolah dan Guru Kelas |
| | - Pembuatan Surat Ukur Tanah dan Sertifikat Tanah Sekolah SD dan SMP |
| | - Pengelolaan Back Bone DAPODIK |
| | - Rekonsiliasi BOSNAS SD/SMP |
| | - Pembangunan Pagar Sekolah SMPN 5 dan SMAN 2 Linggang Bigung |
| | - Pembangunan Sekolah Madrasah Iptidiah (MI) |
| | - Penambahan Ruang Pelajar SMPN 1 Kec. Long Iram |
| | - Penyelenggaraan sarana Pendidikan Madin Mombatul Ulum di Kampung Bangunsari |
| | - Pemeliharaan Asrama Pelajar di Samarinda dan Kota-kota lainnya |
| | - Penyediaan Jasa Transport/Ketinting Pelajar Kampung Tukul Kec. Tering |
| | - Rehab Gedung Sekolah SDN 012 Mook Manaar Bulatn |
| | - Pemeliharaan Asrama Pelajar Kampung Jambuk Makmur |
| | - Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Jenjang SD/MI |
| | - Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) Jenjang SMP dan Olimpiade Sains Nasional Jenjang SMP |
| | - Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Jenjang SD dan Olimpiade Sains Nasional Jenjang SD |
| | - BOSNAS |
| | - DAK PENDIDIKAN SKB (Fisik) |
| | - Pembangunan Gedung Baru SDN. 008 Dingin Kecamatan Muara Lawa |
| | - Pengadaan Meubelair SMP Advent Sendawar |
| 3. | Program Pendidikan Non Formal |
| | - Operasional Mobil Pintar |
| | - Supervisi Penilik PNF dan Kegiatan TLD |
| | - Supervisi Penilik PNF |



| |
|---|
| - Sosialisasi dan Publikasi Pendidikan Non Formal |
| - Akreditasi Lembaga PKBM Pendidikan Non Formal |
| - Pemilihan Pengelolaan UKS,TK,SD,SMP,SMA/SMK |
| - Visitasi dan Verifikasi Lembaga PKMB |
| - Monitoring dan Evaluasi Kegiatan PKBM dan LKP |
| - Konsultasi dan Koordinasi Kegiatan PNF |
| - Pelatihan Pengelolaan UKS PAUD |
| - Pendidikan Kecakapan Hidup (Kursus Menumpar dan Menganyam |
| - Pelatihan Pengelola UKS Terbaik Tingkat Kabupaten |
| - Akreditasi Lembaga LKP Pendidikan Non Formal |
| - Pelatihan Pengelola PKBM Pendidikan Non Formal |
| - Pelatihan Pengelola LKP Pendidikan Non Formal |
| - Pendataan Tenaga Lapangan Dikmas (TLD) |
| - Pengadaan Komputer PKBM Swalas Guna |
| - Pembangunan Gedung PKBM Swalas Guna |
| - Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B, dan C) |
| - Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (DAK Non Fisik) |

Sasaran 4 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

Dalam menilai derajat kesehatan masyarakat terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan. Indikator-indikator tersebut pada umumnya tercermin dalam kondisi angka kematian, angka kesakitan dan status gizi. Selain itu derajat kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor tersebut tidak hanya berasal dari sektor kesehatan seperti pelayanan kesehatan dan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, melainkan juga dipengaruhi faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan sosial, keturunan, pembangunan infrastruktur dan faktor lainnya.

1. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu.

Untuk menilai keberhasilan/kegagalan sasaran 4 menggunakan 1 indikator kinerja dengan tingkat keberhasilan sebesar **98,89 %** dengan kategori "**SANGAT BERHASIL (SB)**". Pencapaian target kinerja sasaran 4 seperti tampak pada tabel 3.15.

Tabel 3.23
Persentase Keberhasilan/Kegagalan Sasaran 4

| Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2018 | | Capaian Tahun 2018 | Tahun 2019 | | Capaian Tahun 2019 | |
|-----------------------------|--------|------------|-----------|--------------------|------------|-----------|--------------------|-------------|
| | | Target | Realisasi | | Target | Realisasi | % | Kategori |
| Angka Harapan Hidup | tahun | 73,5 | 72,57 | 98,73 | 73,6 | 72,79 | 98,89 | (SB) |
| Tingkat Keberhasilan | | | | | | | 98,89 | (SB) |



Berdasarkan tabel diatas Angka Usia Harapan Hidup ditahun 2019 yakni 72,79 tahun atau 98,89 % terjadi peningkatan 0,22 tahun atau 0,16 % jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang hanya mencapai 72,57 tahun atau 98,73 %.

Puskesmas sebagai unit terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat maupun perorangan telah tersedia disemua Kecamatan. Sehubungan dengan hal tersebut puskesmas diharapkan mampu melakukan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif tingkat dasar bagi usia lanjut. Pelayanan kesehatan lanjut usia di puskesmas harus dilakukan secara profesional dan berkualitas, paripurna, terpadu dan terintegritas dengan memperhatikan aspek geriatri pada Lanjut Usia.

Dari tabel 3.15 tersebut terlihat bahwa pada sasaran 4 yaitu **Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat** dengan menggunakan 1 indikator dengan capaian Sangat Berhasil. Adapun indikator-indikator yang diukur di atas dalam mendukung pencapaian sasaran 4 di Kabupaten Kutai Barat tahun 2019 secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Usia Harapan Hidup

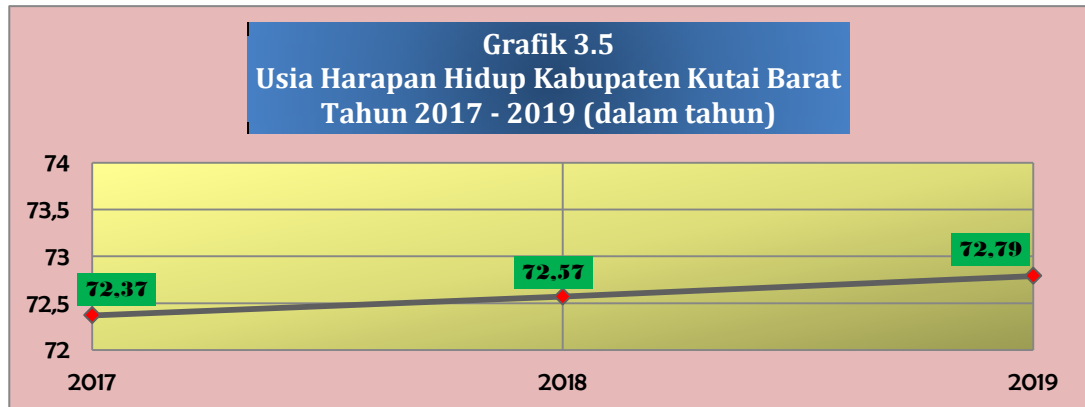
Capaian Usia Harapan Hidup masyarakat di Kutai Barat pada tahun 2019 sebesar 72,79 tahun atau belum mencapai dari target 73,6 tahun sehingga pencapaian realisasi indikator ini sebesar 98,89%. Selama kurun waktu beberapa tahun terakhir Usia Harapan Hidup masyarakat selalu naik seiring dengan peningkatan IPM di Kutai Barat. Hal ini mengindikasikan terus membaiknya kualitas pembangunan manusia di Kutai Barat sebagai pengaruh positif terhadap kebijakan Pemerintah di Kutai Barat salah satunya dalam hal peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Perkembangan Usia Harapan Hidup Kabupaten Kutai Barat dalam Kurun Waktu 3 tahun terakhir digambarkan pada tabel dibawah :

Tabel. 3.24
Persentase Realisasi Usia Harapan Hidup
di Wilayah Kabupaten Kutai Barat
Tahun 2017-2019

| Item | Persentase Realisasi Tahun | | | Keterangan |
|--------------------|----------------------------|-------|-------|------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | |
| Usia Harapan Hidup | 72,37 | 72,57 | 72,79 | |



Persentase Realisasi Usia Harapan Hidup juga dirincikan pada grafik dibawah ini :



Sumber Data : Kantor BPS Kutai Barat

3. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD/RENSTRA.

Untuk meningkatkan usia harapan hidup tersebut maka Pemerintah Kabupaten Kutai Barat tetap melaksanakan upaya kesehatan yang lebih intensif dan berkualitas, peningkatan kualitas pemerataan sumber daya kesehatan disetiap fasilitas kesehatan melalui pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana prasarana Puskesmas dan jaringannya serta peningkatan mutu pelayanan RSUD Harapan Insan Sendawar.

Tabel 3.25
Realisasi Kinerja Sasaran 4 Dibandingkan Target Akhir RPJMD

| Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi Kinerja s/d Tahun 2019 | Target Akhir RPJMD | Persentase Capaian Kinerja (%) |
|---------------------|--------|----------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| Angka Harapan Hidup | Tahun | 72,79 | 74 | 98,36 |

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi akumulasi sampai dengan tahun 2019 dibandingkan dengan rencana akhir RPJMD pada tahun 2021 menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Oleh karena itu Pemerintah Kutai Barat melalui Dinas Kesehatan dan OPD terkait akan terus berupaya keras agar usia harapan hidup dapat mencapai target akhir RPJMD.

Dalam pencapaian sasaran 4, beberapa faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pencapaiannya antara lain :

- a. Tersedianya dana alokasi khusus (DAK) untuk mendukung program kerja puskesmas



- b. Sarana pelayanan kesehatan yang hampir tersebar merata di wilayah Kabupaten Kutai Barat, termasuk keberadaan Puskesmas Terapung yang melayani pengobatan masyarakat di wilayah pesisir Sungai Mahakam
- c. Mini lokakarya di semua Puskesmas yang rutin diselenggarakan sehingga meningkatkan kerjasama tim, memantau cakupan pelayanan Puskesmas serta membina peran serta masyarakat secara terpadu agar dapat meningkatkan fungsi Puskesmas.
- d. Semakin tingginya kesadaran masyarakat memanfaatkan layanan kesehatan di Puskesmas

Adapun beberapa permasalahan yang menjadi penghambat dalam pencapaian sasaran 4 antara lain :

- a. Belum meratanya sebaran tenaga kesehatan pada sarana Kesehatan di Kabupaten Kutai Barat khususnya daerah terpencil
- b. Kurangnya tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan
- c. Masih banyaknya masyarakat yang belum menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat sesuai dengan indikator PHBS.
- d. Sosial budaya yang masih tinggi mempengaruhi perilaku masyarakat
- e. Letak geografis yang sulit dijangkau

Strategi pemecahan masalah

- a. Pendistribusian tenaga kesehatan secara proporsional dan merata disetiap Puskesmas dan Kampung yang sulit dijangkau.
- b. Peningkatan kompetensi Tenaga kesehatan yang berkesinambungan misalnya melalui Diklat sesuai kompetensi dan profesi.
- c. Meningkatkan promosi yang efektif dan efisien mengenai perilaku hidup bersih dan sehat sesuai dengan indikator PHBS, melalui kegiatan Penyuluhan yang intensif dan menjalin kerjasama dengan PKK/ Posyandu
- d. Melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dalam upaya perubahan perilaku masyarakat
- e. Perbaikan infrastruktur melalui kerjasama dengan pihak terkait.
- f. Mengaktifkan kembali Desa Siaga, terutama Ambulance Desa dalam upaya mempercepat proses rujukan untuk mendapat penanganan yang tepat dan cepat.

Analisa Program dan Kegiatan yang Mendukung Keberhasilan Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat



Dinas Kesehatan sebagai pengampu sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melaksanakan 13 (Tiga Belas) program dan 137 (Seratus Tiga Puluh Tujuh) kegiatan yang mendukung pada pencapaian kinerja dengan indikator angka harapan hidup. Program dan kegiatan tersebut terlampir pada tabel dibawah ini:

TABEL 3.26

| NO | NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN |
|-----------|---|
| 1 | Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan 1. Operasional UPT Gudang Farmasi Kabupaten Kutai Barat 2. Pengisian Tabung Oxygen 3. Pengadaan Peralatan Kesehatan Puskesmas & Pustu 4. Pemeliharaan Peralatan Kesehatan Puskesmas & Pustu 5. Pengadaan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit Pratama (*) 6. Inspeksi/Pengawasan Sarana Pelayanan Farmasi(Apotik, Toko Obat, Klinik/BP) 7. Pengadaan Peralatan Laundry Rumah Sakit Pratama 8. Pengadaan Peralatan Dapur Rumah Sakit Pratama 9. Operasional Distribusi Obat Dan Pengelolaan E-Logistik 10. Bimbingan Teknis/Pembinaan Pengelolaan Obat Dan Alat Kesehatan Di Puskesmas 11. Dak Pelayanan Kefarmasian (Dak Fisik) 12. Ap Dak Pengadaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan Puskesmas 13. Dak Distribusi Obat Dan Pengadaan E-Logistik (Bok Puskesmas) 14. Pengadaan Alat Kesehatan (Dak Pelayanan Dasar) 15. Kaliberasi Peralatan Kesehatan Puskesmas 16. Pengadaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan Puskesmas & Jaringannya 17. Bok Distribusi Obat & E-Logistik (Dak Non Fisik) |
| 2 | Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1. Operasional Puskesmas Terapung 2. Operasional Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana 3. Pemeriksaan Kesehatan Jamaah Haji 4. Operasional Rumah Sakit Pratama 5. Pembinaan Manajemen Puskesmas 6. Penilaian Kinerja Puskesmas 7. Pendampingan Akreditasi Fktp & Survei Akreditasi Fktp 8. Akreditasi Puskesmas (Dak) 9. Baksos Katarak Masal 10. Pertemuan Yanmed, Yankesmas & Kepala Puskesmas 11. Kegiatan Penunjang (Dak Non Fisik) |
| 3 | Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1. Pelacakan Kasus Gizi Buruk 2. Monitoring Dan Evaluasi Program Gizi Masyarakat 3. Lomba Balita Sehat Indonesia (Bsi) Tingkat Kabupaten 4. Pengadaan Balok Skdn & Leaf Leaf Gizi 5. Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan Bagi Bayi Balita Gizi Kurang/Bgm Dan Sosialisasi Pentingnya Asupan Gizi Pada Masa Pertumbuhan Dan Perkembangan Anak Balita (Did) 6. Penurunan Stunting (Dak Penugasan) 7. Ap-Penurunan Stunting (Dak Penugasan) 8. Bok Stunting (Dak Non Fisik) |



| | |
|----------|---|
| 4 | Program Pengembangan Lingkungan Sehat <ol style="list-style-type: none">1. Penyusunan Dokumen Lingkungan (Amdal / Ukl-Ulp, Dplh, Sppl)2. Sosialisasi, Pemicuan, Monitoring Verifikasi Dan Deklarasi Kelurahan/Kampung Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)3. Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (Ipal) Puskesmas4. Pengadaan Alat Sanitarian Kit5. Pelatihan Petugas Sanitarian Puskesmas Dalam Rangka Pengamanan Kualitas Air Minum6. Inspeksi Sarana Sanitasi Penduduk Yang Memiliki Akses Air Minum / Air Bersih7. Pembentukan Pos Ukk & Inspeksi Sanitasi Tempat-Tempat Olah Raga / Pos Ukk8. Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (Ipal) Puskesmas (Dak Fisik Pelayanan Dasar) |
| 5 | Program Pencegahan & Penanggulangan Penyakit Menular <ol style="list-style-type: none">1. Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Dbd2. Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Filariasis3. Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Tbc4. Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Malaria5. Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Kusta6. Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Rabies7. Peningkatan Imunisasi8. Pencegahan Dan Penanggulangan Ispa9. Peningkatan Surveilens10. Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Hiv/Aids11. Pencegahan Dan Pengendalian Diare, Hepatitis, Dan Infeksi Saluran Pencernaan (ISP)12. Tatalaksana Penderita Dm13. Dak Pengadaan Peralatan Pendukung Imunisasi (Dak Fisik)14. Pelatihan Petugas PPTM15. Penerapan & Pengawasan KTR16. Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular17. Pelayanan Odgj18. Penggandaan Vaccien Carrier Reffrigrator (Dak Penugasan)19. Pengendalian Penyakit, Pengadaan Alat Sanitarian Kit (Dak Penugasan)20. AP Penggandaan Vaccien Carrier Reffrigrator (Dak Penugasan)21. Penyediaan Posbindu Kit22. Penyediaan Cryoterapi (Dak Penugasan)23. Penggandaan Bahan Habis Pakai Hiv, Cd4 Viraload (Dak Penugasan)24. Pencegahan Penyakit Lainnya (Dak Penugasan)25. Kegiatan Penunjang Dak Penugasan |
| 6 | Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan <ol style="list-style-type: none">1. Penyusunan Profil Kesehatan2. Pengadaan Peralatan Sik (Dak Pelayanan Dasar)3. Pembangunan Sikda |
| 7 | Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana & Prasarana Puskesmas/Pustu & Jaringannya <ol style="list-style-type: none">1. Pembangunan Puskesmas Pembantu2. Rehabilitasi Berat/Sedang Rumah Dinas Bidan3. Pembangunan Halaman Parkir Dan Ruang Puskesmas Muara Pahu4. Pembangunan Salasar Aula Ruang Tunggu Puskesmas Muara Pahu5. Lanjutan Pembangunan Sarana Kesehatan6. Pembangunan Lanjutan Upt Gudang Farmasi |



| | |
|-----------|---|
| | <ol style="list-style-type: none">7. Rehabilitasi / Renovasi Rumah Dinas Dokter Umum8. Rehabilitasi / Renovasi Bangunan Puskesmas9. Rehabilitasi / Renovasi Rumah Dinas Perawat10. Semenisasi Halaman & Jalanan Masuk Di Upt. Puskesmas11. Pengadaan Pembuatan Ppat Di 6 (Enam) Puskesmas & Jaringannya12. Pengadaan Meubelair Rumah Sakit Pratama13. Rehap Atap & Plapon Pustu Linggang Melapeh14. Pembangunan Baru Puskesmas Barong Tongkok (Dak Fisik Pelayanan Dasar)15. Pembangunan Posyandu Kartini Di Jalan Ra. Kartini Mentiwan Kelurahan Melak Ulu16. Penunjuk Konsultan (Dak Fisik Pelayanan Dasar)17. Kegiatan Penunjang Dak Pelayanan Dasar18. Perencanaan Pembangunan Fktp |
| 8 | Program Pengawasan & Pengendalian Kesehatan Makanan <ol style="list-style-type: none">1. Pengawasan Kesehatan Makanan Dan Minuman2. Penyuluhan Keamanan Pangan Bagi Irtp |
| 9 | Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan & Anak <ol style="list-style-type: none">1. Suverfisi Fasilitatif2. Pelatihan Apn (Asuhan Persalinan Normal)3. Jaminan Persalinan (Dak Non Fisik)4. Pelacakan Kasus Kematian Ibu Dan Bayi Dan Balita5. Pengadaan Buku Kia & Kms Lansia, Kohort Ibu Dan Bayi/Anak, Formulir Mtbs/Mtbm, Formulir Sdidtk, Partograf Dll6. Pertemuan Tahunan Tim Audit Maternal Perinatal (Amp) & Rapat Evaluasi Kasus7. Lomba Kampung Berprilaku Hidup Bersih & Sehat (Phbs)8. Bantuan Operasional Kesehatan Kabupaten (Dak Non Fisik)9. Bok Puskesmas (Dak Non Fisik)10. Ap- Dak Bantuan Operasional Kesehatan Kabupaten (Dak Non Fisik)11. Dukungan Managemen Bok Kabupaten (Dak Non Fisik)12. Bok Ukm Sekunder Kabupaten (Dak Non Fisik) |
| 10 | Program Promosi, Kesehatan Institusi & Peran Serta Masyarakat <ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan Kapasitas Petugas Penjaring Kesehatan Anak Sekolah2. Orientasi Abat Hiv Aids Bagi Penyuluh Kesehatan3. Pembuatan Media Promosi Hari-Hari Kesehatan Selama Setahun4. Pendampingan Penilaian Posyandu5. Monev Dan Pelaporan Promkes Dan Pemberdayaan Masyarakat6. Pembangunan Pembinaan Dan Peningkatan Kader Kampung Siaga7. Pengadaan Buku Rapot Kesehatan & Pengadaan Media Cetak Pendukung Promosi Kesehatan Di Kab. Kutai Barat |
| 11 | Program Kemitraan Pelayanan Kesehatan <ol style="list-style-type: none">1. Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan Pasien Umum Di Puskesmas & Jaringannya2. Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Di Tingkat Puskesmas3. Fasilitasi Jaminan Kesehatan Nasional Di Puskesmas Resak4. Fasilitasi Jaminan Kesehatan Nasional Di Puskesmas Besiq5. Fasilitasi Jaminan Kesehatan Nasional Di Puskesmas Damai6. Fasilitasi Jaminan Kesehatan Nasional Di Puskesmas Barong Tongkok7. Fasilitasi Jaminan Kesehatan Nasional Di Puskesmas Melak8. Fasilitasi Jaminan Kesehatan Nasional Di Puskesmas Lambing9. Fasilitasi Jaminan Kesehatan Nasional Di Puskesmas Dilang Puti10. Fasilitasi Jaminan Kesehatan Nasional Di Puskesmas Muara Pahu11. Fasilitasi Jaminan Kesehatan Nasional Di Puskesmas Tanjung Isuy |



| | |
|-----------|---|
| | 12. Fasilitas Jaminan Kesehatan Nasional Di Puskesmas Penyinggahan 13. Fasilitas Jaminan Kesehatan Nasional Di Puskesmas Muara Kedang 14. Fasilitas Jaminan Kesehatan Nasional Di Puskesmas Long Iram 15. Fasilitas Jaminan Kesehatan Nasional Di Puskesmas Tering Seberang 16. Fasilitas Jaminan Kesehatan Nasional Di Puskesmas Linggang Bigung 17. Fasilitas Jaminan Kesehatan Nasional Di Puskesmas Sekolaq Darat 18. Fasilitas Jaminan Kesehatan Nasional Di Puskesmas Gunung Rampah 19. Fasilitas Jaminan Kesehatan Nasional Di Puskesmas Belusuh 20. Fasilitas Jaminan Kesehatan Nasional Di Puskesmas Dempar 21. Fasilitas Jaminan Kesehatan Nasional Di Puskesmas Jambuk 22. Fasilitas Jaminan Kesehatan Dan Operasional Penunjang Program Jaminan Kesehatan Kabupaten Kutai Barat |
| 12 | Program Sumber Daya Manusia Kesehatan 1. Penilaian Dan Pemilihan Dokter, Paramedis Dan Bidan Puskesmas Teladan 2. Peningkatan Mutu & Pelatihan Nakes 3. Monitoring & Evaluasi Tenaga Kesehatan & Jaringannya |
| 13 | Program Khusus Sumber Daya Kesehatan 1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Di Tiga Puskesmas |

Sasaran 5 :Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

Dalam upaya pencapaian sasaran Terselenggaranya Pemerintahan yang semakin Transparan dan Akuntabel serta semakin Membaiknya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik maka dalam tahun 2019 Satuan kerja pelaksana untuk indikator sasaran ini adalah Sekretariat Daerah Bagian Organisasi dan Badan Keuangan dan Aset Daerah melalui program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.

1. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya

Untuk menilai keberhasilan/kegagalan sasaran 5 menggunakan 2 indikator kinerja dengan tingkat keberhasilan **100,50 %** dengan kategori "**SANGAT BERHASIL (SB)**". Pencapaian target kinerja sasaran 5 seperti tampak pada tabel :

Tabel 3.27
Persentase keberhasilan/kegagalan sasaran 5

| Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2018 | | Capaian Tahun 2018 | Tahun 2019 | | Capaian Tahun 2019 | |
|----------------------|----------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|----------|
| | | Target | Realisasi | | Target | Realisasi | % | Kategori |
| Nilai Evaluasi SAKIP | Point/Predikat | B (60,00) | CC (56,23) | 93,71 | B (60,00) | B (60,61) | 101,01 | (SB) |
| Opini BPK | Opini | WTP | WTP | 100 | WTP | WTP | 100 | (SB) |



| Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2018 | | Capaian Tahun 2018 | Tahun 2019 | | Capaian Tahun 2019 | |
|----------------------|--------|------------|-----------|--------------------|------------|-----------|--------------------|----------|
| | | Target | Realisasi | | Target | Realisasi | % | Kategori |
| Tingkat Keberhasilan | | | | | | | 100,50 | (SB) |

Berdasarkan tabel 3.17 diketahui bahwa capaian kinerja pada tahun 2019 untuk ***Meningkatnya Akuntabilitas kinerja dan Keuangan*** dengan sebagian besar indikator sudah mendekati target yang direncanakan, meskipun belum memenuhi target yang ditetapkan.

1. Nilai Evaluasi SAKIP

SAKIP merupakan suatu sistem yang dibangun oleh pemerintah untuk mengukur kinerja aparatur dalam suatu organisasi pemerintah terhadap tujuan dan sasaran organisasi. Semakin efektif dan efisien suatu organisasi semakin tinggi hasil evaluasinya.

Hasil evaluasi SAKIP Kabupaten Kutai Barat tahun 2019 menunjukkan hasil sesuai dengan harapan, Pemerintah daerah mendapatkan nilai 60,61 atau predikat B, sesuai dengan target yang direncanakan 60,00. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menunjukkan hasil yang baik. Namun masih memerlukan perbaikan lebih lanjut. Rincian penilaian tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.28
Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP
pada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat

| Komponen yang dinilai | 2018 | | 2019 | |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | Bobot | Nilai | Bobot | Nilai |
| Perencanaan Kinerja | 30 | 19,93 | 30 | 21,17 |
| Pengukuran Kinerja | 25 | 13,15 | 25 | 14,14 |
| Pelaporan Kinerja | 15 | 9,00 | 15 | 9,52 |
| Evaluasi Kinerja | 10 | 3,23 | 10 | 4,88 |
| Capaian Kinerja | 20 | 10,92 | 20 | 10,91 |
| Nilai Hasil Evaluasi | 100 | 56,23 | 100 | 60,61 |
| Tingkat Akuntabilitas Kinerja | | CC | | B |

Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi



Berdasarkan Data diatas Persentase Keberhasilan/Kegagalan Sasaran “**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Kualitas Pelayanan Publik dan Ketepatan Fungsi dan Ukuran Organisasi Perangkat Daerah**” di tahun 2018 dari penghitungan 3 indikator yang ditetapkan sebesar 96,46%. Ditahun 2019 ini terjadi peningkatan dari 3 Indikator yang sudah ditetapkan yakni **102,59%** atau melampaui target yang ditetapkan. Capaian kinerja ini didapat dari penghitungan 3 (tiga) indikator kinerja yang kesemuanya berhasil mencapai target yang ditetapkan bahkan dari 3 (tiga) indikator tersebut 2 (dua) diantaranya melampaui target yang ditetapkan.

2. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan beberapa tahun sebelumnya.

Tabel 3.29
Nilai evaluasi SAKIP Kabupaten Kutai Barat dari 2017-2019

| No | Tahun | Realisasi Nilai SAKIP |
|----|-------|-----------------------|
| 1 | 2017 | 52,62 |
| 2 | 2018 | 56,23 |
| 3 | 2019 | 60,61 |

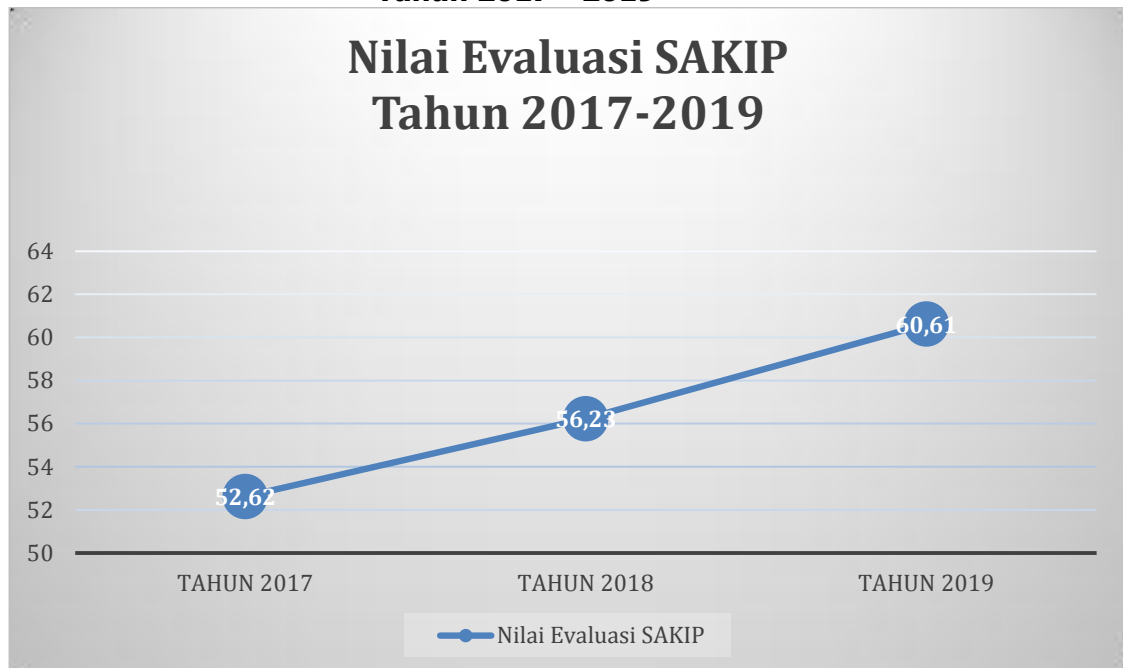
3. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target akhir RPJMD/RENSTRA

Tabel 3.30
Realisasi Kinerja Sasaran 5 Dibandingkan Target Akhir RPJMD

| Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi Kinerja s/d Tahun 2019 | Target Akhir RPJMD | Persentase Capaian Kinerja (%) |
|-------------------|---------------|----------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| Nilai SAKIP | Predikat/Poin | B (60,61) | BB (70,00) | 86,58 |



Grafik 3.6
Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten Kutai Barat
Tahun 2017 - 2019



Uraian singkat atas hasil evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada kabupaten Kutai Barat tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat telah menerapkan sistem akuntabilitas kinerja sebagai wujud implementasi manajemen kinerja yang ditunjukkan oleh keterlibatan pimpinan di berbagai tingkat organisasi, dalam memperbaiki Indikator Kinerja Utama (IKU);
2. Beberapa catatan terkait dengan kualitas implementasi SAKIP di Pemerintah Kabupaten Kutai Barat adalah:
 - a. Implementasi SAKIP masih difokuskan pada tingkat Pemerintah Kabupaten Kutai Barat saja, sedangkan implementasi SAKIP pada tingkat Perangkat Daerah (PD) belum sepenuhnya berorientasi pada hasil/*outcome*, sehingga keberhasilan pencapaian kinerja belum sepenuhnya memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat;
 - b. Mekanisme *cascade* kinerja belum berdasarkan pada proses bisnis organisasi. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat telah menyusun seperangkat indikator kinerja utama mulai dari tingkat Kabupaten hingga level organisasi terkecil. Penyusunan IKU ini belum



- memperhatikan proses kerja yang telah dibangun serta tugas fungsi dan peran yang diemban oleh setiap jabatan;
- c. Belum tersedianya peta proses bisnis yang menggambarkan hubungan proses dalam mewujudkan kinerja antar unit kerja/PD dan unit kerja dibawahnya. Hal ini menyebabkan keterkaitan kinerja antar PD menjadi kurang jelas dan keterkaitan kinerja secara berjenjang antar level organisasi belum dapat tergambarkan dengan baik;
 - d. Penjabaran kinerja dari tingkat provinsi sampai ke individu sudah diimplementasikan melalui perjanjian kinerja berjenjang, namun penjabaran kinerja tersebut belum seluruhnya berdasarkan kerangka berpikir logis (logical framework) sehingga belum tercipta hubungan kausalitas anatar kinerja berjenjang;
 - e. Perencanaan kinerja dan proses bisnis organisasi pada satuan kerja belum sepenuhnya dijabarkan pada dokumen penganggaran. Belum seluruh program dan kegiatan mendukung secara langsung terhadap pencapaian sasaran strategis yang artinya potensi pemborosan anggaran masih akan terjadi;
 - f. Laporan Kinerja telah disusun sampai ke level PD, namun masih banyak mengungkapkan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran, belum sepenuhnya menggambarkan analisa pencapaian kinerjanya;
 - g. Kualitas evaluasi program yang dilakukan oleh penanggung jawab program belum mampu memperbaiki kualitas pelaksanaan maupun hasil program terutama untuk program perangkat daerah.

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. memastikan tersedianya ukuran kinerja pada setiap jenjang jabatan sampai kepada individu yang memenuhi kriteria spesifik, relevan dan terukur;
2. Melakukan pembinaan SAKIP yang intensif pada seluruh PD di Kabupaten Kutai Barat, sehingga pencapaian kinerja pada tingkat PD dapat memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat;



3. Menerapkan *Performance Based Organization* dengan menjadikan RPJMD yang telah ditetapkan sebagai acuan dalam membangun organisasi selain memperhatikan ketentuan tentang penyusunan organisasi perangkat daerah;
4. Menyempurnakan peta proses bisnis dengan mengacu pada hasil *cascading* kinerja, sehingga dapat memberikan gambaran proses pencapaian kinerja pada berbagai tingkatan organisasi sampai ke pelaksana paling bawah. Kemudian proses bisnis ini dijadikan acuan untuk menyelaraskan program dan kegiatan antar PD dalam mencapai kinerja pemerintah daerah;
5. Memperbaiki penjabaran kinerja pada level pemerintah Kabupaten sampai ke individu dengan berpedoman pada kerangka berpikir logis (*logical framework*) sehingga keterkaitan kinerja antar jenjang menjadi lebih jelas dan juga dapat dipastikan bahwa setiap pegawai memiliki kontribusi dalam pencapaian sasaran pembangunan daerah;
6. Melakukan reviu terhadap program, kegiatan dan komponen anggaran secara berkala dengan mengacu pada IKU yang telah diperbaiki. Hasil reviu ini harus dapat memastikan bahwa anggaran memang dialokasikan hanya untuk pencapaian sasaran strategis pembangunan;
7. Mengevaluasi efektifitas dan efisiensi rumusan program serta kegiatan, dengan lebih memfokuskan kepada hasil yang diharapkan, sehingga akan memberikan manfaat yang lebih dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kutai Barat;
8. Membangun sistem penilaian kinerja individu yang diselaraskan dengan ukuran kinerja organisasi, untuk memastikan setiap individu memiliki manfaat dalam pencapaian sasaran kinerja organisasi. Sistem penilaian kinerja individu hendaknya dijadikan dasar dalam pemberian tunjangan kinerja pegawai.

4. Opini BPK

Salah satu indikator kualitas akuntabilitas keuangan dilihat dari opini auditor eksternal (BPK) atas penyajian laporan keuangan pemerintah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang komponennya meliputi: Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Opini BPK secara bertingkat terdiri dari: Tidak Wajar (TW), Tidak Memberikan Pendapat (TMP), Wajar



Dengan Pengecualian (WDP), dan yang terbaik adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Opini pemeriksaan BPK terhadap pengelolaan keuangan Kabupaten Kutai Barat untuk tahun 2019 ditargetkan nilai opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2018 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan hasil audit BPK RI memberikan penilaian WTP sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Jika dibanding dengan tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Kutai Barat mampu mempertahankan opini WTP tahun 2019.

Tabel 3.31
Hasil Audit BPK terhadap Pemeriksaan Keuangan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2017 – 2019

| NO | Tahun | Hasli Opini |
|----|-------|--------------------------|
| 1 | 2017 | Wajar Tanpa Pengecualian |
| 2 | 2018 | Wajar Tanpa Pengecualian |
| 3 | 2019 | Wajar Tanpa Pengecualian |

Sumber Data : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kutai Barat

Tabel 3.32
Realisasi Kinerja Sasaran 5 Dibandingkan Target Akhir RPJMD

| Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi Kinerja s/d Tahun 2019 | Target Akhir RPJMD | Persentase Capaian Kinerja (%) |
|-------------------|--------|----------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| Opini BPK | Opini | WTP | WTP | 100 |

Untuk mencapai target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), beberapa langkah yang telah ditempuh oleh Pemerintah Kutai Barat antara lain melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah :

- a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia penatausahaan laporan keuangan, Pemkab Kutai Barat menggelar kegiatan Bimbingan Teknis Laporan Keuangan SKPD se-Kutai Barat bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kaltim. "Output yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut yaitu para pejabat dan pegawai yang terlibat dalam penatausahaan pelaporan keuangan mampu membuat laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah.

Peningkatan pengelolaan SIMDA barang dan Jasa.



Peningkatan sistem pengendalian intern melalui kegiatan *Workshop Control Self Assessment (CSA)*.

Evaluasi secara menyeluruh terhadap sistem pengendalian intern (SPI) atas aset tetap yang digunakan oleh SKPD guna penyempurnaan SPI atas aset tetap dan peningkatan tingkat kepatuhan terkait pengelolaan aset.

Melaksanakan koordinasi dengan SKPD pada akhir tahun untuk menyesuaikan saldo akhir Laporan Keuangan SKPD dengan Laporan Keuangan yang dibuat oleh Bagian Keuangan sehingga Laporan Keuangan yang dipakai oleh SKPD didasarkan pada Laporan Keuangan yang disusun oleh Bagian Keuangan (sentralistik).

Rencana pembentukan *Badan Keuangan dan Aset Daerah*.

Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan Capaian Sasaran :

- b. Terdapat 1.593 bidang aset tanah dan bangunan yang terdiri dari 659 bidang tanah dan bangunan dan 934 bidang tanah bawah jalan. Tanah yang sudah dilakukan sertifikasi sebanyak 32 sertifikat dan yang belum dilakukan sertifikasi sebanyak 627 bidang tanah dan bangunan, sedangkan aset tanah bawah jalan keseluruhan belum dilakukan sertifikasi.
- c. Pengamanan aset pemerintah daerah masih belum optimal baik dari sisi administrasi, hukum dan fisik.
- d. Pengelolaan barang persediaan di SKPD masih belum optimal menggunakan aplikasi persediaan.
- e. Terdapat SKPD yang belum terkoneksi oleh SIMDA secara online terutama Kecamatan, Puskesmas dan Sekolah.
- f. Belum semua SKPD melakukan install SIMDA keuangan versi terbaru 2.7.13 yang berakibat terhambatnya proses realisasi anggaran, pertanggungjawaban dan pelaporan.
- g. Masih sering terjadinya permasalahan jaringan LAN di setiap SKPD.
- h. Kegiatan penilaian BMD sudah terlaksananya tetapi belum selesai penilaian dari tim penilaian (KPKNL).
- i. Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompentensi untuk melakukan penilaian BMD belum tersedia.
- j. Terdapat dana tampungan DBH-DR yang tidak dapat teranggarkan oleh SKPD teknis yang membidangi sesuai dengan ketentuan penggunaan dana tersebut sehingga



diadministrasikan pada DPA BKAD dan tidak dapat direalisasikan karena bersifat khusus.

Adapun solusi yang dilakukan adalah :

- a. *Melakukan koordinasi dengan pihak terkait khususnya Badan Pertanahan Negara (BPN) untuk melakukan proses percepatan sertifikasi aset tanah dan bangunan.*
- b. *Meningkatkan cakupan pengamanan dan pengawasan Barang Milik Daerah (BMD) dengan melakukan tertib administrasi, tertib hukum dan fisik.*
- c. *Meningkatkan sosialisasi kepada seluruh pengurus barang untuk tertib mengelola barang persediaan dengan menggunakan aplikasi persediaan.*
- d. *Memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana yang menunjang koneksi SIMDA keuangan secara online.*
- e. *Melakukan pemeliharaan jaringan LAN secara rutin di SKPD.*
- f. *Memfasilitasi proses percepatan penilaian BMD dan berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).*
- g. *Menganggarkan untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan dan pelatihan yang berbasis kompetensi.*

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mengukur efisiensi anggaran yang telah dialokasikan, maka dilakukan keselarasan antara sasaran yang ditetapkan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan, selanjutnya sumber daya biaya yang tersedia sebesar Rp.132.194.028.947,18 dengan realisasi penggunaannya sebesar Rp.50.843.605.276,00 sehingga terdapat saldo/sisa anggaran sebesar Rp. 81.350.423.671,18 Terdapat dana tampungan DBH-DR sebesar Rp. 76.378.964.698,18 yang tidak dapat teranggarkan oleh SKPD teknis yang membidangi sesuai dengan ketentuan penggunaan dana tersebut sehingga diadministrasikan pada DPA BKAD dan tidak dapat direalisasikan karena bersifat khusus.

Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Program dan kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian target kinerja tidak terlepas dari sistem perencanaan yang mengacu dari target kinerja sasaran yang ingin dicapai.

Dari 144 (seratus empat puluh empat) kegiatan yang telah ditetapkan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat terdapat 6 (enam) kegiatan yang realisasi anggarannya kurang dari 50% dengan rincian sebagai berikut :



1. Pembinaan aparatur pengelola keuangan daerah di SKPD
2. Penataan dan pengelolaan keuangan daerah
3. Pemeliharaan dan pengamanan Katolik Center, Islamic Center dan Kristen Center
4. Asistensi Penatausahaan dan penyusunan Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (BPKP)
5. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran
6. Perkiraan kewajaran harga tanah pelabuhan royok.

Sasaran 6 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Daerah

Rata-rata Nilai IKM

Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu instrumen untuk mengukur tingkat kinerja masing-masing unit pelayanan, dan juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai secara objektif dan periodik terhadap perkembangan kinerja unit pelayanan publik. Data indeks yang diperoleh akan menjadi bahan penilaian terhadap unsur-unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap Unit Pelayanan untuk meningkatkan pelayanan.

Survei IKM dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui mutu dan kinerja pelayanan masing-masing unit pelayanan publik secara berkala, dan mengetahui tingkat keberhasilan kinerja layanan pelayanan publik.

1. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya

Untuk mengukur kualitas pelayanan publik tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Kutai Barat mengadakan survey kualitas pelayanan pada 4 Perangkat Daerah yaitu Kecamatan Barong Tongkok, DPM-PTSP, Disdukcapil dan RSUD-HIS. Hasil survei tersebut dari tahun 2017 sampai dengan 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.33

Persentase Keberhasilan/Kegagalan Sasaran 6 dibandingkan dengan capaian kinerja tahun lalu.

| No | Indikator Kinerja | Satuan | 2018 | | Capaian kinerja (%) | 2019 | | Capaian kinerja (%) | Kategori |
|----|-------------------|--------|--------|-----------|---------------------|--------|-----------|---------------------|----------|
| | | | Target | Realisasi | | Target | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Nilai IKM | Poin | 75 | 74,41 | 99,21 | 76 | 77,35 | 101,77 | SB |



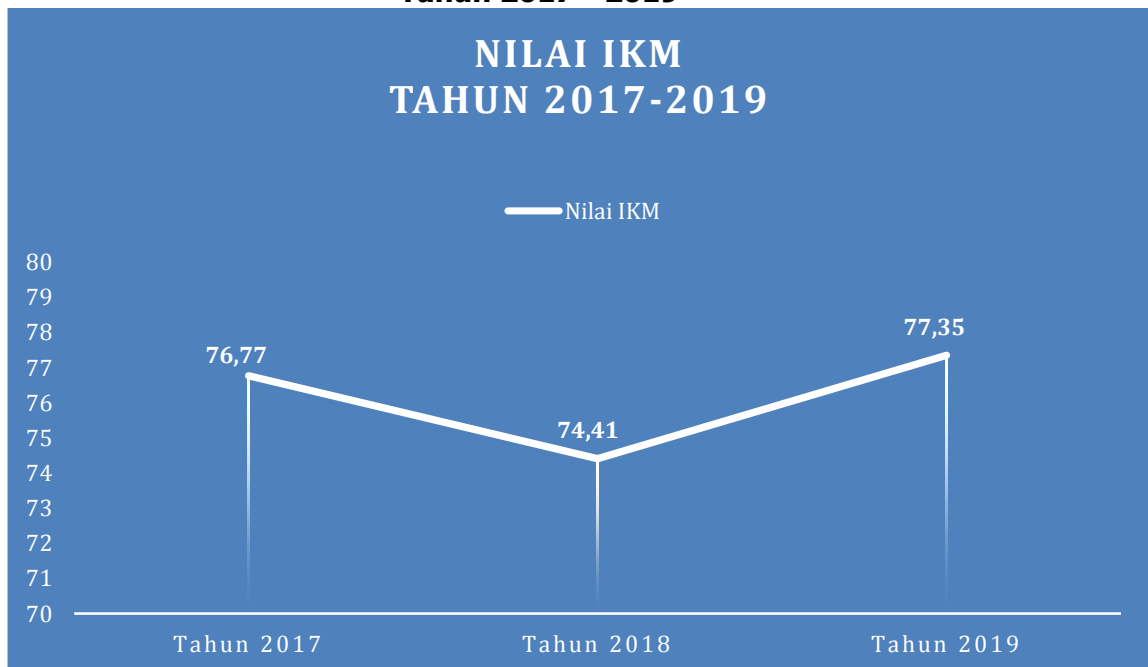
| | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------|------|-----|------|--------|-----|------|--------|----|
| 2 | Nilai EKPPD | Poin | 2,7 | 2,82 | 104,44 | 2,8 | 2,89 | 103,21 | SB |
| Tingkat Keberhasilan | | | | | | | | 102,49 | SB |

2. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan beberapa tahun sebelumnya

Tabel 3.34
Nilai IKM dari 2017-2019

| No | Tahun | Realisasi Nilai IKM |
|----|-------|---------------------|
| 1 | 2017 | 76,77 |
| 2 | 2018 | 74,41 |
| 3 | 2019 | 77,35 |

Grafik 3.7
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
Kabupaten Kutai Barat
Tahun 2017 - 2019



Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan :

1. Adanya dukungan dari stake holder terhadap pencapaian indikator kinerja yang sudah ditetapkan.



2. Adanya Kerjasama dari mulai staf terendah samapi unsur pimpinan terhadap pencapaian keberhasilan Program/Kegiatan yang dilaksanakan.
3. Dukungan Pendanaan yang memadai sehingga setiap item kegiatan bisa dilakukan dengan rencana yang sudah ditetapkan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan upaya :

1. Mengalokasikan anggaran sebesar 67,76% dari anggaran di Bagian Organisasi atau sebesar Rp. 2.127.550.000,- dari total keseluruhan anggaran sebesar Rp. 3.140.450.000,- sebagai upaya untuk mencapai target capaian kinerja yang terdapat dalam indikator kinerja yang ada dalam tujuan dan sasaran strategis yang terdapat dalam RENSTRA.
2. Memastikan bahwa Program/kegiatan yang dilaksanakan benar-benar mendukung terhadap pencapaian indikator sasaran yang sudah ditetapkan.
3. Memeriksa rincian item belanja di kegiatan, untuk memastikan bahwa rincian belanja tersebut benar-benar dapat memberikan kontribusi dan terkait terhadap capain indikator kegiatan.

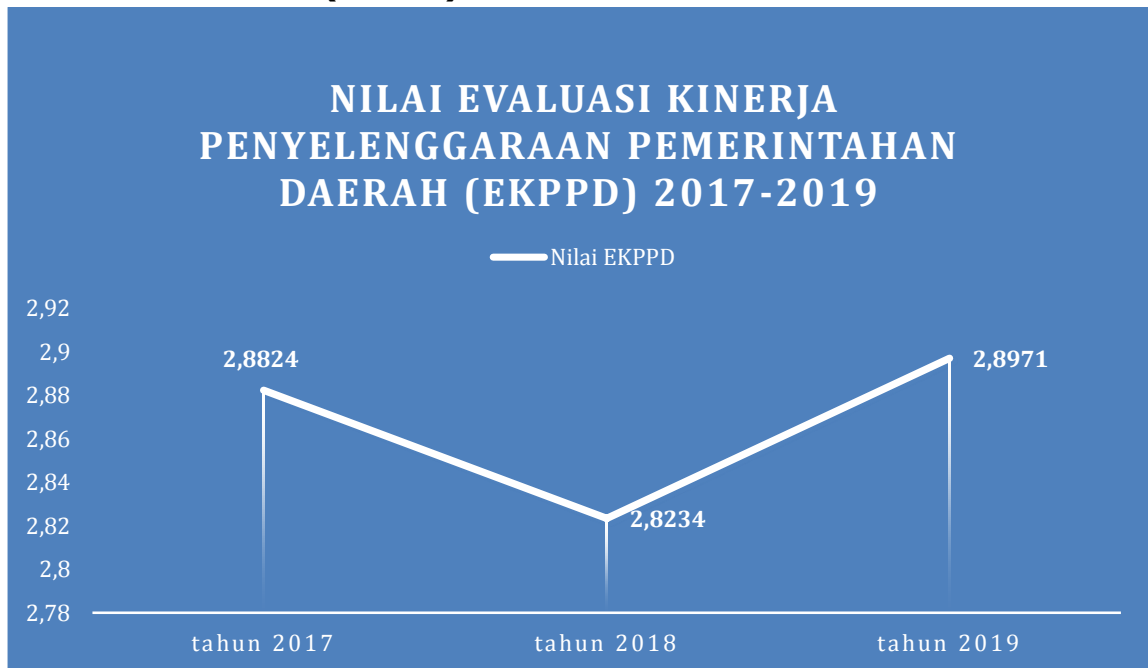
2. Nilai EKPPD

Tabel 3.35
TABEL NILAI EVALUASI LPPD (EKPPD)
2017-2019

| No | Tahun | Nilai Evaluasi LPPD | Ket |
|----|-------|---------------------|--|
| 1. | 2017 | 2.8824 | Skor Nilai Berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 100-53 Tahun 2018 Tanggal 10 Januari 2018 |
| 2. | 2018 | 2.8234 | Skor Nilai Berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 118-8840 Tahun 2018 Tanggal 31 Desember 2018 |
| 3. | 2019 | 2.8971 | Skor Nilai Berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 710/K.489/2018 Tanggal 10 September 2018 |



Grafik 3.8
Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(EKPPD) Tahun 2017-2019



**3. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target akhir
RPJMD/RENSTRA**

Tabel 3.36

Realisasi Kinerja Sasaran 1 dibandingkan dengan Target Akhir RENSTRA

| Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi Kinerja S/d Tahun 2019 | Target Akhir dalam RENSTRA | Prosentase Capaian Kinerja |
|--------------------------------|---------------|---|---|---|
| Nilai Evaluasi LPPD (EKPPD) | Poin | 2,8971 | 3,00 | 96,57% |

Berdasarkan Data diatas dapat diketahui secara akumulasi pencapaian sasaran **"Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah"** sampai dengan tahun 2019 dibandingkan dengan target akhir RENSTRA Tahun 2021 sudah mencapai **96,57%**. Namundemikian untuk mencapai target 100% diakhir di tahun 2021 memerlukan kerjasama dari Perangkat Daerah terkait pemenuhan data pendukung dan Tim *Self Assesment* dari Inspektorat Daerah Kutai Barat. Selain itu untuk mempercepat proses Pencapaian Target Daerah perlu adanya Penambahan Anggaran guna mendukung



Program Kegiatan di OPD dalam Pemenuhan dan Penyusunan Data/Dokumen Pendukung LPPD.

Tabel. 3.37
Nilai Evaluasi LPPD (EKPPD) Kabupaten Kutai Barat
Di Bandingkan Nilai Evaluasi LPPD (EKPPD) Nasional
Tahun 2019

| Indikator Kinerja | Satuan | Kabupaten Kutai Barat | Nasional |
|-----------------------------|---------------|------------------------------|-----------------|
| Nilai Evaluasi LPPD (EKPPD) | Poin | 2,89 | 2,82 |

Sumber : RPJMN Bappenas

Berdasarkan Tabel diatas Nilai Evaluasi LPPD (EKPPD) Kabupaten Kutai Barat tahun 2019 lebih tinggi dibandingkan dengan target nasional yaitu sebesar 0,07.

AKUNTABILITAS KINERJA

1. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan;

Pada saat pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2018 ada beberapa kendala yang dihadapi, kendala-kendala tersebut yaitu :

1. Perbedaan cara pengisian Indikator Kinerja Kunci Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dengan Data/Dokumen yang diberikan oleh masing-masing OPD karena arahan dari masing-masing Kementerian berbeda-beda sehingga menyulitkan dalam Proses Penginputan Data untuk penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Contohnya Data Pemandangan Jumlah Penduduk yang digunakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menggunakan Data dari BPS sedangkan Data Jumlah Penduduk yang digunakan di dalam LPPD menggunakan Data Bersih dari Disdukcapil sehingga hal tersebut menyulitkan untuk Pengisian Data pada IKK LPPD;
2. Keterlambatan pengumpulan Data/Dokumen dari masing-masing OPD sehingga menyebabkan proses penginputan Data di dalam IKK menjadi terlambat dan



kadang-kadang agar tidak terlambat mengumpulkan LPPD, Tim Penyusun menggunakan Data/Dokumen Tahun sebelumnya. Hal tersebut menyebabkan terdapat perbedaan Data/Dokumen yang ada di dalam IKK LPPD saat diserahkan kepada Pemprov. Kaltim dan Pemerintah Pusat dengan Data/Dokumen yang ada saat Evaluasi seringkali berbeda;

3. Perbedaan persepsi Penilaian Data/Dokumen Pendukung oleh Tim Evaluasi Daerah (Inspektorat Wilayah Provinsi Kaltim/BPKP Kaltim) dengan Tim Penyusun sehingga menyulitkan dalam Proses Penyusunan LPPD dan Evaluasi Penyusunan LPPD setiap Tahun Anggaran. ;
4. Belum tersedianya Anggaran untuk Bimbingan Teknis kepada seluruh OPD-OPD terkait dengan Tata Cara dan Mekanisme serta Data/Dokumen yang diperlukan untuk Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
5. Belum dilaksanakannya *Self Assesment* Data/Dokumen Pendukung dalam Penyusunan LPPD sehingga Data yang diinput masih belum melalui Proses Validasi dan Verifikasi Tim Inspektorat Kabupaten Kutai Barat.

2. Solusi untuk mengatasi masalah tersebut antara lain :

1. Perlu untuk dianggarkan Pelaksanaan Bimbingan Teknis kepada Seluruh OPD terkait dengan Tata Cara dan Mekanisme serta Data/Dokumen yang diperlukan untuk Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
2. Perlu adanya Pemberian *Reward and Punishment* kepada OPD-OPD yang terlambat maupun tepat waktu dalam mengumpulkan Data/Dokumen Pendukung serta perlu dilakukan *Self Assesment* Data/Dokumen oleh Inspektorat Kabupaten Kutai Barat agar tidak terdapat Perbedaan Data/Dokumen Pendukung yang terlalu Ekstrim dari saat Penyusunan maupun saat Evaluasi LPPD;
3. Bahwa terkait dengan Tim Evaluasi Daerah, telah disampaikan saran melalui Bagian Pemerintahan Setda.Kab.Kutai Barat agar kedepannya dilaksanakan bimtek terkait dengan Penyusunan LPPD bersama-sama dengan Tim Daerah untuk menyatukan Persepsi tentang Data/Dokumen Pendukung Penyusunan LPPD;
4. Untuk kedepannya perlu dibentuk Tim Penyusun yang melibatkan Bagian Organisasi, Bagian Pemerintahan, Bagian Pembangunan dan BKAD, serta Inspektorat Kabupaten Kutai Barat agar Data/Dokumen yang digunakan dalam Penyusunan Laporan semuanya memiliki angka yang sama sehingga tidak menimbulkan kerancuan bagi Subyek yang membaca maupun mengevaluasi Laporan-Laporan tersebut.



3. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya;

I. INDIKATOR KINERJA

1. *Capaian Program/Kegiatan*

tercapainya Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan, Profesionalisme Kinerja Aparat Pemerintahan Kecamatan, Kegiatan Penyusunan LPPD dan RLPPD Kabupaten Kutai Barat

2. *Masukan (Input)*

- a. Dana : total anggaran sub kegiatan sebagaimana tercantum di DPA-SKPD Bagian Pemerintahan
- b. SDM : total SDM yang terlibat dalam pelaksanaan sub kegiatan 10 Org dari Tim Penyusun LPPD (Bagian Pemerintahan) dan seluruh OPD di Kabupaten Kutai Barat
- c. Materi / bahan : Belanja ATK, Belanja Materai, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan, Belanja Perjalanan Dinas.

3. *Keluaran (Output)*

1 Dokumen LPPD Kabupaten Kutai Barat Tahun 2018 dan RLPPD Kabupaten Kutai Barat.

4. *Hasil (Outcomes)*

Tersusunnya Data dan Informasi mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Kutai Barat.

5. *Kelompok Sasaran*

SKPD se-Kabupaten Kutai Barat.

Maksud dan Tujuan dari Kegiatan Penyusunan LPPD dan RLPPD Kabupaten Kutai Barat, adalah sebagai berikut :

1. Sebagai bentuk tanggung jawab dan kewajiban pelaporan capaian kinerja Kepala Daerah dalam hal ini Bupati Kutai Barat sesuai dengan Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan kepada Pemerintah Pusat;
2. Mengetahui kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah, baik Urusan Wajib maupun Urusan Pilihan;



3. Mengetahui kinerja Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) oleh setiap OPD di Kabupaten Kutai Barat;
4. Memberikan masukan bagi Bupati Kutai Barat dalam perumusan Kebijakan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah;
5. Menyiapkan bahan Evaluasi Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) karena LPPD dasar dari EKPPD.

Upaya-Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat melalui Bagian Pemerintahan, antara Lain :

1. Mengadakan Rapat Koordinasi dengan OPD Teknis untuk Proses Pengumpulan Data/Dokumen serta Penyusunan LPPD Kabupaten Kutai Barat;
2. Mengadakan Koordinasi dan Konsultasi kepada Inspektorat Kabupaten Kutai Barat terkait dengan kesiapan Tim **Self Assessment** dari Inspektorat untuk membantu mendampingi Tim Penyusun LPPD dalam Penyusunan LPPD Kabupaten Kutai Barat;
3. Membuat Surat Edaran Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah untuk Proses Pengumpulan Data/Dokumen Pendukung dari seluruh OPD yang ada di Kabupaten Kutai Barat;
4. Menugaskan 3 Orang Tim Penyusun LPPD untuk mengikuti Bimtek terkait dengan Mekanisme Penyusunan LPPD;
5. Menyusun RKA-SKPD Bagian Pemerintahan Kegiatan Penyusunan LPPD dan RLPPD Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan Kliping yang dikeluarkan oleh Bapelitbangda Kabupaten Kutai Barat, belum sesuai dengan Kebutuhan dalam Penyusunan LPPD Kabupaten Kutai Barat;
6. Melakukan Kegiatan Jemput Bola ke OPD-OPD Teknis untuk mempercepat proses Pengumpulan Data/Dokumen Penyusunan LPPD Kabupaten Kutai Barat.

4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Pada Tahun Anggaran 2019 jumlah Anggaran Kegiatan Penyusunan LPPD dan RLPPD Kabupaten Kutai Barat sebesar Rp 150.850.000,- yang dianggarkan dalam APBD Murni dan bertambah sebesar Rp. 100.000.000,- pada saat APBD-Perubahan. Bahwa di dalam anggaran kegiatan tersebut masih belum mencakup Kegiatan Bimtek Penyusunan LPPD sehingga proses untuk Bimtek Penyusunan



LPPD hanya bisa diikuti oleh paling banyak 3 Orang Tim Penyusun LPPD, masih belum melibatkan seluruh OPD teknis yang ada di Kabupaten Kutai Barat.

Diharapkan untuk Anggaran Kegiatan Penyusunan LPPD kedepannya bisa ditambah untuk Kegiatan Bimtek yang melibatkan seluruh OPD Teknis yang ada di Kabupaten Kutai Barat. Bahkan jika memang diperbolehkan perlu ada Tambahan Anggaran untuk Honorarium Tim Penyusun dan Tim Pengumpul Data/Dokumen dari OPD Teknis serta Tim *Self Assesment* dari Inspektorat Kabupaten Kutai Barat, guna menunjang Kegiatan Penyusunan LPPD Kabupaten Kutai Barat.

5. Realisasi Anggaran

Tabel 3.38

| No | Program/Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi Keuangan | (%) | Ket. |
|-----|---|------------------|-----------------------|-------|--|
| 1. | Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan, Profesionalisme Kinerja Aparat Pemerintahan dan Kecamatan | | | | |
| 1.1 | Kegiatan Rapat Koordinasi Camat Dengan Bupati | 26.100.000,00 | 22.542.600,00 | 86,37 | |
| 1.2 | Kegiatan Penyusunan LPPD dan ILPPD Kabupaten Kutai Barat | 250.850.000,00 | 244.251.050,00 | 97,36 | Bertambah sebesar Rp. 100.000.000,00 saat APBD-Perubahan |
| 1.4 | Kegiatan Rakor Pemerintahan Se-Kaltim | 100.000.000,00 | 0,00 | 0 | Digeser ke Kegiatan Penyusunan LPPD pada Saat APBD-Perubahan |



| | | | | | an T.A. 2019 |
|-----------|---|----------------|----------------|-------|-----------------|
| 1.5 | Kegiatan Monitoring Evaluasi Terhadap Kinerja Kecamatan dan Kelurahan | 151.200.000,00 | 143.210.600,00 | 94,71 | |
| 1.6 | Kegiatan Fasilitasi Koordinasi dan Penyediaan Sistem Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan | 129.440.000,00 | 124.997.100,00 | 96,56 | |
| 1.7 | Kegiatan Fasilitasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pileg / Pilpres Tahun 2019 | 50.000.000,00 | 48.327.800,00 | 96,65 | |
| 1.8 | Kegiatan Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD | 150.000.000,00 | 146.950.850,00 | 97,96 | |
| 2. | Program Penataan Wilayah dan Fasilitasi Tata Batas Kampung dan Daerah | | | | |
| 2.1 | Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Penetapan dan Penegasan Batas Kampung dan Daerah | 228.498.500,00 | 223.967.200,00 | 98,01 | |
| 2.2 | Kegiatan Monitoring dan Fasilitasi Penanaman Rupabumi | 177.400.000,00 | 169.645.100,00 | 95,62 | |
| 2.3 | Kegiatan Penegasan Batas Wilayah Daerah | 191.050.000,00 | 184.227.100,00 | 96,42 | |
| 2.4 | Kegiatan Pembuatan Pilar Batas Kampung dan Daerah | 170.000.000,00 | 166.224.150,00 | 97,77 | |
| 2.5 | Kegiatan Pelatihan Penegasan Batas Bagi Aparat Pemerintah | 100.000.000,00 | 99.996.800,00 | 99,99 | |
| 2.6 | Kegiatan Fasilitasi | 164.400.000,00 | 156.194.000,00 | 95,00 | |



| | | | | | |
|---------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------|--|
| | Penegasan Batas Bagi Tim PBD / PBDDes | | | | |
| 2.7 | Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Percepatan Pemekaran Kecamatan dalam Wilayah Kab. Kutai Barat | 100.000.000,00 | 93.668.300,00 | 93,66 | |
| JUMLAH | | 1.988.938.500,00 | 1.824.202.650,00 | 91,71 | |

Sasaran 7 : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari Sektor Unggulan

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ke empat yang ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021 yaitu **"Pembangunan Ekonomi Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Sektor Ekonomi Potensial Dalam Upaya Penciptaan Lapangan Kerja Dan Peningkatan Pendapatan Masyarakat, Dengan Tetap Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup"** dan tujuan **"mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan"**.

A. Perbandingan Antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Untuk menilai keberhasilan/kegagalan sasaran 7 menggunakan 2 indikator kinerja yaitu Nilai PDRB sektor Pertanian dalam arti luas dan Nilai PDRB Industry Pengolahan dengan tingkat keberhasilan **87,88%** dengan kategori **"SANGAT BERHASIL (SB)"**. Pencapaian target kinerja sasaran **Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari Sektor Unggulan** seperti tampak pada tabel 3.31.

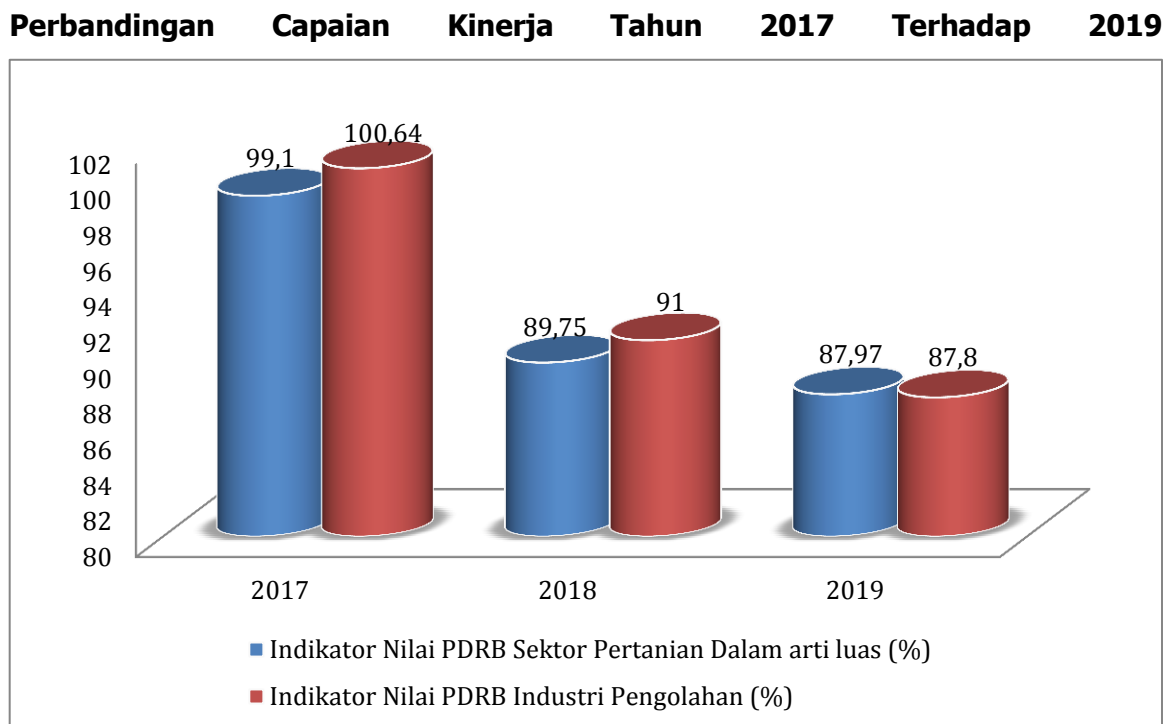
Tabel 3.39
Persentase Keberhasilan/Kegagalan Sasaran 7

| Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2018 | | Capaian Tahun 2018 | Tahun 2019 | | Capaian Tahun 2019 | |
|---|--------|------------|-----------|--------------------|------------|-----------|--------------------|-------------|
| | | Target | Realisasi | | Target | Realisasi | % | Kategori |
| - PDRB sector Pertanian dalam arti luas | % | 15,1 | 13,55 | 89,74 | 15,3 | 13,45 | 87,97 | (SB) |
| - PDRB Industry pengolahan | % | 6,27 | 5,70 | 91 | 6,50 | 5,70 | 87,80 | (SB) |
| Tingkat Keberhasilan | | | | | | | 87,88 | (SB) |

Berdasarkan tabel 3.31 di atas, diketahui bahwa dari 2 indikator sasaran 7 yang sudah dalam kategori sangat baik yaitu PDRB sector Pertanian dalam arti luas dengan capaian 87,90% dan PDRB Industry pengolahan dengan capaian 87,69% pada tahun 2019.

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta serta Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Beberapa Tahun Sebelumnya.

Grafik 3.9



Berdasarkan grafik diatas, dapat dijelaskan bahwa pencapaian realisasi kinerja tahun 2019 terhadap realisasi kinerja Tahun 2018 dan 2017 mengalami sedikit penurunan pada capaian kinerja. Pada Indikator Nilai PDRB Sektor Pertanian dalam arti luas yang mana dalam realisasi terdapat peningkatan namun pada capainnya kinerjanya mengalami penurunan, dapat dilihat pada tahun 2017 realisasi mencapai 99,1%, menurun drastis pada tahun 2018 yaitu 89,75% dan kembali menurun di angka 87,97 pada tahun 2019. Dan pada indikator Nilai PDRB Industry Pengolahan mengalami peningkatan pada realisasi namun dalam capaian kinerjanya, pada tahun 2017 mencapai angka yang fantastis yaitu 100,64%, lalu mengalami penurunan drastis pada tahun 2018 di angka 91% dan kembali menurun menjadi 87,8% di pada tahun 2019.



C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan RPJMD

Tingkat capaian indikator kinerja sasaran tahun 2019 terhadap target akhir RPJMD tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :

Tabel 3.40
Realisasi Kinerja Sasaran 7 Dibandingkan Target Akhir RPJMD

| Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi Kinerja s/d Tahun 2019 | Target Akhir RPJMD | Persentase Capaian Kinerja (%) |
|---|--------|----------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| - Nilai PDRB sektor Pertanian dalam arti luas | % | 13,45 | 15,3 | 87,97 |
| - Nilai PDRB Industry Pengolahan | % | 5,70 | 6,50 | 87,80 |

Secara umum dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam upaya memenuhi sasaran **"Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari Sektor Unggulan"** tahun 2019 sudah baik karena mendekati target yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Kutai Barat.

D. Perbandingan Dengan Standar Nasional dan Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 3.41
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi di Sektor Unggulan

| Indikator Kinerja | Satuan | Kutai Barat 2019 | Kalimantan Timur 2019** | Nasional 2019** |
|---|--------|------------------|-------------------------|-----------------|
| - Nilai PDRB sektor Pertanian dalam arti luas | % | 13,45 | 7,92 | 12,71 |
| - Nilai PDRB Industry Pengolahan | % | 5,70 | 17,76 | 19,70 |

Dari tabel diatas dapat dilihat perbandingan Perumbuhan Ekonomi Kutai Barat Pada tahun 2019 pada Nilai PDRB Sektor Pertanian dalam arti luas mencapai 13,45% dan Nilai PDRB Industry Pengolahan 5,70%, berbanding terbalik dengan Pencapaian Provinsi Kalimantan Timur pada Nilai PDRB dalam arti luas 7,92% sedangkan Nilai



PDRB Industry Pengolahan mencapai 17,76% dan pada skala Nasional Nilai PDRB sektor Pertanian dalam arti luas mencapai 12,71% dan Nilai PDRB Industry Pengolahan mencapai 19,70%.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan Peningkatan Kinerja

Upaya-upaya mencapai target sasaran 7 ini dilakukan melalui beberapa kebijakan yaitu:

- k. penerapan teknologi pertanian / perkebunan tepat guna;
- pengembangan pertanian dalam mendukung upaya penciptaan ketahanan pangan;
- peningkatan produksi pertanian dan Industry
- mengoptimalkan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak;
- pengembangan perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
- peningkatan daya dukung sumber daya perairan umum daratan (PUD)
- optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
- Peningkatan Teknologi dalam Perindustrian
- Peningkatan SDM Pelaku IKM
- Pembukan karakter Usaha IKM yang handal dan pantang menyerah
- Pengembangan Data Base IKM

F. Analisis Program Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan

Program yang menunjang :

- o Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
- o Program peningkatan produksi peternakan
- o Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
- o Penanaman Pohon Pada Lahan Di Luar Kawasan
- o Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian
- o Program Peningkatan Produksi Pertanian
- o Program Peningkatan Produksi Perkebunan
- o Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
- o Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
- o Program pengembangan industri kecil dan menengah
- o Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Mikro Kecil Menengah
- o Program Kualitas Kelembagaan Koperasi



- o Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
- o Program Perdagangan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
- o Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Mikro Kecil Menengah

Sasaran 8 : Meningkatnya Investasi Daerah

a. Perbandingan Antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Untuk menilai keberhasilan/ Kegagalan sasaran 8 digunakan 1 indikator kinerja dengan tingkat keberhasilan **99,95 %** dengan kategori "**BERHASIL (B)**" Pencapaian target kinerja sasaran 8 seperti tampak pada tabel 3.26.

Dari hasil pengukuran terhadap indikator sasaran tersebut, diperoleh hasil pengukuran sebagai berikut.

Tabel 3.42
Persentase keberhasilan/kegagalan sasaran 8

| Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2018 | | Capaian Tahun 2019 | Tahun 2019 | | Capaian Tahun 2019 | |
|-----------------------------|---------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|--------------------|------------|
| | | Target | Realisasi | | Target | Realisasi | % | Kategori |
| Nilai PMDN | Juta Rp | 2.058.388,5 | 3.004.858,1 | 145,98% | 2.428.898,5 | 2.163.608,8 | 99,95 | (B) |
| Tingkat Keberhasilan | | | | | | | 99,95 | (B) |

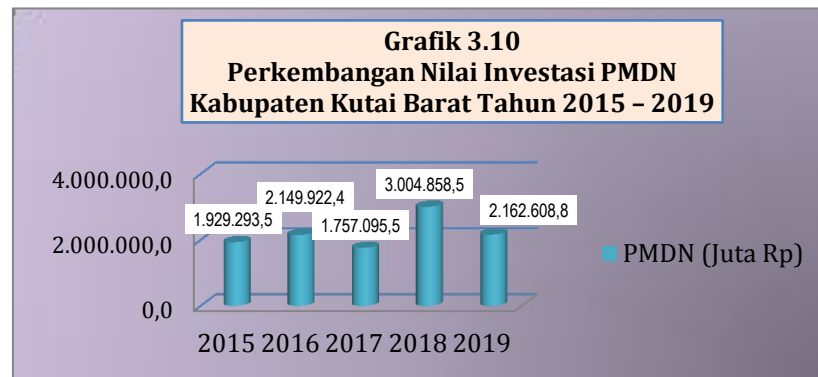
Dari hasil tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 tingkat keberhasilan mencapai 145,98% dan pada tahun 2019 tingkat keberhasilan mengalami penurunan yaitu 99,95%.

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Beberapa Tahun Sebelumnya

Nilai investasi PMDN, pada tahun 2015 Rp. 1.929.293.500.000,-, tahun 2016 meningkat lagi menjadi Rp. 2.149.922.400.000,-. Trend pergerakan positif investasi PMDN turun di tahun 2017 mencapai Rp. 1.757.095.500.000,-. Lalu kembali meningkat sebesar Rp. 3.004.858.500.000,- dalam tahun 2019 dan kembali menurun ke angka Rp. 2.163.608.800.000,- pada tahun 2019.



Berikut rincian Perkembangan Nilai Investasi PMDN Kabupaten Kutai Barat :



c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan RPJMD

Tingkat capaian indikator kinerja sasaran tahun 2019 terhadap target akhir RPJMD tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :

Tabel 3.43
Realisasi Kinerja Sasaran 7 Dibandingkan Target Akhir RPJMD

| Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi Kinerja s/d Tahun 2019 | Target Akhir RPJMD | Persentase Capaian Kinerja (%) |
|------------------------|---------|----------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| Nilai investasi - PMDN | Juta Rp | 2.163.608,8 | 2.428.898,5 | 99,95% |

Secara umum dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam upaya memenuhi sasaran "Meningkatnya Investasi Daerah" yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Kutai Barat tahun 2019 sudah baik karena mendekati target yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Kutai Barat.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang dilakukan

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang dilakukan di Kabupaten Kutai Barat dinyatakan "Berhasil" karena hasil yang didapatkan dari kegiatan ini sangat berpengaruh positif terutama terhadap pertumbuhan Ekonomi dan percepatan pembangunan di Kabupaten Kutai Barat.



Faktor Penunjang Keberhasilan :

1. Nilai Investasi yang sudah cukup optimal
2. Penyerapan tenaga kerja sudah optimal
3. System informasi pelayanan penanaman modal berbasis elektronik sudah cukup optimal;
4. Kualitas dan Kuantitas sumber daya manusia sudah cukup memadai
5. Sarana dan Prasarana sudah memadai untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat
6. Penempatan SDM sudah cukup sesuai dengan Kualifikasi pendidikan dan disiplin ilmu yang dimiliki
7. Koordinasi antar SKPD dalam Perencanaan dan Monitoring evaluasi kebijakan pelaksanaan pembangunan sudah cukup baik.

Beberapa faktor penghambat pencapaian sasaran ini antara lain :

1. Pengaruh kondisi ekonomi global yang mengalami krisis sejak tahun 2016 meskipun saat ini terlihat adanya indikasi membaik.
2. Iklim investasi di Kutai Barat belum sepenuhnya kondusif sehingga menimbulkan keraguan para investor untuk berinvestasi. Belum adanya kepastian jaminan berusaha yang terindikasi masih sering terjadinya konflik antara pihak perusahaan dengan masyarakat sekitar.
3. Belum adanya kebijakan riil Pemerintah Kutai Barat dalam mendorong percepatan realisasi investasi.
4. Ketidak patuhan perusahaan dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sehingga banyak investasi yang tidak terhimpun meskipun secara riil kegiatan investasi sudah berjalan.
5. Masih minimnya mobilitas dan akses transportasi di Kutai Barat sebagai saran penunjang kelancaran berinvestasi
6. Kelembagaan dalam bidang pelayanan modal belum berjalan dengan optimal karena kapasitas SDM yang belum mumpuni dalam mendukung penyelenggaraan penanaman modal.

Beberapa strategi dan kebijakan yang akan ditempuh untuk meningkatkan investasi di Kutai Barat antara lain :

1. Memberikan kepastian jaminan keamanan bagi investor untuk berusaha di Kutai Barat, termasuk Pemerintah Kabupaten Kutai Barat bijak dalam memediasi secara



- cepat apabila terjadi konflik antara perusahaan dengan masyarakat sekitar
2. Memberikan kemudahan dalam proses peijinaninvestasi , dalam rangka meningkatkan investasi di Kutai Barat.
 3. Memfasilitasi realisasi proyek investasi strategis dan ekspansi perusahaan yang ada.
 4. Melanjutkan dan memperkuat reformasi yang sudah berjalan, termasuk menyederhanakan prosedur, serta memperkuat pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) Pusat dan layanan perizinan 3 jam.
 5. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pihak pihak perusahaan dengan rutin mengirimkan surat edaran perihal kewajiban penyampaian LKPM dan rutin melakukan sosialisasi ke perusahaan. Apabila langkah persuasif tidak juga diindahkan, perlu memberlakukan sanksi evaluasi, dibatalkan izin prinsipnya, sampai pencabutan izin keseluruhan bagi perusahaan yang tidak juga melaporkan LKPM.
 6. Mempercepat pembangunan infrastruktur terutama infrastruktur jalan dan transportasi udara berupa kelancaran jadwal penerbangan dari dan menuju Bandara Melalan Melak.
 7. Melaksanakan pembinaan dan penataan personil, mengirimkan pegawai untuk mengikuti diklat-diklat teknis, bimbingan teknis, studi banding dan program-program peningkatan kapasitas personil lainnya.

e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk menyelenggarakan tugas pelayanan penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat sampai akhir bulan Desember 2019 ini, didukung oleh sebanyak 129 Pegawai yang terdiri atas 38 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan 91 orang Tenaga Kerja Kontrak (TKK). Sarana dan Prasarana kerja untuk menunjang kinerja sudah cukup memadai.

f. Analisis Program Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan

Upaya pencapaian sasaran Meningkatnya Investasi Daerah sepenuhnya dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dengan target dan realisasi dari sasaran ini dinilai melalui Indikator kinerja Jumlah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Sasaran Meningkatnya Investasi Daerah didukung dengan Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi



Penanaman Modal serta Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi yang dijabarkan ke dalam 6 kegiatan sebagai berikut :

1. Inventarisasi dan Pendataan Nilai Investasi dan Penanaman Modal
2. Sinkronisasi dan Koordinasi Data Investasi Serta Pengendalian Pelaksanaan PMDN
3. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Penanaman Modal
4. Peningkatan Koordinasi Antara Lembaga / Instansi di Pusat dan Daerah Dalam Rangka Pelayanan Penanaman Modal Kepada Para Investor
5. Pemantauan dan Validasi Realisasi Investasi dengan Provinsi dan Kabupaten
6. Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal yang Terintegrasi dengan Sistem Penanaman Modal di Pusat dan Provinsi Melalui SPIPISE dan SIPID.

Sasaran 9 : Meningkatnya Pendapatan Perkapita

A. Perbandingan Antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Pencapaian sasaran ini dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM, Dinas Pertanian dan OPD terkait lainnya. Untuk menilai keberhasilan/kegagalan sasaran 9 menggunakan 1 indikator kinerja dengan tingkat keberhasilan **114,79 %** dengan kategori "**SANGAT BERHASIL (SB)**". Pencapaian target kinerja sasaran Meningkatnya Pendapatan Wilayah seperti tampak pada tabel 3.29.

Tabel 3.44
Persentase Keberhasilan/Kegagalan Sasaran 9

| Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2018 | | Tahun 2018 | Tahun 2019 | | Capaian Tahun 2019 | |
|-----------------------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|--------------------|-------------|
| | | Target | Realisasi | | Target | Realisasi | % | Kategori |
| PDRB perkapita | Juta Rupiah | 161 juta | 191,34 juta | 117,42 | 169 juta | 194,01 juta | 114,79 | (SB) |
| Tingkat Keberhasilan | | | | | | | 114,79 | (SB) |

PDRB perkapita merupakan salah satu indikator yang diturunkan dari angka PDRB. Angka tersebut di dapat dengan cara membagi angka PDRB suatu tahun dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang ada di daerah tersebut. PDRB Perkapita yang menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk bukanlah alat untuk mengukur kesejahteraan karena nilai PDRB tersebut belum tentu dimiliki oleh penduduk pada wilayah tersebut.

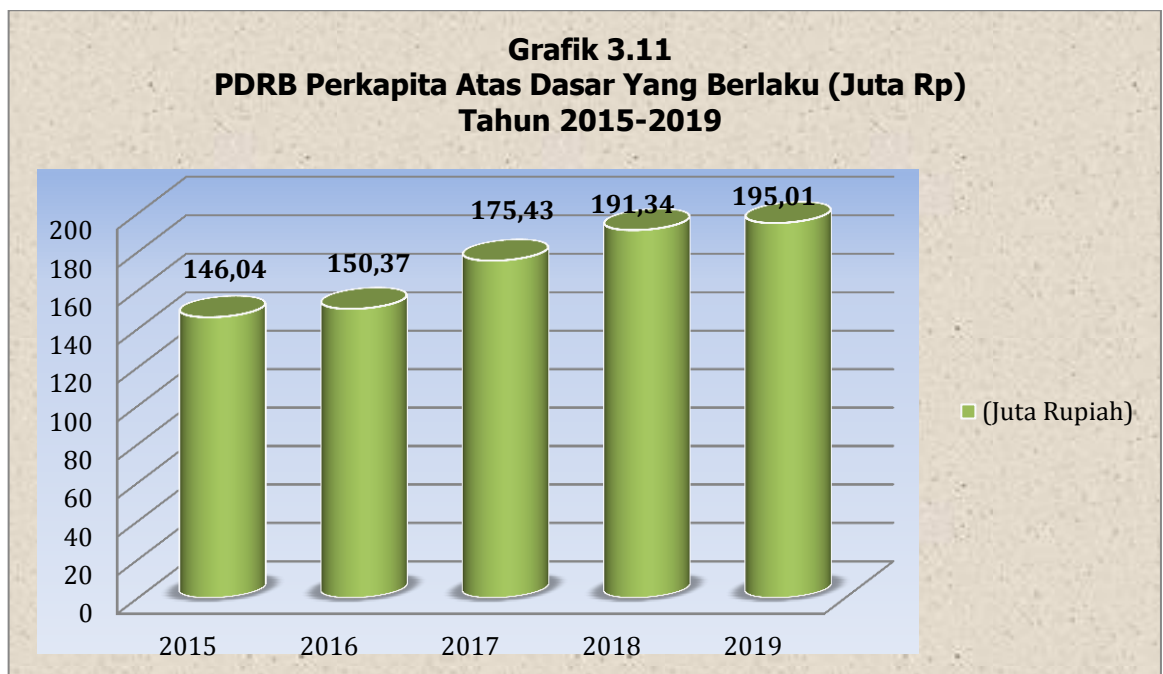
Pada tahun 2019, PDRB per kapita Kabupaten Kutai Barat diestimasi oleh BPS Kabupaten Kutai Barat sebesar 189,04 juta rupiah, meningkat dibanding tahun



sebelumnya, namun perlu dicatat disini bahwa besarnya angka PDRB per kapita, seperti halnya dengan PDRB per kapita seluruh daerah Kabupaten/Kota di Indonesia, khususnya Kabupaten Kutai Barat, bukanlah alat untuk mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat sesungguhnya. Hal ini disebabkan PDRB per kapita diperoleh dari PDRB Kutai Barat secara keseluruhan, yang meliputi 17 kategori lapangan usaha, dimana sebagian besar PDRB Kabupaten Kutai Barat didominasi oleh lapangan usaha pertambangan batu bara. Sementara nilai tambah dari lapangan usaha pertambangan batu bara tidak mencerminkan pendapatan masyarakat secara riil, sehingga dapat diartikan pendapatan per kapita masyarakat yang sesungguhnya bisa jadi jauh lebih rendah lagi.

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta serta Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Beberapa Tahun Sebelumnya

Nilai PDRB pada tahun 2015 berkisar 146,04 Juta meningkat pada tahun 2016 menjadi 150,37 juta lalu kembali meningkat pada tahun 2017 yaitu 175,43. Kembali meningkat pada tahun 2018 yaitu 191,34 juta dan pada tahun 2019 meningkat lagi di angka 195,01 juta.



C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan RPJMD

Tingkat capaian indikator kinerja sasaran tahun 2019 terhadap target akhir RPJMD tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :



Tabel 3.45
Realisasi Kinerja Sasaran 9 Dibandingkan Target Akhir RPJMD

| Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi Kinerja s/d Tahun 2019 | Target Akhir RPJMD | Persentase Capaian Kinerja (%) |
|---------------------------|---------------|---|---------------------------|---------------------------------------|
| Nilai - PDRB Perkapita | Juta Rp | 195,01 | 169 | 114,79% |

Dari table diatas dapat dilihat bahwa Nilai PDRB Perkapita Pada Tahun 2019 melampau target yang terdapat pada RPJMD yaitu persentase keberhasilan mencapai 114,79%.

D. Perbandingan Dengan Standar Nasional dan Provinsi

Penghitungan statistik neraca nasional mengikuti buku petunjuk yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dikenal sebagai Sistem Neraca Nasional (SNN). SNN adalah rekomendasi internasional tentang bagaimana menyusun ukuran aktivitas ekonomi yang sesuai dengan standar neraca baku yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi yang dimaksud dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, klasifikasi, dan aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator tertentu seperti Produk Domestik Bruto (PDB). Salah satu bentuk adaptasi pencatatan statistik nasional adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB Indonesia dari tahun 2000 ke 2010. Perubahan tahun dasar PDB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi PBB yang tertuang dalam Sistem Neraca Nasional 2008 (SNA 2008). Menurut data Badan Pusat Statistik Nasional Pertumbuhan Ekonomi Indonesia pada Triwulan II Tahun 2019 dibanding triwulan II 2018 tumbuh 5,05% melambat dibanding triwulan II 2018 sebesar 5,27% dan secara keseluruhan PDB perkapita Indonesia pada Tahun 2019 mencapai Rp 59,1 juta atau setara dengan US\$4.174,9.

PDRB Provinsi Kalimantan Timur menurut Sistem Neraca Nasional pada tahun 2019 mencapai Rp. 653,68 Triliun Rupiah yang dilihat dari PDRB ADHB dan pada PDRB ADHK sebesar Rp 486,98 Triliun Rupiah dengan pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,77% yang dimana Pertambangan dan Penggalan mendominasi dengan kontribusi sebesar 45,49%.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja



Penyebab Keberhasilan dari meningkatnya nilai PDRB Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019 dipengaruhi oleh 17 Lapangan Usaha yang dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha yaitu :

Tabel 3.46

| | |
|---------|--|
| A | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan |
| B | Pertambangan dan Penggalian |
| C | Industri Pengolahan |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas |
| E | Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang |
| F | Konstruksi |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor |
| H | Transportasi dan Pergudangan |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum |
| J | Informasi dan Komunikasi |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi |
| L | Real Setate |
| M,N | Jasa Perusahaan |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib |
| P | Jasa Pendidikan |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial |
| R,S,T,U | Jasa lainnya |

F. Analisis Program Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan

Program Yang Menunjang :

- Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
- Program peningkatan produksi peternakan
- Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
- Penanaman Pohon Pada Lahan Di Luar Kawasan
- Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian
- Program Peningkatan Produksi Pertanian
- Program Peningkatan Produksi Perkebunan
- Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
- Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
- Program Pengembangan Perikanan Tangkap
- Program Pengembangan Perikanan Tangkap



- Program Pengembangan Perikanan Tangkap
- Program Peningkatan Daya Dukung Sumber Daya Perikanan Perairan Umum Daratan
- Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produk Perikanan
- Program Pengembangan Perikanan Budidaya
- Program Pengembangan Perikanan Budidaya
- Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
- Program pengembangan industri kecil dan menengah
- Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Mikro Kecil Menengah
- Program Kualitas Kelembagaan Koperasi
- Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
- Program Perdagangan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
- Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Mikro Kecil Menengah
- Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
- Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informatika
- Program Pengembangan Informasi Publik
- Program Analisa dan Data Informasi
- Program Penguatan Kelembagaan Dalam Pengelolaan Informasi Daerah
- Program Pengembangan, Pembinaan Pemberdayaan Media Massa Pos dan Telekomunikasi
- Peningkatan Tata Laksana Komunikasi dan Informasi
- Program Pendidikan Anak Usia Dini
- Program Pendidikan Non Formal
- Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
- Program Perlindungan dan Pemanfaatan Objek Kemajuan Kebudayaan
- Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- Program Penataan Organisasi dan kelembagaan Pemerintah Daerah
- Program Pelaporan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
- Program Pembinaan Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik
- Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan, Profesionalisme Kinerja Aparat Pemerintahan Kecamatan
- Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
- Program Upaya Kesehatan Masyarakat
- Program Perbaikan Gizi Masyarakat
- Program Pengembangan Lingkungan Sehat
- Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
- Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
- Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
- Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
- Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
- Program Promosi, Kesehatan Institusi & Peran Serta Masyarakat
- Program Kemitraan Pelayanan Kesehatan
- Program Pelayanan Penduduk Miskin
- Program Pemberdayaan Fakir Miskin
- Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
- Program pembinaan panti asuhan
- Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
- Program Pelayanan Pemberdayaan Kelembagaan Sosial
- Program Bantuan dan Jaminan Sosial
- Program Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan



- o Program Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
- o Program Komunitas Adat Terpencil (KAT)
- o Program Pembinaan dan Pengembangan TKSK dan TKSM
- o Program Pembinaan Lanjut Usia Terlantar
- o Program Pembinaan Anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Korban Tindak Kekerasan, Bermasalah dengan Hukum, Terlantar dan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus)
- o Program Penyuluhan Sosial dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Sosial
- o Program Pembinaan Eks. Penyandang Penyakit Sosial (Eks.NAPI, PSK, NAPZA dan Penyakit Sosial Lainnya)

Sasaran 10 : Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka

Sasaran strategis 10 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ke empat yang ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021 yaitu " **Pembangunan Ekonomi Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Sektor Ekonomi Potensial Dalam Upaya Penciptaan Lapangan Kerja Dan Peningkatan Pendapatan Masyarakat, Dengan Tetap Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup**" dan tujuan " **Mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan**".

Pencapaian sasaran ini diampu oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Untuk menilai keberhasilan/kegagalan sasaran 10 menggunakan 1 (satu) indikator kinerja dengan tingkat keberhasilan **105,92 %** dengan kategori " **SB (Sangat Berhasil)**". Pencapaian target kinerja sasaran **Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka** seperti tampak pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.47
Persentase Keberhasilan/Kegagalan Sasaran 10

| Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2018 | | Capaian Tahun 2018 | Tahun 2019 | | Capaian Tahun 2019 | |
|----------------------------|--------|------------|-----------|--------------------|------------|-----------|--------------------|----------|
| | | Target | Realisasi | | Target | Realisasi | % | Kategori |
| Angka Pengangguran Terbuka | % | 5,6 | 4,86 | 113,21 | 5,4 | 5,08 | 105,92 | (SB) |
| Tingkat Keberhasilan | | | | | | | 105,92 | (SB) |

Berdasarkan tabel 3.41 diatas capaian kinerja sasaran **Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka** menunjukkan pencapaian sebesar **105,92%** dengan Kategori Sangat Berhasil. Pencapaian ini didapat dari realisasi prosentase Angka Pengangguran terbuka dari target yang ditetapkan sebesar 5,4% terealisasi sebesar 5,08%, atau lebih rendah dari tahun lalu dimana pencapaian kinerjanya mencapai 113,21%. Dimana pada tahun 2018 Target Angka Pengangguran Terbuka dipatok sebesar 5,6% dan terrealisasi sebesar 4,86%.



Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah angkatan kerja yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran ini terjadi karena angkatan kerja tersebut belum mendapatkan pekerjaan padahal telah berusaha maksimal atau dikarenakan yang bersangkutan enggan mencari pekerjaan atau malas bekerja. TPT di Kabupaten Kutai Barat selama 3 tahun terakhir menunjukkan angka penurunan yang signifikan, hal ini disebabkan adanya lapangan kerja baru bagi masyarakat yang tersedia baik pada perusahaan yang bergerak pada bidang sektor pertambangan maupun pada sektor perkebunan, juga cukup berkembangnya upaya masyarakat dalam mengembangkan UKM, yang mampu menyerap lapangan kerja, Prosentase Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka tersebut lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel dan grafik dibawah ini :

Grafik 3.12
Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Kutai Barat Tahun 2017 -2019



Sumber data : BPS Sakernas

Berdasarkan data dari BPS Sakernas Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Kutai Barat berfluktuasi, ditandai dengan adanya penurunan dan juga peningkatan. Dimulai dari Tahun 2017 target TPT yang dicanangkan sebesar 5,8% realisasi sebesar 5,87%. Pada



tahun 2018 TPT ditargetkan sebesar 5,6% terealisasi 4,86%, namun pada tahun 2019 naik menjadi 5,08 dari target 5,4%.

Berdasarkan data tersebut diatas maka bisa dikatakan berhasil karena dari target penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka yang dicanangkan semuanya terlampaui. Ini semua berkat kolaborasi dari Perangkat Daerah yang dimotori oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam menurunkan angka/ Tingkat Pengangguran Terbuka di Kutai Barat melalui Program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kutai Barat dibandingkan dengan TPT Provinsi Kalimantan Timur dan TPT Nasional.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Nasional berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai 7,05 Juta orang per Agustus 2019, dimana mengalami peningkatan dari tahun lalu, akan tetapi persentase TPT turun menjadi 5,28% dibandingkan tahun lalu yang sebesar 5,34%.

Adapun pada Februari 2019 secara Nasional, Angka Pengangguran mencapai 5,01% atau 6,82 juta orang. Jumlah Angkatan kerja pada agustus 2019 tercatat sebanyak 197,92 juta orang, bertambah di banding priode yang sama tahun lalu 194,78 juta. Adapun Tingkat Partisipasi Kerja naik dari 66,67% pada Agustus 2018 menjadi 67,49% di Agustus 2019. Tingkat pengangguran terbuka tercatat turun (secara presentase) dari 5,34% pada Agustus 2018 menjadi 5,28% pada Agustus 2019. Tingkat pengangguran tertinggi masih berasal dari lulusan SMK.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kalimantan Timur pada Februari 2019 mencapai 6,66 persen atau sebanyak 126.529 orang, mengalami penurunan dibanding TPT Februari 2018 yang sebesar 6,90 persen (125.167 orang).

Pada bulan Februari 2019, penduduk di Provinsi Kalimantan Timur umumnya bekerja pada kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebesar 20,80 persen, berikutnya adalah kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 20,52 persen dan kegiatan di kategori Jasa-jasa sebesar 11,03 persen.

Untuk lebih jelasnya pencapaian Tingkat Pengangguran terbuka di Kabupaten Kutai Barat jika dibandingkan dengan TPT provinsi dan Nasional tampak pada table dibawah ini :

Tabel 3.48
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kutai Barat
Di Bandingkan TPT Provinsi dan TPT Nasional
Tahun 2019



| Indikator Kinerja | Satuan | Kabupaten Kutai Barat | Provinsi Kalimantan Timur | Nasional |
|------------------------------------|--------|-----------------------|---------------------------|----------|
| Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | % | 5,08 | 6,66 | 5,28 |

Sumber data : BPS

Berdasarkan Tabel diatas Tingkat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kutai Barat tahun 2019 lebih rendah 1,58% dibandingkan TPT Provinsi sebesar 6,66%, dan lebih rendah 0,2% jika dibandingkan dengan TPT Nasional sebesar 5,28%.

Dalam pencapaian sasaran **Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka** terdapat permasalahan yang dihadapi antara lain :

l. Kurangnya SDM Tenaga Kerja Lokal yang bersertifikasi (skill/keahlian yang dibutuhkan perusahaan)

kurangnya sosialisasi Undang-undang Ketenagakerjaan bagi Pengusaha dan Pekerja
Persentase kenaikan anggaran pelatihan bagi tenaga kerja tidak seimbang dengan kenaikan jumlah usia kerja yang belum bekerja

Strategi dan upaya untuk mempertahankan pencapaian sasaran **Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka** yang bisa dilakukan yaitu :

m. Melaksanakan amanat undang-undang Ketenagakerjaan.

Mengupayakan percepatan penyelesaian Balai Latihan Kerja di Kabupaten Kutai Barat.

Peningkatan Anggaran operasional pendukung pelaksana undang-undang ketenagakerjaan bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Barat.

Untuk mendukung sasaran menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai Perangkat Daerah yang mengampu sasaran ini melaksanakan 2 (dua) Program dan 29 (dua puluh sembilan) Kegiatan, diantaranya :

1. **Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja**, dengan kegiatan yang mendukung:
 - a. Fasilitasi Akses Informasi Pasar Tenaga Kerja (Job Canvassing)
 - b. Pemantauan Penempatan Tenaga Kerja
 - c. Pendataan Tenaga Kerja Asing
 - d. Pelayanan Kartu Pencari Kerja (AK1)
 - e. Koordinasi penyusunan rencana penempatan tenaga kerja dan informasi pasar kerja



- f. Penyusunan Data Penempatan Pencari Kerja
 - g. Pendataan dan Pembinaan terhadap Lembaga Penyalur Tenaga Kerja (LPTKS)
 - h. Survey penempatan ketenagakerjaan daerah pada perusahaan
 - i. Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja Melalui Media Cetak dan Elektronik
 - j. Koordinasi dan Penyusunan Booklet Produktivitas dan Informasi Pasar Kerja
 - k. Pendataan Angkatan Tenaga Kerja Produktif
 - l. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja (Diklat Operator Alat Berat)
 - m. Pelatihan dan Magang dan Kerjasama dengan Swasta dalam menyerap Tenaga Kerja Lokal
 - n. Pembersihan Lokasi BLK
 - o. Penilaian dan Pengembangan Desa Produktif
 - p. Bimbingan Konsultasi Produktivitas
2. **Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan,** dengan kegiatan diantaranya :
- a. Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
 - b. Fasilitasi Pembentukan dan Pembinaan LKS Bipartit & Tripartit
 - c. Pendataan Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Bersama di Perusahaan
 - d. Penanganan Kasus Unjuk Rasa/ Mogok Kerja PHK di Perusahaan
 - e. Verifikasi PK, PKWT dan PKWTT di Perusahaan
 - f. Monitoring pelaksanaan penyelesaian kasus hubungan industrial
 - g. Monitoring Pelaksanaan UMK-UMSK pada perusahaan di wilayah Kabupaten Kutai Barat
 - h. Perjanjian Kerja bersama untuk perusahaan yang hanya 1 (satu) Daerah
 - i. Peningkatan pembinaan hubungan industrial
 - j. Pendataan kepesertaan JAMSOSTEK karyawan pada perusahaan
 - k. Verifikasi dan pembinaan keanggotaan serikat pekerja/buruh di perusahaan
 - l. Survey KHL
 - m. Peningkatan Kapasitas Aparatur Dalam Pencegahan dan Penyelesaian Hubungan Industrial



Tabel 3.49
Realisasi Kinerja Sasaran 10 Dibandingkan Target Akhir RPJMD

| Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi Kinerja s/d Tahun 2019 | Target Akhir RPJMD | Persentase Capaian Kinerja (%) |
|------------------------------|--------|----------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 5,08 | 5,00 | 84% |

Sampai dengan tahun 2019 target Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sudah mencapai angka 84% dari target akhir RPJMD pada tahun 2021 dimana TPT yang dipatok sebesar 5%. Dimana dalam 2 (dua) tahun yang tersisa Dinas Tenaga Kerja harus memaksimalkan kinerjanya agar target akhir yang dicangkakan dapat di capai sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena penduduk sebagian besar telah bekerja.

Sasaran 11 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran strategis 11 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ke empat yang ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021 yaitu “ **Pembangunan Ekonomi Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Sektor Ekonomi Potensial Dalam Upaya Penciptaan Lapangan Kerja Dan Peningkatan Pendapatan Masyarakat, Dengan Tetap Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup**” dan tujuan “**Mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan**”.

Pencapaian sasaran ini diampu oleh Dinas Lingkungan Hidup. Untuk menilai keberhasilan/kegagalan sasaran 11 menggunakan 1 (satu) indikator kinerja dengan tingkat keberhasilan **180,67 %** dengan kategori “ **SB (Sangat Berhasil)**”. Pencapaian target kinerja sasaran **Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup** seperti tampak pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.50
Persentase Keberhasilan/Kegagalan Sasaran 11

| Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2018 | | Capaian Tahun 2018 | Tahun 2019 | | Capaian Tahun 2019 | |
|----------------------------------|--------|------------|-----------|--------------------|------------|-----------|--------------------|----------|
| | | Target | Realisasi | | Target | Realisasi | % | Kategori |
| Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | % | 80,35 | | | 81,11 | 78,58 | 96,88 | SB |
| Tingkat Keberhasilan | | | | | | | 96,88 | SB |



Untuk mendukung sasaran meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup sebagai Perangkat Daerah yang mengampu sasaran ini melaksanakan 2 (dua) Program dan 29 (dua puluh sembilan) Kegiatan, diantaranya :

- 1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja**, dengan kegiatan yang mendukung:
 - a. Koordinasi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
 - b. Pembinaan dan Pengawasan Pengendalian Pencemaran Air Kegiatan/Usaha Pertambangan, Perkebunan dan Pengelolaan Hasil Hutan
 - c. Monitoring, Pembinaan dan Pengendalian Penyimpan & Pengelola B3
 - d. Koordinasi dan Pemantauan Kualitas Udara Dalam Baku Mutu Lingkungan
 - e. Pemantauan Kualitas Air Dalam evaluasi Baku Mutu Lingkungan Perairan
 - f. Inventarisasi Jenis Usaha/Kegiatan Industri Rumah Tangga, Hotel, Rumah Sakit dan Rumah Makan
 - g. Pengujian Kualitas Lingkungan (Air, Tanah, Udara) di area Pemukiman Industri
 - h. Verifikasi Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TPS-LB3)
- 2. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam**, dengan kegiatan diantaranya :
 - a. Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA
 - b. Perlindungan dan Pengelolaan Revegetasi Bantaran Sub – DAS
 - c. Penghijauan Wilayah Rawan Longsor
 - d. Penghijauan Sumber Mata Air
 - e. Perlindungan dan Pengelolaan Danau di Kutai Barat
 - f. Sosialisasi Perlindungan dan Pengelolaan Hutan Adat
- 3. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**, dengan Kegiatan diantaranya :
 - a. Pembinaan Kota Kecamatan Peduli Lingkungan (Persiapan Kota Adipura)
 - b. Penilaian Kota Kecamatan Peduli Lingkungan (Persiapan Kota Adipura)
 - c. Penyusunan Data Kualitas Lingkungan Hidup (Tanah, Air Sumur, Limbah Padat, Limbah Cair, Air Sungai, Udara Ambient, Uji Emisi Kendaraan Bermotor)
 - d. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim dan penurunan emisi GRK
- 4. Program Pengembangan dan Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan**, dengan Kegiatan diantaranya :



- a. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah Dengan Metode 3R
 - b. Pendidikan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Pembuatan lobang Biopori
 - c. Sosialisasi Pedoman Pengelolaan Sampah di Sekolah
 - d. Pembentukan Kelompok Peduli Sampah
 - e. Pengadaan Alat Angkut Sampah Dump Truck (Dak Penugasan)
- 5. Program Pengendalian Pencemaran LH dan Pengujian Kualitas Lingkungan**, dengan kegiatan :
- a. Pengujian Kualitas Udara Ambien
 - b. Pengujian Komponen Lingkungan Kualitas Air Sungai di Kabupaten Kutai Barat
 - c. Pengujian Kualitas Tanah
- 6. Program Penatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup**, dengan kegiatan :
- a. Pengawasan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
 - b. Inventarisasi dan Verifikasi Pengaduan Masyarakat Terhadap Pencemaran Lingkungan
 - c. Pengaduan dan Pelayanan Penyelesaian sengketa lingkungan hidup (pos-P3SLH)
 - d. Evaluasi Peraturan Kepres No.32 tahun 1990 tentang pengelolaan kawasan lingkungan pada kegiatan usaha pertambangan dan perkebunan
 - e. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Teknologi dan Sumberdaya Manusia
- 7. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Teknologi dan Sumberdaya Manusia**
- a. Evaluasi Penerapan RKL/RPL, UKL-UPL, pada pemanfaatan SDM
 - b. Pelatihan tentang lingkungan hidup AMDAL, A, B, C, Audit Lingkungan, GIS, dll
 - c. Peningkatan Kapasitas SDM dan Penerapan RKL
- 8. Program Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan**
- a. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penunjang Operasional UPTD Laboratorium Lingkungan
 - b. Standarisasi dan Kalibrasi Peralatan Laboratorium Lingkungan Dalam Rangka Memenuhi Standart Akreditasi
 - c. Proses Akreditasi Laboratorium Pengujian Sesuai dengan Standart ISO/IEC 17025:2008 pada Komite Akreditasi Nasional (KAN)
- 9. Program Pengujian Kualitas Lingkungan**
- a. Pengadaan Peralatan Pemantauan dan Pengujian Kualitas Udara Ambient



- b. Pengujian kadar kualitas air yang digunakan masyarakat sebagai sumber air minum
- c. Pengujian Kadar Kualitas Air Resapan dan Air Tanah untuk Sumur Bor yang digunakan Masyarakat
- d. Pengujian Kadar Kualitas Air dan Hasil Usaha Air Kemasan dan Isi Ulang

Tabel 3.51
Realisasi Kinerja Sasaran 11 Dibandingkan Target Akhir RPJMD

| Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi Kinerja s/d Tahun 2019 | Target Akhir RPJMD | Persentase Capaian Kinerja (%) |
|---|--------|----------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | % | 78,58 | 82,63 | 95.09% |

Sasaran 12 : Menurunnya Kemiskinan di Kutai Barat

Sasaran strategis 12 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ke Lima yang ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021 yaitu " **Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Lokal, terutama masyarakat Miskin dan Tidak Mampu**" dan tujuan " **Penurunan Kemiskinan di Kutai Barat**".

Capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Penduduk diatas Garis Kemiskinan** di Kutai Barat, merupakan tugas hampir semua Perangkat Daerah yang dilakukan secara holistik dan integratif. Namun beberapa Perangkat Daerah yang dinilai paling dominan dan memegang peranan penting dalam menurunkan angka kemiskinan di Kutai Barat diantaranya Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung, Disperindagkop, Dinas Pertanian dan Perikanan. Pengukuran keberhasilan kinerja pada sasaran ini menggunakan indikator .

Pencapaian keberhasilan/kegagalan sasaran 12 menggunakan 1 (satu) indikator kinerja dengan tingkat keberhasilan **97,96 %** dengan kategori " **SB (Sangat Berhasil)**". Pencapaian target kinerja sasaran **Meningkatnya Prosentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan** seperti tampak pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.52
Persentase Keberhasilan/Kegagalan Sasaran 12



| Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2018 | | Capaian Tahun 2018 | Tahun 2019 | | Capaian Tahun 2019 | |
|---|--------|------------|-----------|--------------------|------------|-----------|--------------------|----------|
| | | Target | Realisasi | | Target | Realisasi | % | Kategori |
| Prosentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan | % | 92,60 | 90,85 | 98,11 | 92,80 | 90,91 | 97,96 | SB |
| Tingkat Keberhasilan | | | | | | | 97,96 | SB |

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Prosentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan di Kutai Barat mengalami peningkatan . Pada tahun 2018 sebesar 90,85% meningkat 0,06% pada tahun 2019 atau sebesar 90,91% Penduduk Kabupaten Kutai Barat diatas garis kemiskinan dan sisanya sebesar 9,09% adalah angka kemiskinan atau sebanyak 13.450 orang dari 148.020 Jumlah Penduduk dikabupaten Kutai Barat. Angka kemiskinan di Kutai Barat dalam beberapa tahun terakhir dipengaruhi beberapa faktor

- Sektor-sektor lapangan usaha lain Seperti Pertanian yang Merupakan sektor yang memiliki kontribusi besar dalam penyusunan PDRB selain Pertambangan dan Penggalian belum menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam mendongkrak perekonomian di Kutai Barat. Hal ini disebabkan oleh penurunan luas lahan produksi yang diakibatkan alih fungsi lahan pada sektor sektor tersebut dan harga komodity unggulan pada sektor pertanian masih rendah.
- Penerimaan Pendapatan daerah terutama dari sumber dana perimbangan tidak mencapai target hal ini juga memberikan pengaruh signifikan terhadap menurunnya daya beli masyarakat yang menyebabkan berkurangnya peredaran uang di pasar sebagai akibat dari terbatasnya pembangunan daerah.
- Selanjutnya dilihat dari data dari BPS, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kutai Barat dalam 2 tahun terakhir mengalami penurunan. Pada tahun 2018 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kutai Barat sebanyak 13,490 jiwa, menurun pada tahun 2019 yang berjumlah 13.450 jiwa.
- Untuk menurunkan angka kemiskinan Pemerintah Daerah telah dan akan tetap memprioritaskan program kegiatan yang memberikan dampak langsung terhadap penurunan angka kemiskinan program program tersebut di fokuskan untuk peningkatan kinerja sektor sektor yang paling dapat diunggulkan karena mempunyai daya saing paling kuat dan pertumbuhan paling pesat yaitu sektor Pertanian dan Perikanan. Kebijakan sektor pertanian dalam arti luas lebih di tekankan pada Peningkatan produksi pertanian dalam arti luas dengan sistem Intensifikasi dan rehabilitasi.
- Berdasarkan data yang dikeluarkan BPS Kutai Barat, angka kemiskinan Kabupaten Kutai Barat di tahun 2019 berada pada 9,09 persen. Kondisi ini mengalami



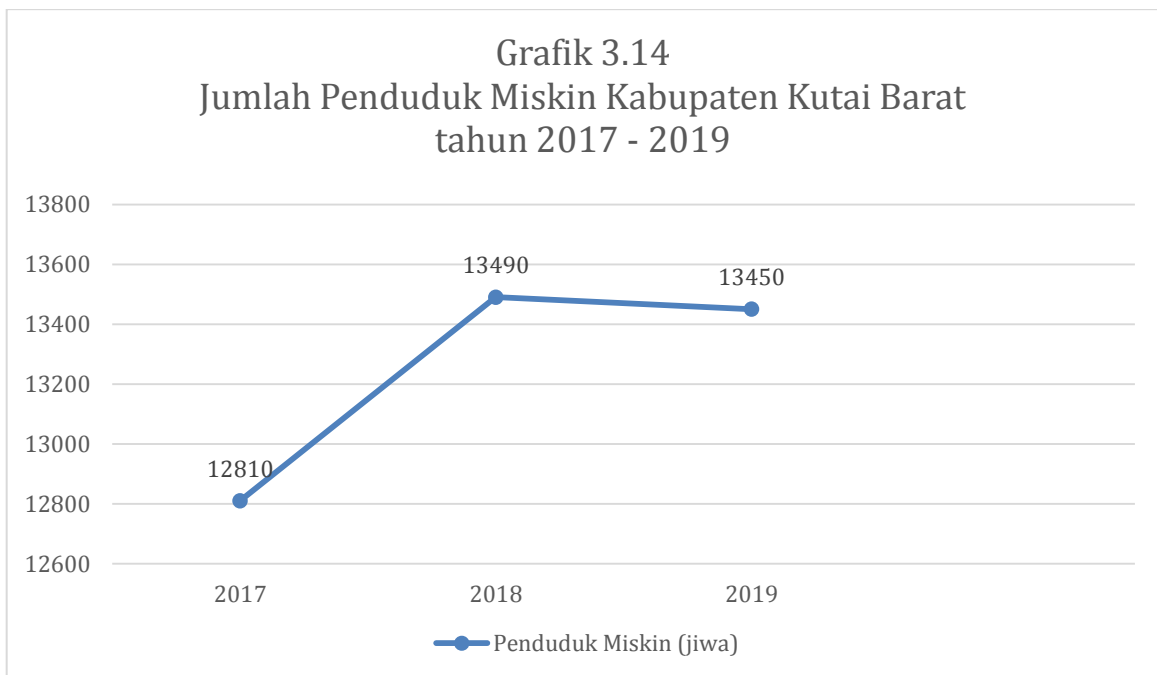
penurunan sebesar 0,06 persen dari angka kemiskinan tahun 2018 atau sebesar 9,15%. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 3.13



Sumber Data : BPS Kabupaten Kutai Barat

Selanjutnya berdasarkan data dari BPS, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kutai Barat dalam 2 tahun terakhir cenderung mengalami penurunan. Walaupun pada tahun 2018 Jumlah penduduk miskin meningkat yaitu dari 12.810 jiwa pada tahun 2017 menjadi 13.490 jiwa pada tahun 2018, namun pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kutai Barat mengalami penurunan sebanyak 13,450 jiwa, Seperti pada grafik dibawah :



Angka Kemiskinan Kabupaten Kutai Barat dibandingkan dengan Angka Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional

a. Angka Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur

Jumlah penduduk miskin di Kalimantan Timur pada Maret 2019 sebanyak 219,92 ribu (5,94 persen). Pada September 2018 sebanyak 222,39 ribu (6,06 persen), berarti jumlah penduduk miskin secara absolut berkurang 2,47 ribu orang (turun 0,12 persen poin).

Selama September 2018 – Maret 2019, garis kemiskinan (GK) naik sebesar 1,83 persen, yaitu dari Rp.598.200,- per kapita per bulan pada September 2018 menjadi Rp.609.155,- per kapita per bulan pada Maret 2019.

Periode September 2018 – Maret 2019, Indeks Kedalaman Kemiskinan naik dari 0,764 pada keadaan September 2018 menjadi 0,910 pada keadaan Maret 2019. Indeks Keparahan Kemiskinan juga naik dari 0,148 menjadi 0,210 pada periode yang sama.

Pada Maret 2019, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk yang diukur oleh Gini Ratio tercatat sebesar 0,330. Angka ini lebih kecil jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2018 (0,342).

Pada Maret 2019, distribusi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah adalah sebesar 20,24 persen. Artinya pengeluaran penduduk masih berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.



b. Angka Kemiskinan Nasional

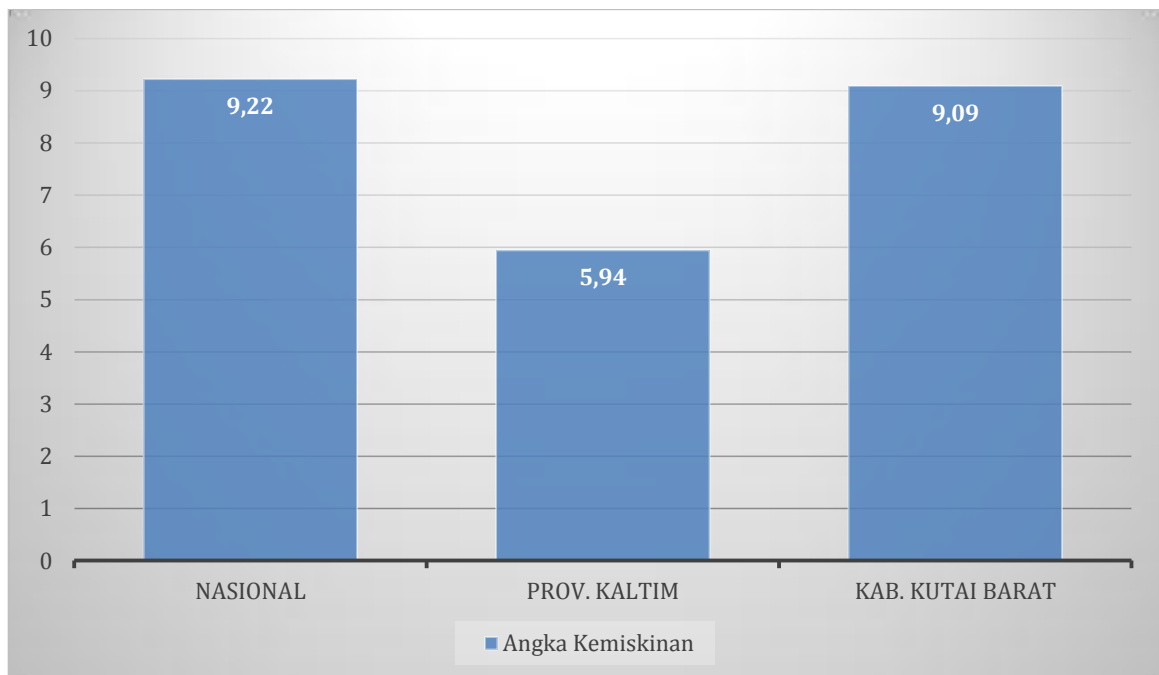
Berdasarkan Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat angka Kemiskinan Nasional pada September 2019 mencapai 9,22 persen. Angka ini turun 0,19 persen poin terhadap Maret 2019 dan menurun 0,44 persen poin terhadap September 2018.

Sementara jumlah penduduk miskin pada September 2019 tercatat 24,79 juta orang. Angka tersebut turun 0,36 juta orang terhadap Maret 2019 dan menurun 0,88 juta orang terhadap September 2018.

Dalam menghitung angka kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan (makanan dan bukan makanan). Metode ini dipakai BPS sejak tahun 1998 supaya hasil perhitungan konsisten dan terbanding dari waktu ke waktu (secara apple to apple), Namun meskipun secara total kemiskinan turun, tapi masih ada permasalahan tingginya disparitas kemiskinan antara perkotaan dan perdesaan masih tinggi. Persentase kemiskinan di kota pada September 2019 tercatat 6,56 persen, sedangkan persentase kemiskinan di perdesaan mencapai 12,60 persen. Diperlukan upaya yang lebih keras dari Pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan di daerah perdesaan yang mayoritas penduduknya bekerja di sector Pertanian.

Untuk lebih jelasnya Perbandingan Angka kemiskinan Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional dapat dilihat pada table berikut ini :

Grafik 3.15 Perbandingan Angka Kemiskinan Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional



Sumber Data : BPS Kabupaten Kutai Barat

Berdasarkan tabel diatas maka angka Kemiskinan di Kabupaten Kutai Barat lebih tinggi 3,15% dari dari Angka Kemiskinan Provinsi Kaltim sebesar 5,94%, namun lebih rendah 0,13% dari angka kemiskinan Nasional diangka 9,22%.

Tabel 3.53
Realisasi Kinerja Sasaran 12 Dibandingkan Target Akhir RPJMD

| Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi Kinerja s/d Tahun 2019 | Target Akhir RPJMD | Persentase Capaian Kinerja (%) |
|---|--------|----------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| Prosentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan | % | 90,91 | 93,20 | 97,54 |

Dalam RPJMD 2016-2021, Target akhir Prosentase Penduduk diatas Garis kemiskinan ditarget 93,20% sampai dengan tahun 2019 sudah mencapai 90,91% atau sudah sebesar 97,54%. Diperlukan kerja keras dari seluruh Perangkat Daerah untuk memenuhi target yang sudah ditetapkan dengan melakukan kolaborasi bersama agar angka kemiskinan menurun yang berakibat pada meningkatnya Prosentase Penduduk diatas garis kemiskinan di Kabupaten Kutai Barat.

Sasaran 13 : Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban bagi Masyarakat.



Perangkat Daerah pelaksana untuk indikator sasaran **Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban bagi Masyarakat** ada 2 (dua) yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja. Untuk menilai keberhasilan/kegagalan sasaran 13 menggunakan 2 indikator kinerja dengan tingkat keberhasilan **115,47%** dengan kategori **"SANGAT BERHASIL (SB)"**. Pencapaian target kinerja sasaran 13 seperti tampak pada tabel 13.1

Tabel 3.54
Persentase keberhasilan/kegagalan sasaran 13

| Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2018 | | Capaian Tahun 2016 | Tahun 2019 | | Capaian Tahun 2019 | |
|--|--------|------------|-----------|--------------------|------------|-----------|--------------------|----------|
| | | Target | Realisasi | | Target | Realisasi | % | Kategori |
| Prosentase Penyelesaian Angka Konflik | % | na | | | 75% | 73,75 | 98,33% | SB |
| Prosentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) | % | na | | | 89% | 98% | 110,11% | SB |
| Tingkat Keberhasilan | | | | | | | 104,22 | (SB) |

Berdasarkan tabel 13.1 diatas diketahui bahwa capaian kinerja pada tahun 2019 untuk sasaran 13 yakni **Meningkatnya Keamanan dan ketertiban bagi masyarakat** dapat disimpulkan bahwa sasaran 13 memberikan hasil kinerja memuaskan karena telah mencapai semua indikator yang di ukur telah sesuai target yang di tetapkan. Adapun pencapaian sasaran pada masing – masing indikator kinerja dapat di jelaskan melalui analisis sebagai berikut :

1. Prosentase Penyelesaian Angka Konflik

Penanganan Konflik Sosial menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi Konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik.



Undang-undang ini, dalam penanganan konflik harus mencerminkan asas kemanusiaan, hak asasi manusia, kebangsaan, kekeluargaan, mengacu pada bhineka tunggal ika, keadilan, esetaraan gender, ketertiban, dan kepastian hukum. Juga mencerminkan keberlanjutan, kearifan lokal, tanggung jawab negara, partisipatif, tidak memihak, dan tidak membedakan.

Tujuan Penanganan Konflik Sosial, menurut Pasal 3 undang-undang ini, adalah menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai dan sejahtera. Kemudian memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan. Meningkatkan tenggang rasa dan toleransi, memelihara fungsi pemerintahan, melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana umum. Serta memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban, dan memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat serta sarana dan prasarana umum.

Konflik dapat bersumber dari:

- permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya;
- perseteruan antar umat beragama dan/atau inter umat beragama, antar suku, dan antar etnis;
- sengketa batas wilayah desa, kabupaten/kota, dan/atau provinsi;
- sengketa sumber daya alam antar masyarakat dan/atau antar masyarakat dengan pelaku usaha; atau
- distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat.

Jumlah Penanganan Konflik dikabupaten Kutai Barat pada tahun 2019 dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 3.55
Jumlah konflik yang terjadi menurut jenis konflik
di Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019

| No | Jenis Konflik | Jumlah Konflik | Tempat Kejadian dan permasalahan | Prosentase Penyelesaian | Keterangan |
|----|---|----------------|---|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | Politik, Ekonomi dan social Budaya | - | | | |
| 2 | Perseteruan antar Umat Beragama dan inter umat beragama, antar suku dan antar etnis | 3 | Penyimpanagan Ajaran Agama Islam ASMA DUTA pimpinan Abah Sabirin di Lingang Bangun Sari | 100% | Sudah dimediasi dan selesai |
| | | | Sengketa Izin Rumah Ibadah Agama Islam (langgar) Kampung Belusuh Kec. Siluq Ngurai | 100% | Sudah dimediasi dan selesai |



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019

| | | | | | |
|---|---|----|---|------|--|
| | | | Sengketa Izin Rumah Ibadah Agama Islam (Masjid) Kampung Ngeyan Asa Kec. Barong Tongkok | 60% | Sudah dimediasi 1 kali dan masih dalam tahap mediasi lanjutan |
| 3 | Sengketa batas wilayah desa, Kabupaten/Kota dan atau provinsi | 11 | Fasilitasi Perselisihan Batas Kampung Linggang Bigung dengan Kampung Bangun Sari kec Linggang Bigung | 100% | Dari hasil Fasilitas Tidak Tercapai Kesepakatan Menunggu Tindak Lanjut Pemkab Kutai Barat dengan Menerbitkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas kampung.(Selesai) |
| | | | Fasilitasi Perselisihan Perbatasan Kel Melak Ulu Kec Melak dengan Kamp Sekolaq Oday Kampung Sekolaq Muliaq dan Kamp Leleng Kec Sekolaq Darat. | 50% | Dari hasil Fasilitas telah dicapai Kesepakatan batas antara Pemerintah Kel Melak Ulu dengan Kamp Leleng akan ditindaklanjuti oleh Pemkab Kubar dengan Pemasangan Pilar Batas. Sementara Pemerintah Kel Melak Ulu dengan Pemerintahan Kamp Sekolaq Oday dan Kampung Sekolaq Muliaq tidak dicapai Kesepakatan, Menunggu Tindak Lanjut Pemkab Kutai Barat dengan Menerbitkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas kampung (Selesai) |
| | | | Fasilitasi Perselisihan Batas Kampung Linggang Marimun dengan Kampung Linggang Muara Batuq dan Kampung Merayaq Kec Mook Manaar Bulatn. | 50% | Dari hasil Fasilitas tidak tercapai Kesepakatan Menunggu Tindak Lanjut Pemkab Kutai Barat dengan Menerbitkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas kampung. (Selesai) |
| | | | Fasilitasi Penegasan Batas Kelurahan Simpang Raya dengan Kelurahan Barong Tongkok Kecamatan Barong Tongkok | 100% | Dari hasil Fasilitas telah dicapai Kesepakatan, dengan Melakukan Pemasangan 8 Pilar Batas Utama (PBU tipe D) dilikasi-lokasi yang disepakati. (Selesai) |
| | | | Fasilitasi Batas Kampung Lemper, Kampung deraya, Kampung Pereng Talik dan Kampung Tanjung Soke Kec Bongan. | 50% | Dari hasil Fasilitas Tidak Tercapai Kesepakatan Menunggu Tindak Lanjut Pemkab Kutai Barat dengan Menerbitkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas kampung (Selesai) |



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019

| | | | | | |
|--|--|--|--|------|--|
| | | | Fasilitasi Batas Kampung Mantar Kecamatan dengan Kampung Sentalar Kec Nyuatan. | 50% | Dari hasil Fasilitas Tidak Terpenuhi Kesepakatan Menunggu Tindak Lanjut Pemkab Kutai Barat dengan Menerbitkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas kampung (Selesai) |
| | | | Fasilitasi Batas Kampung Linggang Marimun dengan Kampung Muara Kalaq | 80% | Dari Fasilitas Telah dicapai Kesepakatan batas Menunggu Tindak Lanjut Pemkab Kutai Barat dengan Menerbitkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas kampung (Selesai) |
| | | | Fasilitasi Batas Kampung Tondoh dengan Kampung Abit dan Kampung Muara Jawaq Kec Mook Manaar Bulatn. | 80% | Dari Fasilitas Telah dicapai Kesepakatan batas antara pemerintah Kampung Tondo, dengan Kampung Abit dan Kampung Muara Jawaq Kec Mook Manaar Bulatn yang akan ditindaklanjuti dengan Menerbitkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas kampung (Selesai) |
| | | | Fasilitasi Batas Kelurahan Simpang Raya, Kampung Mencimai Sari dan Kampung Belempung Ulaq Kec Barong Tongkok dengan Kampung Sekolaq Joleq dan Kampung Sumber Bangun Kec Sekolaq Darat. | 80% | Dari Fasilitas Telah dicapai Kesepakatan batas Kelurahan Simpang Raya, Kampung Mencimai dan Pemerintah Sekolaq joleq yang akan ditindaklanjuti dengan Pemasangan Pilar Batas. Sementara Untuk Kampung-kampung yang belum Mencapai Kesepakatan akan ditindaklanjuti dengan Menerbitkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas kampung (Selesai) |
| | | | Fasilitasi Penetapan Batas Kelurahan Simpang Raya dengan Kampung Mencimai Kec Barong Tongkok | 100% | Dari Fasilitas Telah dicapai Kesepakatan batas ,pemkab Kutai Barat Telah Melakukan Pemasangan 2 Pilar Batas Utama (BPU Tipe D) dilokasi yang Disepakati (Selesai) |
| | | | Fasilitasi Penetapan Batas Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok dengan kampung sekolaq Joleq Kecamatan Sekolaq Darat. | 100% | Dari Fasilitas Telah dicapai Kesepakatan batas, pemkab Kutai Barat Telah Melakukan Pemasangan 5 Pilar Batas Utama (BPU Tipe D) dilokasi yang Disepakati (Selesai) |



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019

| | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|------|--|
| 4 | sengketa sumber daya alam antar masyarakat dan/atau antar masyarakat dengan pelaku usaha | 13 | kelompok 14 dengan PT.Kelian Equatorial Mining (KEM) di Kampung Tutung Kec. Linggang Bigung | 100% | Sudah di mediasi 2 kali dan dilanjutkan ke Pengadilan (Selesai) |
| | | | Masyarakat Kamp Muhur dengan PT Gunung Bayan Pratama Coal (GBPC) di Kampung Muhur Kec. Siluq Ngurai | 80% | Sudah di mediasi 2 kali dan masih dalam tahap mediasi Lanjutan (Selesai) |
| | | | Pengklaiman Lahan Diyanto Lau Wila yang dijual sdra. Amarsyah, Abed Nego CS ke PT Ari Base Camp Menteng di Kampung Bentas Kec.Siluq Ngurai | 50% | Sudah di mediasi 1 kali dan masih dalam tahap mediasi Lanjutan (Selesai) |
| | | | Saudara Kusnadi Ms. Ddengan PT Trubaido Coal Mining (TCM) diKampung Suakong Kec Bentian Besar | 80% | Sudah di mediasi 3 kali dan masih dalam tahap mediasi Lanjutan (Selesai) |
| | | | Kelompok Dien Melanyur Tamen Putih dengan PT Gunung Bara Utama (GBU) di Kampung sembuan Kec Nyuatan | 80% | Sudah di mediasi 3 kali dan masih dalam tahap mediasi Lanjutan (Selesai) |
| | | | Saudara Hun dengan PT. Borneo Surya Mining Jaya (BSMJ) di Kampung lempunah kec Jempang | 80% | Sudah di mediasi 2 kali dan masih dalam tahap mediasi Lanjutan (Selesai) |
| | | | Masyarakat Kampung Suakong (lembaga adat dayak kab kutai barat) dengan PT.Borneo Citra Persada Jaya di Kampung Suakong Kec Bentian Besar | 80% | Sudah di mediasi 2 kali dan masih dalam tahap mediasi Lanjutan (Selesai) |
| | | | Saudara Salvinus Ulin dengan PT Harapan Rimba Raya (HRR) di Kampung Besiq Kec. Damai | 50% | Sudah di mediasi 2 kali dan masih dalam tahap mediasi Lanjutan (Selesai) |
| | | | Saudara Manardimansyah deng PT Gunung Bara Utama (GBU) di Kampung sembuan Kec Nyuatan | 50% | Sudah di mediasi 1 kali dan masih dalam tahap mediasi Lanjutan (Belum Selesai) |
| | | | Permasalahan Longsoran Pasir Saudara basri dengan PT Teguh sinar Abadi (TSA) di Kampung Mendung Kec. Muara Pahu | 100% | Sudah Dimediasi dan Clear (Selesai) |
| | | | Permasalahan Lahan Saudara Hermanika dengan PT.MHM di Kelurahan Melak ilir Kec.Melak | 80% | Dikembalikan ke Pemerintah Kampung untuk Mediasi(Selesai) |
| Permasalahan Lokasi Jalan Umum antara masyarakat Kampung Bunyut (saudara Asrul dan Saiful) dengan PT Gunung Bara Utama (GBU) di Kampung Muara Bunyut. Kec | 50% | Sudah Dimediasi namun Belum Selesai | | | |



| | | | | | |
|------------------------|--|---------|--|-----------|--|
| | | | Melak | | |
| | | | Permasalahan Lahan Saudari Yuliana Lavina dengan Yeni CS. Di Kampung Benggeris Kec. Muara Lawa | 50% | Sudah di mediasi 1 kali dan masih dalam tahap mediasi Lanjutan (Selesai) |
| | | | Pengklaiman Ganti rugi lokasi dan tanam Tumbuh Milik saudara Rayug Rampan oleh PT Gunung Bara Utama (GBU) di Kampung Muara Tokong Kec. Damai | 50% | Sudah di mediasi 1 kali dan masih dalam tahap mediasi Lanjutan (Selesai) |
| | | | Permasalahan Lahan antara Ibu Lilin dengan bapak Elsa Wijaya MK di Kampung Betung Kec. Silug Ngurai | 80% | Sudah di mediasi 1 kali dan masih dalam tahap mediasi Lanjutan (Selesai) |
| | | | Permasalahan lahan Saudara Meladi dengan Saudari Yuliani Lavina di Kampung Benggeris Kec. Muara Lawa | 100% | Sudah Dimediasi dan Clear (Selesai) |
| | | | Permasalahan Lahan saudara Sepe Martinus dengan PT Energi Batu Hitam di Kampung dingin Kec. Muara Lawa | 100% | Sudah Dimediasi dan Clear (Selesai) |
| 5 | distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat | Tdk ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
| PROSENTASE PENYELESIAN | | | | 73,75 | |

Pencegahan Konflik dilakukan dengan upaya:

- memelihara kondisi damai dalam masyarakat;
- mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai;
- meredam potensi Konflik; dan
- membangun sistem peringatan dini.

2. Prosentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)

Perangkat Daerah Pengampu Indikator Prosentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) adalah Satuan Polisi Pamong Praja. Sesuai tugas dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja menterjemahkannya dalam sasaran strategisnya diantaranya :



1. Meningkatnya pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat .

Dalam melaksanakan sasaran ini, Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan Patroli rutin untuk memastikan ada atau tidak adanya pelanggaran Peraturan Daerah terkait Pelanggaran K3 diwilayah Kabupaten Kutai Barat. Patroli dimaksudkan juga sebagai fungsi pengawasan terhadap beberapa Baliho dan reklame yang dipasang telah memenuhi ketentuan yang berlaku, untuk lebih jelasnya kegiatan Patroli yang dimaksud terdapat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 3.56
Kawasan bebas Reklame

| No | Kawasan Bebas Reklame | Tertib / Belum Tertib |
|----|--|-----------------------|
| 1 | Alun- alun ITHO dan sekitarnya | Tertib |
| 2 | Depan gedung milik pemerintah Kab. Kubar | Tertib |

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja

Kawasan tersebut dipatroli dan ditertibkan oleh Satpol PP secara intensif. Apabila diketahui terdapat pemasangan reklame di kawasan tersebut maka Satpol PP akan mengambil tindakan.

Selain di kawasan bebas reklame, penertiban reklame juga dilakukan di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Barat. Pada dasarnya kasus pelanggaran pemasangan reklame kebanyakan dilakukan pada reklame liar tanpa ijin.

Tabel. 3.57
Kawasan bebas PKL yang tertib

| No | Kawasan bebas PKL | Tertib / Belum Tertib |
|----|--------------------------------|-----------------------|
| 1 | Alun- alun ITHO dan sekitarnya | Tertib |
| 2 | Komplek perkantoran | Tertib |
| 3 | Rumah sakit HIS | Tertib |



| | | |
|---|--|--------------|
| 4 | Jalan 2 Jalur/Sendawar Raya/Barong Tongkok/Melak. | Tertib |
| 5 | Dermaga Melak | Belum Tertib |

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja

Kawasan bebas PKL dipatroli dan ditertibkan oleh Satpol PP secara intensif. Apabila diketahui terdapat pedagang kaki lima di kawasan tersebut maka Satpol PP akan mengambil tindakan.

2. **Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap perundang-undangan daerah.**

Dalam melaksanakan sasaran ini Satuan polisi Pamong Praja melakukan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya. Untuk lebih jelasnya terdapat dalam table dibawah ini :

Tabel 3.58
Jumlah penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya Tahun 2019

| No | Kategori | Jumlah pelanggaran yang dilaporkan/ diketahui petugas Satpol PP | Jumlah pelanggaran yang ditertibkan |
|----|--|--|-------------------------------------|
| 1. | Reklame | 40 | 40 |
| 2 | Pengamen, gelandangan, pengemis dan anak jalanan | 5 | 5 |
| 3. | PKS, warung remang-remang | 129 | 129 |
| 4. | Bangunan Liar, galian C dan toko modern tdak berijin | 20 | 20 |
| 5. | Orang gila | - | - |
| 6. | Penertiban / penataan PKL | 139 PKL | 139 PKL |



| | | | |
|----|---------------|---|---|
| 7. | Pelajar bolos | 4 | 4 |
|----|---------------|---|---|

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja

Dilakukan patrol kawasan yang telah ditentukan oleh peraturan daerah secara intensif, apabila terdapat tindak kriminal maka Satpol PP akan mengambil tindakan .

3. Terciptanya situasi yang aman dan tertib dilingkungan masyarakat.

Untuk memastikan Kecamatan Penyangga Ibukota Kabupaten yang terdiri dari 4 (empat) Kecamatan yaitu : Barong Tongkok, Melak, Sekolaq Darat dan Linggang Bigung , dalam keadaan aman dan tertib maka Satuan Polisi Pamong Praja melakukan Patroli. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel. 3.59
Kecamatan yang dipatroli oleh Satpol PP

| No | Nama Kecamatan | Frekwensi Patroli |
|----|-----------------|-------------------|
| 1 | Barong Tongkok | 5 kali / minggu |
| 2 | Melak | 1 kali / minggu |
| 3 | Sekolaq darat | - |
| 4 | Linggang Bigung | - |

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja

Kawasan Kecamatan dan perkantoran tersebut dipatroli dan ditertibkan oleh Satpol PP secara intensif. Berdasarkan data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Satpol PP belum sesuai target.

4. Meningkatkan Kewaspadaan aparatur pemerintah dan tokoh masyarakat terhadap Kamtibmas

Dalam melaksanakan sasaran ini Satuan polisi Pamong Praja melakukan



bantuan pengamanan terhadap peringatan Hari-Hari Besar Nasional dan Hari-hari besar Keagamaan. Banyaknya event Hari-hari besar tersebut Satuan Polisi Pamong Praja berusaha untuk tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan rasa aman dan nyaman serta ketertiban dalam merayakan Hari-hari besar tersebut, walaupun ada beberapa event dimana Satuan Polisi Pamong Praja tidak mengirimkan anggotanya karena keterbatasan SDM dan anggaran. Untuk lebih jelasnya bentuk pengamanan yang diberika dapat dilihat dalam table dibawah ini :

Tabel 3.60
Event besar daerah Kabupaten Kutai Barat
yang diamankan Petugas Satpol PP

| No | Event besar daerah yang berhasil Petugas Satpol PP | Tertangani/Belum Tertangani |
|-----------|--|-----------------------------|
| A. | Pengamanan Hari-Hari Besar Keagamaan: | |
| 1. | Hari Raya kenaikan Isa Al Masih | Tertangani |
| 2 | Hari Raya Isra Miraj Nabi Muhammad | Belum Tertangani |
| 3 | Hari Raya Waisak | Belum Tertangani |
| 4 | Hari Raya Imlek | Belum Tertangani |
| 5 | Tahun Baru Islam | Belum Tertangani |
| 6 | Hari Raya Idul Fitri/Safari Ramadan | Tertangani |
| 7 | Hari Raya Idul Adha | Tertangani |
| 8 | Hari Raya Natal | Tertangani |
| B. | Pengamanan Hari Besar Nasional: | |
| 1 | Tahun Baru Masehi | Tertangani |
| 2 | Hari Buruh Internasional | Belum Tertangani |
| 3 | Hari Lahir Pancasila | Tertangani |
| 4 | Hari Kemerdekaan 17 Aguatus | Tertangani |
| 5 | Peringatan G.30 S PKI | Belum Tertangani |



| | | |
|----|---------------------------------|------------------|
| 6 | Hari Korpri | Tertangani |
| 7 | Hari Kartini | Belum Tertangani |
| 8 | Hari Pendidikan | Tertangani |
| 9 | Hari Kebangkitan Nasional | Belum Tertangani |
| 10 | Hari Koperasi | Tertangani |
| 11 | Hari Kesaktian Pancasila | Belum Tertangani |
| 12 | Hari Jadi Kabupaten Kutai Barat | Tertangani |

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja

Dari 20 event besar Kabupaten Kutai Barat terdapat 14 event yang di amankan oleh satpol PP, realisasi pencapaian pengamanan tidak memenuhi target, kendala yang dihadapi dalam capaian adalah;

1. Kurangnya jumlah anggaran.
2. Tidak adanya permintaan pengamanan, pada acara-acara tertentu.

Berdasarkan data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa satpol PP belum mencapai target.

Untuk membantu menjaga Ketertiban, Ktentraman dan Keindahan di Kabupaten Kutai Barat, Satuan Polisi Pamong Praja dibantu oleh petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS) yang berjumlah 2.520 orang yang tersebar di Kampung dan Kecamatan di wilayah Kabupaten Kutai Barat, sebaran dan jumlah Linmas tersebut dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 3.61
Rasio Anggota LINMAS per Kecamatan di Kabupaten Kutai Barat

| NO | KECAMATAN | JUMLAH KAMPUNG | LINMAS | | | L/P (Org) | |
|----|-----------------|----------------|------------|------------|------------|-----------|----|
| | | | KAB. (Org) | KEC. (Org) | KMP. (Org) | | |
| 1 | Barong Tongkok | 21 | | 30 | 210 | 235 | 5 |
| 2 | Melak | 6 | | 30 | 60 | 84 | 6 |
| 3 | Sekolaq Darat | 8 | | 30 | 80 | 97 | 13 |
| 4 | Linggang Bigung | 11 | | 30 | 110 | 132 | 8 |
| 5 | Muara Lawa | 8 | | 30 | 80 | 99 | 11 |
| 6 | Tering | 15 | | 30 | 150 | 172 | 8 |



| | | | | | | | |
|----|--------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 7 | Long Iram | 11 | | 30 | 110 | 134 | 6 |
| 8 | Muara Pahu | 12 | | 30 | 120 | 144 | 6 |
| 9 | Mook Manaar Bulatn | 16 | | 30 | 160 | 176 | 14 |
| 10 | Bentian Besar | 9 | | 30 | 90 | 109 | 11 |
| 11 | Damai | 17 | | 30 | 170 | 186 | 14 |
| 12 | Jempang | 12 | | 30 | 120 | 142 | 8 |
| 13 | Bongan | 16 | | 30 | 160 | 179 | 11 |
| 14 | Penyinggahan | 6 | | 30 | 60 | 78 | 12 |
| 15 | Nyuatan | 10 | | 30 | 100 | 124 | 6 |
| 16 | Siluq Ngurai | 16 | | 30 | 160 | 183 | 7 |
| | Jumlah | 194 | 100 | 480 | 1.940 | 2.274 | 146 |

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja

5. Meningkatnya Penanganan terhadap frekwensi kejadian kebakaran

Kabupaten Kutai Barat dengan luas sekitar 20.381,59 Km² atau kurang lebih mencapai 16,06% dari keseluruhan luas Provinsi Kalimantan Timur, dengan jumlah penduduk 164.048 jiwa yang tersebar di 16 Kecamatan dan 190 kampung dan 4 Kelurahan. Dengan Jumlah penyebaran penduduk yang tidak merata ditambah dengan luas wilayah yang ada Satuan Polisi Pamong Praja menjalankan salah satu tugas dan fungsinya melayani masyarakat yang tertimpa musibah kebakaran sebagai Petugas Pemadam Kebakaran.

Pada Tahun 2019 telah terjadi 138 kejadian kebakaran yang meliputi 58 kebakaran rumah dan 80 kali kebakaran hutan dan lahan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 3.62
Daerah jangkauan Bencana Kebakaran
yang tertangani Petugas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kutai Barat

| No | Kecamatan | Tertangani/ Belum tertangani | Lokasi | Jumlah Bencana Kebakaran | |
|----|----------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------|
| | | | | Rumah | Lahan |
| 1 | Barong Tongkok | Tertangani | Permukiman padat penduduk | 5 | 19 |



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019

| | | | | | |
|----|--------------------|------------------|---------------------------|----|----|
| 2 | Melak | Tertangani | Permukiman padat penduduk | 6 | 3 |
| 3 | Sekolaq Darat | Tertangani | Permukiman padat penduduk | - | 7 |
| 4 | Linggang Bigung | Tertangani | Permukiman padat penduduk | 1 | 1 |
| 5 | Muara Lawa | Tertangani | Permukiman padat penduduk | 1 | 1 |
| 6 | Tering | Tertangani | Pasar Tering | - | 1 |
| 7 | Damai | Tertangani | | - | 23 |
| 8 | Long Iram | Belum tertangani | - | - | 2 |
| 9 | Muara Pahu | Belum tertangani | - | 40 | 9 |
| 10 | Mook Manaar Bulatn | Tertangani | - | - | 3 |
| 11 | Bentian Besar | Tertangani | - | - | 1 |
| 12 | Jempang | Belum tertangani | - | 2 | - |
| 13 | Bongan | Belum tertangani | - | 1 | 4 |
| 14 | Penyinggahan | Belum tertangani | - | 1 | 4 |
| 15 | Nyuatan | Tertangani | - | - | 2 |



| | | | | | |
|----|--------------|------------------|---|----|----|
| | | | | | |
| 16 | Siluq Ngurai | Belum tertangani | - | 1 | - |
| | Jumlah | | | 58 | 80 |

Dalam pencapaian sasaran **Meningkatnya keamanan dan ketertiban bagi masyarakat** di Kabupaten Kutai Barat. Beberapa kendala/permasalahan yang dihadapi antara lain :

- n. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat sehingga masih banyak terjadi kasus pelanggaran K3 dan Penyelesaian pelanggaran K3 belum maksimal
- o. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba (kasus kriminal terbanyak) dan juga kecelakaan Lalu Lintas.
- p. Siskamling umumnya belum difungsikan sebagaimana mestinya.
- a. Luasnya wilayah Kabupaten Kutai Barat, sehingga menyulitkan kontrol keamanan.

Strategi dan upaya untuk mengatasi permasalahan pencapaian sasaran **Meningkatnya keamanan dan ketertiban bagi masyarakat** yang bisa dilakukan yaitu :

- q. Mengaktifkan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan komunitas Intelijen Daerah (Kominda), juga perat aparat Kecamatan maupun Perangkat Kampung.
- r. Meningkatkan koordinasi antar aparat keamanan (kepolisian, TNI dan Satuan Polisi Pamong Praja) dalam penanganan sehingga konflik didalam masyarakat tidak meluas dan dapat diselesaikan.
- s. Mecegah peredaran narkoba terutama dikalangan pelajar dan remaja.
- b. Meningkatkan kemananan lingkungan dengan memberdayakan sistem keamanan lingkungan.
- c. Sosialisasi kemasyarakat dan juga sekolah-sekolah tentang bahaya menggunakan narkoba dan sosialisasi taat rambu lalu lintas.

Sasaran 14 : Meningkatkan Kampung Maju



Sasaran strategis 14 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ke 7 (Tujuh) yang ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021 yaitu "Pemberdayaan Peran Kampung, Pemuda dan Perempuan Sebagai Basis Pembangunan Masyarakat".

Pencapaian misi ini dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung. Untuk menilai keberhasilan/kegagalan sasaran 14 menggunakan 1 indikator kinerja dengan tingkat keberhasilan **100 %** dengan kategori "**SANGAT BERHASIL**". Pencapaian target kinerja sasaran **Meningkatnya Kampung Maju** seperti tampak pada tabel :

tabel 3.63
Persentase Keberhasilan/Kegagalan Sasaran 14

| Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2018 | | Capaian Tahun 2018 | Tahun 2019 | | Capaian Tahun 2018 | |
|-----------------------------|---------|------------|-----------|--------------------|------------|-----------|--------------------|-----------|
| | | Target | Realisasi | | Target | Realisasi | % | Kategori |
| Jumlah Kampung Maju | Kampung | 8 | 4 | 50% | 10 | 10 | 100% | SB |
| Tingkat Keberhasilan | | | | | | | 100 % | SB |

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

Dari tabel di atas terlihat bahwa hampir semua indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan sasaran 14 menunjukkan kinerja yang **SANGAT BERHASIL**.

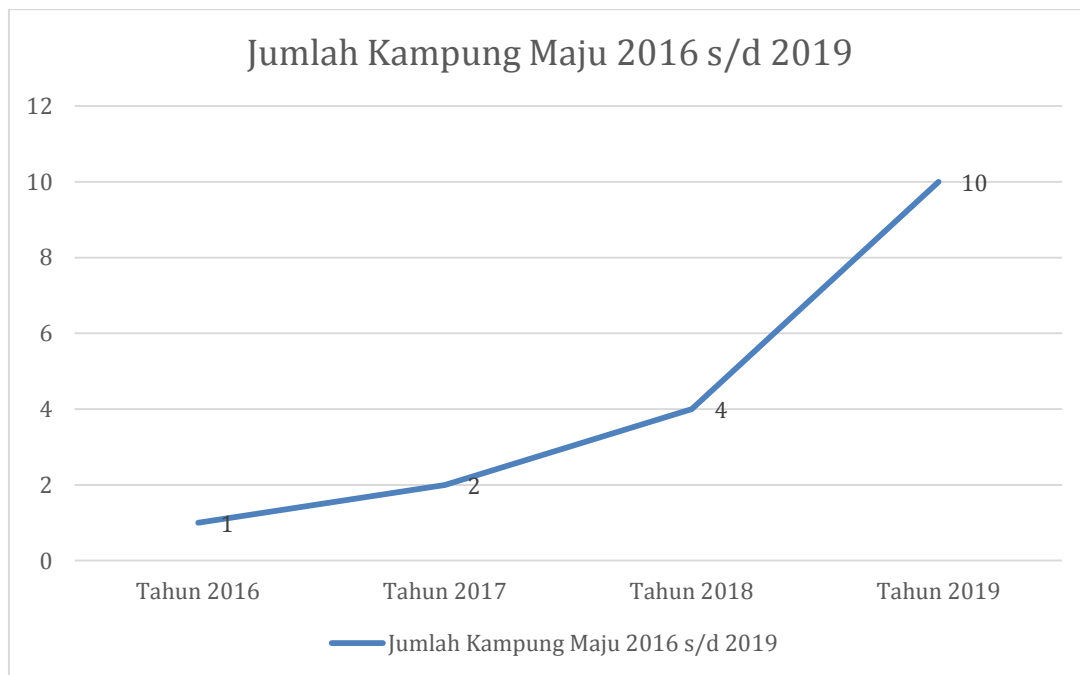
Tabel 3.64
Rincian Jumlah Kampung Maju

| NO | Tahun | Target | Realisasi | Persentase |
|----|-------|--------|-----------|------------|
| 1 | 2016 | 2 | 1 | 50 % |
| 2 | 2017 | 5 | 2 | 40 % |
| 3 | 2018 | 8 | 4 | 50 % |
| 4 | 2019 | 10 | 10 | 100 % |

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

Keberhasilan pencapaian jumlah Kampung Maju selama 3 (Tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 3.16
Jumlah Kampung Maju Tahun 2016 s/d 2019



Sumber :

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

Berdasarkan grafik diatas jumlah Kampung maju di Kabupaten Kutai Barat meningkat setiap tahunnya, dimana pada tahun 2016 hanya terdapat 1 (Satu) Kampung Maju meningkat di tahun 2017 menjadi 2 (Dua), ditahun 2018 meningkat menjadi 4 (Empat) Kampung dan di tahun 2019 meningkat menjadi 10 Kampung Maju.

Adapun analisis keberhasilan dalam capaian kinerja pada sasaran 14 secara detail dijelaskan sebagai berikut :

Penentuan status perkembangan Desa/Kampung didasarkan pada PermendesPDTTtrans Nomor 02 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun. Yang penentuannya berdasarkan 3 indikator yaitu :

1. Ketahanan Sosial
2. Ketahanan Ekonomi
3. Ketahanan Lingkungan (Indikator Kualitas Lingkungan, Rawan Bencana, dan Tanggap Bencana).

Dengan Perhitungan IDM :

$$\text{IDM} = \frac{\text{IKS} + \text{IKE} + \text{IKL}}{3}$$

Keterangan :

IKS = Indeks Ketahanan Sosial

IKE = Indeks Ketahanan Ekonomi

IKL = indeks Ketahanan Lingkungan

Dan dalam pemutahiran data status perkembangan Desa/Kampung ini melibatkan beberapa pihak dari Satuan Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung,



BPPPD, Kepala Kampung, Tenaga Pendamping Profesional baik dari Tenaga Ahli Pendamping Provinsi (TA Provinsi), Tenaga Ahli Pendamping Kabupaten (TA. Kabupaten), Pendamping Desa Kecamatan (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD). Dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Status Desa/Kampung.

Indeks Desa membangun disusun untuk mendukung upaya Pemerintah dalam menangani pengentasan Desa Tertinggal dan peningkatan Desa Mandiri, tujuannya yaitu menetapkan status kemajuan dan kemandirian Desa dan menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan Desa/Kampung.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Penetapan tugas utama berdasarkan RPJMD tahun 2016-2021 telah dilaksanakan secara bertahap. Dari satu sasaran yang terdapat dalam RPJMD dilaksanakan sebanyak satu indikator kinerja. Upaya yang ditempuh adalah selalu melakukan koordinasi yang intensif dengan bidang-bidang yang terkait untuk memperoleh ataupun upaya dalam pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Tabel 3.65
Realisasi Kinerja Sasaran 14 Dibandingkan Target Akhir RPJMD

| Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi Kinerja s/d Tahun 2019 | Target Akhir RPJMD | Persentase Capaian Kinerja (%) |
|--------------------------|---------------|---|---------------------------|---------------------------------------|
| Jumlah Kampung Maju | Kampung | 10 | 17 | 58.82 % |

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

Realisasi kinerja Sasaran ke- 14 yang dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2016-2021 Jumlah Kampung Maju yang telah terealisasi dalam capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yaitu pada tahun 2016 Target 2 Kampung Realisasi 1 Kampung dengan Persentase 50 % capaian target akhir pada RPJMD 5.88 %, Tahun 2017 dengan Target 5 Kampung realisasi 2 Kampung dengan Persentase 40 % capaian target akhir pada RPJMD 11.76 %, tahun 2018 target 8 Kampung realisasi 4 Kampung maju dengan persentase 50 % capaian target akhir pada RPJMD 23.53 % dan pada tahun 2019 target 10 Kampung Maju dan terealisasi dalam realisasi kinerja 10 Kampung Maju pada tahun 2019 dengan capaian kinerja 100 % dengan capaian target



akhir pada RPJMD 58.82 %. Adanya peningkatan dalam realisasi kinerja sasaran dari realisasi per tahun dan target akhir RPJMD.

Analisa Program Dan Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Sasaran Meningkatnya Desa Maju

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dalam mengemban amanah sasaran meningkatnya Desa Maju telah melaksanakan 7 (Tujuh) program dan 55 kegiatan untuk menunjang pencapaian indikator kinerja jumlah Desa/Kampung Maju. Program dan kegiatan tersebut dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.66

| No. | Program/Kegiatan | Pagu |
|--|---|------------------------|
| Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kampung | | Rp. 270.000.000 |
| 1 | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kampung | Rp. 15.000.000 |
| 2 | Rakor Petinggi dan BPK Se-Kabupaten Kutai Barat Tentang Evaluasi Perkembangan Kampung | Rp. 50.000.000 |
| 3 | Pelatihan Petinggi, Sekdes, Non PNS se-Kabupaten Kutai Barat Tentang Administrasi Kampung | Rp. 50.000.000 |
| 4 | Pelatihan Peningkatan Kapasitas Tim Pendamping, Fasilitasi dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kampung Tingkat Kabupaten | Rp. 35.000.000 |
| 5 | Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Permasalahan dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kampung | Rp. 50.000.000 |
| 6 | Pelatihan Bimbingan Teknis Peningkatan SDM Pengelolaan Keuangan dan Aset Kampung | Rp. 35.000.000 |
| 7 | Bimtek Aplikasi SIPADES (Sistem Pengelolaan Aset Desa) | Rp. 35.000.000 |
| Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan | | Rp. 310.000.000 |
| 8 | Fasilitasi Pembentukan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) | RP. 15.000.000 |
| 9 | Mengikuti Rakor BUMK Tingkat Provinsi dan Nasional | RP. 25.000.000 |
| 10 | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan BUMK | RP. 35.000.000 |
| 11 | Fasilitasi Kredit Modal Ekonomi Mikro | RP. 25.000.000 |
| 12 | Monitoring dan Evaluasi Penerima Kredit Modal UEM | RP. 20.000.000 |
| 13 | Penguatan Kapasitas Tim Pengelola Kredit Modal UEM | RP. 15.000.000 |



| | | |
|---|---|--------------------------|
| 14 | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pasar Kampung | RP. 35.000.000 |
| 15 | Pengawasan Penggunaan ADK, DD dan UEM | RP. 140.000.000 |
| Program Peningkatan Pendapatan Masyarakat Kampung melalui Pemasyarakatan TTG dan Pengelolaan SDA | | RP. 140,000,000 |
| 16 | Fasilitasi Pembentukan Posyantek dan Orientasi Penguatan Kelembagaan Pelaku TTG | RP. 25,000,000 |
| 17 | Gelar TTG Tingkat Nasional | RP. 25,000,000 |
| 18 | Pelatihan Pelaku TTG Berbasis Potensi Daerah | RP. 15,000,000 |
| 19 | Gelar TTG Tingkat Kabupaten | RP. 20,000,000 |
| 20 | Gelar TTG Tingkat Provinsi | RP. 15,000,000 |
| 21 | Penguatan Kapasitas Pengurus Posyantek | RP. 20,000,000 |
| 22 | Identifikasi Kebutuhan TTG dan Optimalisasi Pemanfaatan Peralatan TTG | RP. 20,000,000 |
| Program Penataan Administrasi Pemerintahan Kampung | | Rp. 1,088,000,000 |
| 23 | Pelatihan Penyusunan RKP dan RPJMKam | Rp. 50,000,000 |
| 24 | Fasilitasi Penataan Aset Kampung | Rp. 85,000,000 |
| 25 | Pendampingan, Fasilitasi dan Pembinaan Pengelolaan Dana Desa (APBN) | Rp. 150,000,000 |
| 26 | Lomba Kampung Tingkat Kabupaten | Rp. 50,000,000 |
| 27 | Peemilihan Petinggi Serentak s-Kabupaten Kutai Barat | Rp. 368,000,000 |
| 28 | Bimtek Penyusunan LKPJ dan LKPD bagi Kepala Kampung | Rp. 35,000,000 |
| 29 | Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Pemerintahan Kampung dan Kelurahan | Rp. 100,000,000 |
| 30 | Verifikasi dan Monitoring ADK | Rp. 150,000,000 |
| 31 | Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pemerintah Kampung | Rp. 100,000,000 |
| Program Pengembangan dan keserasian Kebijakan dan Program Pemberdayaan Masyarakat | | Rp. 2,118,700,000 |
| 32 | Penguatan Kapasitas Pokjanal Posyandu | Rp. 35,000,000 |
| 33 | Penguatan Kapasitas Tim Penggerak PKK | Rp. 70,000,000 |
| 34 | Penguatan Kapasitas LPM | Rp. 85,000,000 |



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019

| | | |
|---|---|-----------------------------|
| 35 | Lomba Posyandu | Rp. 251,500,000 |
| 36 | Operasional Posyandu | Rp. 1,177,200,000 |
| 37 | Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | Rp. 300,000,000 |
| 38 | Penguatan Kapasitas Lembaga Adat Kecamatan | Rp. 35,000,000 |
| 39 | Penguatan Kapasitas Lembaga Adat Kampung | Rp. 35,000,000 |
| 40 | Monitoring dan Evaluasi Kinerja Lembaga Adat Kecamatan dan Kampung | Rp. 70,000,000 |
| 41 | Penguatan Kapasitas Kader Posyandu | Rp. 35,000,000 |
| 42 | Raker Tim Pokjanal Desa Mandiri Siaga | Rp. 25,000,000 |
| Program Peranan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kampung | | Rp. 390,000,000 |
| 43 | Monitoring dan Evaluasi Kinerja Simpan Pinjam oleh Perempuan | Rp. 60,000,000 |
| 44 | Monitoring dan Evaluasi SFPM | Rp. 50,000,000 |
| 45 | Rapat Koordinasi SFPM se-Kabupaten Kutai Barat | Rp. 35,000,000 |
| 46 | Bimtek Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Kampung | Rp. 120,000,000 |
| 47 | Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Kampung | Rp. 40,000,000 |
| 48 | Pendayagunaan Mahasiswa KKN | Rp. 70,000,000 |
| 49 | Pendataan Potensi Kampung untuk Pelaksanaan Kegiatan KKN | Rp. 15,000,000 |
| Program Pengembangan Prasarana dan Sarana Pedesaan | | Rp. 480,000,000 |
| 50 | Pendataan dan Evaluasi Rencana Aksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kampung | Rp. 125,000,000 |
| 51 | Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pembangunan Kampung dan Kelurahan | Rp. 35,000,000 |
| 52 | Pembangunan Tugu Selamat Datang di Kampung Kelian Luar Kec. Long Iram | Rp. 155,000,000 |
| 53 | Monitoring dan Evaluasi kegiatan Pembangunan Saprak Kampung dan Kelurahan | Rp. 35,000,000 |
| 54 | Perencanaan Kegiatan Pembangunan Semenisasi Jalan Pemandian Umum Kampung Keay Kec. Dama | Rp. 70,000,000 |
| 55 | Perencanaan Pembangunan Gapura Selamat datang di Kampung Pelatn RT. 08 | Rp. 60,000,000 |
| Jumlah | | Rp. 4,796,700,000.00 |

Sumber: Laporan Realisasi DPMK



Sasaran 15 : Meningkatnya Peran Pemuda Dalam Pembangunan

Sasaran strategis 15 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ke 7 (Tujuh) yang ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021 yaitu "Pemberdayaan Peran Kampung, Pemuda dan Perempuan Sebagai Basis Pembangunan Masyarakat".

Pencapaian misi ini dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga. Untuk menilai keberhasilan/kegagalan sasaran 15 menggunakan 1 indikator kinerja dengan tingkat keberhasilan **123 %** dengan kategori "**SANGAT BERHASIL (SB)**". Pencapaian target kinerja sasaran **Meningkatnya Peran Pemuda Dalam Pembangunan** seperti tampak pada tabel :

tabel 3.67
Persentase Keberhasilan/Kegagalan Sasaran 15

| Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2018 | | Capaian Tahun 2018 | Tahun 2019 | | Capaian Tahun 2018 | |
|-----------------------------|--------|------------|-----------|--------------------|------------|-----------|--------------------|-----------|
| | | Target | Realisasi | | Target | Realisasi | % | Kategori |
| Pemuda Berprestasi | Orang | 85 | 97 | 114 % | 90 | 111 | 123 % | SB |
| Tingkat Keberhasilan | | | | | | | 123 % | SB |

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga

Dari tabel di atas terlihat bahwa hampir semua indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan sasaran 15 menunjukkan kinerja yang **SANGAT BERHASIL**.

Tabel 3.68
Rincian Jumlah Pemuda Berprestasi

| NO | Tahun | Target | Realisasi | Persentase |
|----|-------|--------|-----------|------------|
| 1 | 2016 | 75 | 79 | 105 % |
| 2 | 2017 | 80 | 79 | 97.75 % |
| 3 | 2018 | 85 | 97 | 114 % |
| 4 | 2019 | 90 | 111 | 123 % |

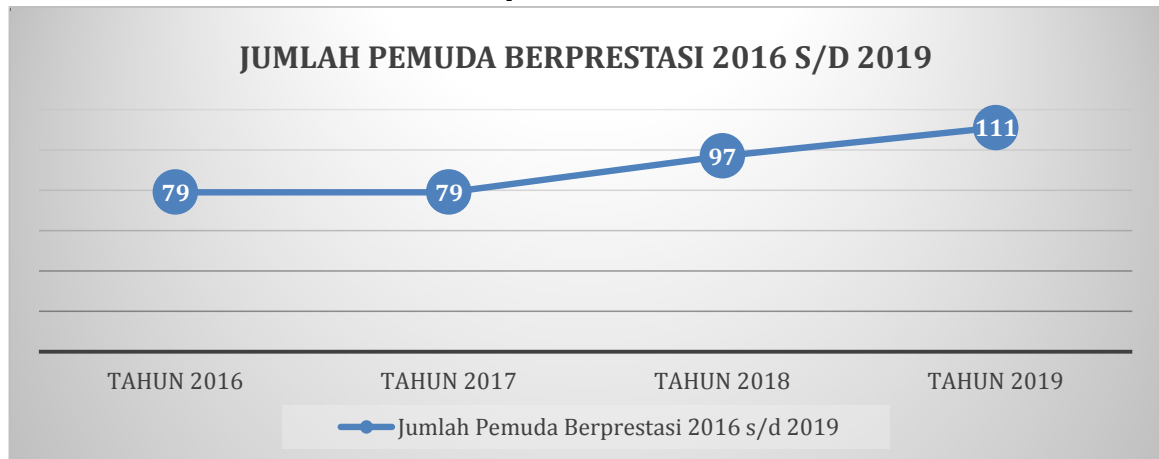
Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga

Keberhasilan pencapaian jumlah Pemuda Berprestasi selama 3 (Tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 3.17



Grafik Pemuda Berprestasi Tahun 2016 S/d 2019



Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga

Berdasarkan grafik diatas jumlah pemuda berprestasi di Kabupaten Kutai Barat meningkat setiap tahunnya, dimana pada tahun 2016 terdapat 79 pemuda berprestasi, meskipun pada tahun 2017 kurang memenuhi dari target 80 hanya terealisasi capaian 79 pemuda berprestasi, akan tetapi pada tahun 2018 terdapat peningkatan yang signifikan dengan realisasi capaian 97 pemuda berprestasi dan di tahun 2019 meningkat menjadi 111 pemuda berprestasi.

Adapun analisis keberhasilan dalam capaian kinerja pada sasaran 14 secara detail dijelaskan sebagai berikut :

Keberhasilan sasaran 15 diukur dari jumlah pemuda berprestasi, dan jumlah sentra pemberdayaan pemuda meningkat. Semakin besar jumlah pemuda yang berprestasi, dan jumlah sentra pemberdayaan pemuda, maka pemuda yang memiliki keteladanan dan kepemimpinan yang dilakukan cukup efektif dan signifikan. Untuk mencapai target dari sasaran 15 "Meningkatnya Peran Pemuda Dalam Pembangunan", upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga melalui Program peningkatan peran serta kepemudaan dengan berbagai kegiatan utama yang menunjang secara langsung indikator dilaksanakan melalui beberapa

kegiatan yaitu :

1. Kegiatan PASKIBRA memiliki beberapa manfaat yang didapat dari pengalaman menjadi seorang Paskibra antara lain Pemuda menjadi lebih disiplin, mempunyai jiwa Kors, mempertebal rasa tanggung jawab, dan dapat memperkuat rasa cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Paskibra (Pasukan Pengibar Bendera) Kabupaten Kutai Barat mempunyai tugas untuk mengibarkan bendera dalam Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di tingkat



Kabupaten yang anggotanya berasal dari pelajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) se Kabupaten Kutai Barat.

2. Kegiatan Studi Orientasi bagi Paskibra, Pendamping dan Pelatih Paskibra dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman Paskib terkait wawasan nusantara dengan cara mengunjungi tempat bersejarah, museum, dll
3. Kegiatan Seleksi dan pengiriman anggota paskibraka. Kegiatan ini melibatkan pihak pejabat eselon beserta staf Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai Barat, tenaga medis, purna paskibra indonesia di Kabupaten Kutai Barat, para Guru, dan tenaga teknis lainnya seperti TNI. Di dalam melakukan proses seleksi anggota Paskibra, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai Barat Melalui Bidang Layanan Kepemudaan dilakukan dari tingkat sekolah, kemudian akan mengikuti seleksi tingkat kabupaten di Dinas Pemuda dan Olahraga. Setiap tahunnya sebanyak 39 orang Laki-laki & 30 orang Perempuan yg telah lolos melewati tahap seleksi di tingkat Kabupaten yaitu dari seleksi Kesehatan, seleksi tinggi badan dan berat badan, seleksi PBB, seleksi Samapta, dan seleksi Pantohir. Selanjutnya Calon Paskibra akan memasuki masa pemusatan pelatihan sebelum melaksanakan tugasnya di tanggal 17 Agustus selama kurang lebih 22 hari.
4. Kegiatan Seleksi dan Pengiriman peserta Jambore Pemuda Daerah (JPD) dan Jambore Pemuda Indonesia (JPI). Jambore Pemuda Daerah (JPD) adalah suatu pertemuan dari para Pemuda pilihan terbaik dari 10 (sepuluh) Kab/Kota se-Provinsi yang dilaksanakan dalam 1 kali pertahun yang diisi dengan berbagai macam kegiatan. Salah satu kegiatan JPD yaitu adanya pertukaran budaya dari berbagai daerah sehingga mereka diharapkan dapat mempromosikan budaya dari daerah asalnya masing-masing. Dalam pelaksanaan JPD sekaligus dilaksanakan seleksi bagi perwakilan Kabupaten/Kota yang akan dipilih mewakili Provinsi Kaltim menuju Jambore Pemuda Indonesia (JPI) yang prinsipnya hampir sama dengan JPD, namun skalanya bukan hanya sebatas Provinsi, tapi ini merupakan pertemuan Pemuda se-Indonesia. Untuk dapat mewakili daerah masing-masing, peserta harus mengikuti seleksi terlebih dahulu. Mulai dari tingkat Kab/Kota sampai di tingkat Provinsi. Terdapat 3 (tiga) tahapan seleksi yang akan diuji kepada para peserta, yakni Tes Tertulis, Tes Wawancara yang terdiri dari Wawasan Kebangsaan, Bahasa Inggris, Sosial Budaya, Pariwisata, Minat Bakat, dan Tes Kesehatan. Dengan diadakannya kegiatan ini diharapkan dapat memotivasi para Pemuda khususnya di Kabupaten Kutai Barat, karena dengan adanya kegiatan ini menjadikan generasi muda mampu berfikir, bertindak dan berinovasi secara personal maupun kelompok, memberikan



pengalaman serta keilmuan hingga menjadi pemuda yang memiliki integritas dan kualitas.

5. Kegiatan Pepelingasih (Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih). Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 06 september 2019, bertujuan untuk bersama dengan masyarakat, pengelola pasar Jaras, kecamatan Barong Tongkok, Kelurahan Barong Tongkok, SKPD, TNI, organisasi kepemudaan bekerja sama dengan Dinas Kebersihan melakukan aksi bersih-bersih sampah di areal Pasar Jaras Barong Tongkok.
6. Kegiatan Pelatihan Bela Negara Bagi Pemuda. Kegiatan ini dilaksanakan di Wisma Trampe, Kecamatan barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 03 Maret 2019. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai Barat melalui Bidang Layanan Kepemudaan/ Kasi... bekerja sama dan melibatkan organisasi kepemudaan dan pelajar SMA/SMK serta mahasiswa. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi indikator sasaran OPD Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai Barat.

Dinas Pemuda dan Olahraga telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Penetapan tugas utama berdasarkan RPJMD tahun 2016-2021 telah dilaksanakan secara bertahap. Dari satu sasaran yang terdapat dalam RPJMD dilaksanakan sebanyak satu indikator kinerja. Upaya yang ditempuh adalah selalu melakukan koordinasi yang intensif dengan bidang-bidang yang terkait untuk memperoleh ataupun upaya dalam pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Tabel 3.69
Realisasi Kinerja Sasaran 15 Dibandingkan Target Akhir RPJMD

| Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi Kinerja s/d Tahun 2019 | Target Akhir RPJMD | Persentase Capaian Kinerja (%) |
|--------------------------|---------------|---|---------------------------|---------------------------------------|
| Jumlah Kampung Maju | Kampung | 111 | 100 | 111 % |

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

Realisasi kinerja Sasaran ke- 15 yang dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2016-2021 Pemuda Berprestasi yang telah terealisasi dalam capaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Adanya peningkatan dalam realisasi kinerja sasaran dari realisasi per tahun dan target akhir RPJMD sebesar 111% dari target yang telah ditentukan.



Analisa Program Dan Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Sasaran Meningkatnya Peran Pemuda Dalam Pembangunan

Dinas Pemuda dan Olahraga dalam mengemban amanah sasaran meningkatnya Peran Pemuda Dalam Pembangunan telah melaksanakan 4 (Empat) program untuk menunjang pencapaian indikator kinerja Pemuda Berprestasi. Program tersebut dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.70

| No. | Program/Kegiatan | Pagu |
|---------------|---|-----------------------------|
| 1 | Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan | Rp. 2.172.330.000,00 |
| 2 | Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga | Rp. 4.148.501.000,00 |
| 3 | Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana | Rp. 530.000.000,00 |
| 4 | Program Peningkatan Prestasi Olahraga | Rp. 245.000.000,00 |
| Jumlah | | Rp. 7,095,831,000.00 |

Sumber: Laporan Realisasi Dispora

Secara umum seluruh program dan kegiatan yang selama tahun 2019 telah dapat dilaksanakan dengan baik. Realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program / kegiatan Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kutai Barat selama tahun 2019 sesuai dengan target.

Sasaran 16 : Meningkatkan Kesetaraan Gender (IDG/IPG)

Sasaran strategis 16 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ke 7 (Tujuh) yang ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021 yaitu "Pemberdayaan Peran Kampung, Pemuda dan Perempuan Sebagai Basis Pembangunan Masyarakat".

Pencapaian misi ini dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Untuk menilai keberhasilan/kegagalan sasaran 16 menggunakan 1 indikator kinerja dengan tingkat keberhasilan **101 %** dengan kategori " **SANGAT BERHASIL (SB)**". Pencapaian target kinerja sasaran **Meningkatnya Kesetaraan Gender (IDG/IPG)** seperti tampak pada tabel :



tabel 3.71
Persentase Keberhasilan/Kegagalan Sasaran 16

| Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2018 | | Capaian Tahun 2018 | Tahun 2019 | | Capaian Tahun 2018 | |
|-----------------------------|--------|------------|-----------|--------------------|------------|-----------|--------------------|-----------|
| | | Target | Realisasi | | Target | Realisasi | % | Kategori |
| Pemuda Berprestasi | Orang | 82 | 83.52 | 101.85 % | 83 | 83.84 | 101.01 % | SB |
| Tingkat Keberhasilan | | | | | | | 101.01 | SB |

Sumber : Dinas P2KBP3A

Dari tabel di atas terlihat bahwa hampir semua indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan sasaran 16 menunjukkan kinerja yang **SANGAT BERHASIL**.

Tabel 3.72
Rincian Jumlah Pemuda Berprestasi

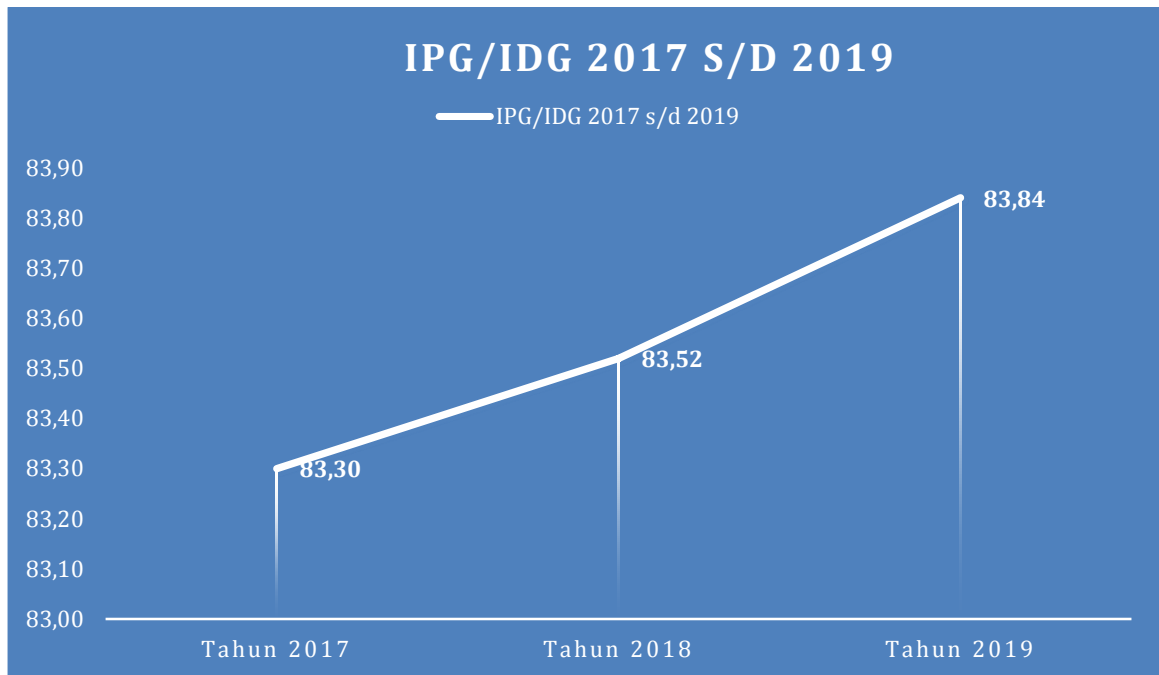
| NO | Tahun | Target | Realisasi | Persentase |
|----|-------|--------|-----------|------------|
| 1 | 2017 | 82 | 83.30 | 101.59 % |
| 2 | 2018 | 82 | 83.52 | 101.85 % |
| 3 | 2019 | 83 | 83.84 | 101.01 % |

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga

Keberhasilan pencapaian jumlah Pemuda Berprestasi selama 3 (Tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 3.18

Grafik IPG/IDG Tahun 2017 S/d 2019



Sumber : Dinas P2KBP3A

Berdasarkan grafik diatas IPG/IDG di Kabupaten Kutai Barat meningkat setiap tahunnya, dimana pada tahun 2017 terdapat 83.30 IPG/IDG, pada tahun 2018 terealisasi capaian 83.52 IPG/IDG terdapat peningkatan yang signifikan di tahun 2019 meningkat menjadi 83.84 dengan IPG/IDG 101.01 %.

Adapun analisis keberhasilan dalam capaian kinerja pada sasaran 16 secara detail dijelaskan sebagai berikut :

1. Optimalisasi/Advokasi Pengarusutamaan Gender Sasaran Kegiatan : Seluruh kepala ODP di Lingkungan Pemerindahan Kabupaten Kutasi Barat. Sebanyak 85 orang Penerima Manfaat Kepala OPD Tempat : di Ruang Rapat Kecil Lantai 2 Kantor Bappeda Kabupaten Kutai Barat 17 Oktober 2019 selama 1 Hari dengan hasil/Volume 1 kali rapat dan kegiatan Terlaksana dengan Baik. Pelaksana Kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan Seksi Pengarusutamaan Gender.
2. Pendidikan/Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Sasaran Kegiatan :Kepala OPD, CAMAT dan Masyarakat. Sebanyak 100 orang Penerima Manfaat Kepala OPD CAMAT-CAMAT dan MASYRAKAT Tempat : di Ruang Rapat Lantai Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pada tanggal 10 Oktober



- 2019 selama 1 Hari dengan hasil/Volume 100 % (Satuan) dan Kegiatan Terlaksana dengan Baik. Pelaksana Kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan Seksi Pengarusutamaan Gender.
3. Pembentukan Forum Komunikasi Kabupaten tentang PP dan PA Sasaran Kegiatan : Organisasi Perempuan dan Pelaku Usaha Perempuan Sebanyak 60 orang Penerima Manfaat Organisasi Perempuan dan Pelaku Usaha Perempuan Tempat : di Ruang Lantai 1 DP2KBP3A Pada tanggal 07 Nopember 2019 selama 1 Hari dengan hasil/Volume 1 kali kegiatan dan Kegiatan Terlaksana dengan Baik. Pelaksana Kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan Seksi Pengarusutamaan Gender.
 4. Peningkatan SDM Perempuan, Kegiatan Peningkatan SDM Perempuan di laksanakan pada hari 25 November 2019, Pukul 09.00 hingga selesai. Bertempat di Hotel Sidodadi Barong Tongkok Peserta seminar terdiri dari 200 orang Perempuan yang berasal dari berbagai Organisasi wanita yang ada di Kabupaten Kutai Barat. Kegiatan terlaksana dengan baik. Pelaksana kegiatan dari Bidang Pemberdayaan Perempuan Seksi Partisipasi Perempuan.
 5. Pendataan Pekerja Perempuan dan Organisasi Perempuan di kabupaten Kutai Barat, Kegiatan Pendataan Pekerja Perempuan dan Organisasi Perempuan dilaksanakan pada bulan Juli 2019 dan bulan Oktober 2019 dengan metode wawancara dan pengisian format pendataan ke 10 Kecamatan di Kabupaten Kutai Barat Pendataan dilaksanakan pada bulan Juli 2019 dan Bulan Oktober 2019 Pendataan dilakukan di 10 Kecamatan, diantaranya Kecamatan Mook Manor Bulant, Melak, Barong Tongkok, Sekolaq Darat, Linggang Bigung, Tering, long Iram, Nyuatan, Muara Lawa, dan Damai. Pelaksana Kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan Seksi Partisipasi Perempuan
 6. Sosialisasi Keterwakilan Perempuan Sebagai Pengambil Keputusan di Lembaga Pemerintah, Kegiatan Sosialisasi Keterwakilan Perempuan Sebagai Pengambil Keputusan di Lembaga Pemerintah ini dilakukan di 3 Kampung/Kecamatan, diantaranya Kampung Sumber Sari Kecamatan Barong Tongkok, Kampung Srimulyo Kecamatan Sekolaq Darat dan Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak jumlah peserta 150 orang, masing-masing 50 orang di tiap



- Kecamatannya. Pelaksana Kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan Seksi Partisipasi Perempuan.
7. Fasilitasi dan Sosialisasi Pembentukan Pengusaha Wanita di Kabupaten Kutai Barat. Kegiatan Fasilitasi dan Sosialisasi Pembentukan Pengusaha Wanita di Kabupaten Kutai Barat Kegiatan di laksanakan pada hari Senin, 07 Oktober 2019, Pukul 09.00, bertempat di Ruang Rapat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kutai Barat. Peserta adalah pelaku Usaha Perempuan di Kabupaten Kutai Barat berjumlah 50 Orang. Kegiatan dilaksanakan 1 kali. Pelaksana Kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan Seksi Partisipasi Perempuan.
 8. Pengumpulan Data Terpisah Perempuan dan Anak Kutai Barat Terlaksananya Kegiatan Pengumpulan Data Terpisah Perempuan dan Anak Kutai Barat (no rekening kegiatan 2.02.2.02.01.19.17) dengan kelompok sasaran kegiatan sebanyak 16 kecamatan di Kabupaten Kutai Barat, yang dilaksanakan pada bulan Mei untuk kecamatan MMB, Barong Tongkok, Bigung, Sekolaq Darat, Melak, Tering, Nyuatan, Damai dan Muara Lawa serta di bulan September untuk kecamatan Long Iram, Muara Pahu, Penyinggahan, Siluq Ngurai, Jempang, Bongan dan Bentian dan sebagai pelaksana kegiatan adalah Kasi Perlindungan Anak dan Kasi Perlindungan Perempuan beserta staf bidang PPA.
 9. Pelatihan Sistem Pencatatan dan pelaporan KDRT Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Sistem Pencatatan dan Pelaporan KDRT (no rekening kegiatan 2.02.2.02.02.19.19), dengan peserta dari Rumah Sakit, Puskesmas, Polres dan pengurus atau pemerhati perlindungan perempuan dan anak dari kecamatan sebanyak 50 orang yang dilaksanakan pada tanggal 18 November 2019 dan sebagai pelaksana kegiatan adalah dari Seksi Perlindungan Anak. Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang direncanakan karena ketersediaan dana sehingga baru bias direalisasikan pada triwulan ke IV.
 10. Pelatihan Bagi Pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban KDRT Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Bagi Pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban KDRT (no rekening kegiatan 2.02.2.02.02.19.21), dengan peserta dari petugas pendamping dan pelayanan Korban KDRT dari DP2KBP3A, aktivis anak dan perempuan serta aktivis kecamatan yang



dilaksanakan pada triwulan III tahun 2019 dan sebagai pelaksana kegiatan adalah dari Seksi Perlindungan Perempuan.

11. Rakor Daerah Pemberdayaan Perempuan Tingkat Kabupaten Sasaran Kegiatan : Organisasi Perempuan dan Pelaku Usaha Perempuan Sebanyak 200 orang Penerima Manfaat Organisasi Perempuan dan Pelaku Usaha Perempuan Tempat : di Ruang Lantai III Hotel Sidodadi Pada tanggal 16 Desember 2019 selama 1 Hari dengan hasil/Volume 100 % (Satuan) dan sebagai Pelaksana Kegiatan Terlaksana dengan Baik
12. Rakortek dan Rakernis Pemberdayaan Perempuan Tingkat Nasional dan Provinsi Sasaran Kegiatan : Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana dan Pelindungan Anak . Sebanyak 3 orang Penerima Manfaat Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana dan Pelindungan Anak. Tempat : Semarang Pada tanggal 08-11 April 2019 selama 4 Hari dengan hasil/Volume 100 % (Satuan) dan sebagai Pelaksana Kegiatan Terlaksana dengan Baik.
13. Rapat Gelar Kasus Pendampingan Korban Tindak Kekerasan Terlaksananya Kegiatan Rapat Gelar Kasus Pendampingan Korban Tindak Kekerasan (no rekening kegiatan 2.02.2.02.02.19.35), yang dilaksanakan pada triwulan I dan hanya menyerap tidak sampai setengah dari pagu anggaran. Hal ini disebabkan karena menyesuaikan kasus yang dilaporkan dan membutuhkan rapat gelar kasus.
14. RAKORNAS, RAKORTEK, RAKORDA dan RAKERNIS Perlindungan Perempuan Terlaksananya Kegiatan RAKORNAS, RAKORTEK, RAKORDA, dan RAKERNIS Perlindungan Perempuan dan Anak Tingkat Nasional dan Provinsi (no rekening kegiatan 2.02.2.02.02.19.38), dengan peserta Rakornas PPA di Tangerang, Banten adalah Kepala Dinas, Kepala Bidang PPA dan Kasi Perlindungan Perempuan sedangkan peserta yang mengikuti Rakorda PPA di Kabupaten Penajam Paser Utara adalah Kepala Dinas, Kepala Bidang PPA, Kasi Perlindungan Perempuan, Kasi Perlindungan Anak, Kasubag Program dan Staf Bidang PPA. Untuk Rakornas dilaksanakan pada bulan April 2019 sedangkan Rakorda dilaksanakan pada bulan Juni 2016.



15. Sosialisasi UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) (no rekening kegiatan 2.02.2.02.02.19.38) dengan kelompok sasaran kegiatan sebanyak 16 kecamatan beserta stake holder yang terkait dengan ke tenaga kerja dan para aktivis pemerhati perempuan. Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan III tahun 2019 dan dihadiri oleh para Camat, Staf Kecamatan, Puskesmas, perwakilan dari Organisasi Wanita, Disnaker dan para pemerhati perempuan.
16. Kampanye Anti Kekerasan Terhadap Anak Sasaran kegiatan pada kegiatan ini adalah : terlaksananya Kegiatan Kampanye Anti Kekerasan terhadap Anak (no rekening kegiatan 2.02.2.02.01.19.40) dengan kelompok sasaran kegiatan sebanyak 16 sekolah di 4 kecamatan yaitu Kecamatan Linggang Bigung : TK Kristen Linggang Bigung, SDN 01 Linggang Bigung, SMPN 01 Linggang Bigung dan SMAN 01 Linggang Bigung; Kecamatan Barong Tongkok : TK Sta Angela Merici, SDN 001 Barong Tongkok, SMPN 02 Sendawar, SMA/SMK Surya Mandala; Kecamatan Sekolaq Darat : TK Pembina Kabupaten , SDN 003 Snedawar, SMPN 03 Sekolaq Darat, SMAN 03 Sekolaq Darat; dan Kecamatan Melak : TK Pembina Kecamatan, SDN 04 Melak, SMPN 01 Melak, SMK Sinar Abadi Melak. Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan 4 tahun 2019.
17. Pelatihan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Sistem Informasi online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) (no rekening kegiatan 2.02.2.02.01.19.41) dengan kelompok sasaran kegiatan operator SIMfoni PPA dari Dinas P2KBP3A, RSUD HIS, Polres Kutai Barat, dan Puskesmas serta Kecamatan. Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan III tahun 2019 dengan peserta sebanyak 40 orang.
18. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak (no rekening kegiatan 2.02.2.02.01.19.42) dengan kelompok sasaran kegiatan sebanyak 14 kecamatan di Kabupaten Kutai Barat. Untuk pelaksanaannya di lakukan di 16 kecamatan di Kabupaten Kutai Barat dan sebagai pelaksana kegiatan adalah



Kabid PPA, Kasi Perlindungan Anak dan Kasi Perlindungan Perempuan beserta staf bidang PPA.

19. Pelatihan Fasilitator Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Fasilitator Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) (no rekening kegiatan 2.02.2.02.01.19.43) dengan kelompok sasaran kegiatan adalah aktivis dari 16 kecamatan dan staf pendampingan/pelayanan di Dinas P2KBP3A. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 28- 30 November 2019 di Ruang Pertemuan Hotel SIdodadi Kabupaten Kutai Barat dengan peserta sebanyak 15 orang dengan hasil ditetapkannya Fasilitator dari 14 Kecamatan. Kecamatan yang belum memiliki fasilitator adalah dari Kecamatan Melak dan Barong Tongkok. Narasumber kegiatan ini adalah Fasilitator PATBM Nasional dan Provinsi.
20. Pembentukan dan Rapat Koordinasi Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak. Terlaksananya Kegiatan Pembentukan dan Rapat Koordinasi Gugus Tugas kabupaten layak Anak dengan kelompok sasaran kegiatan sebanyak 200 Orang Anak Di Kabupaten Kutai Barat ,pada tanggal 19 Desember 2019 di Ruang Rapat BP3D selama 1 hari dengan hasil/volume di hadiri 200 orang dan sebagai pelaksana kegiatan adalah Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Seksi Pemenuhan Hak Anak
21. Fasilitasi Hari Kartini, Kegiatan Fasilitasi hari kartini Kegiatan Seminar di laksanakan pada hari Jumat, 10 Mei 2019, Pukul 09.00 hingga selesai. Bertempat di Hotel Grand Family Barong Tongkok. Peserta seminar dalam rangka perayaan Hari Kartini di Kabupaten Kutai Barat berjumlah 160 orang yang terdiri dari Mahasiswa dan Mahasiswi Politeknik Sendawar, Forum Anak Kutai Barat dan Pelajar SMK Negeri Sendawar. Pelaksana Kegiatan dari Bidang Pemberdayaan Perempuan Seksi Partisipasi Perempuan
22. Optimalisasi Pemberdayaan Perempuan dalam Peningkatan Ekonomi Produktif Di laksanakan di Kabupaten Kutai Barat Penerima Manfaat Pengusaha Perempuan Tempat : terjadwal
 1. 5 Agustus 2019 di BPU Kecamatan Damai
 2. 12 Agustus 2019 di BPU Kecamatan Siluq Ngurai



3. 19 Agustus 2019 di BPU Kecamatan Long Iram 4. 26 Agustus 2019 di BPU Kecamatan Linggang Bigung
 4. 27 September 2019 di BPU Kecamatan Barong Tongkok
 5. 30 September 2019 di BPU Kecamatan Nuyatan
 6. 29 Nopember 2019 di BPU Kecamatan Bentian Besar
 7. 02 Desember 2019 di BPU Kecamatan Sekolaq Darat
 8. 03 Desember 2019 di BPU Kecamatan Melak
 9. 09 Desember 2019 di BPU Kecamatan Penyinggahan
 10. 17 Desember 2019 di BPU Kecamatan Tering
 11. 18 Desember 2019 di BPU Kecamatan Muara Lawa
 12. 19 Desember 2019 di BPU Kecamatan Bongan
 13. 20 Desember 2019 di BPU Kecamatan Jempang
 14. 23 Desember 2019 di BPU Kecamatan Muara Pahu
- Selama 1 hari masing masing disetiap 15 Kecamatan dengan peserta masingmasing 30 orang di tiap kecamatan. Dengan jumlah seluruh peserta 450 orang. Pelaksana Kegiatan Terlaksana dengan Baik.
23. Operasional Pendampingan Korban Tindak Kekerasan Terlaksananya Kegiatan Operasional Pendampingan Korban Tindak Kekerasan (no rekening kegiatan : 2.02.2.02.01.19.43) dengan kelompok sasaran kegiatan anak atau perempuan yang mengalami kekerasan atau masalah dalam keluarga termasuk melayani dan mendampingi anak berhadapan dengan hukum. Pada tahun 2019 terdapat 28 kasus yang terdiri dari 5 kasus dengan korban dewasa dan 23 kasus dengan korban atau pelaku anak.

Tabel 3.73
Realisasi Kinerja Sasaran 16 Dibandingkan Target Akhir RPJMD

| Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi Kinerja s/d Tahun 2019 | Target Akhir RPJMD | Persentase Capaian Kinerja (%) |
|--------------------------|---------------|---|---------------------------|---------------------------------------|
|--------------------------|---------------|---|---------------------------|---------------------------------------|



| | | | | |
|---------|---------|---------|------|----------|
| IPG/IDG | IPG/IDG | 83.84 % | 83 % | 101.01 % |
|---------|---------|---------|------|----------|

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

Realisasi kinerja Sasaran ke- 16 yang dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2016-2021 Pemuda Berprestasi yang telah terealisasi dalam capaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Adanya peningkatan dalam realisasi kinerja sasaran dari realisasi per tahun dan target akhir RPJMD sebesar 111% dari target yang telah ditentukan.

Analisa Program Dan Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Sasaran Meningkatnya Peran Pemuda Dalam Pembangunan

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengemban amanah sasaran meningkatnya Peran Pemuda Dalam Pembangunan telah melaksanakan 2 (Dua) program dan 23 kegiatan untuk menunjang pencapaian indikator kinerja IPG/IDG. Program tersebut dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.74

| No. | Program/Kegiatan |
|--|--|
| Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan | |
| 1 | Optimalisasi/Advokasi Pengarusutamaan Gender |
| 2 | Pendidikan/Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gende |
| 3 | Pembentukan Forum Komunikasi Kabupaten tentang PP dan PA |
| 4 | Peningkatan SDM Perempuan |
| 5 | Pendataan Pekerja Perempuan dan Organisasi Perempuan di kabupaten Kutai Barat |
| 6 | Sosialisasi Keterwakilan Perempuan Sebagai Pengambil Keputusan di Lembaga Pemerintah |
| 7 | Fasilitasi dan Sosialisasi Pembentukan Pengusaha Wanita di Kabupaten Kutai Bara |
| Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak | |



| | |
|----|---|
| 8 | Pengumpulan Data Terpilah Perempuan dan Anak Kutai Barat |
| 9 | Pelatihan Sistem Pencatatan dan pelaporan KDRT |
| 10 | Pelatihan Bagi Pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban KDRT |
| 11 | Rakor Daerah Pemberdayaan Perempuan Tingkat Kabupaten |
| 12 | Rakortek dan Rakernis Pemberdayaan Perempuan Tingkat Nasional dan Provinsi |
| 13 | Rapat Gelar Kasus Pendampingan Korban Tindak Kekerasan |
| 14 | RAKORNAS, RAKORTEK, RAKORDA dan RAKERNIS Perlindungan Perempuan |
| 15 | Sosialisasi UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) |
| 16 | Kampanye Anti Kekerasan Terhadap Anak |
| 17 | Pelatihan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) |
| 18 | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak |
| 19 | Pelatihan Fasilitator Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) |
| 20 | Pembentukan dan Rapat Koordinasi Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak |
| 21 | Fasilitasi Hari Kartini |
| 22 | Optimalisasi Pemberdayaan Perempuan dalam Peningkatan Ekonomi Produktif |
| 23 | Operasional Pendampingan Korban Tindak Kekerasan |

Sumber: DP2KBP3A

Secara umum seluruh program dan kegiatan yang selama tahun 2019 telah dapat dilaksanakan dengan baik. Realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program / kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Barat selama tahun 2019 sesuai dengan target.



D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pendapatan Daerah Tahun 2019 ditargetkan sebesar **Rp. 2.581.577.421.223,08** dan terealisasi sebesar **Rp. 2.546.928.990.007,00** atau **98,65% persen** dari target. Dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar **Rp. 133.162.244.525,04** terealisasi sebesar **Rp. 168.908.553.788,33** atau **126,84%**.
- b. Dana Perimbangan yang ditargetkan sebesar **Rp. 1.869.758.294.657,60** terealisasi sebesar **Rp. 1.833.112.625.065,00** atau **98,04 %**.
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah ditargetkan sebesar **Rp. 578.656.882.040,44** terealisasi sebesar **Rp. 544.907.811.153,67** atau **94,17%**

Rincian target dan realisasi pendapatan tahun 2018 sampai dengan bulan Desember dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 3.75
Target dan Realisasi Pendapatan
Tahun Anggaran 2019

| No. | Uraian | Target(Rp) | Realisasi(RP) | % | Bertambah (Berkurang) |
|------------|---|-----------------------------|-----------------------------|---------------|----------------------------|
| 1 | PENDAPATAN | 2.581.577.421.223,08 | 2.546.928.990.007,00 | 98,65 | (34.648.431.216,08) |
| 1.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 133.162.244.525,04 | 168.908.553.788,33 | 126,84 | 35.746.309.263,29 |
| 1.1.1 | Pendapatan Pajak Daerah | 34.940.000.000,00 | 43.144.177.445,27 | 123,48 | 8.204.177.445,27 |
| 1.1.2 | Hasil Retribusi Daerah | 5.000.000.000,00 | 6.042.190.810,07 | 120,84 | 1.042.190.810,07 |
| 1.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | 4.293.410.614,62 | 4.293.410.614,62 | 100 | 0,00 |
| 1.1.4 | Lain-lain PAD Yang Sah | 88.928.833.910,42 | 115.428.774.918,37 | 129,80 | 26.499.941.007,95 |
| 1.2 | DANA PERIMBANGAN | 1.869.758.294.657,60 | 1.833.112.625.065,00 | 98,04 | (36.645.669.592,60) |
| 1.2.1 | Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 1.092.514.911.657,60 | 1.074.459.081.974,00 | 98,35 | (18.055.829.683,60) |
| 1.2.2 | Dana Alokasi Umum | 618.522.771.000,00 | 618.522.771.000,00 | 100 | 0,00 |
| 1.2.3 | Dana Alokasi Khusus | 158.720.612.000,00 | 140.130.772.091,00 | 88,29 | (18.589.839.909,00) |
| 1.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 578.656.882.040,44 | 544.907.811.153,67 | 94,17 | (33.749.070.886,77) |
| 1.3.1 | Pendapatan Hibah | 31.505.427.329,08 | 12.767.913.765,67 | 40,53 | (18.737.513.563,41) |



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019

| | | | | | |
|-------|---|--------------------|--------------------|-------|---------------------|
| 1.3.3 | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | 232.273.276.311,36 | 217.261.718.988,00 | 93,54 | (15.011.557.323,36) |
| 1.3.4 | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 14.539.165.000,00 | 14.539.165.000,00 | 100 | 0,00 |
| 1.3.5 | Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | 127.241.179.400,00 | 127.241.179.400,00 | 100 | 0,00 |
| 1.3.6 | Alokasi Dana Desa | 173.097.834.000,00 | 173.097.834.000,00 | 100 | 0,00 |

Sumber data: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kutai Barat

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa, Pendapatan Tahun 2019 yakni sebesar **Rp. 2.581.577.421.223,08** dan terealisasi sebesar **Rp. 2.546.928.990.007,00** atau **2.170.306.017.457,48** terealisasi sebesar **Rp. 2.010.346.690.120,60** atau sebesar **92,63 persen**, sehingga mengalami Kenaikan sebesar **Rp. 411.271.403.765,60** atau **15,93 persen**.

Pada tahun 2019 Alokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2019 sebesar Rp. **133.162.244.525,04** dengan realisasi sebesar **Rp. 168.908.553.788,33** atau **126,84%**, yang terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah sebesar **Rp. 34.940.000.000,00** dengan realisasi **Rp. 43.144.177.445,27** atau **123,48%**, Hasil Retribusi Daerah sebesar **Rp. 5.000.000.000,00** dengan realisasi **Rp. 6.042.190.810,07** atau **120,84%**, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar **Rp. 4.293.410.614,62** dengan realisasi sebesar **Rp. 4.293.410.614,62** atau **100%** dan Lain-lain PAD Yang Sah sebesar **Rp. 88.928.833.910,42** dengan realisasi sebesar **Rp. 115.428.774.918,37** atau **129,80%**.

Dana Perimbangan ditargetkan sebesar **Rp. 1.869.758.294.657,60** terealisasi sebesar **Rp. 1.833.112.625.065,00** atau **98,04 %**. yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar **Rp. 1.092.514.911.657,60** dengan Realisasi sebesar **Rp. 1.074.459.081.974,00** atau **98,35%**, Dana Alokasi Umum sebesar **Rp. 618.522.771.000,00** dengan Realisasi sebesar **Rp. 618.522.771.000,00** atau **100%**, Dana Alokasi Khusus sebesar **Rp. 158.720.612.000,00** dengan Realisasi sebesar **Rp. 140.130.772.091,00** atau **88,29%**.

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dengan target **Rp. 578.656.882.040,44** dan Realisasinya sebesar **Rp. 544.907.811.153,67** dengan Capaian **94,17%** terdiri dari Pendapatan Hibah sebesar **Rp. 31.505.427.329,08**



dengan Realisasi sebesar **Rp. 12.767.913.765,67** atau **40,53%**, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya sebesar **Rp. 232.273.276.311,36** dengan Realisasi sebesar **Rp. 217.261.718.988,00** atau **93,54%**, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar **Rp. 14.539.165.000,00** dengan Realisasi sebesar **Rp. 14.539.165.000,00** atau **100%**, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya sebesar **Rp. 127.241.179.400,00** dengan Realisasi **Rp. 127.241.179.400,00** atau **100%** dan Alokasi Dana Desa Sebesar **Rp. 173.097.834.000,00** dengan Realisasi sebesar **Rp. 173.097.834.000,00** atau **100%**.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2019 yang dialokasikan untuk membiayai program / kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.76
Alokasi Realisasi Anggaran per Sasaran Pembangunan Tahun Anggaran 2019

| No | Sasaran Strategis | Anggaran | Realisasi | Persentase Realisasi |
|-----------|---|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| 1 | Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah | 508.043.113.207,61 | 441.794.291.245,34 | 86,96 |
| 2 | Meningkatnya Infrastruktur Dasar di Wilayah Kutai Barat | 29.836.161.587,39 | 28.087.762.518,37 | 94,14 |
| 3 | Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat | 204.684.021.153,08 | 115.441.787.930,34 | 56,4 |
| 4 | Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat | 123.552.590.988,00 | 104.191.899.980,18 | 84,33 |
| 5 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan | 39.837.101.000,00 | 36.980.780.858,30 | 92,83 |
| 6 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Daerah | 24.852.997.100,00 | 23.252.464.086,76 | 93,56 |
| 7 | Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan | 44.416.654.600,00 | 41.098.730.501,38 | 92,53 |
| 8 | Meningkatnya Nilai Investasi | 3.724.911.000,00 | 3.640.355.520,30 | 97,73 |



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019

| No | Sasaran Strategis | Anggaran | Realisasi | Persentase Realisasi |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 9 | Meningkatnya Pendapatan Perkapita | 783.000.000,00 | 736.803.000,00 | 94,1 |
| 10 | Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (Angka Pengangguran) | 1.150.000.000,00 | 1.096.295.000,00 | 95,33 |
| 11 | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup | 32.133.065.400,00 | 31.368.298.443,48 | 97,62 |
| 12 | Meningkatnya Prosentase Penduduk diatas garis kemiskinan | 5.411.514.000,00 | 5.213.993.739,00 | 96,35 |
| 13 | Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban bagi Masyarakat | 178.474.402.504,78 | 173.048.780.668,64 | 96,96 |
| 14 | Meningkatnya Kampung Maju | 26.197.777.625,33 | 25.663.342.961,77 | 97,96 |
| 15 | Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan | 7.287.204.000,00 | 6.970.210.626,00 | 95,65 |
| 16 | Meningkatnya Kesenjangan Gender | 9.874.209.818,00 | 8.625.112.276,02 | 87,35 |
| JUMLAH BELANJA LANGSUNG YANG Mendukung Sasaran | | 1.240.258.723.984,19 | 1.047.210.919.355,88 | 91,23 |



TABEL 3.77
ELIMINASI PROGRAM

| No. | Perangkat Daerah | Nama Program | Nilai Efisiensi |
|-----|--|---|---------------------|
| 1 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya | Rp 38.346.000,00 |
| | | Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan | Rp 3.400.000.000,00 |
| | | Program Pengembangan Data dan Informasi | Rp 550.000.000,00 |
| | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Rp 30.132.000,00 |
| 2 | RSUD HIS | Program Pengadaan, Peningkatan sarana dan Prasarana Rumah Sakit | Rp 2.436.798.589,00 |
| | | Program Pemeliharaan sarana dan Prasarana Rumah sakit | Rp 9.665.399,00 |
| | | Program Pelayanan BLUD RSUD HIS | Rp 3.602.050.352,99 |
| | | Program Pengembangan dan penerapan Teknologi Ramah Lingkungan | Rp 526.127.000,00 |
| | | Program Pengendalian Pencemaran LH dan Pengujian Kualitas Lingkungan | Rp 140.000.000,00 |
| | | Program Penataan Kelembagaan dan Penegakan Hukum Pengelolaan SDA dan Pelestarian Lingkungan Hidup | Rp 110.000.000,00 |
| 3 | Dinas Lingkungan Hidup | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Teknologi dan SDM | Rp 95.000.000,00 |
| | | Program Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan | Rp 145.000.000,00 |
| | | Program Peningkatan Efektifitas Pengelolaan, Konservasi dan Rehabilitasi SDA | Rp 140.000.000,00 |
| | | Program Peningkatan Pengendalian Polusi | Rp 133.000.000,00 |
| | | Program Peningkatan Penanganan Daerah Rawan Pangan | Rp 95.000.000,00 |
| 4 | Dinas Ketahanan Pangan | Program Peningkatan Ketersediaan dan Cadangan Pangan | Rp 265.000.000,00 |
| | | Program Peningkatan Distribusi dan Akses Pangan | Rp 75.000.000,00 |
| | | Program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan | Rp 35.000.000,00 |



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019

| | | | | |
|------------------------|--|---|-----------|--------------------------|
| 5 | Dinas Pertanian | PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN / PERKEBUNAN | Rp | 18.605.000.000,00 |
| | | PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN /PERTANIAN | Rp | 7.215.000.000,00 |
| | | PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN | Rp | 4.025.000.000,00 |
| | | PROGRAM PENANGANAN PASCA PANEN DAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN / PERKEBUNAN | Rp | 6.797.000.000,00 |
| | | PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN | Rp | 25.977.400.000,00 |
| | | PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK | Rp | 790.000.000,00 |
| 6 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN | Rp | 930.000.000,00 |
| | | Program Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Obyek Pemajuan Kebudayaan | Rp | 4.999.900.000,00 |
| | | | | |
| | | Program Upaya Kesehatan Masyarakat | Rp | 96.955.000,00 |
| 7 | Dinas Kesehatan | Program Perbaikan Gizi Masyarakat | Rp | 83.000.000,00 |
| | | Program Promosi, Kesehatan Institusi & Peran Serta Masyarakat | Rp | 50.000.000,00 |
| | | Program Peningkatan keselamatan Ibu Melahirkan & Anak | Rp | 106.109.300,00 |
| | | Program pencegahan & Penanggulangan Penyakit Menular | Rp | 392.400.000,00 |
| | | Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif | Rp | 70.000.000,00 |
| 8 | Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi | Program Penataan Struktur Industri | Rp | 725.000.000,00 |
| | | Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keuangan Kompetitif Usaha Mikro Kecil Menengah | Rp | 185.000.000,00 |
| | | | | |
| Total Efisiensi | | | Rp | 82.873.883.640,99 |



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019

$$\text{PERSENTASE EFISIENSI ANGGARAN} = \frac{\text{TOTAL EFISIENSI HASIL ELIMINASI PROGRAM}}{\text{TOTAL ANGGARAN BELANJA NON PEGAWAI}} \times 100\%$$

ISILAH KOLOM DI BAWAH INI:

| | | |
|--|---|-------------------------|
| 1. TOTAL EFISIENSI HASIL ELIMINASI PROGRAM | = | Rp 82.873.883.640,99 |
| 2. TOTAL ANGGARAN BELANJA NON PEGAWAI | = | Rp 1.389.036.562.130,68 |
| 3. PERSENTASE EFISIENSI ANGGARAN | = | 6% |



BAB IV

PENUTUP

Penyusunan LKjIP Kabupaten Kutai Barat tahun 2019 ini merupakan bentuk perekaman kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dengan membandingkan antara rencana dan realisasi serta melakukan penajaman sasaran strategis lewat indikator-indikator sasaran yang ditetapkan. Sudah menjadi konsekuensi bagi daerah hasil pemekaran yang terbentuk tahun 1999 ini memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar pelayanan terhadap masyarakat sebagai agenda pembangunan selain usaha pengentasan kemiskinan sebagai prioritas. Hal ini dimaklumi mengingat luasnya wilayah Kabupaten Kutai Barat dengan kampung-kampung yang terpencar dan sulitnya mengakses daerah-daerah tertentu. Meski secara umum pengukuran kinerja program dan kegiatan yang dijalankan masing-masing Perangkat Daerah dianggap berhasil, namun pembangunan dirasakan masih menyisakan kekurangan dan kelemahan terutama pada sisi perencanaan dan usaha pencapaian dari target yang dikehendaki.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jawaban visi, misi dan tujuan strategis instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan – kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kutai Barat telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang memuaskan atas sasaran – sasaran strategis yang telah ditetapkan. Hasil yang diperoleh ini tentu tidak terlepas dari dukungan seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kutai Barat yang telah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Namun dibalik keberhasilan yang dicapai Pemerintah Kutai Barat, masih dijumpai berbagai hambatan baik bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala/hambatan yang dijumpai, sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja. Menyadari hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat telah mempersiapkan strategi-strategi yang diupayakan untuk pemecahannya, sehingga tahun-tahun mendatang hambatan-hambatan tersebut dapat diminimalisir. Selain itu, indikator-indikator sasaran belum sepenuhnya dapat dilaksanakan pada tahun Kedua RPJMD 2016 – 2021, hal ini disebabkan karena keterbatasan dana,



kompetensi SDM dan waktu pelaksanaan, sehingga diharapkan pencapaian indikator sasaran yang belum terpenuhi dapat dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya.

Adapun program dan kegiatan yang dijalankan selama tahun 2019, senantiasa memperhatikan urusan yang menjadi prioritas baik karena tuntutan peraturan perundangan maupun karena kebutuhan sejatinya masyarakat seperti urusan pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, pekerjaan umum (nfrastuktur) dan lain sebagainya yang berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan itu, upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik terus dibenahi dan ditingkatkan. Dan upaya ini dinilai berhasil oleh pemerintah, sehingga Pemerintah Kabupaten Kutai Barat pada tahun 2018 berhasil meraih penghargaan antara lain :

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian Oleh BPK Provinsi Kaltim Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018;
2. Penghargaan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019 dengan Predikat B (Baik) Oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi untuk Bidang Akuntabilitas Kinerja, Bagian Organisasi Sekretariat Kabupaten Kutai Barat;
3. Piagam Penghargaan dari OMBUDSMAN Republik Indonesia dengan Predikat Kepatuhan Tinggi Tahun 2019 Terhadap Standar Pelayanan Publik Sesuai Undang – Undang no. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Kutai Barat mendapat Nilai 85,47 dan masuk Kategori Kepatuhan Tinggi dalam Zona Hijau (80,51 – 100,00) untuk Bidang Pelayanan Publik Bagian Organisasi Sekretariat Kabupaten Kutai Barat;
4. Penghargaan Bidang Kebudayaan dari KEMENDIKBUD RI Kategori Penenun Selendang Badong Usia Anak dan Remaja (Gita);
5. Peringkat III Kategori Kampung adat Terpopuler (Kampung Mancong) Anugerah Pesona Anugerah Indonesia Tahun 2019, untuk Bidang Kebudayaan Nasional, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Barat;
6. Panji Keberhasilan (Terbaik I) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Bidang Dekranasda;
7. Terbaik I Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Biniung Lestari, Kampung Juaq Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat Tingkat Kalimantan Timur Tahun 2019;
8. Terbaik II Bidang Penanggulangan Bencana Daerah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
9. Terbaik III Bidang Pengelolaan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan



Timur;

10. Terbaik III Bidang Perdagangan Kategori Kabupaten dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

11. Terbaik III Bidang Kwartir Cabang Tergiat dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

Penghargaan tersebut membuktikan bahwa dalam kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Barat, Bapak FX. Yapan,SH dan H. Edyanto Arkan,SE telah berhasil melakukan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang merupakan salah satu cita-cita otonomi daerah.

Terlepas dari keberhasilan tersebut diatas, tidak sedikit pula program dan kegiatan yang ditetapkan seringkali tidak mencapai target karena banyaknya kendala atau permasalahan yang dihadapi. Hal inilah yang kemudian memberi ruang yang seluas-luasnya kepada pemerintah untuk melakukan evaluasi dan pembinaan dan pengawasan dalam perbaikan penyelenggaraan otonomi daerah dimasa yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019 ini disusun, dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Sendawar, 23 Maret 2020

BUPATI KUTAI BARAT

FX. YAPAN, SH